

**INVOLUSI GERAKAN AGRARIA  
DAN NASIB PETANI**  
**Studi Tentang Dinamika Gerakan Petani di  
Provinsi Lampung**

Oleh:  
**HARTOYO**



**SEKOLAH PASCASARJANA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
2010**

## **Pernyataan Mengenai Disertasi dan Sumber Informasi**

Dengan ini saya menyatakan disertasi **Involusi Gerakan Agraria dan Nasib Petani: Studi Tentang Dinamika Gerakan Petani di Provinsi Lampung** adalah merupakan karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun ke perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor, Mei 2010

Hartoyo  
NRP: A162050051

## ABSTRAK

HARTOYO. Involusi Gerakan Agraria dan Nasib Petani: Studi Tentang Dinamika Gerakan Petani di Provinsi Lampung. Dibimbing oleh ENDRIATMO SOETARTO (Ketua), ARYA HADI DHARMAWAN dan ROBERT M.Z. LAWANG (Anggota).

Salah satu elemen masyarakat Lampung yang mengalami ketidakadilan baik dalam dimensi politik, ekonomi maupun kultural adalah petani. Pada era orde baru, petani tidak bisa memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya atas sumberdaya agraria (tanah) yang setara dan adil karena mendapat tekanan kuat dari negara. Pada era demokratisasi struktur peluang politik sudah terbuka dan petani berpeluang untuk meneruskan perjuangannya. Pada awal reformasi terjadi aksi-aksi kolektif petani terorganisir hingga pada level provinsi. Tetapi hingga saat ini kondisinya kembali melemah. Masalahnya adalah: *“Bagaimana gerakan petani yang muncul dan berkembang di dalam struktur politik yang sudah terbuka di era demokratisasi saat ini tidak mampu memperkuat dirinya dan dalam melakukan perubahan substantif nasib petani ?”*

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: (1) kondisi-kondisi hubungan agraria yang menjadi pemicu utama terjadinya gerakan petani; (2) menjelaskan saling keterkaitan di antara unsur-unsur yang mendukung dilancarkannya aksi-aksi kolektif dalam gerakan petani; dan (3) menjelaskan arah perkembangan gerakan petani (yang direpresentasikan oleh organisasi gerakan petani) dalam melakukan perubahan struktural agraria di era demokratisasi saat ini.

Penelitian ini sengaja dilakukan di provinsi Lampung berdasarkan kriteria tertentu, menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan desain studi kasus terhadap organisasi gerakan petani level provinsi (DTL, IPL, SPL, dan Mirak Nadai). Sebagai konsekuensinya adalah digunakan metodologi kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, dokumentasi, observasi dan data sekunder. Sumber data diperoleh dari NGO, aktivis gerakan petani, perusahaan, instansi pemerintah, universitas, dan petani basis. Proses dan analisis data mengikuti tahapan reduksi data dan klasifikasi berdasarkan kategori yang dibangun oleh konsep, dan kemudian dibuat hubungan antar konsep.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, ketegangan struktural agraria menjadi prakondisi utama munculnya gerakan petani. Kondisi ini dipicu oleh kebijakan pembangunan yang tidak responsif terhadap kepentingan petani. *Kedua*, betapapun tertutupnya peluang politik masih ada celah-celah keterbukaan untuk petani melakukan perjuangan. *Ketiga*, struktur sumberdaya integratif petani dan non petani menjadi ciri utama gerakan petani skala provinsi. *Keempat*, cepatnya penguatan struktur mobilisasi sumberdaya gerakan petani dan respon positif petani terhadap peluang politik (dekonstruksi struktur politik negara sebagai momentum) karena telah tersedia sumberdaya mobilisasi potensial yang berkembang dalam sub kultur oposisi petani. *Kelima*, stagnasi gerakan petani terjadi karena dalam proses penguatan struktur mobilisasi sumberdaya diwarnai disorientasi perilaku para elit aktor yang konsekuensinya tidak dapat diprediksi dan dikontrol. *Keenam*, involusi gerakan agraria terjadi ketika struktur sumberdaya mobilisasi melemah (mengalami deformasi, decoupling dan stagnasi) dan sifat struktural organisasi gerakan semakin melekat pada sistem agraria yang mapan, sedangkan program perjuangan belum terlembagakan.

Kata kunci: Gerakan, agraria, petani, stagnasi, involusi.

## ABSTRACT

HARTOYO. Involution of Agrarian Movement and The Fate of Peasants: A Study of Peasant Movement Dynamics in Lampung Province. Under direction of ENDRIATMO SOETARTO, ARYA HADI DHARMAWAN, and ROBERT M.Z. LAWANG.

One of the elements of Lampung community which suffer political, economic and cultural injustice is peasant. In the New Order era, peasant were not able to fight for a fair and equal right and need of agrarian (land) resource due to state oppression. At the era of democratization, the structure of political opportunity is widely opened and peasants have their chance to continue their assertion. In the early reformation era, collective actions have been organized up to provincial level. Up to this moment their condition tend to weaken. The research question was: "*How peasant movement which occur and grow during the already opened democratic era cannot strengthen itself and make substantial change for peasants' life ?*"

The purpose of this research was: (1) to clarify the conditions of agrarian relations which become the main trigger of peasant movement; (2) to explain interrelationship between the elements that support the collective actions of peasant movement; (3) and to explain the course of the peasant movement development (which is represented by peasant movement organizations) in making structural agrarian changes in democratic era.

This research was intentionally conducted in Lampung Province due to some criteria, made use of constructivism paradigm, with a case study design on the provincial level peasant movement organization (Dewan Tani Lampung, Ikatan Petani Lampung, Serikat Petani Lampung and Mirak Nadai). As the consequence, used qualitative method. Data was obtained through in-depth interviews, documentations, observations and secondary data. The data source was NGO, peasant movement activists, enterprises, government agencies, research agencies, and peasants. Data were processed and analyzed using qualitative method.

The results of this research indicate, *first*, strained agrarian structural situation was the main precondition of the emergence of peasant movement. This condition was triggered by development policy that was not responsive to peasant interests. *Second*, no matter how exclusive the political opportunity was, there were always spaces for peasants to struggle. *Third*, integrative resource structure of peasants and non-peasants was the main characteristic of provincial scale peasant movement. *Fourth*, the strengthening speed of resource mobilization structure of the peasant movement and positive response of peasants to political opportunity (national political structure deconstruction as a momentum) were due to potential availability of resource mobilization which grown within sub-cultural peasant opposition. *Fifth*, the stagnation of peasant movement occurred because the strengthening process of resource mobilization structure was deprived by behavioural disorientation of elite actors which cause unpredictable and uncontrollable consequences. *Sixth*, the agrarian movement involution took place when resource mobilization structure weaken (deformed, decoupled, and stagnant) and structural properties of movement organization adhered to proper agrarian system, while the movement program has not been institutionalized by it self.

Key words : Movement, agrarian, peasant, stagnation, involution.

## RINGKASAN

HARTOYO. Involusi Gerakan Agraria dan Nasib Petani: Studi Tentang Dinamika Gerakan Petani di Provinsi Lampung. Dibimbing oleh ENDRIATMO SOETARTO, ARYA HADI DHARMAWAN, dan ROBERT M.Z. LAWANG.

Sebagai suatu gerakan sosial maka munculnya gerakan petani tidak terlepas dari kondisi-kondisi yang mendasarinya, berlangsung dengan segenap faktor pengaruh dan berkembang secara dinamis. Pada era orde baru gerakan petani sulit berkembang karena tidak diberi ruang dan ditekan kuat oleh negara. Pada era reformasi dan demokratisasi peluang politik terbuka lebar. Pada awalnya marak terjadi aksi-aksi kolektif petani dan berkembang organisasi gerakan petani skala provinsi. Tetapi dalam perjalanannya kemudian gerakan petani semakin menurun dan mengendur sehingga secara substantif tetap tidak mampu melakukan perubahan agraria yang dapat mengentaskan nasib petani. Masalahnya adalah *“Bagaimana gerakan petani yang muncul dan berkembang di dalam struktur politik yang sudah terbuka di era demokratisasi saat ini juga tidak mampu memperkuat dirinya dan dalam melakukan perubahan substantif terhadap nasib petani ?”* Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi-kondisi hubungan agraria yang menjadi pemicu utama terjadinya gerakan petani; menjelaskan saling keterkaitan di antara kondisi-kondisi yang mendukung dilancarkannya aksi-aksi kolektif dalam gerakan petani; dan menjelaskan arah perkembangan gerakan petani dalam melakukan perubahan sistem agraria di era demokratisasi.

Penelitian kualitatif ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan desain studi kasus. Provinsi Lampung dipilih sebagai wilayah penelitian karena selain banyak sengketa dan konflik pertanahan struktural juga muncul dan berkembang gerakan petani skala provinsi. Data dikumpulkan dengan teknik triangulasi melalui wawancara mendalam, dokumentasi, observasi dan data sekunder. Sumber data diperoleh dari LSM, aktivis gerakan petani, perusahaan, instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan para petani basis. Unit analisis kasus adalah organisasi gerakan petani skala provinsi, yakni DTL, IPL, SPL, dan Mirak Nadai. Pengolahan dan analisis data mengikuti tahapan reduksi data dan klasifikasi berdasarkan kategori yang dibangun oleh konsep, dan kemudian dibuat hubungan antar konsep.

Hasil penelitian membuktikan bahwa ketegangan struktural agraria dipicu oleh kebijakan pembangunan yang tidak responsif terhadap kepentingan petani. Dalam praktik pembangunan di pedesaan banyak komunitas petani yang sangat terganggu kelangsungan hidupnya karena tanah yang mereka kuasai diambil-alih atau dibebaskan dengan cara tidak fair. Realitas ini mengakibatkan meningkatnya jumlah petani yang mengalami deprivasi (absolut dan relatif) dan merasa diperlakukan tidak adil. Kondisi ini ditambah dengan berkembangnya ideologi egalitarian yang dapat menjadi arah perjuangan petani. Semua secara bersama-sama menjadi prakondisi utama yang mendorong munculnya gerakan petani.

Betapapun tertutupnya struktur peluang politik orde baru di dalamnya tetap masih terdapat celah–celah keterbukaan. Negara menutup rapat perjuangan petani baik melalui jalur institusional maupun non institusional, tetapi mereka

tetap berjuang mereproduksi strategi aksi kolektif (protes, gerakan konsensus dan gerakan lokal-tradisional). Aksi-aksi kolektif mengalami stagnasi karena biaya yang mesti ditanggung jauh dari sebanding dengan keberhasilan yang dicapai. Kegagalan perjuangan petani berjalan seiring dengan meningkatnya persoalan pertanahan yang berkembang secara akumulatif dan menyebar. Realitas ini mendorong berkembangnya sub kultur oposisi petani, yang di dalamnya terdapat akumulasi sumberdaya mobilisasi potensial petani. Sub kultur oposisi petani selalu diaktifkan dan selalu berada pada kondisi siap diaktualisasikan dalam aksi-aksi kolektif selanjutnya.

Struktur sumberdaya integratif petani dan non petani menjadi ciri utama gerakan petani skala provinsi. Kemunculan secara dramatis aksi-aksi kolektif petani di Lampung pada awal reformasi dalam memanfaatkan momentum peluang politik tidak dapat dipisahkan dari peran sinergis di antara kedua elemen sumberdaya tersebut. Oleh karena itu gerakan petani muncul dalam dualitas orientasi, yakni *material* (tujuan petani basis) dan *postmaterial* (tujuan non petani). Sebagai gerakan moderen berbasis pada kesadaran bersama untuk melakukan aksi-aksi kolektif, didesain dengan struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas, dan memiliki daya tekan kuat dan posisi tawar seimbang. Perlunya penyadaran dan pengorganisasi petani basis didasarkan pada fakta bahwa selain petani masih belum memiliki kesadaran politik (masih berada pada kesadaran konfliktual), terbukanya peluang politik pada tataran praksis ternyata tetap tidak bebas dari tekanan-tekanan. Realitas ini juga berpengaruh terhadap keragaman sikap partisipatif petani terkait dengan respon mereka terhadap peluang politik.

Cepatnya penguatan struktur mobilisasi sumberdaya gerakan petani dan respon positif petani terhadap peluang politik (dekonstruksi struktur politik negara sebagai momentum) karena telah tersedia sumberdaya mobilisasi potensial (sub kultur oposisi petani). Berkembangnya sub kultur oposisi petani menunjukkan bahwa persoalan pertanahan di lingkungan komunitas petani terus-menerus diaktifkan. Terbukanya peluang politik mendorong kesadaran konfliktual petani secara cepat dapat dirubah ke dalam kesadaran politik. Disini proses pemingkanaan kolektif menjadi penting dalam menjembatani keterkaitan antara sub kultur oposisi petani, respon terhadap peluang politik dan kekuatan sumberdaya mobilisasi untuk sampai pada aksi-aksi kolektif dalam gerakan sosio-politik petani.

Dalam dinamika gerakan petani terjadi stagnasi, karena dalam proses penguatan organisasi gerakan diwarnai dengan disorientasi perilaku para elit aktor yang akibat negatifnya tidak dapat dikontrol. Pasca reklamings terjadi perubahan drastis motivasi partisipasi di antara kelompok aktor gerakan dari keinginan untuk membela kepentingan substantif petani berubah menjadi keinginan untuk memenuhi kepentingan kelompoknya masing-masing. Disini terjadi perebutan kuasa atas organisasi gerakan petani dan sumberdaya mobilisasi petani basis yang mengarah pada konflik dan fragmentasi. Terjadi deformasi antar kelompok aktor gerakan, terjadi *decoupling* antara persoalan substantif petani dan kepentingan para elit aktor, dan akhirnya gerakan agraria mengalami stagnasi.

Stagnasi gerakan petani mengarah pada kesimpulan telah terjadi "invulsi gerakan agraria". Ini terjadi ketika struktur sumberdaya mobilisasi semakin melemah, sifat-sifat strukturalnya semakin tunduk pada sistem agraria dominan, sedangkan program-programnya belum terlembagakan. Dilihat secara umum dari sisi perkembangan struktur sumberdaya gerakan petani, disimpulkan bahwa berkembangnya perjuangan petani dari protes sampai pada gerakan sosio-politik menunjukkan peningkatan kualitas struktur sumberdaya mobilisasi. Tetapi pada

akhirnya, *pertama*, struktur gerakan berada pada titik kulminasi, mengalami krisis legitimasi dan kredibilitas, diskontinuitas, destrukturisasi dan deinstitutionalisasi. *Kedua*, dilihat secara historis hubungan integratif antara elemen petani dan non petani terjadi dalam tiga tahap, yakni dari yang belum terintegrasi (*unintegrated*), menjadi struktur mobilisasi sumberdaya yang kuat (*integrated*) dan kemudian (hingga saat ini) antar elemen struktur gerakan terbelah dan belum dapat disatukan (*disintegrated*). *Ketiga*, perkembangan struktur gerakan tidak menghasilkan perubahan substantif bagi pengentasan nasib petani sesuai dengan tujuan perjuangan semula. Sedangkan dilihat dari perkembangan organisasionalnya disimpulkan bahwa perkembangan organisasi gerakan petani mengarah pada bentuk gerakan konsensus. Organisasi gerakan seperti ini tidak dapat dipakai sebagai instrumen transformasi agraria. Karakternya yang semula cenderung berada pada posisi *countercultural* telah bergeser cenderung berada pada posisi akomodasionis (*subcultural*).

**Kata kunci:** Gerakan, agraria, petani, stagnasi, involusi.

© Hak Cipta milik IPB, Tahun 2010  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. *Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya:*
  - a. *Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan lain suatu masalah.*
  - b. *Pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.*
2. *Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.*



# **INVOLUSI GERAKAN AGRARIA DAN NASIB PETANI**

**Studi Tentang Dinamika Gerakan Petani di Provinsi Lampung**

Oleh:

**HARTOYO**



**Disertasi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor  
Pada Program Studi Sosiologi Pedesaan**

**SEKOLAH PASCASARJANA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
2010**

**Penguji Luar Komisi :**

Ujian Tertutup : Dr. Lala M. Kolopaking, MS.  
(Dept. Komunitasi dan Pengembangan Masyarakat  
FEMA IPB)  
Dr. Satyawan Sanito.  
(Dept. Komunitasi dan Pengembangan Masyarakat  
FEMA IPB)

Ujian Terbuka : Prof. Dr. San Afri Awang, M.A.  
(Departemen Kehutanan Universitas Gadjah Mada,  
Yogyakarta)  
Dr. Yuswanda  
(Deputi Penatagunaan Tanah, Badan Pertanahan  
Nasional Pusat, Jakarta).

Judul Disertasi : **INVOLUSI GERAKAN AGRARIA DAN NASIB  
PETANI (Studi Tentang Dinamika Gerakan Petani di  
Provinsi Lampung)**

Nama : Hartoyo

NRP : A162050051

Program Studi : Sosiologi Pedesaan

Disetujui

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A.  
Ketua

Dr. Ir. Arya H. Dharmawan, M.Sc.Agr.  
Anggota

Prof. Dr. Robert M.Z. Lawang, M.A.  
Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi  
Sosiologi Pedesaan (SPD)

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Arya H. Dharmawan, M.Sc.Agr Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, M.S.

Tanggal Ujian: .....

Tanggal Lulus:.....

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. Yuhan Yang Maha Esa karena berkat rachmad dan karunia-Nya, disertasi ini dapat diselesaikan. Penelitian ini dilaksanakan sejak akhir tahun 2007 hingga akhir tahun 2009. Proses penelitian ini relatif berlangsung lama dan merupakan penelitian kasus gerakan petani skala provinsi yang menggunakan pendekatan konstruktivis. Oleh karena itu untuk mendapatkan data yang komprehensif dari perspektif emik diperlukan waktu relatif lama.

Pada kesempatan ini ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi penulis sampaikan pertama-tama kepada komisi pembimbing Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A, sebagai ketua dan masing-masing kepada Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, M.Sc. Agr dan Prof. Dr. Robert M.Z. Lawang, MA sebagai anggota atas bimbingannya sejak menyusun proposal hingga selesainya penyusunan disertasi ini. Bahkan lebih dari itu, beliau semua bukan sekedar sebagai pembimbing tetapi juga sangat peduli pada persoalan pribadi mahasiswa dan terbuka untuk berdiskusi, sehingga memberikan semangat dan kenyamanan suasana akademis bagi penulis. Semoga amal kebaikan beliau semua diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan imbalan setimpal.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu dan Bapak dosen di Program Studi Sosiologi Pedesaan IPB, Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS., Dr. Ir. Titik Sumarti, MS, Dr. Nurmala K. Panjaitan, MS. DEA., Dr. Ir. Ekawati Sri Wahyuni, MS., Dr. Ir. Felix Sitorus, MS., Dr. Juara P. Lubis, MS., dan Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS. Penghargaan penulis sampaikan kepada beliau semua atas tambahan bekal ilmu dan pengembangan tradisi berfikir kritis yang diberikan, sehingga penulis menjadi tertantang dan tetap bersemangat dalam menyelesaikan studi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kawan-kawan aktivis gerakan petani dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Kantor Bantuan Hukum (KBH) Lampung, Dewan Rakyat Lampung (DRL) dan Universitas Lampung (Unila); kawan-kawan aktivis dari Organisasi Gerakan petani, yaitu dari Dewan Tani Lampung (DTK), Ikatan Petani Lampung (IPL), Serikat Petani Lampung (SPL), Mirak Nadai, Pramukti dan Aliansi Petani Indonesia, Petani Mandiri, dan Serikat Petani Indonesia (SPI); dari instansi pemerintah seperti BPN Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung,

dan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung; kawan-kawan LSM lainnya di Lampung dan di luar Lampung seperti Raca Institute dan ICRAF; dan kawan-kawan lain yang tidak mungkin disebut semuanya disini, termasuk kawan-kawan tani di beberapa wilayah komunitas basis. Mereka semua memberi dukungan sangat besar, sangat terbuka dan bersahabat, memberikan data dan informasi yang tak ternilai harganya demi lancarnya penelitian ini. Mereka juga tidak merasa keberatan untuk terus-menerus menambah informasi meskipun tidak langsung (melalui telepon dan handphon, dan E-mail). Penulis memberikan penghargaan yang tinggi kepada semuanya dan semoga amal baiknya mendapatkan imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Selama pendidikan di SPD-IPB penulis berkesempatan berinteraksi dengan kawan-kawan yang kritis konstruktif dan bersemangat. Kepada semua teman angkatan 2005, angkatan di atasnya dan di bawahnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan diskusi-diskusinya kritisnya.

Semangat untuk segera menyelesaikan disertasi ini juga tidak terlepas dari dukungan teman-teman di almamater FISIP Unila. Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Jurusan Sosiologi FISIP Unila dan segenap kawan dosen. Lebih khusus kepada kawan-kawan yang membantu pengumpulan data lapangan yang dikoordinir oleh Drs. Ibrahim Besar, M.Si dan Drs. Reza Alatif, penulis memberikan penghargaan yang tinggi dan ucapkan terima kasih tak terhingga atas segala daya dan upayanya untuk membantu kelancaran penelitian ini dengan sepenuh hati.

Terakhir, rasa syukur, terima kasih, penghargaan dan kebanggaan penulis sampaikan kepada istri tercinta Dra. Eti Susilowati dan ketiga anak kami atas semua do'a, dukungan, keikhlasan, dan pengorbanannya. Tanpa dukungan mereka rasanya disertasi ini tidak akan pernah terwujud.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam disertasi ini, karena keterbatasan penulis. Oleh karenanya, segala saran, kritik dan masukan sangat penulis harapkan demi kesempurnaan disertasi ini. Atas segala doa, dukungan dan perhatian semua pihak, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih dan menghaturkan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan Bapak, Ibu dan Saudara semuanya.

Bogor, Mei 2010

Hartoyo

## RIWAYAT HIDUP

Penulis, Hartoyo dilahirkan di Blora Jawa Tengah tanggal 8 Desember 1960 dari orang tua Ibu Soetarmi (alm) dan Bapak Noer Hadi (alm). Sekolah Dasar (SD) di SD Muhammadiyah Blora, Madrasah Tsanawiyah Kudus dan Aliyah Walisongo Kudus. Pendidikan Sarjana di tempuh di Jurusan Sosiologi Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, tamat tahun 1988 dan di Jurusan Bimbingan dan Konseling Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta, tamat tahun 1988. Pada tahun 1993-1995 menempuh program Master pada Jurusan Sosiologi Universitas Indonesia (UI). Kemudian sejak tahun 2005 melanjutkan pendidikan program doktor di Program Studi Sosiologi Pedesaan (SPD) Institut Pertanian Bogor (IPB).

Sejak 1989 hingga sekarang penulis bekerja sebagai dosen di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Mata kuliah yang pernah diampu adalah Pengantar Sosiologi, Teori Sosiologi Klasik, Teori Sosiologi Moderen, dan Psikologi Sosial. Menjadi Ketua Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung pada tahun 1996-2004.

Selama mengikuti program doktor beberapa tulisan pernah dihasilkan, antara lain Gejolak Agraria di Pedesaan: Kasus Implementasi Kebijakan Agraria di kabupaten Lampung Timur, dalam buku Menggugat Kebijakan Agraria (Pustaka Wirausaha Muda, Bogor 2006); Ketegangan Struktural dan Perjuangan Petani Terhadap Kuasa Atas Tanah di Pedesaan Lampung (Jurnal Komunitas Volume 11, Nomor 2, Juni 2008); dan Dekonstruksi Struktur Politik Pusat dan Penguatan Sumberdaya Mobilisasi di Wilayah Pinggiran Sebagai basis Munculnya Gerakan Petani di Lampung (Jurnal Agresif Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Maret 2010).

Pada tahun 1990 penulis menikah dengan Dra. Eti Susilowati dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Muhammad Hasan Imaduddin, Baharuddin Ludfi Syuhada dan Humaira Nisaul Jannah.

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
<b>I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Nasib Petani Dalam Lilitan Persoalan Agraria.....	1
1.1.2. Petani Menggugat.....	3
1.1.3. Gerakan Petani Mengalami Titik Kulminasi Menuju Peluruhan dan Stagnasi .....	5
1.1.4. Kasus di Provinsi Lampung .....	6
1.2. Permasalahan Penelitian.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
1.5. Kebaruan (Novelty).....	13
<b>II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1. Dimensi Agraria, Gerakan Petani dan Gerakan Agraria.....	15
2.1.1. Konsepsi dan Dimensi Agraria di Indonesia Masa Orde Baru.....	15
2.1.2. Konsepsi Petani Dalam Analisis Gerakan Sosial.....	18
2.1.3. Gerakan Agraria dan Gerakan Petani.....	20
2.2. Ketegangan Struktural Sebagai Prakondisi Utama Munculnya Gerakan Petani .....	22
2.3. Gerakan Petani Sebagai Gerakan Sosial Normal, Rasional dan Terorganisir.....	27
2.3.1. Struktur Mobilisasi Sumberdaya.....	34
2.3.2. Struktur Peluang Politik.....	34
2.3.3. Framing (Pembingkaihan ) Kolektif.....	37
2.4. Dinamika Gerakan Petani.....	40
2.4.1. Organisasi Gerakan Petani.....	40
2.4.2. Perkembangan Organisasional Gerakan Petani.....	44
2.5. Kerangka Pemikiran.....	47
<b>III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
3.1. Paradigma Metodologi.....	50
3.2. Pokok Penelitian, Konsep dan Metode Penelitian.....	52
3.3. Desain Penelitian Studi Kasus .....	55
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.5. Validitas Internal.....	59
3.6. Analisa Data.....	60
<b>IV DINAMIKA KEPENDUDUKAN DAN PERSOALAN AGRARIA DI PEDESAAN LAMPUNG.....</b>	<b>62</b>
4.1. Pluraritas Dalam Masyarakat Lampung .....	62
4.2. Masyarakat Adat Lampung dan Tanah Marga.....	62
4.2.1. Struktur Geneologis dan Wilayah Teritorial.....	62
4.2.2. Prinsip Nilai dan Struktur Masyarakat Adat.....	63
4.2.3. Pergeseran Wilayah Teritorial Adat .....	64

4.3.	Struktur Penguasaan Agraria dan Kondisi Petani Pada Masa Pra Kemerdekaan .....	65
4.3.1.	Akibat Kebijakan Agraria Kolonial.....	65
4.3.2.	Program Kolonisasi.....	66
4.4.	Struktur Penguasaan Agraria dan Kondisi Petani Pada Masa Kemerdekaan .....	67
4.4.1.	Migrasi Penduduk dan Persoalan Pertanahan Masa Orde Lama.....	68
4.4.2.	Migrasi Penduduk dan Persoalan Pertanahan Masa Orde Baru.....	68
4.4.2.1.	Pertumbuhan Penduduk dan Kebutuhan Lahan.....	68
4.4.2.2.	Berebut Tanah.....	70
4.4.2.3.	Kemiskinan Penduduk Sebagai Persoalan Mendasar.....	70
4.5.	Sejarah Ringkas Gerakan Agraria di Lampung.....	71
4.6.	Ikhtisar.....	76
V	<b>KETEGANGAN STRUKTURAL AGRARIA SEBAGAI PRAKONDISI UTAMA MUNCULNYA GERAKAN PETANI DI LAMPUNG.....</b>	<b>78</b>
5.1.	Sumber Utama Ketegangan Struktural.....	78
5.1.1.	Pola Penguasaan Tanah dan Konflik Pertanahan.....	78
5.1.2.	Kebijakan Pembangunan Mengabaikan Kepentingan Petani.....	82
5.1.3.	Praktik Penguasaan Tanah Komunitas Setempat Dengan Cara Tidak Fair.....	86
5.2.	Menurunnya Kondisi Kehidupan Petani .....	91
5.3.	Sulitnya Perjuangan Petani Dalam Struktur Politik Orde Baru..	93
5.3.1.	Aksi Protes.....	94
5.3.2.	Gerakan Konsensus.....	95
5.3.3.	Gerakan Lokal-Tradisional.....	98
5.4.	Berkembangnya Sub Kultur Oposisi Petani.....	100
5.5.	Ikhtisar.....	102
VI	<b>DEKONSTRUKSI STRUKTUR POLITIK, MOBILISASI SUMBERDAYA, PEREBUTAN KUASA DAN STAGNASI GERAKAN PETANI.....</b>	<b>105</b>
6.1.	Struktur Sumberdaya Mobilisasi dan Anatomi Gerakan Petani.....	105
6.1.1.	Konstruksi Gerakan Dari Atas: Kasus Serikat Petani Lampung (SPL).....	105
6.1.2.	Konstruksi Gerakan Dari Bawah: Kasus Dewan Tani Lampung (DTL).....	108
6.1.3.	Anatomi Gerakan Petani.....	111
6.2.	Dekonstruksi Struktur Politik dan Respon Terhadap Peluang Gerakan.....	113
6.2.1.	Terbukanya Peluang Politik.....	113
6.2.2.	Respon Terhadap Peluang Politik .....	114
6.3.	Mobilisasi Sumberdaya Dalam Gerakan Petani.....	117
6.3.1.	Saling Keterkaitan Antar Unsur-Unsur Keberhasilan Aksi-aksi Kolektif Dalam Gerakan Petani.....	118
6.3.2.	Rekrutmen dan Pengorganisasian Petani Basis.....	120



6.3.3.	Penguatan Mobilisasi Sumberdaya Pendukung.....	122
6.3.4.	Aksi Kolektif Petani dan Efeknya.....	124
6.4.	Deformasi Struktur Gerakan Petani.....	128
6.4.1.	Konflik dan Perpecahan: Kasus Konstruksi Gerakan Dari Bawah.....	128
6.4.2.	Berebut Sumberdaya Mobilisasi.....	132
6.4.3.	Pertarungan Garis Perjuangan Kelompok Pendukung....	136
6.5.	<i>Decoupling</i> Antara Persoalan Substantif Petani Dengan Kepentingan Para Elit Aktor Gerakan.....	139
6.6.	Stagnasi Gerakan Petani.....	142
6.6.1.	Pengeroposan dari Dalam.....	143
6.6.2.	Pengeroposan dari Luar.....	146
6.6.3.	Stagnasi Gerakan Petani.....	148
6.7.	Ikhtisar.....	152
VII	INVOLUSI GERAKAN AGRARIA.....	155
7.1.	Kearah Teori Involusi Gerakan Agraria.....	155
7.2.	Strukturasi Internal.....	158
7.3.	Pola Hubungan Kekuasaan Dalam Gerakan Agraria.....	164
7.4.	Kuatnya Sistem Agraria Dominan.....	165
7.5.	Deinstitusionalisasi Program Gerakan.....	168
7.6.	Arah Perkembangan Gerakan Agraria.....	170
VIII	NASIB PETANI DAN PENGUATAN STRUKTUR SUMBERDA- YA GERAKAN AGRARIA.....	174
8.1.	Nasib Petani Dalam Sistem Agraria Antagonis.....	174
8.2.	Kegagalan Peran Gerakan Agraria Dalam Mengentaskan Nasib Petani.....	176
8.3.	Penguatan Struktur Gerakan Agraria Dengan Meningkatkan Derajat Mediasi.....	178
IX	SIMPULAN.....	184
	DAFTAR PUSTAKA.....	187

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1 Perspektif Teori Dalam Studi Gerakan Petani.....	14
2 Dimensi Konseptual Petani Dalam Analisis Gerakan Sosial.....	19
3 Pokok Penelitian, Unsur Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	54
4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Tahun.....	68
5 Jenis Kawasan dan Tingkat Kerusakan Hutan di Provinsi Lampung Tahun 2002.....	69
6 Tanah Dikuasai Negara Berujung Konflik Dengan Masyarakat Setempat.....	80
7 Tanah Dikuasai Perusahaan Berujung Konflik Dengan Masyarakat Setempat.....	81
8 Unsur Gerakan Konsensus.....	96
9 Sumber Utama Ketegangan Struktural Agraria dan Perjuangan Petani.....	104
10 Anatomi Organisasi Gerakan Petani Konstruksi dari Bawah dan Atas.....	112
11 Anatomi Gerakan Petani di Lampung Sebagai Gerakan Sosial.....	113
12 Ciri-Ciri Perkembangan Organisasi Gerakan Petani (DTL, IPL, SPL/SPI-L dan MN) di Lampung.....	151
13 Tipe Aktor dan Orientasinya.....	154
14 Arah Perkembangan Organisasi Gerakan Petani (DTL, IPL, SPL/SPI-L, dan MN) di Lampung.....	173
15 Strategi Gerakan Agraria Mendatang.....	183

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1 Alur Pikir Studi.....	49
2 Proses Analisis Data Prakondisi Gerakan Petani dan Konstruksi Sosial atas Realitas Gerakan dan Dinamika Organisasi Gerakan Petani.....	61
3 Dinamika Organisasi Gerakan SPL .....	107
4 Struktur Sumberdaya Mobilisasi DTL.....	108
5 Dinamika Organisasi Gerakan DTL.....	110
6 Determinan Aksi Kolektif Dalam Gerakan Petani .....	119
7 Strukturasi Internal Gerakan Petani.....	162

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

#### 1.1.1. Nasib Petani Dalam Lilitan Persoalan Agraria

Sesuai dengan amanah konstitusi bahwa sumberdaya agraria (tanah) yang dikuasai negara agar dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanah tersebut oleh rezim Orde Baru diterjemahkan dalam konteks persoalan ekonomi, politik, dan kultural yang dapat diatasi melalui pembangunanisme (*developmentalism*)<sup>1</sup> atau modernisasi pembangunan.<sup>2</sup> Sebagai landasan utama penguasaan tanah tersebut dibangun struktur kebijakan agraria yang berorientasi mekanis dan ekonomis sesuai dengan kepentingan pasar yang lebih luas. Sentralisasi politik dibuktikan bahwa selama empat Pelita (1969/1970-1984/1985) Pembangunan Nasional dirancang dari pusat.

Dalam kurun waktu 20 tahun (1967-1987) terbukti bahwa secara agregat terjadi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan jumlah penduduk miskin menurun.<sup>3</sup> Produksi pertanian (dan kehutanan) mampu menjadi andalan utama peningkatan devisa di sektor non migas. Bahkan ketika boom minyak menurun justru sektor ini menjadi andalan substitusi ekspor. Hingga awal

---

<sup>1</sup> Konsepsi "*developmentalism*" berakar pada suatu filsafat yang terkandung dalam teori kemajuan linier, perkembangan evolusioner, teori modernisasi dan pemikiran pembangunan (Joke Schrijvers. 2000. *Kekerasan "Pembangunan": Pilihan untuk Kaum Intelektual*. Jakarta: Kalyanamitra., hal. 25).

<sup>2</sup> Nicolas Abercrombie, Stephan Hill and Bryan S. Turner. 1988. *Dictionary of Sociology*. Australia: The Penguin Group., hal. 158. Dalam *Encyclopedia of the Sosial Sciences* (1968) istilah "*modernisasi*" mencakup "... sekularisasi; komersialisasi; industrialisasi; peningkatan standar hidup materi; penyebaran melek huruf; pendidikan media massa, persatuan nasional, dan perluasan keterlibatan rakyat dalam partisipasi (Mansour Fakih. 2004. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., hal. 72).

<sup>3</sup> Dalam kurun waktu 10 tahun (1967-1976) penduduk miskin menurun dari sembilan perseluluh (1967) menjadi tiga persepuluh (1976). Hasil tersebut dilaporkan dalam Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 1977, meskipun perubahan perbaikan yang spektakuler tersebut kemudian menjadi bahan perdebatan karena mengandung banyak tanda tanya terutama terkait dengan standar pengukuran dan kenyataan di aras mikro. Kemudian menurut laporan Bank Dunia, selama periode 1976-1987 juga terjadi penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pemerataan pendapatan. *Pertama*, dari 40% seluruh penduduk dan 54 juta orang (1976) menjadi 29% dan 42 juta orang (1980), kemudian 22% dan 35 juta orang (1984) dan 17% dan 30 juta orang (1987). Data ini menunjukkan tingkat kemiskinan turun baik secara relatif maupun secara absolut. *Kedua*, tingkat kepincangan distribusi penghasilan (*income inequality*) telah menurun terus, yang berarti keadaan 1987 adalah lebih merata dibandingkan dengan keadaan 1976 (Benjamin White. *Optimisme Makro, Pesimisme Mikro ? Penaksiran Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia, 1967-1987*. Tulisan dimuat satu bab dalam buku Prof Sajogyo 70 Tahun. 1996. *Memahami dan menanggulangi Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo).

dasawarsa 1990-an tanah yang dikuasai negara tetap berada pada koridor sebagai komoditas strategis bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional.<sup>4</sup>

Struktur kebijakan agraria yang pro ekonomi pasar tersebut, pada sisi lain, menyebabkan ketimpangan penguasaan lahan, terjadi penetrasi modal kuat ke pedesaan, pemiskinan kaum tani, dan konflik pertanahan yang cenderung tidak menurun. Semua mengancam kelangsungan hidup petani karena orientasinya jelas mengabaikan upaya untuk menciptakan sistem agraria yang egaliter.<sup>5</sup> Oleh karena itu, proses dan hasilnya menjadi kontraproduktif dan bertentangan dengan hakekat pembangunan itu sendiri. Persoalan agraria menjadi semakin menyentuh wilayah otonomi kultural dan prinsip keadilan bagi petani. Kondisi ini berakibat semakin banyak petani yang mengalami penderitaan struktural,<sup>6</sup> karena secara ekonomi terus termarginalkan, secara politik tidak memiliki keterwakilan suara di parlemen, dan secara kultural sebagai elemen masyarakat yang terancam.<sup>7</sup>

Akumulasi persoalan agraria di pedesaan tersebut menjadi indikasi bahwa telah terjadi proses kemampatan pembangunan. Komunikasi dialogis antar elemen struktural tersumbat rapat berjalan seiring dengan semakin terkikisnya tatanan tradisional akibat modernisasi. Sistem sosio-kultural pedesaan kemudian masuk ke dalam setting kapitalisme yang tidak responsif terhadap kepentingan petani.<sup>8</sup> Kondisi seperti ini meminjam istilah Sajogyo telah terjadi "modernisasi tanpa pembangunan".<sup>9</sup> Selama 37 tahun (1970-2007) petani di pedesaan terus terjerat persoalan kemiskinan dan konflik pertanahan yang tidak pernah diselesaikan secara mendasar.<sup>10</sup>

---

<sup>4</sup> Indikasinya adalah dikeluarkan Paket Oktober (Pakto) 23 tahun 1993 untuk menarik investor asing yang membutuhkan tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang tata cara penetapan ganti rugi terkait dengan pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

<sup>5</sup> Meskipun UUPA/1960 oleh Mendagri (1978) dinyatakan tetap berlaku, tetapi dalam prakteknya "dikooptasi", tidak diindahkan dan dilanggar tanpa adanya sangsi (Soerjo Adiwibowo, Melanie A. Sanito dan Lala M. Kolopaking. 2008. *Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan. SMP Tjondronegoro*. Bogor: DKPM-IPB., hal. 100).

<sup>6</sup> Petani tunakisma meningkat tajam; banyak penduduk pedesaan yang tidak mendapatkan pekerjaan; petani kaya lebih mampu memperbaiki nasibnya berdasarkan aset tanah dan modal yang dimilikinya dibandingkan petani kecil; tekanan demografis dan fragmentasi tanah menguat; dan terjadi polarisasi penguasaan tanah yang menumpuk pada petani kaya dalam arti yang lebih ekonomis (PAU-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.1989. *Temu Ilmiah: Perubahan Sosial dan Demokrasi di Pedesaan*, 11-13 Desember 1989. Yogyakarta: PAU-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada).

<sup>7</sup> Posisi petani dalam sistem agraria tersebut menurut Stephan (1992) termasuk di dalam konsepsi "popular" (John Brohman, 1996. *Popular Development: Rethinking the Theory and Practice of Development*. Blackwell Publishers Ltd, hal. 258).

<sup>8</sup> Dalam asumsi teori formal dinyatakan bahwa penetrasi kapitalisme akan mengikis ciri tradisional masyarakat pedesaan (petani) dan akan semakin berkembang ciri-cirinya ke arah sistem kapitalistik (Wan Hashim. 1984. *Petani Dan Persoalan Agraria*. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti SDN. BHD, hal. 21).

<sup>9</sup> Sajogyo. 1973. *Modernization Without Development*. Dalam Anonymous, 2003.

<sup>10</sup> Dalam Data Base KPA per 31 Desember 2001 tercatat sebanyak 1.753 kasus konflik pertanahan dan sebanyak 344 kasus (19,62%) di antaranya adalah konflik yang terjadi di areal perkebunan besar yang luasnya mencapai 1.311.971 hektar dengan jumlah korban sebanyak 257.686 jiwa (Anu Leonela dan R. Yando Zakaria (Editor). 2002. *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*. Yogyakarta: Insist dan Karsa., hal. 25).

### 1.1.2. Petani Menggugat

Suatu hal yang wajar ketika petani terancam kelangsungan hidupnya dan diperlakukan tidak adil kemudian mereka berjuang menuntut haknya. Akan tetapi kekuatan perjuangan petani melalui wadah organisasi tani pada masa Orde Baru dikontrol ketat oleh negara. Kebijakan politik yang mengarah pada sentralisasi birokrasi terus dilakukan memperkuat 'deideologisasi' dan 'depolitisasi' dan 'floating mass' yang dapat menekan berkembangnya kekuatan gerak perjuangan petani.<sup>11</sup> Negara Orde Baru mengarahkan petani berorganisasi melalui disain korporatisme, yakni hanya mengalirkan aspirasi ke dalam kanal-kanal lembaga bentukan pemerintah.<sup>12</sup> Akibatnya, partisipasi politik petani menjadi semu karena kepentingannya diarahkan dan disalurkan lewat organisasi tani yang dibentuk dan dikontrol ketat oleh negara. Petani ditempatkan pada posisi tersbordinasi, tidak berdaya dan terkerangkeng oleh otoritarianisme negara. Ini berarti bahwa sistem politik yang dibangun cenderung sebagai alat dominasi dan berfungsi sebagai penyumbat kebebasan bersuara dan gerak perjuangan petani.<sup>13</sup>

Tak heran jika sistem politik Orde Baru menjadi ajang mobilisasi massa, menjadi tempat berkembangnya kesadaran palsu, sebagai ajang represi, praktik kooptasi dan manipulasi. Stigma politik sering diarahkan kepada mereka yang dianggap membangkang dan cara ini dianggap lebih efektif dalam membungkam suara-suara kritis dan dalam menekan upaya perjuangan petani. Menjinakkan kesadaran petani menjadi orientasi nafsu kekuasaan. Pendekatan keamanan dan pencitraan sistemik yang dibangun semakin mengaburkan persoalan

---

Statistik pertanian tahun 2003 memperlihatkan peningkatan jumlah rumah tangga petani dari 20,8 juta pada tahun 1993 menjadi 25,6 juta pada tahun 2003. Peningkatan yang sama juga terjadi pada populasi petani gurem (pemilik lahan kurang dari setengah hektar), yakni sejumlah 10,8 juta (1993) menjadi sejumlah 13,7 juta (2003). Angka 13,7 juta itu tersebar 74,9% di Jawa dan 25,1% di Luar Jawa. Setahun berikutnya, 2004, angka kemiskinan juga mengalami penurunan menjadi 16,6%. Namun di balik penurunan itu, di bulan September 2006, BPS mengumumkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia telah meningkat dari 16,0 persen pada Februari 2005 menjadi 17,75 persen pada Maret 2006 (Policy Paper RUU Desa, Juli 2007. *Masukan untuk perumusan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa*. Jakarta: Kerjasama antara Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan Democratic Reform Support Program (DRSP-USAID). Download dari Policy\_Paper\_RUU\_Desa, pdf.-adobe reader., hal. 52-54).

Menurut catatan BPN RI bahwa masyarakat pedesaan masih dihadapkan pada persoalan tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, konsentrasi aset agraria pada sebagian kecil masyarakat, rentannya ketahanan pangan, semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup, dan lemahnya akses sebagian besar masyarakat terhadap hak-hak dasarnya termasuk sumber-sumber ekonomi keluarga. Terdapat 2.810 kasus konflik pertanahan dan tanah-tanah yang menjadi obyek konflik banyak yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini merupakan *opportunitiy loss* dan menutup akses bagi petani penggarap (BPN RI. 2007. *Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan "Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat"*. Jakarta: BPN RI., hal. iii-iv, 2).

<sup>11</sup> Jajat Burhanuddin dan Arief Subhan (Editor), 1999, *Sistem Siaga Dini Untuk Kerusuhan Sosial*, Jakarta: Balitbang Agama Depag RI dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta., hal. 21.

<sup>12</sup> Korporatisme negara dalam konteks pembingkaiian kepentingan kaum tani disini menunjuk pada organisasi tani seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang menjadi derivasi institusi negara di tingkat informal, yakni sebagai agen kepentingan negara (Lihat Nasikun. 1997. *Domestikasi Peran Cendekiawan dan Perkembangan Sosiologi di Indonesia*. Jurnal *Unisia*, No.32/XVII/April 1997., hal. 58-67).

<sup>13</sup> Arie Sujito. 2007. *Organisasi Rakyat dan Gerakan Sosial*. [http://groups.yahoo.com/group/suarakorban\\_bencana/message/1801](http://groups.yahoo.com/group/suarakorban_bencana/message/1801) (Download tanggal 31 Agustus 2007).

substantif petani. Sangat wajar jika petani terus berjuang menuntut hak-haknya atas tanah pertanian meskipun tetap muncul tetapi menemui banyak hambatan.<sup>14</sup> Dengan mengandalkan bantuan jejaring pada lokus nasional saja tidak cukup, mereka harus memanfaatkan isu-isu global dan berjejaring dengan lembaga-lembaga transnasional.<sup>15</sup>

Seiring tumbanganya Orde Baru maka lembaga-lembaga kenegaraan juga sedang mengalami krisis legitimasi, kehilangan orientasi dan daya adaptasinya sehingga tidak mampu merespon dengan cepat gejolak petani karena masih menanggung beban moral yang begitu berat akibat peran mereka sebelumnya.<sup>16</sup> Ini juga berarti bahwa struktur peluang politik telah dibuka paksa untuk cepat tanggap terhadap tuntutan-tuntutan perubahan oleh kalangan masyarakat sipil. Gerakan petani kemudian terjadi di mana-mana menuntut keadilan dan demokrasi agraria. Ke atas mereka gencar mendesak tuntutan-tuntutannya dan ke bawah melakukan aksi-aksi reklamasi. Sebagian besar analisis menilai bahwa maraknya gerakan petani pada awal-awal reformasi sebagai kelanjutan atau efek dari gerakan pro-demokrasi yang dimainkan oleh segenap elemen masyarakat sipil dalam menumbangkan otoritarianisme negara Orde Baru.

Dalam perkembangan kemudian berdiri berbagai organisasi gerakan petani skala provinsi dan berjejaring dengan organisasi gerakan agraria skala nasional. Bahkan dalam spektrum yang lebih luas berjejaring dengan organisasi gerakan agraria transnasional.<sup>17</sup> Gelombang timbal balik antara gerakan lokal dan global tersebut, kemudian di dalam wacana gerakan masyarakat sipil berkembang dua konsep, yakni: "*think globally act locally*" atau "*think locally act globally*".<sup>18</sup> Pada setting gerakan skala meso (provinsi) kehadirannya mampu mempertemukan antara orientasi *material* dan *postmaterial*. Oleh karena itu, ketika gerakan petani di daerah mampu berjejaring kuat secara nasional merupakan indikasi bahwa telah terjadi arus balik pengaruh gerakan petani lokal ke spektrum nasional. Para aktor strategis gerakan mampu mengartikulasikan persoalan agraria nasional ke tingkat lokal, dan sebaliknya dari tingkat lokal ke nasional.

---

<sup>14</sup> Petani banyak mengalami tekanan seperti intimidasi, teror, pembabatan atau pembakaran tanaman, pembakaran atau perusakan rumah, penangkapan, penculikan, penembakan, pembunuhan, penganiayaan, dan tekanan lainnya (Endriatmo Soetarto, 2005. *Reforma Agraria Di Indonesia: Agenda Kebangsaan Yang Harus Dituntaskan*, Bogor: Pustaka Wirausaha Muda., hal. 17-18).

<sup>15</sup> Meuthia Ganie Rochman. 2002. *An Uphill Struggle: Advocacy NGO's under Soeharto's New Order*, Jakarta: LabSosio, FISIP-Universitas Indonesia.

<sup>16</sup> Boedhi Wijardjo dan Herlambang Perdana. 2001. *Reklamasi dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: YLBHI dan Raca., hal. 3-4.

<sup>17</sup> Aksi-aksi kolektif yang dilakukan oleh Serikat Petani Lampung (SPL) berhubungan timbal balik dengan organisasi gerakan tingkat nasional, seperti "Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)" dan berjejaring dengan organisasi gerakan transnasional "La Via Campesina".

<sup>18</sup> Andi Widjajanto, dkk. 2007. *Transnasionalisasi Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara.

### 1.1.3. Gerakan Petani Mengalami Peluruhan dan Stagnasi

Berangkat dari kegagalan pembangunan Orde Baru yang merugikan komunitas petani tradisional, maka tidak heran jika gerakan petani di awal-awal reformasi sangat kuat diarahkan berhadapan dengan negara (dan perusahaan). Kelemahannya ketika kekuatan negara sudah dapat dilemahkan, telah merespon sebagian kepentingan petani melalui kebijakan agraria yang dikeluarkan, dan tanah-tanah berhasil direklaming, berarti sudah tidak ada lagi musuh bersama (*common enemy*). Gerakan petani tidak dapat dikatakan berhasil jika dalam implementasinya belum mampu menyelesaikan persoalan substantif petani dan distribusi lahan hasil reklaming tidak sampai kepada yang berhak menerima (petani penggarap). Apalagi jika dalam perjalanannya masing-masing kelompok penggerak gerakan petani berjalan sendiri-sendiri dan tidak memiliki *common platform*. Dimaksud dengan *common platform* disini adalah sebuah konsensus bersama untuk mengawal proses pencapaian tujuan transformasi agraria dalam jangka pendek dan jangka panjang, yang diwujudkan dalam berbagai inovasi strategi kerja dan agenda kerja yang telah disepakati bersama.<sup>19</sup> Oleh karena itu, gerakan petani di era demokratisasi saat ini justru dikhawatirkan semakin rentan terhadap beberapa persoalan yang berpotensi lepas dari kerangka gerakan akar rumput, mengalami peluruhan dan stagnan.

Proses peluruhan dan stagnasi antara lain disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, proses pengorganisasian komunitas petani basis sejak awal dilakukan lebih bersifat sporadis. Kerja-kerja pengorganisasian menguat ketika ada kasus-kasus yang menantang heroisme dan kemudian melemah ketika kasus-kasus tersebut selesai atau tidak kunjung dapat diselesaikan. Pengorganisasian petani basis belum dapat diarahkan secara sistematis untuk membangun tatanan kehidupan baru pada komunitas-komunitas petani sebagai alternatif dari tatanan yang ada.<sup>20</sup> *Kedua*, penguatan kembali struktur politik negara berjalan seiring dengan semakin sempitnya ruang-ruang bagi berkembangnya gerakan petani.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Kompas. 2004. *Lembaga Swadaya Masyarakat: Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal. 10-11.

<sup>20</sup> Dedeh Nurhayati. 2007. *Pengembangan Sistem Pendidikan Kader pada Organisasi Rakyat untuk Memperkuat Kerja Pengorganisasian dan Pemberdayaan Kelompok Rakyat Marjinal*. Diakses tanggal 31 Agustus 2007.

<sup>21</sup> Gerakan petani mendapatkan keuntungan di awal-awal jatuhnya rezim Orde Baru. Setelah lima tahun reformasi peluang politik tersebut mulai tertutup kembali. Oleh karena itu, jika gerakan petani muncul kembali pada periode sekarang ini tidak serta merta dipengaruhi oleh terbukanya peluang politik di Indonesia (Lihat Abdul Wahib Situmorang. 2007. *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., hal. 6.).



Semua unsur tersebut memperkuat dugaan meskipun perjuangan petani sudah sampai pada gerakan sosio-politik, kondisi petani tetap berada pada atau tidak beranjak dari pusaran arus kepentingan integratif negara dan pasar yang lebih luas (tersubordinasi). Gerakan petani hanya bergerak ditempat, tidak kemana-mana, tidak maju ke suatu titik yang menjanjikan peningkatan kesejahteraan petani. Bahkan diduga gerakan petani berpeluang menjadi diffuse, yakni menyebar ke berbagai penjuru, sehingga tidak fokus pada persoalan agraria lagi. Organisasi gerakan petani telah berkembang berjejaring tingkat nasional, tetapi konflik pertanahan masih banyak dan tanah negara yang terlantar masih luas tidak dapat diakses oleh petani penggarap. Realitas tersebut sebagai petanda bahwa urgensi peran gerakan petani dalam memperjuangkan nasib petani masih patut dipertanyakan.

#### **1.1.4. Kasus di Provinsi Lampung**

Wilayah Provinsi Lampung merupakan salah satu representasi realitas persoalan agraria dan gerak perjuangan petani di Indonesia. Di provinsi Lampung banyak terjadi konflik-konflik pertanahan yang berlangsung secara akumulatif dan menyebar di wilayah kabupaten/kota. Pada awal reformasi banyak terjadi aksi-aksi kolektif petani, muncul dan berkembang beberapa organisasi gerakan petani skala provinsi berjejaring tingkat nasional.

Pada tahun 1995 tanah yang menjadi obyek konflik dengan komunitas petani seluas 110.737, 50 hektar,<sup>22</sup> dan pada tahun 2002 meningkat drastis menjadi 398.425 hektar (259,8%). Status tanah yang paling banyak berkonflik adalah lahan usaha agro industri, yakni seluas 159.640 Hektar (40,07%), berada di bawah penguasaan dan pengelolaan perusahaan swasta dan BUMN atau BUMS. Kemudian lahan yang berstatus sebagai kawasan hutan lindung seluas 121.250 Hektar (30,43%), dan lahan usaha tambak moderen seluas 78.650 Hektar (19,74%).<sup>23</sup> Petani terus terjebak di dalam ruang-ruang konflikual berebut kuasa atas tanah.

Kemudian pada awal reformasi dalam kurun waktu lima tahun (1998-2002) tercatat dari 360 kasus konflik pertanahan<sup>24</sup> yang tersebar di seluruh wilayah

---

<sup>22</sup> Endang Suhendar dan Yohana Budi Winarni. 1998. *Petani dan Konflik Agraria*. Bandung: Yayasan Akatiga.

<sup>23</sup> Sunarto D.M. 2007. *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung., hal. 183.

<sup>24</sup> Surat Kabar Mingguan "Koridor", Edisi 178/Th. IV. Tanggal 13 Oktober 2002, hal. 4. Tetapi menurut catatan BPN Provinsi Lampung pada tahun 2002 terdapat sebanyak 445 kasus konflik pertanahan dan hingga tahun 2008 meningkat menjadi sebanyak 578 kasus.

kabupaten dan kota,<sup>25</sup> dan sebagian besar (327 kasus/90,8%) diikuti dengan aksi-aksi reklamining.<sup>26</sup> Aksi-aksi unjuk rasa dan reklamining sebagian dilakukan secara terorganisir dalam skala provinsi. Diperkirakan selama lima tahun (1998-2002) terdapat puluhan ribu hektar lahan yang berhasil diduduki oleh petani secara sistematis.<sup>27</sup> Pasca reklamining para petani bersama dengan segenap elemen pendukungnya berusaha memperkuat organisasi gerakan petani. Beberapa organisasi gerakan petani yang berkembang di Lampung adalah seperti Dewan Tani Lampung (DTL), Ikatan Petani Lampung (IPL), Serikat Petani Lampung (SPL), dan Mirak Nadai.

Dalam perkembangannya, aktivitas gerakan petani semakin menurun dan diduga juga mengalami peluruhan dan stagnasi. *Pertama*, eksistensinya semakin kurang mendapat dukungan petani basis, yang berarti semakin tercerabut dari akarnya. *Kedua*, komitmen, spirit dan daya juang para aktor strategisnya mengalami pasang surut dan cenderung semakin mengendur, yang berarti kondisi batang tubuhnya semakin melemah. *Ketiga*, jaringan pendukung semakin berkurang dan melemah yang berarti kekuatan eksternal gerakan petani semakin menurun. *Keempat*, isu-isu kritisnya masih berkuat pada persoalan material (penguasaan tanah), tidak beranjak dari persoalan klasik, dan tidak nampak terjadi perkembangan. Ini berarti bahwa gerakannya masih berkuat pada gerakan sosio-politik daripada gerakan sosio-kultural. *Kelima*, orientasi praktis gerakan semakin berjarak dengan orientasi strategisnya karena antar elemen aktor saling berebut kepentingan dan mengabaikan unsur bermediasi, sehingga keberadaan petani berpotensi menjadi korban mobilisasi. Peluang komodifikasi terhadap komunitas petani basis menjadi terbuka ketika bersinggungan dengan kepentingan praktis (ekonomi dan politik) para aktor strategisnya.

## 1.2. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan paparan di atas, maka yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: *"Bagaimana gerakan petani yang muncul dan berkembang di dalam struktur politik yang sudah terbuka di era demokratisasi*

---

<sup>25</sup> Dari 327 kasus reklamining tersebut sebanyak 80 kasus terjadi Kabupaten Tulang Bawang, 50 kasus di Kabupaten Lampung Selatan, 46 kasus di Kota Bandar Lampung, 33 kasus di Kabupaten Lampung Tengah, 32 kasus di Kabupaten Way Kanan, 24 kasus di Kabupaten Lampung Timur, 23 kasus di Kabupaten Lampung Utara, 19 kasus di Kabupaten Tanggamus, 18 kasus di Kabupaten Lampung Barat, dan 2 kasus di Kota Metro (Surat Kabar Mingguan "Koridor", 2002. Ibid.).

<sup>26</sup> Biro Tata Pemerintahan Provinsi Lampung, Bandar Lampung, 2001. Menurut harian Radar Lampung hingga tahun 2000 tercatat sebanyak 385 kasus konflik pertanahan di Lampung (Harian Radar Lampung, edisi Kamis, 17 September 2000).

<sup>27</sup> Perkiraan luas lahan yang berhasil direklamining tersebut menurut catatan Dewan Rakyat Lampung (DRL) dan Serikat Petani Lampung (SPL), sekitar 47.000 hektar baik yang berhasil maupun yang gagal.

saat ini tidak mampu memperkuat dirinya dan dalam melakukan perubahan substantif nasib petani ?”

Dilihat dari kacamata sosiologis tidak dapat diabaikan pentingnya mencari penjelasan tentang dinamika gerakan petani di era demokratisasi saat ini sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dan urgensinya dalam proses transformasi agraria untuk memperjuangkan (mengubah) nasib petani. Gerakan petani merupakan gerakan sosial yang secara khusus muncul dan berkembang berakar pada konflik-konflik agraria (pertanahan). Karakteristiknya juga berbeda dibandingkan dengan gerakan petani yang terjadi pada masa lalu, baik dilihat dari bentuk mobilisasi, organisasi dan kepemimpinan, isu-isu yang disuarakan, hingga pada bentuk aksi yang dilancarkan.<sup>28</sup> Misalnya, para pemimpin gerakan petani pada masa pra kemerdekaan berasal dari golongan elit desa (pemuka agama, kaum ningrat atau orang-orang dari golongan terhormat),<sup>29</sup> tetapi sekarang diisi oleh para kaum intelektual kota yang aktif dalam berbagai organisasi non pemerintah. Para elit desa tetap berperan penting tetapi kurang berposisi sebagai aktor utama yang memberi preferensi nilai dan visi perjuangan.

Dinamika gerakan petani di era demokratisasi saat ini merupakan produk dari kesadaran baru bagian dari gerakan masyarakat sipil. Persoalannya, meski gerakan petani di Indonesia secara historis bukan sesuatu hal yang baru sama sekali, dan telah banyak dikaji, tetapi perhatian berbagai kalangan terhadap masalah tersebut secara akademis belum mendapat tempat memadai dalam studi-studi sosiologi, khususnya dalam mengembangkan teori gerakan sosial. Kurangnya perhatian terhadap gerakan petani (terutama yang direpresentasikan oleh peran organisasi gerakan petani skala provinsi), didasarkan pada beberapa hasil penelitian sebelumnya tentang gerakan masyarakat sipil, atau yang secara khusus berkaitan dengan komunitas lokal di pedesaan atau berkaitan dengan komunitas petani sebagai basis konstituen.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Neil Webster. 2004. *Understanding the Evolving Diversity and Originalities in Rural Social Movements in the Age of Globalization: Civil Society and Social Movements*. Paper No. 7, United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD); J. Petras. 1998. *The Political and Sosial Basis of Regional Variation an Land Occupation in Brazil*. Journal of Oeasant Studies.

<sup>29</sup> Sartono Kartodirdjo. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, jalanperistiwa, dan kelanjutannya (Sebuah studi kasus mengenai gerakan sosial di Indonesia)*. Terjemahan Hasan Basri. Cetakan pertama. Jakarta: Pustaka Jaya., hal. 16.

<sup>30</sup> Meuthia Ganie Rochman. 2002. Op.cit.; Adi Suryadi Culla. 2006. *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi LSM di Indonesia*, Jakarta: LP3ES; Mansour Fakh. 2004. Op.Cit; Wahyudi. 2005. *Formasi dan Struktur Gerakan petani: Studi Kasus Reklaiming/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan*. Malang: UMM Press; Victor Silaen. 2006. *Perlawanan Komunitas Lokal pada Kasus Indorayon di Toba Samosir: Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: IRE Press; Oetami Dewi. 2006. *Resistensi Petani Terhadap Perkebunan Kelapa Sawit: Studi kasus perlawanan petani terhadap perkebunan kelapa sawit PTPN XIII (Persero) PIR V Ngabang, di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat*. Jakarta: FISIP Departemen

Organisasi gerakan petani menjadi elemen penting (yang menjadi obyek representasi) dalam gerakan petani. Wadah aspirasi dan partisipasi petani ini dilihat dari ciri utamanya memiliki orientasi penguatan dan pemberdayaan petani. Klaim ini secara substansial berkaitan erat dengan gagasan dan praksis gerakan petani itu sendiri. Disebut “organisasi gerakan petani” karena memiliki struktur, visi, misi dan program gerakan yang jelas dan mengidentifikasi tujuan-tujuannya dengan pilihan terhadap suatu gerakan sosial serta berusaha melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa entitas organisasi gerakan petani bukan sebagai suatu realitas sosio-politik yang baru di Indonesia. Kehadirannya dapat ditelusuri sejak masa kolonial dengan merujuk pada organisasi gerakan berbasis pada ideologi tertentu dan berusaha melakukan perubahan sistem agraria yang kurang responsif terhadap kepentingan petani. Organisasi-organisasi gerakan petani secara nyata muncul pada masa orde lama seperti BTI, RTI, SAKTI, PETANI dan STII yang semuanya dibidani oleh partai politik. Pada masa Orde Baru mereka ditekan dan dijinakkan melalui strategi korporatisasi. Kemudian aspirasi dan partisipasi petani disalurkan melalui wadah HKTII yang dibidani dan dikontrol ketat oleh negara.

Setelah kekuasaan rezim Orde Baru runtuh berbagai organisasi gerakan petani tumbuh dan berkembang bagaikan jamur di musim penghujan. Mereka mengusung isu keadilan dan demokrasi agraria untuk mencapai kesejahteraan petani. Melalui momentum reformasi, ruang publik terbuka (era demokratisasi), maka kehadiran organisasi gerakan petani menjadi penting karena kapasitasnya dalam memperjuangkan nasib petani lebih inklusif ketimbang yang selama ini diperankan oleh lembaga-lembaga formal seperti parlemen atau lembaga semi pemerintah seperti Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), partai politik, dan berbagai kelompok kepentingan.

Sangat wajar jika muncul rasa ingin tahu banyak orang tentang eksistensi dan aktivitas organisasi gerakan petani di era demokratisasi saat ini dan sejauh mana peran urgennya dalam ikut mengarahkan perubahan sistem agraria yang lebih responsif terhadap kepentingan substantif petani. Sayangnya studi tentang aktor gerakan demokrasi agraria tersebut masih sangat sedikit. Bahkan para akademisi dan peminat studi sosiologis tentang gerakan agraria masih kurang memperhatikan eksistensi gerakan petani yang direpresentasikan oleh urgensi

---

Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Ringkasan Disertasi; Mustain. 2007. *Petani vs Negara: Gerakan petani Melawan Hegemoni Negara*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

peran organisasi gerakan petani di dalam proses perubahan sistem agraria. Lawan petani bukan hanya berada pada tataran lokal dan kongkrit, tetapi juga berada pada tataran wilayah provinsi dan nasional, bahkan berada pada tataran global dan abstrak. Pasca maraknya aksi-aksi reklamasi justru terjadi penguatan organisasi gerakan petani tingkat wilayah provinsi dan berjejaring dengan organisasi gerakan agraria tingkat nasional dan transnasional. Namun demikian, adanya gejala semakin meluruhnya gerakan petani saat ini maka studi tentangnya juga perlu dicari penjelasan tentang bagaimana kekuatan hubungan agraria terkonstruksi sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tentang permasalahan di atas, maka secara dirinci dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Sejauh mana realitas struktur hubungan agraria terkonstruksi sehingga menjadi prakondisi utama munculnya gerakan petani ?
2. Kondisi-kondisi utama apa saja yang mendukung dilancarkannya aksi-aksi kolektif dalam gerakan petani ?
3. Sejauh mana urgensi gerakan petani dalam proses perubahan sistem agraria di era demokratisasi saat ini ?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika gerakan petani (prakondisi, muncul, beroperasi, modifikasi struktur, konflik, fragmentasi dan meluruh) pada lokus supra lokal (wilayah provinsi). Secara lebih rinci dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan kondisi-kondisi hubungan agraria yang menjadi pemicu utama terjadinya gerakan petani.
2. Menjelaskan saling keterkaitan di antara unsur-unsurnya yang mendukung keberhasilan dilancarkannya aksi-aksi kolektif dalam gerakan petani
3. Menjelaskan arah perkembangan gerakan petani (yang direpresentasikan oleh peran organisasi gerakan petani) dalam melakukan perubahan struktural agraria di era demokratisasi saat ini.

Pada tataran akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang aspek-aspek penting dalam dinamika gerakan petani. Terutama dalam sosiologi gerakan sosial dapat menambah pengetahuan tentang dinamika gerakan petani berbasis pada kesadaran baru masyarakat sipil, dan perkembangan kekuatan transformasi struktural menuju keadilan dan

demokrasi agraria sebagai dasar bagi peningkatan kesejahteraan petani. Akhirnya, pada tataran keilmuan penelitian ini diharapkan dapat menemukan penjelasan teoritis (konstruksi teori) tentang dinamika gerakan petani (yang direpresentasikan oleh peran organisasi gerakan petani skala provinsi) sebagai gerakan agraria yang menuju kearah kondisinya yang meluruh dan stagnan.

Pada tataran praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat: (1) dipergunakan untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan di pedesaan, implementasi dan dampaknya terhadap kelangsungan hidup petani supaya menjadi waspada dalam melaksanakan kebijakan agraria mendatang; (2) dalam melakukan revitalisasi dan reposisi kelembagaan di pedesaan berbasis komunitas petani, yakni berupa wadah keberdayaan petani melalui jalur komunikasi dialogis dan partisipasi aktif;<sup>31</sup> (4) menjadi masukan dalam memperkuat organisasi tani sebagai institusi sosial yang benar-benar berada dalam ranah masyarakat sipil.

Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan: (a) dalam mendukung dan mengkritisi implementasi program reforma agraria yang kerkeadilan sosial; (b) dalam menyelesaikan berbagai kasus konflik pertanahan yang melibatkan komunitas petani; (c) dalam penguatan organisasi masyarakat sipil, khususnya organisasi tani sebagai wadah perjuangan dan pemberdayaan petani; dan (d) dalam jangka panjang sebagai pendukung utama gerakan transformasi agraria yang responsif terhadap kepentingan petani.

#### **1.4. Ruang Lingkup Penelitian**

Gerakan “agraria” adalah suatu bentuk gerakan sosial yang mengusung isu keadilan dan demokrasi agraria. Gerakan agraria tidak hanya dilakukan dalam bentuk gerakan petani, tetapi juga bisa dilakukan oleh aktor-aktor lain selain petani yang mengusung agenda perubahan agraria. Gerakan petani bisa disebut sebagai gerakan agraria karena aktor gerakan terdiri atas petani dan non petani, basis massa utamanya adalah petani, isu utama gerakan adalah persoalan agraria, dan agenda utamanya adalah perubahan tatanan agraria. Jadi yang dimaksud dengan gerakan agraria dalam studi ini secara spesifik menunjuk pada “gerakan petani”. Oleh karena itu, dalam bahasan selanjutnya sebutan “gerakan agraria” dalam studi ini secara khusus menunjuk pada “gerakan petani”. Masing-

---

<sup>31</sup> Kebijakan agraria yang tidak responsif terhadap kepentingan petani, yakni berbasis paradigma modernisasi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi dan didukung stabilitas politik yang menekan ternyata telah gagal dalam meningkatkan pemerataan pendapatan. Dalam skala mikro banyak petani miskin yang menjadi korban pembangunan. Oleh karena itu proses modernisasi berjalan seiring dengan kegagalan pembangunan atau modernisasi tanpa pembangunan.

masing akan dipakai secara bergantian sesuai dengan konteksnya (umum dan khusus) tersebut.

Selain menjadi suatu konsepsi untuk menjelaskan realitas, maka gerakan agraria oleh petani juga difahami sebagai suatu institusi yang selalu berusaha bagaimana sistem agraria yang diharapkan dapat terwujud. Oleh karena itu, konsepsi gerakan agraria oleh petani (atau gerakan petani) dalam studi ini tidak dapat terlepas dari obyek representasinya, yakni organisasi gerakan petani.<sup>32</sup> Melalui perspektif itu, maka organisasi gerakan petani dituntut untuk memiliki visi, misi dan mengidentifikasi tujuan-tujuannya dengan pilihan terhadap suatu gerakan sosial dan berusaha melaksanakan tujuan-tujuan tersebut secara konsisten, baik tujuan jangka pendek (*material*) dalam bentuk gerakan sosio-politik maupun tujuan jangka panjang (*postmaterial*) dalam bentuk gerakan sosio-kultural.

Secara garis besar ada tiga pokok masalah yang akan dijelaskan dalam studi ini. *Pertama*, tentang sejauh mana realitas struktur hubungan agraria terkonstruksi sehingga menjadi prakondisi utama munculnya gerakan petani. Ini berhubungan dengan derajat ketegangan hubungan agraria (*structural strains*) yang mengandung suatu kondisi struktural yang mendukung atau memberi peluang (*structural conduciveness*) bagi dilakukannya tindakan kolektif petani. Secara khusus bagian ini akan dikonsentrasikan pada persoalan penguasaan tanah masyarakat petani berhubungan dengan negara (pemerintah) dan swasta (perusahaan), termasuk di dalamnya upaya kolektif (perjuangan) petani dalam menyelesaikan persoalan pertanahan yang dihadapi tersebut.

*Kedua*, kondisi-kondisi utama yang mendukung dilancarkannya aksi-aksi kolektif dalam gerakan petani. Diduga ada tiga kondisi utama yang saling terkait, yaitu struktur peluang politik, struktur mobilisasi sumberdaya, dan pemingkalian kolektif. *Pertama*, struktur peluang politik difahami sebagai derajat keterbukaan politik yang memungkinkan dilakukannya aksi-aksi kolektif petani. *Kedua*, struktur mobilisasi sumberdaya merupakan proses di mana suatu organisasi gerakan

---

<sup>32</sup> Banyak ahli yang sepakat bahwa "gerakan sosial sebagai organisasi dan aktivitas terorganisir". Sosiolog politik awal seperti Lenin (1929) dan Michels (1949) menempatkan dimensi organisasional gerakan sosial sebagai topik utama dalam kajiannya. Kemudian McCarthy dan Zald's (1973, 1977) dalam mengembangkan perspektif mobilisasi sumberdaya meletakkan dimensi organisasional sebagai tahapan sentral dan organisasi gerakan sosial menjadi *focal unit of analysis*. Sejak itu, kemudian berlangsung perdebatan (Gamson, 1990; Melluci, 1989; Piven dan Cloward, 1977) tentang peranan sentral organisasi formal dalam beroperasinya gerakan sosial dan tentang apakah organisasi formal tersebut memfasilitasi atau justru sebagai perintang dalam upaya mencapai tujuan gerakan. Dalam perkembangan lebih lanjut Sidney Tarrow (1994) membedakan antara gerakan sosial sebagai organisasi formal dan organisasi aksi kolektif. Meskipun pembedaan ini penting, tetapi terasa sulit jika dipergunakan untuk memahami operasi dan dinamika gerakan sosial, termasuk hampir semua gerakan berhubungan dengan aksi-aksi kolektif, tanpa merujuk pada organisasi dan karakteristik organisasional (Lihat Doug McAdam dan David A. Snow. 1997. *Social Movements: Reading on The Emergence, Mobilization, and Dynamics*. Los Angeles, California: Roxbury Publishing Company., hal.xxii).

petani menjamin kontrol terhadap sumberdaya gerakan petani. *Ketiga*, pemingkakan kolektif difahami sebagai suatu proses interpretasi bersama dan sebagai suatu proses konstruksi sosial yang dilakukan oleh para aktor yang menjadi mediasi antara peluang politik tersebut dengan aksi-aksi kolektif petani.

*Ketiga*, sejauh mana urgensi gerakan petani dalam proses perubahan sistem agraria di era demokratisasi saat ini. Persoalan ini berhubungan dengan kondisi-kondisi yang menunjukkan kemampuan gerakan petani dalam mencapai tujuannya sesuai dengan klaim-klaim yang diperjuangkan. Analisis persoalan ini mencakup proses dinamis gerakan petani. Oleh karena itu, disini terdapat dua urgensi gerakan petani, yakni dalam mencapai tujuannya sesuai dengan kekuatan sumberdaya yang dimiliki, dan arah kecenderungan aktivitas gerakan dalam mencapai tujuannya sesuai dengan klaim-klaim yang diperjuangkan.

Dipilih wilayah penelitian di Provinsi Lampung didasarkan pada alasan obyektif dan subyektif (lihat sub bab tentang Desain Penelitian). Analisis tentang dinamika gerakan petani yang direpresentasikan oleh organisasi gerakan petani dibatasi berlangsung dari tahun 1998-2009. Gerakan petani ini sengaja dipilih berdasarkan dua kategorikan utama, yakni konstruksi dari bawah dan dari atas (lihat sub bab tentang Desain Penelitian).

### **1.5. Kebaruan (Novelty)**

Kebaruan penelitian ini berada pada tataran konsepsi, lokus penelitian dan pendekatan teoritik. *Pertama*, pada tataran konsepsi berhasil menggunakan konsep “involusi” untuk menjelaskan dinamika gerakan agraria (gerakan petani) yang terjadi di era demokratisasi saat ini. *Kedua*, lokus penelitian gerakan petani skala provinsi, khususnya di era demokratisasi saat ini, sejauh yang penulis ketahui belum pernah diteliti secara akedemis. Petani yang terlibat dalam gerakan petani skala provinsi Lampung adalah yang mengalami berbagai kasus konflik pertanahan dan berasal dari berbagai wilayah komunitas petani basis.

Gerakan petani skala provinsi di era demokratisasi lebih tepat dijelaskan menggunakan teori mobilisasi sumberdaya dalam perspektif konstruksionisme sosial. Perspektif ini memperhatikan dualias orientasi *material* dan *postmaterial* (keduanya saling mendukung). Karena peran integratif antara elemen aktor petani dan non petani di dalam struktur gerakan petani skala provinsi, maka perlu redefinisi konsep “gerakan petani” yang memposisikan kedua elemen aktor tersebut bersifat komplementer.



Penggunaan pendekatan teori mobilisasi sumber daya perspektif konstruksionisme sosial dalam penelitian ini ada perberbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, seperti penelitian Ngadisah (2003), Wahyudi (2005) dan Victor Silaen (2006) dan Oetami Dewi (2006), sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Perspektif Teori Dalam Studi Gerakan Agraria

Peneliti	Perspektif Teori dalam Studi Gerakan Sosial			
	Klasik	Neoklasik (Fungsional)	Mobilisasi Sumberdaya	Gerakan Sosial Baru
Ngadisah (2003)	-	V	-	V
Wahyudi (2005)	-	V	V (interest-Tilly)	-
Victor Silaen (2006)	-	-	-	V
Oetami Dewi (2006)	V	V	-	-

Terdapat tiga aspek perbedaan dan kesesuaian. *Pertama*, berbeda dengan penelitian Ngadisah, Wahyudi dan Oetami Dewi karena perspektif teori mobilisasi sumberdaya dalam studi ini menolak asumsi-asumsi yang dibangun oleh perspektif teori fungsional (neoklasik). *Kedua*, sama dengan kesimpulan teoritik dari penelitian Wahyudi, tetapi dalam studi ini tidak hanya memperhatikan aspek kepentingan (*interest*) sebagai faktor utama dalam gerakan petani, tetapi juga memperhatikan *grievances*, *values* dan *ideology*. *Ketiga*, sama dengan Ngadisah dan Victor Silaen yang memasukkan gerakan agraria dalam perspektif gerakan sosial baru (*new social movement*) antara lain dilihat dari struktur organisasi, orientasi gerakan (*postmaterial*), dan penguatan identitas organisasional.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Dimensi Agraria, Gerakan Petani dan Gerakan Agraria

##### 2.1.1. Konsepsi dan Dimensi Agraria di Indonesia Masa Orde Baru

Secara etimologis, kata agraria berasal dari bahasa Latin "ager" yang artinya sebidang tanah (bahasa Inggris "acre"). Kata "agrarius" berarti yang ada hubungannya dengan sebidang tanah, pembagian atas tanah terutama tanah-tanah umum dan bersifat rural.<sup>33</sup> Dalam perkembangannya, konsepsi agraria mempunyai pengertian yang luas, tidak hanya menunjuk pada makna "pertanian" (*agriculture*), atau lebih sempit pada makna "tanah pertanian" (*land*) saja, tetapi juga termasuk pedusunan, bukit, wilayah, dan segala sesuatu (kekayaan alami dan kehidupan sosial) yang terkandung di dalamnya.<sup>34</sup>

Dimaksud dengan "agraria" dalam penelitian ini adalah yang berdimensi sosial, menunjuk pada makna penguasaan (dalam arti luas) "tanah pertanian" oleh "petani" berhubungan dengan negara dan swasta. Tanah pertanian sebagai sumberdaya (obyek) agraria, sedangkan petani, negara dan swasta adalah subyeknya. Bagi petani, tanah pertanian memiliki posisi sentral karena mawadahi keseluruhan kekayaan alami dan kehidupan sosio-kulturalnya.<sup>35</sup> Hubungan antara manusia (subyek) dengan sumberdaya agraria (obyek) disebut "hubungan teknis agraria", sedangkan hubungan antar manusia (subyek) dalam pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumberdaya agraria (obyek) disebut "hubungan sosial agraria".<sup>36</sup> Jika dilihat dari struktur dominasi agraria, sesuai dengan maksud penelitian ini, keempat konsepsi tersebut selalu dikaitkan dengan dimensi kekuasaan sumberdaya politik dan ekonomi.

---

<sup>33</sup> Gunawan Wiradi. 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: PT. Gramedia, halaman 286.

<sup>34</sup> MT. Felix Sitorus. 2004. *Kerangka dan Metode Kajian Agraria*. Jurnal Analisis Sosial Vol.9 No.1 April 2004, halaman 111.

<sup>35</sup> MT. Felix Sitorus. 2004. Loc. Cit.

<sup>36</sup> Menurut Tap MPR No. IX Tahun 2001 Pasal 2, konsep "pemilikan" menunjuk pada status hukum seseorang atas sebidang tanah pertanian, merupakan penguasaan formal atau sering disebut dengan "*land tenure*". Konsep "penguasaan" menunjuk pada kepentingan ekonomi, yaitu akses seseorang dalam memanfaatkan sebidang tanah pertanian, merupakan penguasaan efektif atau sering disebut "*land tenancy*". Sedangkan konsep "penggunaan" dan "pemanfaatan" menunjuk pada bagaimana tanah pertanian itu dimanfaatkan secara fisik.

Dalam rentang sejarah agraria di Indonesia, persoalan struktural agraria yang terkait dengan kelangsungan hidup petani dapat digolongkan menjadi empat aspek, yaitu kebijakan agraria yang tidak memihak petani dan tidak konsisten, pemilikan dan penguasaan tanah yang timpang, konflik penguasaan dan penggunaan, serta degradasi sumberdaya agraria.<sup>37</sup> Oleh karena itu, dalam banyak kasus persoalan struktur hubungan agraria di Indonesia, para analisis sampai pada kesimpulan bahwa masyarakat petani selalu berada pada posisi ter subordinasi dan kepentingannya selalu terpinggirkan.<sup>38</sup> Struktural hubungan agraria yang asimetris tersebut menurut Hugh Miall (2000) hanya dapat diselesaikan dengan merubah struktur yang ada menjadi seimbang dengan memperkuat posisi tawar petani. Transformasi struktural ini tidak dapat dilakukan tanpa menimbulkan konflik karena di dalamnya menyentuh persoalan perubahan paradigmatik, yakni “pembangunanisme”.<sup>39</sup>

Menurut Pieterse,<sup>40</sup> pembangunanisme berakar pada suatu filsafat yang terkandung dalam teori kemajuan linier, perkembangan evolusioner, teori modernisasi dan pemikiran pembangunan. Produksi pengetahuan merupakan bagian integral dari paradigma tersebut dan setiap konsep yang digunakan selalu mengacu dan dimanfaatkan untuk mendukungnya. Mereka menyakini pentingnya pembangunan berbasis teknologi moderen dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi, meskipun konsekuensinya banyak memakan korban di pihak petani. Gugus pengetahuan moderen tersebut terpusat pada upaya perubahan mendasar yang diarahkan pada saling keterkaitan antara aspek sosial, politik, ekonomi, dan kultural.<sup>41</sup> Kemudian lahirlah gugus pengetahuan agraria bersifat

---

<sup>37</sup> Dua jenis konflik yang sering muncul adalah antara petani dengan negara dan antara petani dengan pihak swasta. Keterlibatan pihak swasta dimulai dari lahirnya Undang-Undang Agraria 1870 (*Agrarische Wet*) yang mengundang pemodal swasta menanamkan modalnya terutama di bidang perkebunan. Sedangkan permasalahan kerusakan sumberdaya agraria tercantum dalam Tap MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

<sup>38</sup> M. Taukhdid. 1952. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Djakarta: Tjakrawala; Yando Zakaria, dkk. 2001. *Mensiasati Otonomi Daerah demi Pembaruan Agraria*, Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA); Mansour Fakh. 1995. *Tanah, Rakyat dan Demokrasi*, Yogyakarta: Forum LSM; Ichsan Malik, dkk. 2003. Op.Cit.; Noer Fauzi.1999. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Yogyakarta: INSIST, KPA, Pustaka Pelajar; Razif. 1991. *Penguasaan Tenaga Kerja dan Perkebunan Besar di Sumatera Timur: Tinjauan Historis*. Prisma "Industri Perkebunan: Kemakmuran untuk Siapa?". Jakarta: LP3ES No.4 Tahun XX, April 1991; Suhartono. 1991. *Agroindustri dan Petani: Multi Pajak di Vorstenlanden 1850-1900*, dalam Prisma. 1991. *Industri Perkebunan: Kemakmuran Untuk Siapa?* Jakarta: LP3ES No.4 Tahun XX, April 1991.

<sup>39</sup> Hugh Miall. 2000. *Resolusi Konflik Kontemporer: Penyelesaian, Mencegah, Melola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

<sup>40</sup> Joke Schrijvers. 2000. Op.Cit., hal. 25.

<sup>41</sup> Konstruksi paradigma pembangunan terlekat di dalam struktur schemata aktor yang diyakini sebagai solusi tepat untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan politik yang ditinggalkan Orde Lama. Konsisten dengan upaya perubahan “mendasar” tersebut, diproduksi gugus pengetahuan tentang pertumbuhan ekonomi yang didukung pengetahuan tentang sistem politik, sistem birokrasi dan sistem modernisasi sosio-kultural. Caranya antara lain dengan melakukan serangkaian transfer ilmu pengetahuan dan teknologi melalui jalur pendidikan formal (Mansour Fakh. 2004. Op.Cit.).

teknokratis yang melekat di dalam struktur schemata para pelaku pembangunan yang berpusat pada kompetensi para teknokrat.<sup>42</sup>

Bangunan struktural tersebut merupakan perwujudan dari sistem agraria dominan. Secara logis dapat diketahui bahwa posisi petani di dalam sistem agraria sebagai obyek atau subyek pasif. Dominasi agraria berbasis kompetensi tidak memberi peluang kepada petani untuk berpartisipasi aktif di dalam mereproduksi prinsip-prinsip struktural sistem agraria dominan. Petani kemudian diposisikan sebagai faktor produksi dan dalam struktur hubungan agraria berada pada posisi subordinat dan termarginalkan secara sistematis.

Oleh karena itu, di dalam sistem pembangunan yang demikian itu struktur hubungan agraria didominasi oleh para elit politik dan elit ekonomi. Dalam praktiknya cenderung mengarah pada kapitalisme semu.<sup>43</sup> Akibatnya petani tidak memiliki kekuatan kontrol yang memadai atas sumberdaya agraria. Sebagai negara bekas jajahan, maka ruh kolonialisme tidak bisa hilang begitu saja dan menjadi bagian dari praktik pembangunan.<sup>44</sup> Sama dengan masa kekuasaan Soekarno, ketika Soeharto berkuasa otoriterianisme tetap diberlakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Dalam pembangunan yang belum selesai, petani harus membatasi hak-hak demokrasiya agar memberi ketenangan politik bagi pertumbuhan ekonomi.<sup>45</sup> Kontrol negara terhadap petani terus diperkuat didukung dengan pendekatan '*depolitisasi*', '*deideologisasi*', dan massa mengambang (*floating mass*).<sup>46</sup> Kondisi ini menyebabkan tersumbatnya saluran aspirasi petani dan teralienasi secara politik, ekonomi dan kultural. Mereka dijanjikan akan diperhatikan ketika sumberdayanya diperlukan sebagai instrumen mobilisasi terutama untuk kepentingan politik.<sup>47</sup>

---

<sup>42</sup> Menurut Ignas Kleden, teknokrasi lahir karena kompetensi (kemampuan dan keahlian dalam bekerja) tanpa konstituensi (jumlah orang-orang memilih seseorang untuk mewakili mereka). *Pertama*, para teknokrat mendapat suatu jabatan politik karena keahlian dan kemampuannya dalam suatu bidang teknis dan karena itu mereka tidak memerlukan konstituen yang mendukungnya. *Kedua*, teknokrasi cenderung percaya pada suatu elitisme intelektual yang mengandaikan bahwa soal-soal ekonomi politik dan sosial politik dalam suatu negara moderen harus dipegang oleh seorang yang kompeten (Ignas Kleden. 2004. *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*. Magelang: Indonesiatara., hal. 4-5).

<sup>43</sup> Gunawan Wiradi. 2000. *Reforma Agraria: Perjalanan yang belum berakhir*. Yogyakarta: Insist., hal. 173.

<sup>44</sup> Di Lampung kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) mengacu pada produk kolonial. Di Sulawesi juga ditemukan kasus tafsir yang berlaku umum atas UU Kehutanan (UU No. 41/1999) dan UU Pelestarian Hutan (UU No. 5/1990) masih merujuk pada *Domain Verklaaring* warisan pemerintah kolonial (MT. Felix Sitorus. 2006. *Reklam Tanah Hutan: Tipe-tipe Reforma Agraria dari Bawah di Dataran Tinggi Sulawesi Tengah*. Tulisan dimuat dalam Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria. *Sumberdaya Agraria*. Bogor: IPB-Lapera Pustaka Utama, Volume III/Tahun III/2006., hal. 24).

<sup>45</sup> Ignas Kleden. 2004. Op.Cit., hal. 32.

<sup>46</sup> Ini terjadi secara nasional terkait dengan kebijakan politik Orde Baru (Jajat Baharudin dan Arief Subhan (editor). 1998. Op.Cit., hal. 21).

<sup>47</sup> Kasus ini mudah dicari karena terjadi dimana-mana terutama pada masa Orde Baru, termasuk yang terjadi di desa Dwikora, Lampung Utara dan di desa Sinar Rejeki dan sekitarnya kabupaten Lampung Selatan.

## 2.1.2. Konsep Petani Dalam Analisis Gerakan Sosial

Meskipun dalam literatur klasik, seperti Eric R. Wolf dan Teodor Shanin memaknai konsep petani dibedakan antara *farmer* (petani kecukupan) dan *peasant* (petani miskin),<sup>48</sup> tetapi lazim dinyatakan bahwa masyarakat petani sebagai elemen sistem agraria memiliki prinsip-prinsip struktural berbeda dengan negara dan perusahaan (swasta).<sup>49</sup> Lebih khusus masyarakat petani kontemporer berhubungan dengan lingkungan yang lebih luas terkait dengan struktur relasi kekuasaan di sektor pertanian.<sup>50</sup> Ini berarti bahwa mereka hidup di dua lingkungan yang berbeda, yakni lingkungan prakapitalis dan dalam struktur kapitalisme. Pada kondisinya yang relatif tertutup mereka bersifat spesifik, subsisten, tradisional, menggunakan tenaga kerja rumah tangga, memiliki perangkat sosio-budaya yang khas, memiliki pola, referensi dan logika hidup sendiri. Sedangkan dalam kondisinya yang terbuka lebih bersifat utilitarian dan memiliki kapasitas pilihan rasional. Asumsi teori formal menyatakan bahwa penetrasi kapitalisme akan mengikis ciri-ciri tradisional masyarakat petani dan akan semakin berkembang ciri-cirinya ke arah sistem kapitalistik.<sup>51</sup>

Secara khusus Marcus J. Kurtz,<sup>52</sup> membahas keterkaitan antara konsep petani dengan gerakan sosial dan maknanya berkembang beragam. Sebagian studi menunjuk pada (1) petani penggarap pedesaan (*rural cultivators*), tetapi sebagian yang lain memahami petani lebih dari itu menunjuk pada tiga kemungkinan lain, yakni: (2) memiliki kontrol atas tanah yang digarap, dan atau (3) tersubordinasi secara sosial terhadap kelas dominan pedesaan, dan atau (4) secara khusus dicirikan oleh praktik kultural komunitas yang berbeda. Dari

<sup>48</sup> Konsep *farmer* menunjuk pada petani kecukupan, berada pada lapisan atas, memiliki dan menguasai faktor produksi (tanah) dalam jumlah yang lebih dari cukup. Mereka mampu mengakumulasi surplus ekonomi, memiliki akses kedekatan politik dengan elit penguasa daerah setempat, dan cenderung mengadopsi gaya hidup kelas atas. Sedangkan *peasant* menunjuk pada petani miskin yang memiliki atau menguasai tanah relatif sempit, bahkan sebagian sebagai buruh tani dengan tidak memiliki atau menguasai tanah pertanian. Gaya hidup dan pandangan hidup *peasant* juga berbeda dengan *farmer*, karena mereka berada pada lingkungan strata masyarakat tersendiri (Teodore Shanin (Ed). 1979. *Peasants and Peasant Societies*. New York, Auckland: Penguin Books, Middlesex., hal. 50-68)

<sup>49</sup> Masyarakat petani: (1) memiliki hubungan khusus dengan tanah dengan ciri spesifik produksi pertanian berakar pada keadaan khusus petani; (2) usaha petani keluarga merupakan satuan dasar pemilihan produksi dan konsumsi serta kehidupan sosial petani; (3) kepentingan pokok pekerjaan dalam menentukan kehidupan sosial; (4) peranan dan kepribadian petani dikenal secara baik oleh masyarakat yang bersangkutan; (5) struktur sosial desa merupakan keadaan khusus bagi daerah tertentu dan waktu tertentu; dan (6) masyarakat petani merupakan sebuah kesatuan sosial praindustri yang memindahkan unsur-unsur spesifik struktur sosial ekonomi dan kebudayaan lama ke dalam masyarakat kontemporer (Moch. Nurhasim. 1997. *Konflik Tanah di Jenggawah: Tipologi dan Pola Penyelesaiannya*. Jakarta: Prisma 7, Juli-Agustus 1997., hal. 80).

<sup>50</sup> Karakteristiknya adalah: (1) produksinya berbasis keluarga pertanian; (2) suatu ekonomi pertanian yang tingkat spesialisasinya rendah; (3) kultur tradisionalnya secara khusus berhubungan dengan tata kehidupan pedesaan kecil; dan (4) berada dalam hubungan dominasi dengan pihak luar yang dapat diperkuat melalui penguasaan tanah, tekanan fisik langsung, dan perlakuan tidak fair melalui kekuatan pasar (Marcus J. Kurtz. 2000. *Understanding Peasant Revolution: From Concept to Theory and Case*. Theory and Society 29: 93-124, 2000. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands., hal. 101-102).

<sup>51</sup> Wan Hashim. 1984. Op.Cit., hal. 21.

<sup>52</sup> Marcus J. Kurtz. 2000. Op.Cit., hal. 94-97

keempat atribut tersebut dapat diidentifikasi lima aliran yang memberikan perbedaan definisi kaum tani (*peasantry*) dalam menganalisis gerakan petani, yakni tradisi Weberian, Marxian, Antropologi, Moral Ekonomi dan Minimalis.

Tabel 2 Dimensi Konseptual Petani Dalam Analisis Gerakan Sosial

No	Aspek	Minimalis	Antropologi- cal	Moral Economy	Marxian	Weberi- an
1	Rural cultivators	Yes	Yes	Yes	yes	Yes
2	Peasant communities characterized by distinct cultural practices	-	Yes	Yes	-	Yes
3	High levels of rural subordination	-	-	Yes	Yes	Yes
4	Peasants control and/or own land	-	-	-	Yes	Yes
	Range of case covered	Very large	Large	Moderate	Moderate	Very small
	Examples	Popkin (1979), Lichbach (1994), Bates (1984, 1988)	Redfield (1955) Kroeber (1948) Banfield (1958)	Wolf (1967), Scott (1976), Magagna (1991), Kerkvliet (1977)	Wolf (1967) Paige (1975)	Moore (1966) Shanin (1982)

Sumber: Marcus J. Kurtz, 2000. Op.Cit., hal. 96.

Tabel 2 menunjukkan bahwa tradisi Marxian memfokuskan pada kombinasi pemilikan tanah dan subordinasi sosial. Mengikuti konsepsi Marx, petani sebagai masyarakat yang dieksploitasi dan diperas. Hubungan mereka bersifat lokal dan terpisah-pisah, sehingga sulit dipersatukan dalam kesatuan nasional, ke dalam organisasi politik, tidak mampu menegakkan kepentingan kelas sendiri secara politik, dan karena itu mereka harus diwakili. Posisi petani berada dalam struktur dominasi proses produksi pertanian, mengalami pemerasan dan penghisapan oleh institusi supra desa. Karena itu, pendekatan moral ekonomi memasukkan ciri subordinasi sosial dalam memfokuskan pada integritas komunitas petani. Sedangkan tradisi minimalis memahami petani hanya memfokuskan pada statusnya sebagai petani penggarap pedesaan. Pandangan ini digunakan oleh tradisi pilihan rasional atau ekonomi politik dalam menganalisis gerakan petani.

Berdasarkan paparan di atas, maka konsep petani dalam hubungannya dengan analisis gerakan sosial dapat dilihat dari beberapa ciri, yakni sebagai petani penggarap pedesaan, sebagai komunitas yang memiliki kultur berbeda, berada dalam posisi tersubordinasi, dan memiliki kontrol atau penguasaan atas tanah pertanian yang lemah. Akan tetapi, baik dalam literatur klasik maupun

kontemporer banyak analisis yang berkesimpulan bahwa petani miskin (*peasants*) dengan segenap ciri-cirinya tersebut tidak mampu bergerak secara terorganisir jika tidak dipelopori oleh petani kecukupan dan didukung sepenuhnya oleh segenap masyarakat sipil yang lain (elemen aktor non petani).

### 2.1.3. Gerakan Agraria dan Gerakan Petani

Anthony Giddens<sup>53</sup> mendefinisikan gerakan sosial sebagai “*a collective attempt to further a common interest or secure a common goal, through collective action outside the sphere of established institutions*”. Charles Tilly,<sup>54</sup> mendefinisikan gerakan sosial sebagai “rangkaian interaksi berkelanjutan (*sustained series of interactions*)” antara otoritas dengan para penantang yang membuat tuntutan-tuntutan berdasarkan kepentingan konstituen dengan preferensi khusus. Sedangkan Della Porta dan Diani, mendefinisikan gerakan sosial sebagai “(1) *informal networks*, (2) *based on shared beliefs and solidarity*, which mobilise out of (3) *conflictual issues*, through (4) *the frequent use of various forms of protest*.”<sup>55</sup> Lebih spesifik Doug McAdam dan David A. Snow mendefinisikan gerakan sosial: “*as a collectivity acting with some degree of organization and continuity outside of institutional channels for the purpose of promoting or resisting change in the group, society, or world order of which it is a part*”. Definisi tersebut didasarkan pada beberapa elemen, yakni: (1) tindakan kolektif atau bersama; (2) tujuan berorientasi perubahan; (3) derajat organisasi; (4) derajat kontinuitas temporer; dan (5) tindakan kolektif ekstrainstitusional, atau paling tidak berupa campuran aksi protes turun ke jalan (ekstrainstitusional) dan aktivitas lobi politik.<sup>56</sup>

Memperhatikan beberapa definisi gerakan sosial di atas, sesuai dengan kepentingan penelitian ini, makna konsep “gerakan agraria” secara luas sejalan dengan yang didefinisikan oleh Gunawan Wiradi, yakni sebagai suatu usaha, upaya, dan kegiatan yang dilakukan secara kolektif atau bersama, dengan tujuan untuk merombak tata sosial di bidang agraria, karena tata yang ada dianggap tidak adil dan tidak sesuai sebagai dasar bagi peningkatan kesejahteraan

---

<sup>53</sup> Anthony Giddens. 1997. *Sociology*. Third Edition. Polity Press., hal. 511.

<sup>54</sup> Hanspeter Kriesi. 1988. *The Interdependence of Structure and Action: Some Reflections on the State of the Art*. JAI Press Inc., hal. 352.

<sup>55</sup> Stewart Lockie. 2004. *Collective agency, non-human causality and environmental social movements: A case study of the Australian 'landcare movement'*. *Journal of Sociology* @ 2004 The Australian Sociological Association, Volume 40(1): 41-58, DOI:10.1177/1440783304040452 [www.sagepublications.com](http://www.sagepublications.com), hal. 47.

<sup>56</sup> Doug McAdam dan David A. Snow. 1997. *Op.Cit.*, hal.xviii.

rakyat.<sup>57</sup> Secara khusus, gerakan agraria dimaknai sebagai tindakan kolektivitas aktor petani dan non petani yang bertindak bersama melalui wadah organisasi petani berbasis isu sumberdaya agraria yang berorientasi pada perubahan agraria yang adil dan demokratis untuk mencapai kesejahteraan petani dengan menggunakan saluran non-institusional.

Berdasarkan definisi tersebut maka gerakan agraria dalam studi ini tidak difahami sebagai tindakan kolektif “*by product*” sebagaimana pandangan tradisi teori psikologi dan teori struktural fungsional klasik, tetapi sebagai tindakan kolektif “*by design*”. Gerakan agraria sebagai gejala normal, direncanakan, terorganisir dengan tujuan yang jelas, menggunakan strategi dan taktik gerakan, dan dilakukan dengan sadar berdasarkan metodologi dan analisis sosial yang memadai.<sup>58</sup> Dari definisi tersebut juga dapat difahami bahwa: (1) gerakan agraria adalah suatu bentuk gerakan sosial yang mengusung agenda perubahan norma (struktural) dan nilai (kultural) agraria; dan (2) gerakan agraria tidak hanya dilakukan dalam bentuk gerakan petani, tetapi juga dilakukan oleh aktor-aktor non petani. Berdasarkan alasan tersebut, maka yang dimaksud dengan “gerakan agraria” dalam studi ini secara khusus menunjuk pada “gerakan petani”, yakni sebagai gerakan sosial terdiri atas aktor petani dan non petani yang membingkai isu atau mengusung agenda perubahan tatanan agraria dengan basis massa utamanya adalah petani. Oleh karena itu, dalam bahasan selanjutnya yang dimaksud dengan “gerakan agraria” dalam studi ini adalah sama dengan “gerakan petani” sesuai dengan pengertian tersebut di atas.

Selain menjadi suatu konsepsi untuk menjelaskan realitas, maka gerakan agraria tersebut juga difahami sebagai suatu institusi yang selalu berusaha bagaimana sistem agraria yang diharapkan dapat terwujud. Oleh karena itu, konsep “gerakan agraria” (yang secara khusus menunjuk pada gerakan petani) dalam studi ini tidak dapat terlepas dari obyek representasinya, yakni “organisasi gerakan petani”.<sup>59</sup> Melalui perspektif itu, maka organisasi gerakan petani dituntut untuk memiliki visi, misi dan mengidentifikasi tujuan-tujuannya dengan pilihan terhadap suatu gerakan sosial dan berusaha melaksanakan tujuan-tujuan tersebut secara konsisten, baik tujuan jangka pendek dalam bentuk gerakan

---

<sup>57</sup> Gunawan Wiradi. 2000. Op.Cit., hal. 196.

<sup>58</sup> Definisi yang sama digunakan oleh Mansour Fakhri, 2004. Op.Cit., hal. 58-59.

<sup>59</sup> Dalam kajian tentang gerakan sosial, pandangan ini sudah berkembang oleh para ahli seperti Lenin (1929), Michels (1949), McCarthy dan Zald (1973, 1977), Gamson (1990), Melluci (1989), Piven dan Cloward (1977) dan Sidney Tarrow (1994) (Lihat Doug McAdam dan David A. Snow. 1997. Op.Cit., hal.xxii).



socio-politik maupun tujuan jangka panjang dalam bentuk gerakan socio-kultural.<sup>60</sup>

## **2.2. Ketegangan Struktural Agraria Sebagai Prakondisi Utama Munculnya Gerakan Petani**

Menurut Smelser, ketegangan (*strain*) diartikan sebagai: “*impairment of the relations among and consequently inadequate functioning of the components of action*” (rusaknya hubungan antar dan sebagai konsekuensi rendahnya fungsi dari komponen-komponen tindakan).<sup>61</sup> Menurut Doug McAdam dan David A. Snow, konsep ketegangan dimaknai sebagai semua bentuk gangguan atau kondisi-kondisi sosial yang penuh ketidakpastian yang dapat menjadi stimulan bagi tumbuhnya gerakan sosial.<sup>62</sup> Sedangkan ketegangan struktural (*structural strains*) menurut Smelser dimaknai sebagai ketegangan (ambiguitas yang dirasakan, deprivasi, inkonsistensi, tensi-tensi, dan konflik-konflik di dalam masyarakat) yang muncul dalam hubungannya dengan cara di mana struktur yang kondusif (suatu struktur yang lebih dulu muncul yang lebih mungkin menjadi pendorong munculnya suatu gerakan tertentu daripada struktur yang lain) itu dirasakan.<sup>63</sup>

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut di atas dapat diacu untuk memaknai konsep “ketegangan struktural agraria”. Konsep “agraria” dalam studi ini diikutsertakan karena ketegangan struktural tersebut terjadi akibat adanya upaya petani dalam mempertahankan kuasa atas sumberdaya agraria (tanah) berhadapan dengan kekuatan negara dan swasta. Konsep “ketegangan struktural agraria” dalam penelitian ini dimaknai sebagai labilnya kondisi-kondisi atau ketidakpastian struktur hubungan agraria yang dirasakan oleh petani (dan segenap kelompok pendukungnya) sebagai peluang dan sebagai pendorong munculnya tindakan-tindakan kolektif petani. Pada kondisi seperti ini terjadi ketidaksesuaian hubungan antar elemen struktur agraria (negara, swasta dan masyarakat petani) dalam beberapa aspek seperti nilai-nilai, norma-norma, dan kepentingan. Menurut Smelser, ketegangan struktural terkait dengan berbagai

---

<sup>60</sup> Sejalan dengan kedua konsepsi gerakan sosial tersebut, Gramsci membedakan antara “perang manuver” (*war of manuver*) berupa perjuangan mencapai perubahan jangka pendek mengubah kondisi untuk memenuhi kebutuhan praktis, dan “perang posisi” (*war of position*) berupa perjuangan kultural dan ideologis dalam jangka panjang (Mansour Faqih. 2004. Op. Cit., hal. 66.)

<sup>61</sup> Neil J. Smelser. 1962. *Theory of Collective Behavior*. New York: The Free Press., hal. 47.

<sup>62</sup> Doug McAdam dan David A. Snow. 1997. Op.Cit., hal. 2.

<sup>63</sup> Charles L. Harper. 1989. *Exploring Social Change*. New Jersey: Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs., hal. 135; Susan Eckstein. 1989. *Power and Popular Protest: Latin American Social Movements*. Los Engeles: University of California Press., hal.5.

aspek tertentu dalam elemen utama tindakan sosial, yakni: (a) ambiguitas dalam fasilitas situasional, (b) deprivasi dalam tahap mobilisasi motivasi, dan (c) konflik atas berbagai norma sosial yang ada.<sup>64</sup>

Dalam argumen tradisional (*breakdown theory*) dinyatakan bahwa gerakan sosial merupakan “*by-products*” dari percepatan perubahan sosial dan disintegrasi yang dipicu oleh kondisi struktural dan tindakan-tindakan yang dapat memunculkan ketegangan dan frustrasi secara ekstrim. Beban psikologis yang demikian berat dapat dilepaskan melalui gerakan sosial.<sup>65</sup> Tetapi dalam studi ini tidak diasumsikan bahwa petani akan secara otomatis merespon dalam bentuk tindakan kolektif setiap terjadi ketegangan struktural agraria. Gerakan petani yang dimaksud dalam studi ini adalah “*by-design*”, sehingga ketegangan struktural agraria yang “*by-product*” tersebut diposisikan sebagai prakondisi akumulasi sumberdaya mobilisasi potensial yang selalu siap diaktualkan dalam tindakan-tindakan kolektif.

Sangat sulit menentukan besaran derajat ketegangan struktural agraria yang menjadi prakondisi bagi munculnya gerakan petani. Ketegangan struktural agraria sendiri tidak dapat menjadi satu-satunya faktor penentu pasang-surutnya atau respon gerakan petani. Ketegangan struktural agraria tidak dapat diabaikan sebagai prakondisi akumulasi sumberdaya mobilisasi, jika didasarkan pada suatu asumsi bahwa “*tidak akan ada asap jika tidak ada api*”. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa setiap terjadi ketegangan secara otomatis akan direspon oleh petani dalam bentuk aksi-aksi kolektif.

Selain itu, sangat sulit menjelaskan meningkatnya ketegangan struktural sesuai dengan kompleksitas persoalan agraria yang dihadapi petani. Akan tetapi, juga tidak dapat diabaikan adanya keterkaitan timbal-balik antara sebab-sebab terjadinya ketegangan struktural yang terkonsentrasi pada perubahan kesadaran, sumberdaya politik, sumberdaya ekonomi dan kebijakan agraria. Mengadopsi pandangan Huiser (1967) dan Wolf (1969) bahwa ketegangan struktural terjadi karena terganggunya petani terhadap perkembangan agresif moda produksi skala besar, yakni kepentingan komersialisasi tanah didukung oleh kekuatan negara.<sup>66</sup> Landsberger dan Alexandrov menyimpulkan secara simultan, yakni: 1) karena terintegrasinya petani ke dalam pasar nasional dan internasional; maka 2) kondisi tersebut mendorong berkembangnya komersialisasi pertanian, dan (3)

<sup>64</sup> Neil J. Smelser. 1962. Op.Cit., hal. 278.

<sup>65</sup> Doug McAdam dan David A. Snow. 1997. Op.Cit., hal. 2.

<sup>66</sup> Krishna B. Ghimire (Editor). 2001. *Land Reform and Peasant Livelihoods: The Social Dynamics of Rural Poverty and Agrarian Reforms in Developing Countries*. London: ITDG Publishing, hal. 164.

akhirnya berkembang berbagai gangguan terhadap hak dan status atas tanah pertanian bagi petani. Petani khawatir terjadi penggusuran yang berarti penurunan statusnya, dan ancaman itu bukan berasal dari tuan tanah tetapi dari kekuatan institusi supra desa (para pemodal besar).<sup>67</sup> Jadi, perubahan pola hubungan struktural agraria dapat meningkatkan derajat ketegangan ketika tanah ditransformasikan dalam suatu komoditas komersial dan praktek itu sangat mengganggu kelangsungan hidup petani. Transformasi ini terjadi melalui proses kapitalisme dan perluasan pasar, serta berjalan seiring dengan kecenderungan kuat transformasi petani ke dalam posisi proletariat (tenaga kerja kasar) pedesaan.<sup>68</sup>

Argumen-argumen tersebut di atas masih berada pada tataran umum dan terkait dengan saling hubungan antara faktor politik, ekonomi dan ideologi. Bagi petani penggarap penguasaan tanah jauh lebih penting dibanding kesadaran ideologis, sedangkan bagi petani kecukupan insentif ideologi yang lebih menarik. Jika diasumsikan bahwa gerakan petani membutuhkan basis ideologi perjuangan yang sesuai, maka Wolf berpendapat bahwa petani kelas menengahlah yang menjadi pendukung utamanya.<sup>69</sup> Petani lapisan ini lebih peka terhadap dampak gejolak pasar dan kebijakan agraria, lebih mudah menerima ideologi gerakan, memiliki basis ekonomi independen dan sumberdaya politik taktis.<sup>70</sup> Terjadinya ketegangan struktural agraria semakin berpotensi mendorong munculnya gerakan petani ketika gangguan eksternal muncul mengenai keduanya. Para petani kecukupan ini berpotensi menjadi aktor strategis gerakan dan menjadi simpul perjuangan petani terutama di lingkungan komunitasnya.

Dalam perspektif moral ekonomi, titik kritis ketegangan struktural terjadi ketika petani merasa terancam kebutuhan dasarnya dan hancurnya tatanan tradisional akibat penetrasi kapitalisme.<sup>71</sup> Dalam perspektif Marxian, ketegangan struktural terjadi akibat petani berada pada posisi subordinate dalam moda

---

<sup>67</sup> Henry A. Landsberger dan YU.G. Alexandrov. 1984. *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali., hal. 38-42.

<sup>68</sup> Eduardo Archetti, Egil Fossum and Per Olav Reiton. 1970. *Agrarian Structure and Peasant Autonomy*. Journal of Peace Research 1970; 7; 185. On behalf of International Peace Research Institute, Oslo. Sage Publications., hal.189.

<sup>69</sup> Eric J. Wolf. 1969. *Peasant Wars of the Twentieth Century*. New York: Harper and Row., hal. 292.

<sup>70</sup> Basrowi dan Sudikin. 2003. *Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*. Surabaya: Insan Cendekia., hal. 40; Hotman M. Siahaan. 1996. *Pembangkangan Terselubung Petani Dalam Program TRI Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi*. Disertasi Doktor Universitas Airlangga, hal. 44.

<sup>71</sup> James Scott. 1989. *Everyday Form of Resistance: Peasant Resistance*. New York: Rmuncck Mc Shape; James C Scott. 2000. *Senjatanya Orang-Orang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; Eric Wolf. 1969. *Op.Cit*; Eric Wolf. 1983. *Petani: Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: Radjawali Press; Joel Migdal. 1979. *Peasant Politics and Revolutions Pressure to World Political and Social Change in the Third World*. Princeton: Princeton University Press; James Scott. 1976. *The Moral Economy of the Peasant*. New Haven: Yale University Press.

produksi dan faktor politik. Menurut Marx upah pekerja tidak bertumbuh secara “nyata” menjadikan mereka sebagai proletarian bukan sebagai petani. Ini berarti bahwa tidak ada petani tanpa penguasaan tanah dan bebas dari posisi subordinasi.<sup>72</sup> Paige menganggap bahwa argumen Marx tersebut lebih cocok untuk menjelaskan kondisi masyarakat agraris daripada masyarakat industrial. Paige menambahkan faktor politik seperti terancamnya posisi petani miskin dalam relasi kerja dengan petani berkecukupan terkait dengan tanah dan upah. Ketegangan tersebut akan berkembang menjadi aksi radikal jika diikuti dengan kemampuan menggalang solidaritas berbasis ideologi karena terjadi krisis ekonomi dan peluang politik yang mendukung.<sup>73</sup>

Masih dalam perspektif struktural, dalam kasus yang terjadi di Amerika Latin, Susan Ekstein menyimpulkan bahwa ketegangan struktural terjadi akibat petani diperlakukan tidak fair (penindasan) dan terjadi lonjakan beban hidup akibat krisis ekonomi yang tidak dapat diatasi oleh petani. Pada sisi lain respon negara dan kondisi kultural tetap kurang kondusif.<sup>74</sup> Ini diawali adanya bentuk-bentuk kontradiksi tertentu dalam struktur hubungan agraria kemudian terjadi ketidakpuasan yang terkait dengan kepentingan tertentu pula.<sup>75</sup> Jadi, ketegangan struktural agraria berkembang memuncak karena tersumbatnya saluran (peluang politik), berkembangnya sistem nilai baru, dan ambiguitas peran negara dalam membuat pilihan harus reformis atau menindas petani.<sup>76</sup>

Namun demikian juga tidak dapat diabaikan perspektif ekonomi politik yang basis premisnya bersifat utilitarian dan *rational choice*. Betapapun kecilnya ketegangan struktural agraria sebagai prakondisi munculnya gerakan petani tidak terlepas dari kalkulasi rasio antara *costs* dan *rewards*, meskipun tidak bebas dari peluang munculnya “*free rider*”. Perilaku kolektif dimungkinkan sejauh para pelaku menerima penghargaan selektif atas partisipasinya dan ketika non partisipan akan memperoleh sanksi negatif ketika mereka tidak terlibat.<sup>77</sup> Teori ekonomi politik ini lebih berbasis pada aspek rasionalitas dan intensionalitas

---

<sup>72</sup> Marcus J. Kurtz. 2000. Op.Cit., hal. 101.

<sup>73</sup> Jeffery M Paige. 1978. *Agrarian Revolution: Social Movement and Export Agricultural in the Underdeveloped World*. New York: The Free Press.

<sup>74</sup> Susan Ekstein. 1989. Op. Cit., hal. 15

<sup>75</sup> Gergey Mamay, *Theories of Social Movements and Their Current Development in Soviet Society*, di download dari <http://www.lucy.ukc.ac.uk/csacpub/russian/mamay.html>.

<sup>76</sup> Hotman M. Siahaan. 1999. *Anarkhi Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi Pedesaan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.2, Nomor 3 Maret 1999, FISIP UGM, hal. 60-70.

<sup>77</sup> Susan Eckstein. 1989. Op. Cit., hal. 4.

tindakan individu atau kolektivitas aktor dan berorientasi pada perubahan tatanan masa depan yang lebih baik.<sup>78</sup>

Memperluas teori Marx, Paige, Ekstein, dan ekonomi politik di atas, bahwa ketegangan struktural agraria yang dimaksud dalam penelitian ini bukan terjadi dalam hubungan antar kelas, tetapi antar sektor negara, swasta dan masyarakat petani. Ketegangan struktural terjadi karena kepentingan negara dan swasta terhadap sumberdaya agraria (tanah) tidak pernah dapat disatukan dalam suatu titik kompromi dengan kepentingan masyarakat petani. Menurut Geritt Huizer, kasus-kasus yang terjadi di banyak negara menunjukkan bahwa ketegangan struktural agraria memuncak akibat frustrasi ekstrim yang dialami petani. Ini terjadi tidak hanya karena kemiskinan dan marginalisasi petani, tetapi juga karena modernisasi atau pembangunan yang menciptakan ketidakcocokan, berada dalam wilayah yang sudah terbuka (tidak terisolasi dan mudah mengakses atau berkomunikasi dengan pusat kota), dan terjadi dalam wilayah yang berpenduduk relatif padat. Karena petani mengalami erosi status quo yang pada umumnya akibat pembangunan ekonomi maka ketegangan struktural menjadi pendorong utama petani ikut berorganisasi untuk terlibat dalam gerakan-gerakan sosial.<sup>79</sup>

Lebih lanjut, Landsberger dan Alexandrov menyimpulkan lima sebab yang memungkinkan unsur psikologis (kegelisahan atau ketidakpuasan) ketegangan struktural menjadi pendorong utama munculnya gerakan petani, yakni: 1) terjadinya kemerosotan obyektif yang nyata di dalam beberapa atau semua dimensi status; 2) inkonsistensi status atau perbaikan yang tidak seimbang (perbaikan pada beberapa aspek tertentu tetapi terjadi perubahan atau kemerosotan pada aspek lain); 3) perubahan kedudukan petani dibandingkan dengan yang lain; 4) meningkatnya aspirasi kehidupan petani lebih cepat dari perbaikan status obyektif mereka, yakni penyebaran ide egalitarian dan konsepsi tentang hak setiap orang atas kebahagiaan; dan 5) kombinasi dari semuanya.<sup>80</sup>

Dalam kasus di Cina, Zagoria mencatat beberapa kondisi sosial, psikologis, politik dan teknis yang dapat mempercepat munculnya gerakan revolusioner. *Pertama*, kondisi-kondisi sosial, yaitu: (a) besarnya kelas petani tak bertanah dan miskin tanah dalam sistem tenansi; (b) beratnya tekanan terhadap tanah, dan (c)

---

<sup>78</sup> Samuel L. Popkin. 1979. *The Rational Peasant*. Berkeley: The University of California Press; R.H. Bates. 1981. *Markets and States in Tropical Africa: The Political Basis of Agricultural Policies*. Berkeley: University of California Press.

<sup>79</sup> Krishna B. Ghimire (Editor). 2001. Op.Cit., hal. 187.

<sup>80</sup> Henry A. Landsberger dan YU.G. Alexandrov. 1984. Op.Cit., hal. 43.

eksistensinya intelegensia pedesaan. *Kedua*, kondisi-kondisi psikologis, yaitu: (a) ketidakpuasan petani dengan status quo dan tuntutan untuk melakukan perubahan, dan (b) kesadaran petani terhadap praktik penghisapan tuan tanah dan bangkrutnya struktur kekuasaan pedesaan. *Ketiga*, kondisi-kondisi politik, yaitu: (a) peran organisasi-organisasi revolusioner yang membidaninya (seperti partai komunis), dan (b) kondisi melemahnya para elit pedesaan. *Keempat*, kondisi-kondisi teknis, yaitu: (a) kemampuan organisasional petani, dan (b) kemampuan organisasional gerakan revolusioner. Semua itu sebagai prasyarat bagi terbentuknya formasi organisasi gerakan untuk mewujudkan tujuan mentransformasi petani dari suatu 'class in itself' menjadi 'class for itself'.<sup>81</sup>

### **2.3. Gerakan Petani Sebagai Gerakan Sosial Normal, Rasional dan Terorganisir**

Dalam memahami genesis dan dinamika gerakan petani sebagai gerakan sosial, dalam tradisi Amerika, sering dibedakan antara dua konsep, yakni perilaku kolektif (*collective behavior*) dan tindakan kolektif (*collective action*). Perilaku kolektif lazim digunakan dalam teori-teori gerakan sosial klasik, seperti teori psikologi sosial aliran Chicago, teori masyarakat massa, dan model struktural fungsional.<sup>82</sup> Paling tidak terdapat dua persamaan karakteristik umum dari pendekatan teori-teori *collective behavior* tersebut. *Pertama*, mereka lebih memfokuskan pada penjelasan partisipasi individu dalam gerakan sosial, melihat keluhan-keluhan dan nilai-nilai sebagai respon terhadap cepatnya perubahan sosial (*strain*). *Kedua*, perilaku kolektif dianggap bersifat eskpresif, "*arational*" jika tidak disebut "*irational*", menyimpang dari tatanan sosial yang mapan dan lebih elementer mencakup baik gerakan perubahan personal maupun institusional.<sup>83</sup>

Perspektif teori tindakan kolektif (*collective action*) menolak pandangan teori klasik tersebut, berupaya merumuskan kembali asumsi-asumsinya, dan masuk pada ranah kajian sosiologi politik dan ekonomi. Perspektif teori ini secara umum sering disebut dengan teori mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization theory*),<sup>84</sup> dengan beberapa variannya seperti teori proses politik (*political*

---

<sup>81</sup> Tan Chung. 1980. *A New Look at Peasant Rebellions in China*. Sage Publications., hal. 35. Downloaded from <http://chr.sagepub.com> by hartoyo on November 19, 2007.

<sup>82</sup> W. Kornhauser. 1959. *The Politics of Mass Society*. New York: Free Press; Hannah Arendt. 1951. *The Origin of Totalitarianism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich; Neil J. Smelser. 1962. Op.Cit.

<sup>83</sup> Jean L. Cohen. 1985. *Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements*. Dalam "*Social Movements*", Journal "*Social Research: An International Quarterly of The Social Sciences*", Vol. 52 No.4 (Winter 1985)., hal. 672.

<sup>84</sup> Secara umum perspektif teori mobilisasi sumberdaya mendasarkan asumsi-asumsinya sebagai berikut: (a) gerakan sosial harus difahami dalam konteks model konflik tindakan kolektif; (b) tidak ada perbedaan

*prosess theory*) dan teori peluang politik (*political opportunity theory*). Perspektif teori ini dibangun dan dikembangkan oleh Oberschall (1973), Gamson (1975), McCarthy dan Zald (,1973;1977), Tilly (1978), Jenkins (1981), dan Tarrow (1998). Pada awal perkembangannya meskipun varian teori tersebut terdapat perbedaan, semuanya melihat pentingnya mobilisasi, organisasi, dan sumberdaya dalam gerakan sosial. Tetapi sebaliknya, dalam analisisnya kurang memperhatikan pentingnya faktor sosial psikologis seperti keluhan dan ketidakpuasan.<sup>85</sup> Titik utama teori mobilisasi sumberdaya adalah meletakkan pada pentingnya proses mobilisasi di dalam analisis gerakan sosial. John D. McCarthy dan Mayer N. Zald dengan tegas menyatakan bahwa:

The resource mobilization approach emphasizes both societal support and constraint of social movement phenomenon. It examines the variety of resources that must be mobilized, the linkages of social movements to other groups, the dependence of movements upon external support for success, and the tactics used by authorities to control or incorporate movements.<sup>86</sup>

Terdapat lima titik tekanan utama dalam perkembangan teori mobilisasi sumberdaya. *Pertama*, studi tentang agregasi sumberdaya sangat penting untuk memahami aktivitas gerakan dalam mencapai tujuan kolektif. *Kedua*, agregasi sumberdaya perlu organisasi gerakan sosial. *Ketiga*, dalam memperhitungkan kesuksesan dan kegagalan gerakan perlu pengakuan secara eksplisit pentingnya keterlibatan pihak luar (individu dan organisasi). *Keempat*, model penawaran dan permintaan kadang diterapkan terhadap arus sumberdaya kepada dan dari gerakan sosial khusus. *Kelima*, pentingnya konsepsi *costs* dan *rewards* dalam menjelaskan keterlibatan individu dan organisasi dalam gerakan sosial.<sup>87</sup>

Sebagai suatu gerakan sosial, gerakan petani yang terorganisir pada tingkat supra lokal (skala provinsi dan berjejaring pada tingkat nasional) seperti yang terjadi di Indonesia pada awal era reformasi selain bisa dikatakan sebagai gerakan populer juga lebih sesuai jika dianalisis dengan menggunakan teori mobilisasi sumberdaya. Menurut Jelin, bentuk gerakan-gerakan populer (*popular*

---

mendasar antara tindakan kolektif institusional dan non institusional; (c) mengandung konflik-konflik kepentingan yang dibangun ke dalam hubungan-hubungan kekuasaan terlembagakan; (d) tindakan kolektif melibatkan kelompok-kelompok yang bertindak rasional dalam mengejar kepentingannya; (e) tujuan dan keluhan-keluhan merupakan produk permanen dari hubungan kekuasaan dan tidak dapat menjelaskan formasi gerakan; (f) semua itu tergantung pada perubahan sumberdaya, organisasi, dan peluang tindakan kolektif; (g) kesuksesan gerakan dibuktikan oleh pengakuan kelompok sebagai pelaku politik atau oleh meningkatnya keuntungan material; (h) mobilisasi skala besar, bertujuan khusus, birokratik, dan dalam bentuk organisasi formal (Jean L. Cohen. 1985. *Ibid.*, hal. 675).

<sup>85</sup> Steven E. Barkan and Lynne L. Snowden. 2001. *Collective Violence*. Allyn and Bacon., hal. 23; J. Craig Jenkins. 1983. *Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements*. Columbia: Departemen of Sociology, University of Missouri, Annual Review of Sociology. 1983, Vol.9., hal. 23.

<sup>86</sup> John D. McCarthy and Mayer N. Zald. 1977. *Resource Mobilization and Social Movements: A partial theory*. In *American Journal of Sociology*, 82, 1977, Vol. 6., hal.1213.

<sup>87</sup> Mayer N. Zald and John D. McCarthy. 2003. *Social Movements in an Organizational Society*. New Jersey: New Brunswick, Transaction Publishers., hal. 19.

*movements*)<sup>88</sup> yang banyak dilakukan di negara-negara selatan pada dekade tahun 1990-an tidak hanya berorientasi *material* tetapi juga *postmaterial*, seperti upaya untuk melakukan penguatan identitas. Jelin (1996:22)<sup>89</sup> mengatakan sebagai berikut:

... are forms of collective action with a high degree of popular participation, which use non-institutional channels, and which, at the same time that they formulate their demands, also find forms of action to advanced those demands and to establish themselves as collective subjects, that is, as a group or a social category.

Kedua orientasi (*material* dan *postmaterial*) yang ada dalam gerakan sosial tersebut lebih sesuai jika dianalisis menggunakan teori mobilisasi sumberdaya daripada hanya menggunakan teori gerakan sosial klasik atau teori gerakan sosial baru (*new social movement theory*). Sejalan dengan pandangan Phongpaichit,<sup>90</sup> bahwa gerakan petani skala provinsi di Indonesia bertujuan sekaligus untuk mencapai dua kepentingan *material* (tanah) dan *postmaterial* (keadilan dan demokrasi agraria). Swain (2001) juga sependapat karena perspektif teori mobilisasi sumberdaya memiliki kelenturan lebih tinggi dalam mengakomodasi konteks spesifik gerakan sosial yang terjadi di negara berkembang dan dalam menjelaskan keterkaitan antara proses-proses sosio-politik pada tingkat mikro dan meso.<sup>91</sup>

Teori mobilisasi sumberdaya mendasarkan asumsinya bahwa tindakan kolektif merupakan respon para aktor politik rasional terhadap kondisi konfliktual yang dihadapi. Kondisi tersebut (menghasilkan tekanan dan ketidakpuasan) relatif konstan dan tidak dapat menjadi faktor penentu (sebab) utama terjadinya tindakan kolektif. Tindakan kolektif dimulai ketika sumberdaya dapat dimobilisir oleh para pemimpin gerakan dan ketika kondisi sosio-politik telah terbuka terhadap mobilisasi. Gerakan berlangsung ketika dapat memobilisir sumberdaya yang cukup untuk mengimbangi kontrol negara.<sup>92</sup> Oleh karena itu, sebagai suatu

---

<sup>88</sup> Menurut Stephen (1992) istilah "popular" tersebut secara umum digunakan menunjuk pada suatu peringkat masyarakat yang secara ekonomi termarginalkan, secara politik tidak mempunyai hak suara, dan secara kultural sebagai kelompok-kelompok yang terancam, termasuk di dalamnya para penduduk local (*indigenous*), para anggota sector informal, para petani tak bertanah dan miskin tanah, dan underemployed dan unemployed. Sedangkan dalam konteks Amerika Latin, Escobar (1989) menggunakan istilah "popular" terkait pada mereka semua itu yang diciptakan oleh proses ketergantungan pada pembangunan para kapitalis (John Brohman, 1996. Op.Cit., hal. 258.).

<sup>89</sup> John Brohman. 1996. Loc.Cit., hal. 258.

<sup>90</sup> P. Phongpaichit. 1999. *Theories of Social Movements and Their Relevance for Thailand*. Position Paper for Thailand Research Fund.

<sup>91</sup> Darmawan Triwibowo (editor). 2006. *Gerakan Sosial: Wacana Civil Society bagi Demokratisasi*. Jakarta LP3ES., hal. 10.

<sup>92</sup> Steven E. Barkan and Lynne L. Snowden. 2001. Op.Cit., hal. 28.



tidakkan kolektik rasional, normal, dan instrumental terorganisir maka penguatan sumberdaya saja tidak cukup tanpa dapat memobilisirnya.<sup>93</sup>

Dalam perkembangannya perspektif teori ini dapat dikelompokkan menjadi dua model teoritis. Perbedaan keduanya terkait dengan dukungan dan penolakan terhadap teori pilihan rasional (*rational choice*) dan karya Mancur Olson berjudul "*The Logic of Collective Action* (1965)".<sup>94</sup> Pertama, adalah "*political-interactive model*" atau "*political process approach*" yang dikembangkan oleh Tilly, Gamson, dan Oberschall. Model ini menekankan pentingnya perubahan struktur peluang bagi aksi kolektif, keberadaan jaringan, serta ikatan horizontal yang telah terbangun dengan kelompok tertindas (*aggrieved group*) sebagai pelaku penentu keberhasilan gerakan sosial. Kedua, "*organizational-entrepreneurial model*" yang dikembangkan oleh McCarthy dan Zald. Model ini memandang dinamika organisasional, kepemimpinan dan pengelolaan sumberdaya merupakan faktor-faktor yang lebih penting dalam menentukan keberhasilan gerakan sosial.<sup>95</sup> Dengan demikian, pendekatan mobilisasi sumberdaya menekankan baik pada dukungan masyarakat maupun tekanan terhadap fenomena gerakan sosial. Pendekatan ini menguji beragam sumberdaya yang harus dimobilisir, keterkaitan antara gerakan sosial dengan kelompok-kelompok lain, ketergantungannya terhadap dukungan eksternal untuk sukses, dan taktik yang digunakan oleh pemegang otoritas untuk mengontrol atau menyatukan gerakan.<sup>96</sup>

Pada perkembangan awal perspektif teori ini lebih condong pada teori politik, lebih menekankan pada prinsip rasionalitas dan kepentingan individu aktor (*self-interest*) daripada aspek sosial-psikologis seperti keluhan-keluhan, solidaritas, dan ideologi. Beberapa kritik telah diterima karena mendudukkan aktivitas aktor terlalu rasional, terlalu tidak emosional, dan terlalu berorientasi politik. Tidak semua tindakan kolektif direncanakan dengan matang, dan tidak semua episode tindakan kolektif secara eksplisit berorientasi politik seperti yang diasumsikan.<sup>97</sup> Kritik tersebut kemudian mendorong perspektif teori ini menerima konsepsi-konsepsi sosial-psikologis yang sebelumnya kurang diperhatikan. Ini didasarkan pada realitas bahwa perspektif teori ini selalu menghadapi tiga

<sup>93</sup> Piotr Sztompka. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. (Terjemahan). Jakarta: Prenada Media, hal. 342.

<sup>94</sup> Martti Muukkonen. 1999. *From Deviant Phenomenon to Collective Identity: Paradigm Shifts in Social Movement Studies*. Master Thesis. Departemen of Sociology University of Joensuu. Diakses dari <http://www.cc.joensuu.fi/~muukkone/Smstudy.rtf>, diakses tanggal 9 Juli 2007.

<sup>95</sup> E. Canel. *New Social Movement Theory and Resource Mobilization Theory: The Need for Integration (continued)*. Diakses dari [http://www.idrc.ca/en/ev-69139-201-1-DO\\_TOPIC.html](http://www.idrc.ca/en/ev-69139-201-1-DO_TOPIC.html), tanggal 8 Juni 2007.

<sup>96</sup> Mayer N. Zald and John D. McCarthy. 2003. Op.Cit., hal. 16.

<sup>97</sup> Steven E. Barkan and Lynne L. Snowden. 2001. Op.Cit., hal. 25.

problem utama dalam analisis gerakan sosial, yakni problem identitas kolektif, problem kesadaran, dan problem solidaritas.<sup>98</sup> Ini berarti bahwa perspektif teori ini telah berkembang dari pendekatan strukturalisme menjadi konstruksionisme, yang sering disebut “perspektif konstruksionis sosial (*social konstruktionist perspective*)” atau “konstruksionisme sosial (*social konstruktionism*)”.<sup>99</sup>

Ada tiga elemen utama yang ditawarkan sebagai solusi, yakni: (1) merevisi konsep pelaku (*actor*) dari pandangan utilitarianisme menjadi pandangan bahwa aktor melekat secara sosial (*socially embedded actor*); (2) memperluas peranan penting mobilisasi mikro (jaringan informal) dalam interaksi bersemuka di dalam beragam konteks kelompok; dan (3) spesifikasi makna yang membangkitkan elemen-elemen oposisional dalam kultur sosio-politik pada beragam waktu, sifat dan bentuknya.<sup>100</sup>

Terkait dengan kategori aktor gerakan sosial, McCarthy dan Zald memperhatikan posisi masing-masing sebagai “*adherents*”, “*constituents*”, “*potential beneficiaries*”, “*bystanders*”, dan “*authorities*”. *Adherents* adalah individu atau organisasi yang percaya terhadap tujuan gerakan; *constituents* adalah mereka yang memberikan dukungan sumberdaya kepada organisasi gerakan sosial; dan *baystanders* adalah mereka yang bersikap netral terhadap gerakan sosial.<sup>101</sup> Sedangkan Hunt, Gamson dan Snow (1994) membagi menjadi tiga kategori aktor, yakni *protagonist*, *antagonist* dan *bystanders*. *Protagonist* mencakup semua kelompok dan kolektivitas yang mendukung gerakan atau yang merasa kepentingannya terwakili. Mereka termasuk *adherent*, konstituen, dan *beneficiaries*. Inti dari *protagonist* gerakan adalah *adherent*, yang ikut serta dalam aktivitas gerakan dalam mengejar tujuannya. Sedangkan konstituensi adalah aktor yang menjadi basis *protagonist* gerakan. Sedangkan *antagonist* adalah mereka yang berdiri sebagai oposisi terhadap konstituen dan *adherent*.<sup>102</sup>

Mobilisasi mikro tidak hanya berkaitan dengan konteks di mana identitas kolektif dan frame tindakan dikonstruksi, tetapi juga menyangkut lokus di mana lokalitas diciptakan yang mendukung terbentuknya solidaritas organisasional.

---

<sup>98</sup> Problem identitas kolektif ketika tidak mampu menjawab mengapa dan kapan karakteristik yang sama menjadi relevan bagi pengakuan timbal balik para anggota kelompok. Problem kesadaran berkenaan dengan koneksi antara relasi produksi (atau dengan negara) dan artikulasi kepentingan jangka panjang dan jangka pendek yang tidak terjadi secara otomatis. Problem solidaritas terkait kategori kepentingan kolektif yang memerlukan analisis utama tentang keuntungan kolektif apa yang diperhitungkan dan bagaimana kepentingan kolektif diakui, ditafsirkan, dan dapat mengkomando loyalitas dan komitmen (Jean L. Cohen. 1985. *Ibid.*, hal. 685)

<sup>99</sup> Steven E. Barkan dan Lynne L. Snowden. 2000. *Op.cit.*, hal. 25.

<sup>100</sup> Aldon D. Morris dan Carol McCurg Muller (Editors). 1992. *Frontier in Social Movement Theory*. New. Haven and London: Yale University Press., hal. 6.

<sup>101</sup> John D. McCarthy and Mayer N. Zald. 1977. *Op.Cit.*, hal. 1220-1221.

<sup>102</sup> Doug McAdam dan David A. Snow. 1997. *Op.Cit.*, hal. xxii-xxiv.

Proses mobilisasi mikro secara eksplisit berada di dalam sistem sosial yang memperkuat ketimpangan struktural. Perjuangan pada level mikro terkait dengan pelembagaan kepercayaan dan komitmen loyalitas. Perjuangan berperan dalam meningkatkan kesadaran, dalam proses konfrontasi dan polarisasi melalui mana kepercayaan dan identitas kolektif dimodifikasi dan ditransformasikan dalam gerakan.<sup>103</sup>

Upaya untuk membedakan tindakan individu dalam bentuk “rasional” dan “emosional” atau “irasional” sebenarnya menolak kompleksitas perilaku manusia itu sendiri. Aspek sosial-psikologis (kognisi dan afeksi sosial) dan sosio-kultural berada dalam kesatuan struktur schemata pelaku. Pertimbangan biaya dan keuntungan itu penting, tetapi menterjemahkan hubungan sosial obyektif ke dalam kelompok kepentingan yang mengalaminya secara subyektif juga penting. Aspek-aspek seperti pengalaman, nilai-nilai inti dan kepercayaan, filsafat kehidupan, dan ideologi selalu berada dalam proses interpretasi (dan afeksi) yang terkait dengan tindakan, pemahaman terhadap peluang dan tantangan di dalam lingkungan sistem sosio-politik.<sup>104</sup>

Cohen (1985) mengajukan pentingnya memperhatikan konsep identitas kolektif, solidaritas, dan kesadaran. Ketiganya menyangkut proses hubungan antara individu dengan sistem sosio-kultural yang menurut Gamson dapat dilihat pada level jaringan informal (mobilisasi mikro).<sup>105</sup> Klandermans mengidentifikasi lima konsep utama gerakan sosial yang memperhatikan aspek-aspek simbolik dari mobilisasi, yakni liberasi kognitif, diskursus publik dan paket ideologi, formasi dan mobilisasi konsensus, pensejajaran frame (*frame alignment*), dan identitas kolektif.<sup>106</sup> Ia juga membedakan antara tiga proses konstruksi makna pada level

---

<sup>103</sup> Taylor dan Whittier mengajukan konsepsi utama bagaimana komunitas oposisional mentransformasi para anggota sebagai pelaku politik. Komunitas oposisional atau komunitas identitas politik didefinisikan sebagai “jaringan individu dan kelompok secara longgar berbasis institusional, keragaman tujuan dan pelaku, dan identitas kolektif yang menawarkan kepentingan bersama berposisi dengan kelompok dominan” (Aldon D. Morris dan Carol McCurg Muller. Editors. 1992. Ibid., hal. 13).

<sup>104</sup> Joann Carmin dan Deborah B. Balsler. 2002. *Selecting Repertoires of Action in Environmental Movement Organizations: An Interpretive Approach*. Sage Publication: <http://www.sagepublications.com>.

<sup>105</sup> Aldon D. Morris dan Carol McCurg Muller. Editors. 1992. Op.Cit., hal. 54.

<sup>106</sup> Liberasi Kognitif (*cognitive liberation*) menurut McAdam (1982) menunjuk pada transformasi kesadaran antar partisipan potensial dalam tindakan kolektif. Ini merupakan suatu perubahan kesadaran dalam tiga hal: (1) sistem yang kehilangan legitimasi, (2) orang-orang yang tadinya fatalistik kemudian mereka mulai menuntut perubahan, dan (3) mereka mengembangkan perasaan baru terhadap kemajuan politik. Diskursus publik (*public discourse*) oleh Gamson (1989) dikaitkan dengan peranan media massa untuk memahami formasi dan aktivasi mobilisasi potensial. Peranan media massa juga penting dalam mendesiminasikan paket ideologi (*ideological packages*) gerakan. Pada awalnya Klandermans (1984) membedakan antara mobilisasi konsensus dan mobilisasi tindakan. Kemudian dia (1988) membedakan mobilisasi konsensus sebagai upaya sengaja yang dilakukan pelaku sosial untuk menciptakan konsensus antar bagian dari populasi, dan formasi konsensus menunjuk pada bertemuanya makna yang tidak direncanakan dalam jaringan sosial dan subkultur. Pensejajaran frame (*frame alignment*) menurut Snow (1986) menunjuk pada frame kognitif individu partisipan menjadi tersejajarkan dengan frame ideologi suatu organisasi gerakan sosial. Identitas kolektif (*collective identity*) menunjuk pada perasaan kelompok yang mendefinisikan diri sebagai siapa “kita” (*ingroup*) (Aldon D. Morris dan Carol McCurg Muller. Editors. 1992. Ibid., hal. 79-80).

yang berbeda di dalam konteks gerakan, yakni diskursus publik, komunikasi persuasif, dan meningkatnya kesadaran selama episode tindakan kolektif. Masing-masing memiliki dinamikanya sendiri, saling mempengaruhi, sehingga berada dalam proses konstruksi dan rekonstruksi. Seperti proses membentuk dan mentransformasikan kepercayaan kolektif berada dalam cara berbeda. Pada level pertama melalui penyebaran jaringan konstruksi makna; pada level kedua melalui upaya sengaja melakukan persuasi; dan pada level tiga melalui diskusi antar partisipan.<sup>107</sup>

Perkembangan teori mobilisasi sumberdaya yang memperhatikan aspek sosial psikologis berhasil dikembangkan oleh McAdam, McCarthy dan Zald (1996),<sup>108</sup> dan kemudian diperkuat oleh McAdam, Tarrow dan Tilly (2001).<sup>109</sup> Mereka mencoba melakukan sintesis di antara ketiga konsepsi utama yang saling terkait secara dinamis dan yang menentukan muncul dan berkembangnya gerakan sosial, yakni: (1) struktur peluang politik dan tekanan-tekanan terhadap gerakan sosial; (2) bentuk-bentuk organisasi (baik formal maupun informal) yang dapat digunakan untuk melakukan gerakan; dan (3) proses-proses kolektif dari interpretasi, atribusi dan konstruksi sosial yang memediasi antara peluang dan tindakan. Ketiga faktor utama tersebut diringkas dalam tiga konsep, yakni: struktur mobilisasi, struktur peluang politik, dan pemingkai kolektif.<sup>110</sup>

Meskipun pendekatan sintesis tersebut masih cenderung bias struktural, hingga saat ini masih mendominasi studi gerakan sosial karena mampu menjelaskan dan menawarkan prediksi kuat berbasis dukungan fakta empiris.<sup>111</sup> Lagi pula, ketiga konsepsi utama tersebut telah terbukti berguna dalam menjelaskan hasil gerakan sosial. Akan tetapi, dengan banyak kritik yang ditujukan padanya karena ruang lingkupnya yang terlalu luas, maka setiap penelitian yang menggunakan pendekatan ini dihadapkan pada pentingnya mengkonsentrasikan sesuai dengan lingkup gerakan sosial yang diteliti.

---

<sup>107</sup> Hank Johnston dan Bert Klandermans (Editor's). 1995. *Social Movements and Cultur*. Monnieapolis: University of Minnesota Press., hal. 10.

<sup>108</sup> Doug McAdam, John D. McCarthy dan Mayer N. Zald (editor's). 1996. *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Pemingkaians*. USA: Cambridge University Press., hal. 2.

<sup>109</sup> Doug McAdam, Sidney Tarrow dan Charles Tilly. 2001. *Dynamics of Contention*. New York: Cambridge University Press., hal. 17.

<sup>110</sup> Doug McAdam, John D. McCarthy dan Mayer N. Zald (editor's). 1996. Op.Cit., hal. 2.

<sup>111</sup> Brayden King. 2008. *A Social Movement Perspective of Stakeholder Collective Action and Influence*. Dimuat dalam Jurnal Busines and Society: <http://bas.sagepub.com>. Sage Publication., hal. 26.

### 2.3.1. Struktur Mobilisasi Sumberdaya

Struktur mobilisasi sumberdaya menunjuk pada jaringan antar aktor atau antar kelompok aktor dari bentuk informal hingga dalam bentuk organisasi formal, merupakan rangkaian posisi dalam struktur mobilisasi mikro dan meso. McCarthy membedakan antara struktur mobilisasi formal (organisasi) dan informal (unit keluarga, jaringan pertemanan, asosiasi tenaga sukarela, unit-unit tempat bekerja, dls).<sup>112</sup>

Mobilisasi sumberdaya merupakan proses di mana suatu organisasi menjamin kontrol kolektif terhadap sumberdaya. Sumberdaya gerakan memiliki banyak kegunaan dan terdapat pandangan yang beragam. Rogers (1974) membedakan antara "*instrumental resources*" yang digunakan dalam pengaruh aktual, dan "*infra-resources*" merupakan kondisi yang berguna bagi sumberdaya instrumental. Jenkins (1982) juga membedakan antara "*power resources*" yang menyediakan alat untuk melakukan kontrol tindakan-tindakan terhadap target dan "*mobilizing resources*" sebagai fasilitas yang tersedia untuk memobilisasi *power resources*.<sup>113</sup>

Sebagian ahli menolak gambaran instrinsik dari sumberdaya karena dianggap membatasi nilainya. Sumberdaya sebagai "*assets*" yang sering dimobilisasi dalam gerakan-gerakan sosial dan pandangan tentang *resources* juga beragam. McCarthy dan Zald (1977) menunjuk pada uang, fasilitas, tenaga kerja, dan legitimasi; Etzioni membedakan antara sumberdaya *coercive* (senjata, kekuatan tentara, teknologi manipulatif), *utilitarian* (barang, pelayanan informasi, uang) dan *normative* (loyalitas, kewajiban); sedangkan Tilly menunjuk pada tanah, tenaga kerja, kapital, dan keahlian teknis.<sup>114</sup> Kemudian Freeman (1979) membedakan antara "*tangible assets*" seperti uang, fasilitas dan peralatan komunikasi, dengan "*intangible assets*" atau "*human assets*" sebagai basis utama gerakan sosial, mencakup sumberdaya terspesialisasi seperti organisasi dan keahlian legal dan para pendukung yang tidak terspesialisasi.<sup>115</sup>

### 2.3.2. Struktur Peluang Politik

Berkembangnya konsepsi struktur peluang politik didasarkan pada alasan bahwa tidak semua teoritis tradisi mobilisasi sumberdaya menerima teori Olson

---

<sup>112</sup> Doug McAdam, John D. McCarthy dan Mayer N. Zald (editor's). 1996., Op. Cit., hal. 141.

<sup>113</sup> J. Craig Jenkins. 1983. op.cit., hal. 533.

<sup>114</sup> Charles Tilly. 1978. *From Mobilization to Revolution*. Amerika Serikat: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., hal. 69.

<sup>115</sup> J. Craig Jenkins. 1983. Op.Cit., hal. 533.

tentang pilihan individual sebagai pelaku utama dalam tindakan kolektif. Faktor lain seperti kesiapan struktural dan struktur dukungan atau hambatan politik juga penting dipertimbangkan. Sidney Tarrow (1994) menghubungkan antara analisis level medium atau meso (kelompok) dengan analisis level makro (struktural).<sup>116</sup> Variabel yang digunakan adalah derajat keterbukaan suatu *polity*, keragaman elit politik, toleransi terhadap aksi protes, dan kapabilitas implementasi kebijakan pemerintah. Kemudian Herbert Kitschelt (1986) mengoperasionalkan sebagai “derajat keterbukaan suatu rezim terhadap tuntutan-tuntutan baru” berbagai kelompok yang mempengaruhi ukuran, strategi, dan taktik gerakan.<sup>117</sup> Baik Tarrow maupun Kitschelt keduanya cenderung menganggap bahwa peluang politik bersifat obyektif. Pandangan ini melengkapi konseptualisasi Klandermans bahwa struktur peluang politik menunjuk pada derajat kondisi bagi munculnya gerakan sosial.<sup>118</sup>

Keterkaitan antara struktur peluang politik dengan struktur mobilisasi sumberdaya telah dikaji secara intensif oleh Kreisi (et.al. 1992), Van der Heijden (et.al 1991), Koopmans dan Rucht (1995), dan Tarrow (1995). Mereka menyimpulkan bahwa ketika sistem politik bersifat tertutup terhadap klaim-klaim masyarakat, maka gerakan sosial yang terjadi agak kecil skalanya tetapi bersifat radikal, dan ketika terjadi sebaliknya maka aktivitas kelompok dalam gerakan sosial memungkinkan menjadi lebih besar tetapi kurang radikal.<sup>119</sup>

Betapapun kuatnya struktur mobilisasi sumberdaya tidak pernah bebas dari tekanan-tekanan atau hambatan. Hal ini menunjuk pada keterkaitan antara “*institutionalized politics*” yang menentukan struktur peluang dan hambatan bagi berkembangnya gerakan-gerakan sosial.<sup>120</sup> Jadi ruang dan proses politik menjadi

---

<sup>116</sup> Pada karya sebelumnya Tarrow menyatakan bahwa gerakan-gerakan sosial dibentuk secara struktural berbasis pada “*opportunities*” baik sebagai pendukung maupun sebagai penghambat. Kemudian definisinya tentang gerakan sosial berubah dari sebelumnya, menjadi: “perjuangan kolektif yang dilakukan oleh kelompok orang dengan tujuan bersama dan solidaritas dalam memelihara keberlanjutan interaksinya dengan para elit, para penentang dan para pemegang otoritas” (Jeffrey Beasley. 1997. *Social Movement Organizations and Collective Action in Mexico: a Comparative Analysis of Urban and Rural Cases*. University of Kansas. Diakses dari [http://www.168.96.200.17/arlibroslasa/97\\_beasley.pdf](http://www.168.96.200.17/arlibroslasa/97_beasley.pdf)., pada tanggal 8 Juni 2007.)

<sup>117</sup> Jeffrey Beasley. 1997. Ibid.

<sup>118</sup> Ulf Hjlmar.1996. *Constructivist Analysis and Movement Organizations: Conceptual Clarifications*. Acta Sociologica 1996 Vol. 39, pp. 169-186. Sage Publications dalam <http://www.sagepublications.com>. Diakses tanggal 20 Nopember 2007.

<sup>119</sup> Ulf Hjlmar.1996. Ibid.

<sup>120</sup> Perkembangan ini muncul perspektif atau pendekatan baru dengan sebutan beragam, yaitu teori proses politik (*political process theory*), struktur peluang politik (*political opportunity structure*), teori peluang politik terstruktur (*structured political opportunity theory*). Semua teori tersebut mengandung bias struktural, menganggap bahwa para pelaku rasional berada dibawah tekanan-tekanan institusional dan lingkungan, yang membatasi kemampuan untuk mengejar tujuan-tujuannya (Doug McAdam dan W. Richard Scott, 2002. *Organization and Movements*. Paper presented at the Annual Meetings of the American Sociological Association, Chicago, IL, August, 2002. Revised draft of a paper prepared for an invitational Conference on Organizations and Social Movements held at the University of Michigan, Ann Arbor, May 10 -11, 2002).

tujuan utama dilakukan gerakan yang dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam mempengaruhi keputusan legal atau politik yang lebih baik bagi pencapaian kepentingan gerakan.<sup>121</sup> Sydney Tarrow menegaskan bahwa struktur peluang politik selalu berhubungan dengan sumberdaya eksternal. Sumberdaya ini dipergunakan sejalan dengan terbukanya akses kepada kelembagaan politik dan perpecahan di dalam tubuh para elit politik.<sup>122</sup>

Menurut Kenneth T. Andrews, struktur peluang politik merupakan dimensi pelaku eksternal dari proses politik, meliputi peranan sekutu politik dan pendukungnya, ketersediaan akses di dalam sistem politik, kapabilitas dan kecenderungan negara untuk melakukan tekanan, pecahnya dan konflik antar para elit kekuasaan.<sup>123</sup> Struktur peluang politik merupakan determinan bentuk gerakan sosial dan juga dinamikanya yang dapat dibedakan menjadi “struktur tertutup” dan “struktur terbuka”, atau struktur keluaran (*output*) yang “kuat” dan “lemah”. Perbedaan tersebut dilihat dari konfigurasi spesifik tentang sumberdaya, susunan institusional, dan kejadian-kejadian dalam dinamika mobilisasi. Kemudian Sidney Tarrow (1994) menambahkan aspek semi formal dari struktur terbuka tersebut dalam akses kekuasaan, perubahan dalam jalur aturan, tersedianya para elit berpengaruh, dan perpecahan di dalam dan antar elit kekuasaan itu sendiri.<sup>124</sup>

Dengan demikian, perubahan struktur peluang politik berhubungan dengan siklus gerakan sosial. Secara lebih rinci, McAdam (1996) merumuskan struktur peluang politik dalam empat aspek berikut: (1) keterbukaan relatif dari sistem politik yang melembaga, (2) kestabilan relatif dari ikatan-ikatan para elit yang menyokong suatu kebijakan tertentu, (3) ketersediaan persekutuan-persekutuan baru yang berpengaruh, dan (4) kapabilitas negara dan kecenderungan untuk dapat menekan setiap upaya mobilisasi kekuatan masyarakat.<sup>125</sup> Struktur peluang politik ini dapat dianggap bertanggung jawab dalam peningkatan atau

---

<sup>121</sup> F. Dubet dan H.L. Thaler. 2004. *Introduction: The Sociology of Collective Action Reconsidered*. *Current Sociology*, July 2004, Vol. 52(4): 557-573 SAGE Publications. Download dari [www.sagepublications.com](http://www.sagepublications.com), hal. 559.

<sup>122</sup> Sydney Tarrow. 1998. *Power in Movement Social Movement and Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press., hal. 20.

<sup>123</sup> Tilly (1978) McAdam (1982), Morris dan Herring (1987), dan Tarrow (1994), semuanya menyatakan bahwa struktur peluang politik terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, dan dinamika politik yang membentuk peluang-peluang dan tekanan-tekanan terhadap mobilisasi (Kenneth T. Andrews. 1997. *The Impacts of Social Movements on the Political Proses: The Civil Rights Movement and Black Electoral Politics in Mississippi*. *American Sociological Review*, 1997, Vol.62 (October:800-819):<http://www.UNC.edu/cta1/ASR97.pdf>.pdf. Download 8 Juni 2007).

<sup>124</sup> Todd Landman. 1999. *Organization and Impact: The Green Movement in Comparative Perspective*. <http://www.essex.ac.uk/UCPR/events/joints/sessions/paper/archivemennheim/w21/landman.pdf>.pdf. Download 8 Juni 2007.

<sup>125</sup> Todd Landman. 1999. *Ibid*.

penurunan resiko atau keuntungan dari berbagai upaya mobilisasi kekuatan masyarakat. Melalui persepsi para pemimpin gerakan dapat disimpulkan derajat ancaman dan keuntungan berhubungan dengan keputusan kebijakan publik, kesempatan berhasilnya mobilisasi, dan bagaimana otoritas negara memfasilitasi atau menekan mobilisasi tersebut.

Asumsi utama penjelasan tentang struktur peluang politik adalah bahwa mobilisasi gerakan dimungkinkan ketika terjadi perubahan iklim politik yang membuat tindakan kolektif lebih memungkinkan untuk sukses. Kitschelt (1986), Sidney Tarrow (1998), Jenkins (et.al., 2003), Mayer (2004) dan Mayer dan Minkoff (2004), menyimpulkan bahwa peluang politik meningkat pada level penerimaan para elit terhadap aksi-aksi gerakan atau melakukan penstrukturan kembali hubungan-hubungan kekuasaan yang ada.<sup>126</sup> Misalnya, situasi politik kompetitif dan perubahan politik dapat menciptakan peluang-peluang politik untuk melakukan mobilisasi dan aksi gerakan. Sebaliknya, tekanan politik berpengaruh terhadap menurunnya aktivitas gerakan khususnya yang tujuannya lebih radikal.<sup>127</sup>

Hanspeter Kriesi mengkritik pandangan tentang struktur peluang politik dalam gerakan sosial, karena dianggap bersifat statik dan konstan. Menurutnya, struktur peluang politik bersifat dinamis dan selalu terbuka terhadap perubahan sebagai hasil kontrol para elit baru di dalam sistem atau tercapainya konsolidasi elit lama dengan berbagai modifikasi baru. Maka perlu dipertimbangkan struktur kelembagaan formal, informal dan berbagai strategi perubahan.<sup>128</sup>

### 2.3.3. Pembingkaihan (Framing) Kolektif

Konsep pembingkaihan kolektif lebih menunjuk pada dimensi sosial-psikologis, dan mampu melengkapi kelemahan konsepsi struktur mobilisasi dan struktur peluang politik. Konsepsi struktur peluang politik juga banyak dikritik karena cenderung “*overextend*” dan “bias struktural”.<sup>129</sup> Konsepsi struktur

---

<sup>126</sup> Susan Olzak dan Emily Ryo. 2004. *Organization Diversity, Vitality and Outcomes in the Civil Right Movement: Running Head: Organizational Diversity in the Civil Rights Movement*. Makalah disampaikan pada “Annual Meeting of the American Sociological Association in San Francisco, 2004. Download dari <http://www.stanford.edu/dept/soc/people/faculty/olzak/diversity.paper06.pdf>, 8 Juni 2007.

<sup>127</sup> Susan Olzak dan Emily Ryo. 2004. *Ibid.*

<sup>128</sup> J. Craig Jenkins dan Bert Klandermans (Editor's). 1995. *The Politics of Social Protest Comparative Perspective on States and Social Movement*. Menneapolis: University of Minnesota Press., hal. 168.

<sup>129</sup> Jeffrey Beasley. 1997. *Op.Cit.* Dia juga mengemukakan bahwa secara konseptual, pendekatan teoritis yang memfokuskan pada peluang politik kurang memuaskan karena beberapa alasan: (1) menyangkal posisi agensi dalam organisasi gerakan dengan memotret keberhasilan gerakan yang sangat ditentukan oleh kekuatan luar, dan (2) kurang memperlakukan kemampuan organisasi gerakan dalam memobilisasi individu. Dengan memperlakukan peluang politik sebagai variabel bebas menjadi kurang mampu menjelaskan mengapa organisasi gerakan mengambil keuntungan terhadap peluang politik yang ada pada



peluang politik lebih menekankan keterbukaan struktural yang menyebabkan terjadinya mobilisasi daripada melihat proses dengan mana para pelaku merasa gagal memanfaatkan peluang-peluang politik tersebut.<sup>130</sup> Pendekatan peluang politik tidak secara sistematis merupakan refleksi atas konteks sosial yang lebih luas di mana organisasi gerakan terlekat di dalamnya dan tidak memiliki artikulasi yang cukup jelas bagaimana organisasi gerakan merespon perubahan peluang politik yang ada. Disini perhatian terhadap peranan pelaku dalam proses interpretasi simbol dan makna gerakan menjadi penting. Proses interpretasi dilakukan dengan berbagai cara dan dengan menggunakan berbagai media.

Pembingkai kolektif merupakan proses interpretasi kolektif, atribusi, dan konstruksi sosial yang memediasi antara peluang politik dan tindakan dalam gerakan sosial.<sup>131</sup> Proses pembingkai kolektif lebih menekankan pada bagaimana individu memutuskan berpartisipasi dan bagaimana mereka menginterpretasikan makna-makna yang terkait dengan perilaku kolektif. Snow et.al. (1986), Snow dan Benford (1988) dan Benford dan Snow (2000) menekankan proses pembingkai sebagai strategi pemaknaan dan definisi bersama terhadap klaim-klaim identitas individual dan rasa tanggung jawab kultural terhadap suatu sebab. Pensejajaran bingkai (*frame alignment*) berguna untuk menggambarkan bagaimana keterkaitan timbal balik antara bingkai kognitif individu partisipan dengan bingkai ideologis (*frame ideological*). *Frame alignment* lebih fokus pada derajat kesamaan antara pilihan bingkai-bingkai individu partisipan dan organisasi gerakan, tidak menyoroti strategi organisasi gerakan tetapi lebih tepatnya pada beragam ideologis.<sup>132</sup>

Proses pembingkai menurut Doug McAdam dan W. Richard Scott (2002) mengandung elemen-elemen simbolik yang menjadi penghubung antara parameter struktural dan para pelaku (individual). Pelaku menafsirkan situasi yang dihadapi, memikirkan perbaikan, dan mengusulkan tindakan-tindakan perubahan yang akan dilakukan. Pembingkai tindakan kolektif tidak bersifat statis, tetapi terus dikonstruksi, dikonteskan, diproduksi, ditransformasikan, dan atau berubah sepanjang berlangsungnya aktivitas gerakan sosial, serta tidak terjadi dalam kondisi kevakuman struktural dan kultural. Proses ini dipengaruhi

---

waktu tertentu. Teori ini juga mengabaikan kemungkinan organisasi gerakan mempengaruhi berubahnya peluang politik yang ada dan bahkan menciptakannya.

<sup>130</sup> Kritik tersebut dikemukakan oleh Jeff Goodwin dan James Jasper dalam makalahnya berjudul "Caught in a winding, anarling vive" dalam "Sociological Forum" tahun 1999 pada simposium kecil tentang gerakan sosial (Douglas Bevington dan Chris Dixon. 2005. *Movement-relevant Theory: Rethinking Social Movement Scholarship and Activism*. Social Movement Studies. Vol.4, No.3, 185-208, Desember 2005).

<sup>131</sup> Doug McAdam dan W. Richard Scott. 2002. Op.cit.

<sup>132</sup> Ulf Hjarv. 1996. Op.Cit.

oleh sejumlah elemen sistem sosio-kultural di mana proses tersebut terlekat di dalamnya.<sup>133</sup>

Keterkaitan antara pemingkaian kolektif dengan struktur mobilisasi sumberdaya dan struktur peluang politik terletak pada perubahan-perubahan dalam struktur peluang politik khususnya perubahan dalam struktur kelembagaan dan atau hubungan informal suatu sistem politik, dan perubahan dalam struktur mobilisasi gerakan. Perangkat kultural merupakan basis sumberdaya gerakan yang dapat dipakai sebagai dasar inovasi dan hasilnya dapat dipakai sebagai kerangka tindakan kolektif.

Keterkaitan interaktif antara pemingkaian kolektif dengan struktur peluang politik bukan berarti bahwa peluang-peluang politik secara murni merupakan entitas yang terkonstruksi secara sosial. Pemingkaian peluang politik merupakan komponen sentral dari bingkai tindakan kolektif, meskipun di dalamnya terdapat unsur “*given*”, tetapi tidak mengabaikan kapabilitas aktif pelaku gerakan. Artinya, ketika para pelaku menafsirkan ruang politik dalam cara-cara yang lebih menekankan pada peluang daripada tekanan-tekanan, mereka dapat menstimulir tindakan-tindakan yang dapat merubah peluang politik tersebut, dan bingkai peluang politik mereka menjadi suatu “*self-fulfilling prophecy*”.<sup>134</sup>

Dalam pemingkaian kolektif, gerakan sosial tidak dipandang hanya menyangkut ide-ide dan makna-makna deterministik, merupakan kejadian yang tidak terantisipasi, dan sebagai ideologi yang sudah ada.<sup>135</sup> Lebih dari itu, para pelaku dipandang sebagai penandaan para agen yang secara aktif terlibat memproduksi dan memelihara makna-makna yang dikonstruksi, dan terwujud dalam tindakan yang diorientasikan pada seperangkat kepercayaan, nilai-nilai, dan makna-makna kultural yang mengilhami dan meligitimasi aktivitas gerakan sosial.<sup>136</sup> Oleh karena itu, bingkai kolektif bukan hanya berupa kumpulan (*agregate*) sikap dan persepsi individu, tetapi juga merupakan hasil dari proses

---

<sup>133</sup> Proses pemingkaian banyak digunakan dalam disiplin ilmu lain, seperti dalam psikologi, khususnya psikologi kognitif, ilmu bahasa dan analisis diskursus, studi komunikasi dan media, dan ilmu politik dan studi kebijakan. Di dalam disiplin sosiologi dipengaruhi oleh Irving Goffman (1974) dalam bukunya berjudul “*Framing Analysis*”. Saat ini perspektif teori pemingkaian semakin diakui, disamping perspektif teori mobilisasi sumberdaya dan perspektif teori peluang politik atau proses politik, dalam memahami karakter dan masalah gerakan sosial (Robert D. Benford dan David A. Snow. 2000. *Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assesment*. Annu. Rev.Sociol.26:611-39. Copyright @ 2000 by Annual Review s. All rights reserved, hal. 611-612).

<sup>134</sup> Robert D. Benford dan David A. Snow. 2000. *Ibid.*,hal. 631.

<sup>135</sup> Dibedakan antara ideologi dominan yang ditentang dengan ideologi gerakan. Ideologi dominan sebagai tantangan, sedangkan ideologi gerakan sebagai sumberdaya dalam kaitannya dengan proses pemingkaian dan kerangka tindakan kolektif.

<sup>136</sup> Robert D. Benford dan David A. Snow. 2000. *Op.Cit.*, hal. 613.

negosiasi makna-makna bersama.<sup>137</sup> Hasilnya adalah komitmen terhadap hasil proses pembingkaihan yang menjadi acuan bersama dalam melakukan tindakan kolektif, meskipun kondisi ini tidak berlaku ketat.

Menurut Robert D. Benford dan David A. Snow, kerangka tindakan kolektif terkait dengan proses pembingkaihan, terdiri dari dua karakteristik utama, yaitu: 1) menunjuk pada tindakan yang berorientasi fungsi sebagai tugas pembingkaihan inti dari organisasi gerakan sosial; dan 2) menunjuk pada interaktif, proses diskursif yang menyertainya dan yang melahirkan tindakan kolektif. Pembingkaihan inti terdiri dari tiga bagian, yaitu "*pembingkaihan diagnostik*" (masalah identifikasi dan atribusi), "*pembingkaihan prognostik*", dan "*pembingkaihan motivasional*". Dengan mengejar tugas pembingkaihan inti, para pelaku gerakan menyelesaikan masalah yang saling terkait dengan "mobilisasi konsensus" dan "mobilisasi tindakan".<sup>138</sup> Dalam pembingkaihan diagnostik memfokuskan pada perkembangan dan artikulasi sebab gerakan, yang oleh Gamson menunjuk pada "*injustice frame*". Pembingkaihan prognostik menekankan pada artikulasi pemecahan masalah, paling tidak berupa rencana dan strategi gerakan. Sedangkan pembingkaihan motivasional menunjuk pada kesediaan untuk melakukan tindakan atau alasan logis terlibat dalam tindakan kolektif untuk melakukan perubahan (perbaikan), termasuk di dalamnya mengkonstruksi kosa kata terhadap alasan-alasan tersebut.<sup>139</sup>

## **2.4. Dinamika Gerakan Petani**

### **2.4.1. Organisasi Gerakan Petani**

Sebagaimana pandangan McCarthy dan Zald (1977), dibedakan antara gerakan petani dan organisasi gerakan petani. Organisasi gerakan petani lebih kompleks berbentuk organisasi formal yang mengidentifikasi tujuan-tujuannya dengan pilihan terhadap suatu gerakan sosial dan berusaha melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Ini menunjuk pada bentuk organisasi profesional yang memandang bahwa dinamika organisasional, kepemimpinan dan pengelolaan sumberdaya mobilisasi menjadi faktor diterminan gerakan petani.<sup>140</sup>

---

<sup>137</sup> Robert D. Benford dan David A. Snow. 2000. *Ibid.*, hal. 614.

<sup>138</sup> "Mobilisasi konsensus" adalah terjadinya kesepakatan antar aktor terlibat untuk siap melakukan tindakan kolektif, sedangkan "mobilisasi tindakan" terjadi selama proses aksi-aksi kolektif berlangsung (Robert D. Benford dan David A. Snow. 2000. *Ibid.*, hal. 615.

<sup>139</sup> Robert D. Benford dan David A. Snow. 2000. *Ibid.*, hal. 615-617.

<sup>140</sup> M. Kauffman dan HD Alfonso (eds). 1997. *Community Power and Grassroots Democracy: The Transformation of Social Life*. Zed Book.

Pandangan Charles Tilly lebih lentur bahwa setiap gerakan kolektif adalah terorganisir meskipun sangat sederhana. Gerakan petani dapat dilihat dari perkembangan kualitas organisasionalnya ditandai dengan semakin menguatnya identitas dan jaringan antar pelaku. Menurut Tilly, semakin ekstensif identitas bersama dan jaringan internal suatu kelompok, maka semakin terorganisir kelompok tersebut.<sup>141</sup> Pandangan Tilly tersebut sejalan dengan konsep mobilisasi mikro dari McAdam. Munculnya bangunan jaringan informal berkembang menjadi organisasi formal merupakan bagian dari dinamika proses organisasional, di mana aktivitas para pelaku gerakan dalam kehidupan sehari-hari secara terus menerus mereproduksi struktur kelompok untuk dapat dimobilisir.<sup>142</sup>

Menurut Scott (1993:305), gerakan petani sebagai gerakan sosial memiliki ciri-ciri antara lain: (a) lebih terorganisir, sistematis, dan kooperatif; (b) berprinsip atau tanpa pamrih; (c) memiliki akibat-akibat revolusioner; dan (d) mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi.<sup>143</sup> Kemungkinan terjadinya gerakan petani tersebut menurut Dahrendorf dipengaruhi oleh tiga prasyarat kondisional, yaitu: (1) kondisi teknis berupa munculnya sejumlah orang tertentu yang mampu merumuskan dan mengorganisir kepentingan *latent* menjadi kepentingan *manifest*; (2) kondisi politik berupa ada tidaknya kebebasan politik yang diberikan oleh masyarakat; dan (3) kondisi sosial berupa adanya sistem komunikasi yang memungkinkan para anggota dari suatu kelompok selalu berkomunikasi dengan mudah.<sup>144</sup> Pandangan Dahrendorf tersebut dimodifikasi oleh Ngadisah, menjadi syarat kepemimpinan (kondisi teknis), syarat politik (kondisi politik), syarat teknis (kondisi sosial), dan syarat lingkungan strategis.<sup>145</sup>

Menyimak pendapat di atas berarti bahwa wadah organisasi dapat menjadi katalisator penting dalam aksi kolektif petani. Melalui organisasi gerakan dapat memproduksi isu-isu strategis petani. Kemiskinan petani, misalnya tidak dapat menjadi suatu realitas emosional kecuali jika diartikulasikan sebagai keluhan dan ketidakpuasan. Oleh karena itu, akumulasi ketidakpuasan petani dimungkinkan sebagai fenomena yang diproduksi atau dikondisikan. Terdapat beberapa variabel utama yang mempengaruhi perkembangan struktur gerakan, yakni sifat gerakan dan tujuannya (ekspresif atau instrumental, isu tunggal atau jamak),

---

<sup>141</sup> Charles Tilly. 1978. Op.Cit., hal. 63.

<sup>142</sup> Hanspeter Kriesi. 1988. Op.Cit.

<sup>143</sup> Mustain. 2007. Op.Cit., hal. 24.

<sup>144</sup> Nasikun. 1991. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press., hal. 21-22.

<sup>145</sup> Ngadisah. 2003. *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*. Yogyakarta: Pustaka Raja., hal. 309.

bentuk proses rekrutmen (individu atau blok), peranan pemimpin dalam tahapan formatif, dan pengaruh pihak ketiga.

McCarthy dan Zald (1987) memperhatikan keterkaitan antara struktur dan proses yang di dalamnya terdapat unsur kepemimpinan, struktur administratif, insentif partisipasi, dan alat untuk memperoleh sumberdaya dan dukungan.<sup>146</sup> Dalam konteks memahami maksud, tujuan dan identitasnya, McCarthy dan Zald (1977) membedakan antara model sentralisasi dan desentralisasi. Jika tujuan utama gerakan adalah perubahan personal, maka lebih efektif menggunakan model struktur desentralisasi dengan pembagian kerja minimal, karena dapat membangkitkan ikatan-ikatan sosial dan perasaan solidaritas. Sedangkan jika tujuan utama gerakan adalah perubahan institusional, maka model struktur tersentralisir dengan pembagian kerja yang jelas menjadi lebih efisien, karena berbagai keputusan dapat dibuat lebih cepat.<sup>147</sup>

Pandangan McCarthy dan Zald nampaknya mengarah pada perbedaan karakteristik antara organisasi kolektivistik (struktur desentralisasi) dan organisasi birokratis (struktur sentralisasi). Rothschild dan Whitt (1979) merumuskan tipe ideal organisasi gerakan yang membedakannya dari organisasi birokratis berdasarkan aspek otoritas, aturan, kontrol sosial, hubungan sosial, kriteria rekrutmen dan kemajuan, struktur insentif, stratifikasi sosial, dan meminimalisir perbedaan.<sup>148</sup> Menurut Zald dan Ash (1966),<sup>149</sup> struktur organisasi sentralisasi lebih efektif bagi perubahan kelembagaan, tetapi lebih sulit dalam mendorong partisipasi rakyat. Sebaliknya, struktur organisasi desentralisasi lebih mudah merekrut anggota, mencapai kepuasan lebih besar dan dalam memelihara kelompok, tetapi kurang mampu mencapai tujuan strategis. Kepemimpinan individual memainkan peranan sentral di dalam tahapan formatif, dan sebagai konsekuensinya struktur organisasinya cenderung lebih hirarkhis dan terpusat.

---

<sup>146</sup> Doug McAdam dan Scott, W. Richard. 2002. Op.Cit., hal 5.

<sup>147</sup> Abigail A. Fuller. 1989. *The Structure and Process of Peace Movement Organizations: Effects on Participation*. Departement of Sociology, University of Colorado, Boulder. Diakses dari [http://www.colorado.edu/conflict/full\\_text\\_search](http://www.colorado.edu/conflict/full_text_search), tanggal 15 Juni 2007.

<sup>148</sup> Standar ukurannya adalah: 1) otoritas tetap berada di dalam kolektivitas daripada berada di dalam individu atau posisi. Keputusan dibuat berdasarkan proses konsensus dari semua partisipan; 2) aturan-aturan diminimalisir. Keputusan dibuat secara ad hoc dan lebih berbasis pada etika substantif daripada berbasis pada keadilan formal; 3) kontrol sosial dicapai melalui pendekatan personalistik dan moralistik atau melalui seleksi personal berorientasi homogenitas, daripada melalui supervisi langsung atau aturan-aturan yang dibakukan; 4) hubungan sosial bersifat "holistik, afektif, dan berdasarkan nilai di dalam diri mereka sendiri", daripada bersifat instrumental dan berbasis peranan; 5) kriteria rekrutmen dan kemajuan adalah berbasis pertemanan, nilai-nilai sosio-politik, dan ciri-ciri personalitas yang relevan terdiri atas latihan khusus atau standar kompetensi umum (universal); 6) struktur insentif didasarkan pada *incentif purposive* (pemuahan nilai) dan *incentif solidaritas*, sedangkan *incentif material* bersifat sekunder; 7) stratifikasi sosial diminimalisir melalui kemilikan dalam prestise, privelese, dan upah; dan 8) perbedaan diminimalisir dengan memelihara peranan-peranan kerja se-umum dan se-holistik mungkin (Abigail A. Fuller. 1989. Ibid).

<sup>149</sup> Abigail A. Fuller. 1989. Ibid.

Derajat organisasi gerakan tergantung pada satu atau lebih kelompok yang mempengaruhi bagaimana organisasi itu dapat memobilisasi sumberdaya dan taktik-taktik gerakan yang dipilih.<sup>150</sup> Organisasi gerakan juga dapat berfungsi sebagai “*issue/grievance entrepreneurs*” yang mampu memanfaatkan peluang struktural untuk ‘mengembangkan’ dan ‘memasarkan’ produk gerakan yang baru. Contohnya perkembangan gerakan-gerakan sosial di Chili dan Brazil semakin mengadopsi bentuk-bentuk aksi yang lebih terlembaga dan dengan tingkat resiko yang lebih rendah untuk menjamin ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan. Tetapi proses ini sering menggiring transformasi organisasi gerakan ke dalam bentuknya yang lebih formal dan terstruktur.<sup>151</sup>

Dalam proses organisasional, otoritas kolektif digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan konsensus, yang berusaha mengintegrasikan kehidupan “publik” dan “privat”. Hal ini dapat membantu menciptakan hubungan holistik antar pelaku. Sedangkan dalam model birokratis di mana para pelaku saling berhubungan terutama pada basis instrumental, sehingga hubungan antar pelaku dalam organisasi gerakan lebih bersifat ekspresif. Kondisi ini memberi peluang para pelaku untuk saling bertukar pikiran, berbagi perasaan karena partisipasi mereka di dalam berbagai hal, sekaligus dapat menampung berbagai “*hidden agenda*” masing-masing partisipan.<sup>152</sup>

Memang terjadi perdebatan antara mereka yang menganjurkan “*centralized bureaucratic model*” seperti Gamson (1975), McCarthy dan Zald (1973, 1977) dan “*decentralized informal model*” seperti Gerlach dan Hine (1970).<sup>153</sup> Sebagian besar teoritis gerakan sosial lebih setuju model tersentralisir karena lebih efektif dalam mencapai tujuan instrumental.<sup>154</sup> Sebaliknya, model desentralisasi dengan pembagian kerja yang minimal, terintegrasi melalui jaringan informal dan ideologi menjadi lebih efektif. Alasan model desentralisasi bukan karena para pelaku tidak melihat pentingnya tujuan instrumental, tetapi dianggap sebagai tujuan sekunder.

Sebagai organisasi gerakan sekaligus memiliki dua tujuan ideologis dan instrumental. Seperti membangun struktur kelembagaan organisasi gerakan yang kuat lebih dipandang sebagai tujuan “*expressive*” daripada tujuan instrumental. Pada kenyataannya kedua tujuan tersebut tidak dapat dipandang secara terpisah

---

<sup>150</sup> Martti Muukkonen. 1999. Op.Cit.

<sup>151</sup> Darmawan Triwibowo (Editor). 2006. Op. Cit., hal. 13.

<sup>152</sup> Abigail A. Fuller. 1989. Op.Cit.

<sup>153</sup> J. Craig Jenkins. 1983. Op.Cit., hal. 539.

<sup>154</sup> Perdebatan di dalam literatur tentang gerakan sosial secara umum tertuju pada derajat sentralisasi dalam mendiskusikan internal organisasi dari organisasi gerakan sosial. Konsep “sentralisasi” disini lebih menunjuk pada konsentrasi relatif kekuasaan pengambilan keputusan pada sebagian kecil orang (Abigail A. Fuller. 1989. Op. Cit).

karena tujuan perubahan personal dan perubahan institusional merupakan dua sisi yang berada pada satu mata uang yang sama.<sup>155</sup> Studi terakhir menghasilkan bentuk tengah, yakni struktur organisasi tersentralisasi dengan semi-otonomi tingkat lokal dan otonomi lokal yang secara erat dikoordinasikan melalui struktur federatif.<sup>156</sup> Yang penting adalah organisasi gerakan sosial perlu difahami dalam konteks bagaimana dapat mengelola: (1) untuk memperoleh akses terhadap barang langka; dan (2) bersaing dengan negara dan organisasi politik lain dalam memecahkan permasalahan yang menjadi dasar tindakan kolektif.<sup>157</sup>

#### 2.4.2. Perkembangan Organisasional Gerakan Petani

Secara umum gerakan sosial, lebih khusus gerakan petani, mengalami pasang surut, berjalan pada siklusnya bahkan hingga pada titik kematian. Arned Mauss menyimpulkan ada lima tahapan pola gerakan sosial yang merupakan bentuk ideal, yakni *incipiency*, *coalescence*, *institiutionalization*, *fragmentation*, dan *demise*.<sup>158</sup> Dalam teori perkembangan linier dari Weber, Ernst Troeltseh, dan Robert Michels dan teori “*life cycle*” atau “*natural history*” dari Rex Hoper (1950), semua menyimpulkan bahwa ketika gerakan sosial semakin melekat pada sistem sosial yang mapan maka akan berubah menjadi konservatif.<sup>159</sup> Dia akan menjadi gerakan konsensus dan tidak dapat dipakai sebagai katalis perubahan sosial.<sup>160</sup> Kondisi ini berbeda ketika program-program gerakan belum terlembagakan tetapi organisasi gerakan sudah melekat pada sistem sosial yang mapan. Gerakan sosial yang demikian berjalan di tempat (stagnan) karena seakan gerakannya berhasil tetapi sebenarnya secara substantif mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan sesuai dengan klaim-klaim yang diperjuangkan.

Organisasi gerakan petani sebagai katalis gerakan petani dapat dipandang sebagai sumberdaya yang mencerminkan perannya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat petani, terutama komunitas petani basis. Dinamika organisasional gerakan petani dapat dilihat dari tiga peran utamanya, yakni sebagai pengimbang kekuatan negara dan swasta dalam struktur hubungan sosial agraria, sebagai kekuatan gerakan pemberdayaan masyarakat petani, dan sebagai lembaga perantara antara masyarakat petani dengan negara dan swasta

---

<sup>155</sup> Abigail A. Fuller. 1989. Op.Cit.

<sup>156</sup> J. Craig Jenkins. 1983. Op.Cit., hal. 540.

<sup>157</sup> Jeffrey Beasley. 1997. Op.Cit.

<sup>158</sup> Arned L. Mauss. 1975. *Social Problems as Social Movements*. Philadelphia: Lippincott., hal. 61-66; Charles L. Harper. 1989. Op.Cit., hal. 147.

<sup>159</sup> Rex Hoper menjabarkan bahwa gerakan sosial berkembang dalam empat tahapan, yakni, “*preliminary stage*”, “*popular stage*”, “*formal stage*”, “*institusional stage*” (Charles L. Harper. 1989. *Ibid.*, hal 146-147).

<sup>160</sup> Aldon D. Morris dan Carol McCurg Muller (Editors). 1992. Op.cit., hal. 205.

maupun dengan segenap lembaga pendukung baik dalam konteks jejaring (*networks*) maupun koalisi.<sup>161</sup> Dinamika organisasional tersebut tidak terlepas dari dimensi internal dan eksternal. Culla (2006) dan Miller dan Covey (2005) mengukurnya dari tingkat kemandirian (*autonomy*), swadaya (*self-supporting*), swasembada (*self-generating*), legitimasi, dan kredibilitas.<sup>162</sup> Pada sisi lain, Konsorsium Pembaharuan Agraria melihatnya dari enam prinsip utama, yakni demokrasi, kepemimpinan, kemandirian, garis massa, kritik-otokritik, kesatuan dan persatuan.<sup>163</sup> Sedangkan Hanspeter Kriesi,<sup>164</sup> mengajukan empat parameter analisis perkembangan organisasional gerakan sosial, pertumbuhan dan penurunan organisasional, strukturasi internal, strukturasi eksternal, dan orientasi tujuan dan repertoire tindakan.

Suatu organisasi gerakan petani sangat tergantung pada konstituennya, selama aktivitas utamanya terkait dengan mobilisasi konstituen, khususnya petani basis. Dengan menyediakan insentif selektif maka menjadi kurang tergantung pada fluktuasi komitmen individual dan lebih mampu memperluas basis sumberdaya mobilisasi. Dalam hubungannya dengan konstituen, seperti dengan jaringan pendukung, dengan aliansi dan dengan para pemegang otoritas semua memiliki sisi ambivalensi (sisi kekuatan dan kelemahan) dalam dinamika gerakan petani. Salah satu kecenderungannya dapat mengarah pada bentuk

---

<sup>161</sup> Ketiga peran organisasi gerakan petani tersebut diadaptasi dari kerangka konseptual Abdi Rahmat (Lihat Abdi Rahmat. 2003. Op.Cit., hal. 34-37). Konsepsi tersebut juga diadaptasi oleh Adi Suryadi Culla dalam studinya tentang peran masyarakat sipil di Indonesia (Lihat Adi Suryadi Culla. 2006. Op.Cit., hal. 31).

<sup>162</sup> Adi Suryadi Culla (2006. Ibid.) menekankan pada kapabilitas *civil society* dan dalam studinya ditujukan pada kapabilitas Ornop, sama dengan Valerie Miller dan Jane Covey (Lihat Valerie Miller dan Jane Covey. 2005. *Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 15-17). *Kemandirian* menunjuk pada kemampuannya dalam mengembangkan diri tanpa tergantung pada pihak lain, yakni: 1) kemampuan dalam mengambil keputusan sendiri tanpa campur tangan pihak lain; dan 2) kondisi, reaksi atau perkembangan organisasi yang mampu mengelola dan mengatur diri sendiri secara bebas. *Swadaya* menunjuk pada tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan tertentu berdasarkan prakarsa sendiri disertai kemampuan memobilisasi sumberdaya materi sendiri tanpa harus tergantung pada pihak lain atau sumberdaya dari luar. *Swasembada* menunjuk pada tingkat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sendiri berdasarkan sumberdaya yang dimiliki. *Legitimasi* menunjuk pada siapa saja yang secara nyata menjadi anggota organisasi gerakan dan sejauh mana mereka mengakui keberadaan organisasi gerakan tersebut. *Kredibilitas* menunjuk pada hubungan antara organisasi gerakan dengan konstituennya, ukuran konstituen, dan seberapa jauh bertanggung jawab kepada konstituennya.

<sup>163</sup> Prinsip “demokrasi” mengandung arti bahwa “kepemimpinan pusat yang berlandaskan demokrasi”, dan sebaliknya, “demokrasi yang dipimpin suatu program perjuangan yang terpusat”. Konsep demokrasi merupakan suatu proses pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Prinsip “kepemimpinan” berarti kemampuan menghindarkan diri terpisah dari petani, dan mampu sungguh-sungguh memimpin keseluruhan massa petani untuk melangkah maju. Prinsip “kemandirian” berarti kemampuan diri organisasi dalam menjawab persoalan-persoalan tanpa harus meminta ijin dari organisasi yang lebih tinggi. Prinsip “garis massa” berarti para kader harus selalu berada di tengah-tengah massa petani. Prinsip “kritik-otokritik” berarti kemampuan menunjukkan kesalahan orang lain dengan cara membandingkan antara prinsip perjuangan dengan praktek yang akan dilakukan, dan kemampuan menunjukkan kesalahan diri sendiri dengan cara membandingkan antara prinsip perjuangan dengan praktek yang dilakukan. Sedangkan prinsip “kesatuan dan persatuan” berarti dalam kerja dan kegiatan praktek politiknya di tengah massa, segala pandangan dan pikiran yang muncul akan berada dalam satu garis politik yang memperjuangkan kepentingan massa petani (Andik Hardiyanto dan Gunawan Wiradi. Penyusun. 2001. *Land Reform Berdasarkan Inisiatif Rakyat*. Seri Panduan Organisasi Tani Jilid I. Bandung: KPA., hal. 11-17).

<sup>164</sup> Doug McAdam, John D. McCarthy, Mayer N.Zald (Editor's). 1996. Op.Cit., hal. 154-156.



“*autopoietic systems*”, di mana masing-masing aktor gerakan berorientasi pada kepentingannya daripada kepentingan gerakan petani.<sup>165</sup> Pada kondisi ini karakter anggota tidak terlembagakan dan lemah komitmen mereka terhadap kemajuan gerakan petani. Kepentingan rasional dapat mempengaruhi kualitas hubungan antar elemen aktor dalam struktur gerakan. Atau bahkan mengarah pada konflik dan fragmentasi karena masing-masing memiliki logika rasionalitas berbasis pada kepentingannya sendiri.

Perkembangan organisasi gerakan petani dengan memperhatikan faktor internal dapat dibedakan antara dinamika organisasional internal dan tipe gerakan sosial, sedangkan dengan memperhatikan faktor eksternal dapat dilihat keterkaitannya dengan lingkungan lebih luas (ekonomi, politik dan kultural).<sup>166</sup> Menurut Zald dan Asch (1966),<sup>167</sup> perkembangan struktur mobilisasi dan peluang politik dapat mengarahkan gerakan cenderung lebih memperhatikan eksistensi organisasi daripada mencapai tujuannya semula. Sedangkan pada konteks adaptasi sistem sosio-kultural, maka perkembangan organisasi gerakan petani cenderung berjalan pada jalur “*accommodationist*”. Pada kondisi demikian organisasi gerakan petani dihadapkan pada dilema antara tetap memperhatikan kepentingan konstituen, visi, misi dan kerjanya, dan memenuhi kepentingan para pendukung (termasuk kepentingan lawan).<sup>168</sup> Bahkan dalam jangka panjang stabilisasi organisasi gerakan akan rentan jika pola kepemimpinan lebih tertutup mengandalkan pada figur tokoh personal karena minimnya kaderisasi.<sup>169</sup>

Mengacu pandangan Edella Schlager,<sup>170</sup> dalam gerakan petani selain bangunan jaringan juga penting membangun koalisi. Koalisi dalam hal tertentu sama dengan jaringan tetapi lebih bersifat sementara. Faktor lain adalah ikatan solidaritas dengan memasukkan dimensi rasional.<sup>171</sup> Dalam kaitannya dengan

---

<sup>165</sup> Elim Paradakis. 1988. *Social Movements, Self-Limiting Radicalism and the Green Party in West Germany*. Sociology. Vol.22. No.3: 433-454. From the SAGE Social Science Collections. All Rights Reserved. Hal. 440.

<sup>166</sup> Doug McAdam, John D. McCarthy, Mayer N.Zald (Editor's). 1996. Op.Cit., hal. 157.

<sup>167</sup> Charles L. Harper. 1989. loc.cit., hal. 150.

<sup>168</sup> Patrick Kilby. 2004. *Accountability for empowerment: Dilemmas facing non-governmental organizations*. Asia Pacific School of Economics and Government, The Australian National University. <http://www.apseg.anu.edu.au>, hal. 4.

<sup>169</sup> Wawan Fahrudin.2003. *Akuntabilitas dan Transformasi LSM dalam Proses Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Demokratis di Indonesia*. Jakarta: *Journal for Civil Society Empowerment*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Penerbit Pacivis, Depok.

<sup>170</sup> Edella Schlager. 1995. *Policy making and collective action: Defining coalition within the advocacy framework*. Dalam “*Policy Sciences: An International Journal Devoted to the Improvement of Policy Making*”. Netherlands: Kluwer Academic Publishers., hal. 243-270.

<sup>171</sup> Dalam perkembangannya secara analitik dibedakan antara konsep “*social solidarity*”, “*social exchange*”, “*instrumental exchange*”, dan “*instrumental co-ordination*” (Lihal Örjan Widegren.1997. *Social Solidarity and Social Exchange*. Sociology. Vol. 31. No.4: 755-771. SAGE Social Science Collections. All Rights Reserved). Dalam konteks organisasi gerakan petani yang di dalamnya syarat kepentingan beragam pelaku, maka tidak memungkinkan memakai konsep solidaritas sosial dalam maknanya yang murni, melainkan perlu diadaptasikan dengan ketiga konsep lain tersebut.

jaringan gerakan maka solidaritas rasional lebih bermakna dinamis.<sup>172</sup> Dinamika jaringan dan solidaritas rasional terkait dengan kepentingan aktor dalam relasi kekuasaan yang dapat mengganggu aktivitas dan stabilitas organisasi gerakan. Ini terjadi pada banyak kasus gerakan sosial di Indonesia, sebagaimana hasil analisis Olle Törnquist terhadap arah kecenderungan perilaku gerakan-gerakan demokrasi pada umumnya.<sup>173</sup> Kondisi tersebut dapat difahami, karena menurut Alberto Milucci perilaku organisasi gerakan tidak bersifat “given” dan deterministik yang berada di luar kontrol kesadaran para pelaku aktif, tetapi merupakan tampilan hasil dari proses konstruksi yang terkait dengan persepsi, orientasi, dan pilihan-pilihan para pelaku yang disesuaikan dengan lingkungan sosio-kulturalnya.<sup>174</sup>

## 2.5. Kerangka Pemikiran

Muncul dan berkembangnya gerakan petani yang direpresentasikan oleh peran organisasi gerakan petani tidak bersifat instan, tetapi dilatari oleh persoalan ketidaksesuaian hubungan dengan negara dan swasta yang tidak pernah berada pada suatu titik kompromi. Pada kondisi tekanan politik yang kuat maka gerakan-gerakan petani sangat sulit muncul. Keinginan petani untuk terus berjuang menuntut hak-haknya atas tanah secara adil dan tekanan negara yang terus menerus, semakin meningkatkan derajat ketegangan struktural agraria. Pada kondisi demikian perjuangan petani yang masih bersifat lokal dengan mudah dapat dilemahkan. Kegagalan tersebut tetap tidak menurunkan semangat perjuangan, justru menambah kekecewaan dan ketidakpuasan, meningkatkan derajat ketegangan dan mengendap di dalam sub kultur oposisi petani.

Sub kultur oposisi petani kemudian dikemas menjadi isu-isu kritical petani dalam dimensi sosio-politik dan basis sumberdaya mobilisasi dalam gerakan petani. Munculnya gerakan petani pada awal reformasi selain didukung oleh sub kultur oposisi petani juga dipengaruhi oleh tiga unsur utama lainnya, yakni penguatan organisasi gerakan petani, terbukanya peluang (politik) gerakan dan proses pembingkai kolektif dalam bentuk visi, misi, strategi dan taktik gerakan. Hubungan timbal balik di antara unsur-unsur tersebut yang memungkinkan berhasil dilakukan aksi-aksi kolektif petani.

---

<sup>172</sup> Charles Kadushin. 2004. *Linton C. Freeman. The Development of Social Network Analysis: A Study in The Sociology of Science*. <http://www.booksurge.com> (download tanggal 4 April 2007).

<sup>173</sup> Olle Törnquist. *Workers in politics: Why is organised labour missing from the democracy movement ?* <http://www.demos.or.id/demokrasi.aceh/Olle/Labor/Pol/Space 7.pdf>. Download 8 Juni 2007).

<sup>174</sup> Hanspeter Kriesi. 1996. Op Cit., hal. 350.

Pasca aksi-aksi kolektif petani (meskipun belum berhenti sama sekali) dilakukan penguatan organisasi gerakan petani karena eksistensinya terlekat dengan (memiliki) basis massa petani.<sup>175</sup> Dinamika organisasionalnya dapat dilihat dari tiga peran utamanya, yakni sebagai pengimbang kekuatan negara dan swasta dalam struktur hubungan sosial agraria, sebagai kekuatan gerakan pemberdayaan masyarakat petani, dan sebagai lembaga perantara antara masyarakat petani dengan negara dan swasta maupun dengan segenap elemen pendukung baik dalam konteks jejaring (*networks*) maupun koalisi.<sup>176</sup> Urgensi peran organisasi gerakan petani dilihat dari perspektif tindakan para aktornya (petani dengan segenap kelompok pendukungnya) bersifat dinamis dan memiliki konsekuensi ambivalensi. Perkembangan negatif terjadi ketika tindakan para aktornya mengalami disorientasi dan tidak mampu mengatasi kendala eksternal. Meluruhnya gerakan petani (dalam memainkan ketiga peran tersebut) diduga karena adanya penyumbatan dari luar dan pengeroposan dari dalam terhadap eksistensi organisasi gerakan petani.

Berdasarkan kajian teoritik dan paparan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun. *Pertama*, gerakan petani pada dasarnya ingin merubah struktur hubungan agraria (sistem agraria) dari bentuknya yang asimetris atau dalam sifatnya yang antagonis menjadi berbentuk simetris atau bersifat simbiosis-mutualisme. *Kedua*, ketegangan struktural agraria berisi kondisi-kondisi hubungan agraria yang mengabaikan kepentingan petani. Kondisi ini melahirkan perjuangan petani tetapi gagal dan kemudian berkembang sub kultur oposisi petani. *Ketiga*, aksi-aksi kolektif petani terorganisir dikonstruksi bersama antara petani dengan segenap kelompok pendukungnya berdasarkan respon mereka terhadap kondisi dan situasi tertentu. *Keempat*, dinamika gerakan agraria (gerakan petani) direpresentasikan oleh urgensi peran organisasi gerakan petani, yakni DTL, IPL, SPL, MN (lihat sub bab tentang Desain Penelitian).

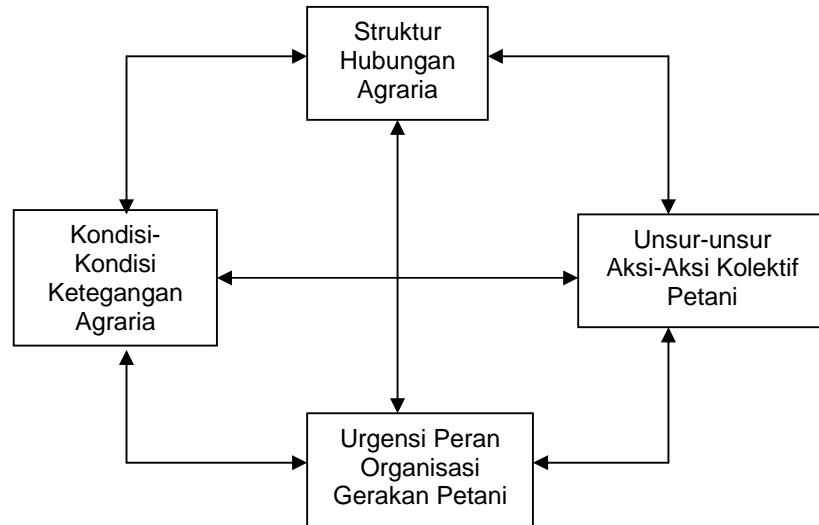
Dalam gerakan sosio-politik petani, ketiganya saling berhubungan satu sama lain dan dalam merubah struktur hubungan agraria (sistem agraria) dari bersifat asimetris atau antagonis menjadi simetris atau simbiosis-mutualisme.

---

<sup>175</sup> Ichsan Malik. 2004. *Pasang Surut LSM di Indonesia*. Tulisan dimuat dalam buku: "*Lembaga Swadaya Masyarakat: Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan*". Jakarta: PT Kompas Media Nusantara., hal.xi-xix.

<sup>176</sup> Ketiga peran organisasi gerakan petani tersebut diadaptasi dari kerangka konseptual Abdi Rahmat (Lihat Abdi Rahmat. 2003. *Peranan LSM dalam Penguatan Civil Society di Indonesia: Studi Kasus Walhi*. Jakarta: Tesis Program Pascasarjana S2 Sosiologi Universitas Indonesia., hal. 34-37). Konsepsi tersebut juga diadaptasi oleh Adi Suryadi Culla dalam studinya tentang peran masyarakat sipil di Indonesia (Lihat Adi Suryadi Culla. 2006. Op.Cit., hal. 31).

Secara sederhana saling hubungan di antara aspek-aspek tersebut sebagaimana tampak disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1 Alur-Pikir Studi

## **BAB III**

### **METODOLOGI**

#### **Paradigma Metodologi**

Penelitian ini memfokuskan pada tindakan-tindakan kolektif dan dinamika gerakan petani terorganisir tingkat wilayah provinsi, yakni DTL, IPL, SPL (SPI-Lampung) dan Mirak Nadai. Prakondisi gerakan petani (ketegangan struktural agraria) dalam penelitian ini digunakan untuk mencari penjelasan tentang sumber utama munculnya gerakan petani (meskipun difahami tidak secara otomatis sebagai sebab) yang di dalamnya juga sudah muncul aksi-aksi kolektif petani. Fenomena tersebut diposisikan sebagai basis akumulasi sumberdaya potensial petani yang dapat diwujudkan dalam penguatan struktur mobilisasi sumberdaya dalam gerakan sosio-politik petani.

Berdasarkan penjelasan tersebut, diasumsikan bahwa gerakan petani terdiri atas struktur sumberdaya mobilisasi yang selalu dikonstruksi oleh para aktor terlibat untuk mencapai tujuan-tujuannya, baik tujuan jangka pendek (sosio-politik) maupun jangka panjang (sosio-kultural). Kapasitas pelaku gerakan berada dalam dua ruang sekaligus, yakni dipendensi dan otonomi dalam memproduksi makna-makna, menegosiasikan, dan mengambil keputusan dalam gerakan. Artinya, asumsi ini lebih menekankan pada kapasitas aktif dan kreatif para aktor gerakan daripada selalu tunduk terhadap kondisi-kondisi struktural yang ada. Gerakan petani merupakan hasil dari kemampuan para aktor dalam mendefinisikan isi yang sangat bermakna dalam perjuangan sosio-politik (jangka pendek) dan sosio-kultural (jangka panjang) dan dalam mengorganisir perilaku bersama mereka. Oleh karena itu, teori utama yang digunakan untuk menganalisis gerakan petani adalah teori mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization theory*) dengan tidak mengabaikan aspek sosial psikologis, seperti *grievances, values, ideology*. Alat analisis ini oleh Barkan dan Snowden disebut dengan perspektif konstruksionis sosial (*social constructionist perspective*) atau konstruksionisme sosial (*social constructionism*).<sup>177</sup>

---

<sup>177</sup> Steven E. Barkan dan Lynne L. Snowden. 2000. Op.Cit., hal. 25.

Sebagai konsekuensinya, mengacu pada pengertian dan pembagian paradigma penelitian yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln,<sup>178</sup> penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Pada tataran metodologis digunakan pendekatan pemahaman timbal balik antar-subyektif (*intersubjective understanding*) berupa kesepakatan antara tineliti dan peneliti. Disini terjadi arus timbal-balik antara dunia sosial yang diperbuat oleh tineliti dan wacana ilmiah yang dilakukan oleh peneliti (*double hermeneutic*),<sup>179</sup> karena subyektivitas itu tumbuh dan berkembang di dalam praktik-praktik hubungan sosial di antara keduanya melalui cara dialogis. Pada tataran epistemologi pendekatan tersebut sebagai jalan masuk yang sesuai untuk memperoleh kebenaran ilmiah.

Selain itu, digunakannya paradigma konstruktivisme dalam penelitian ini juga didasarkan pada tiga alasan utama. *Pertama*, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memperoleh generalisasi dalam konteks pengujian teori umum sebagaimana yang dilakukan dalam tradisi paradigma positivisme. *Kedua*, penelitian kualitatif dan sosiologis ini berupaya mengembangkan hipotesis atas dasar fakta di lapangan, bukan melakukan uji atas hipotesa-hipotesa yang sudah ditetapkan peneliti sebelum ke lapangan. *Ketiga*, penelitian ini juga tidak diarahkan untuk membangun kesatuan antara teori dan praksis, yakni tindakan-tindakan yang diarahkan untuk mendorong terjadinya transformasi dalam struktur kehidupan masyarakat petani.

Pertimbangan lainnya terkait dengan pokok permasalahan penelitian adalah, *pertama*, gerakan petani terorganisir sebagai wadah perjuangan petani tidak terlepas dari proses konstruksi oleh para aktor gerakan yang terlibat. *Kedua*, gerakan petani dapat dilihat dari sisi bagaimana sumberdaya yang dimiliki dapat dimobilisasi, bagaimana ruang politik oleh para aktor gerakan dimaknai sebagai peluang atau ancaman, dan bagaimana makna situasi gerakan dapat dikonstruksi. *Ketiga*, dinamika gerakan petani secara internal dapat dilihat sebagai jaringan antar aktor dan secara eksternal memungkinkan membentuk jaringan sosial lebih luas. *Keempat*, sistem sosio-kultural dapat dilihat sebagai jaringan sosial makro yang diproduksi bersifat mengekang (*constraining*) sekaligus memberdayakan (*enabling*) bagi para aktor dan dalam mereproduksi struktur jaringan mikro dan meso sosial untuk mencapai kepentingan individu

---

<sup>178</sup> Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (editors). 1994. *Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications. Hal. 107-109.

<sup>179</sup> Anthony Giddens. 1984. *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press., hal. 373; Anthony Giddens. 1993. *New Rule of Sociological Method*. 2<sup>nd</sup>. Edition. Cambridge: Polity Press., hal.86.

aktor, kepentingan bersama organisasi gerakan petani, dan dalam melakukan gerakan-gerakan petani selanjutnya.

Namun demikian peneliti menyadari tidak dapat menggunakan paradigma konstruktivisme secara murni, karena dua hal. *Pertama*, dalam menganalisis “prakondisi munculnya gerakan petani”, peneliti lebih banyak mengandalkan data dokumen dan data sekunder dibanding dari hasil wawancara mendalam. Karena itu, dalam memahami (analisis) kasus-kasus tersebut sesuai dengan kepentingan penelitian ini, maka peneliti lebih banyak harus berposisi obyektif daripada intersubjektif (*intersubjective understanding*). *Kedua*, dalam mengumpulkan dan analisis data tentang dinamika organisasi gerakan petani peneliti sering ikut terlibat di dalam berbagai pertemuan antar tineliti baik formal maupun informal. Rasa empati terhadap persoalan petani dan lemahnya organisasi gerakan petani mendorong peneliti untuk melakukan penyadaran terhadap para tineliti (terhadap para aktor strategis petani dan non petani serta para petani basis) dalam beberapa kesempatan pertemuan tersebut. Tindakan peneliti yang diarahkan untuk membangun kesatuan antara teori dan praksis tersebut tidak menjadi bagian dari fokus untuk mencari jawaban sesuai dengan tujuan penelitian ini.

### **Pokok Penelitian, Konsep dan Metode Penelitian**

Ada tiga persoalan yang menjadi pokok penelitian ini, yaitu: kondisi-kondisi yang berpotensi sebagai pendorong utama munculnya gerakan petani, unsur-unsur utama keberhasilan gerakan petani, dan dinamika gerakan petani yang direpresentasikan oleh urgensi peran organisasi gerakan petani. Berdasarkan ketiga pokok penelitian tersebut di dalamnya dapat dijabarkan tiga konsep utama sebagai berikut:

- a. Ketegangan struktural agraria. Bentuk-bentuk gangguan yang muncul terhadap komunitas lokal (petani), khususnya berupa kondisi-kondisi sosial agraria yang penuh ketidakpastian atau labil yang dapat menstimulir munculnya gerakan petani, dalam studi ini secara umum dikonseptualkan sebagai “ketegangan struktural agraria”. Secara khusus konsepsi ini difokuskan terjadi dalam bentuk konflik-konflik pertanahan antara komunitas lokal (petani) dengan negara dan swasta, karena petani mempertahankan kuasa atas tanah (sumberdaya agraria) berhadapan dengan kekuatan institusi supra desa tersebut.

- b. Tindakan kolektif dalam gerakan petani. Dalam arti sempit (praktis) dimaknai sebagai tindakan terorganisir dan non institusional yang dikonstruksi sebagai perwujudan reaksi atau respon petani terhadap tindakan pihak lawan atas penguasaan tanah pertanian yang merugikan petani. Dalam arti luas (strategis) dimaknai sebagai suatu usaha kolektif petani terorganisir dengan tujuan untuk merombak tatanan sosial agraria yang adil dan demokratis sebagai dasar bagi peningkatan kesejahteraan petani. Gerakan petani dikatakan sebagai gerakan sosial menurut Landsberger<sup>180</sup> dan Lofland<sup>181</sup> jika memenuhi beberapa unsur, yaitu: sebab gerakan, tujuan dan sasaran, strategi, ideologi atau kepercayaan, keanggotaan, kepemimpinan, struktur organisasi dan efek gerakan.

Ada tiga unsur utama saling terkait yang mendorong keberhasilan aksi-aksi kolektif dalam gerakan sosio-politik petani, yaitu struktur peluang politik, struktur mobilisasi, dan pemingkaian kolektif. *Pertama*, struktur peluang politik dimaknai sebagai derajat keterbukaan politik yang memungkinkan dilakukannya aksi-aksi kolektif petani. *Kedua*, struktur mobilisasi sumberdaya merupakan proses di mana suatu organisasi gerakan petani yang diciptakan dapat menjamin kontrol kolektif terhadap sumberdaya material dan non material. Struktur mobilisasi sumberdaya terwujud dalam jaringan (struktur) dari skala mikro (kelompok informal) hingga meso (organisasi gerakan petani skala provinsi). *Ketiga*, pemingkaian kolektif difahami sebagai suatu proses interpretasi bersama dan sebagai suatu proses konstruksi sosial yang memediasi antara peluang politik dan aksi-aksi kolektif dalam gerakan petani.

- c. Dinamika Organisasi Gerakan Petani. Konsepsi ini difahami sebagai suatu kondisi-kondisi yang menunjukkan arah perkembangan organisasi gerakan petani tingkat provinsi dalam mencapai tujuan-tujuannya sesuai dengan klaim-klaim yang diperjuangkan. Tiga peran utamanya adalah sebagai pengimbang kekuatan negara dan swasta dalam struktur hubungan agraria, sebagai kekuatan gerakan pemberdayaan petani, dan sebagai lembaga perantara antara petani dengan negara dan swasta serta dengan segenap kelompok pendukungnya.<sup>182</sup>

---

<sup>180</sup> Henry A. Landsberger, dan Alexandrov YU.G.. 1984. *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.

<sup>181</sup> John Lofland. 1996. *Social Movement Organizations: Guide to Research on Insurgent Realities*. New York: Aldine de Gruyter.

<sup>182</sup> Abdi Rahmat. 2003. Op.Cit., hal. 34-37.



Kemudian pokok penelitian, unsur data dan teknik pengumpulan data disajikan dalam Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3 Pokok Penelitian, Unsur Data dan Teknik Pengumpulan Data

<b>Pokok Penelitian</b>	<b>Unsur-Unsur Data</b>	<b>Metode Pengumpulan</b>
Potret Lampung Dari Masa ke Masa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi fisik, perkembangan wilayah administratif dan sosial budaya.</li> <li>Dinamika petani di Lampung dari masa ke masa.</li> </ul>	Dokumentasi (D), Data Sekunder (DS) D, DS
Ketegangan Struktural Agraria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses dan status penguasaan tanah pertanian oleh petani.</li> <li>Proses pengambil-alihan dan pembebasan tanah petani oleh pemerintah dan perusahaan.</li> <li>Perlakuan pemerintah dan perusahaan terhadap petani dalam konflik pertanahan.</li> <li>Dampak konflik pertanahan terhadap kondisi petani.</li> <li>Upaya pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi dampak negatif terhadap kehidupan petani.</li> <li>Upaya kolektif petani dalam menyelesaikan konflik pertanahan dengan pemerintah dan perusahaan.</li> </ul>	Wawancara (W), D, DS W, D, DS W, D, DS W, D, DS W, D, DS W, D, DS
Aksi-aksi Kolektif Petani (dalam Gerakan Sosio-politik Petani)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Respon terhadap peluang politik.</li> <li>Rekrutmen elemen petani.</li> <li>Rekrutmen elemen pendukung (non petani).</li> <li>Pengorganisasian (penstrukturan sumberdaya mobilisasi)</li> <li>Aksi-aksi kolektif.</li> <li>Efek aksi-aksi kolektif.</li> </ul>	W W W W W, D, DS W, D, DS
Dinamika Gerakan Petani (direpresentasikan oleh peran Organisasi Gerakan Petani)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formalisasi organisasi gerakan petani.</li> <li>Reproduksi isu-isu kritis dan memobilisir sumberdaya dalam aksi kolektif.</li> <li>Hubungan dengan para pemegang otoritas dalam penyelesaian konflik pertanahan.</li> <li>Konflik internal dan fragmentasi organisasi gerakan petani.</li> <li>Keberlanjutan kekuatan jejaring antara elemen petani dengan elemen non petani.</li> <li>Perluasan jaringan pendukung.</li> <li>Dalam mempertahankan jalinan hubungan dengan konstituen.</li> <li>Dalam menyelesaikan kendala internal dan eksternal.</li> </ul>	W, D, DS W, D, DS W, DS W, D, DS W, Observasi (O) W, D, DS, O W, D, O W, D, O

## Desain Penelitian

Studi kasus dipilih sebagai strategi, kerangka kerja, atau desain penelitian. Model induksi analitik dalam beberapa kasus gerakan petani di Lampung nampaknya lebih cocok diterapkan dalam studi ini dibanding model sampel teoritik dan studi kasus tunggal. Dalam model induksi analitik maka beberapa kasus gerakan petani di Lampung (yang direpresentasikan oleh peran organisasi gerakan petani) dapat dicari kesamaannya dan dibuat suatu kategori umum, dengan cara memberi makna secara ketat atas konsep-konsep yang digunakan.<sup>183</sup>

Kasus organisasi gerakan petani tingkat provinsi di Lampung bersifat spesifik karena kemunculannya terkait dengan persoalan pertanahan yang terjadi secara akumulatif dan merata di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Untuk memahami dinamikanya perlu dilakukan interpretasi terhadap setiap gejala yang muncul dengan menggunakan kerangka (*frame*) kerja berbagai pihak yang terlibat di dalam gerakan petani. Oleh karena itu, kesatuan analisis dalam penelitian ini adalah “lingkungan” situasi di mana organisasi gerakan petani itu muncul, beraktivitas dan berkembang dari tingkat lokal hingga provinsi dan berbagai komunitas lokal (petani) yang terlibat dalam persoalan pertanahan dengan pemerintah (negara) dan perusahaan (swasta), berjejaring dengan berbagai kelompok aktor pendukung, serta keterkaitannya dengan lingkungan masyarakat yang lebih luas. Sebagai gerakan petani terorganisir, maka yang dimaksud dengan kesatuan analisis “lingkungan” situasi tersebut terwujud dalam dinamika organisasi gerakan petani yang mengidentifikasi tujuan-tujuannya dengan pilihan terhadap suatu gerakan sosial (gerakan petani) dan berusaha melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.

Mengacu pendapat Lofland mengenai prosedur penelitian studi kasus tentang gerakan sosial, maka dalam studi ini mengikuti 4 (empat) langkah, yaitu: (1) memilih kasus-kasus gerakan petani yang akan diteliti, (2) memikirkan secara luas tentang bentuk-bentuk pengumpulan data atas kasus tersebut, (3) menjabarkan pertanyaan-pertanyaan sosial tentang data, dan (4) menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara sosiologis.<sup>184</sup>

---

<sup>183</sup> Charles C. Ragin. 1994. *Constructing Social Research, Sociology for a New Century*. Thousand-Oaks-London, New Delhi: Cine Forge Press., hal. 93-103.

<sup>184</sup> John Lofland. 1996. *Social Movement Organizations: Guide to Research on Insurgent Realities*. New York: Aldine de Gruyter., hal. 21.

*Pertama*, pemilihan kasus yang paling relevan adalah organisasi gerakan petani tingkat wilayah provinsi Lampung yang menjadi representasi gerakan petani, yakni Dewan Tani Lampung (DTL), Ikatan Petani Lampung (IPL), Serikat Petani Lampung (SPL) dan Mirak Nadai (MN). Gerakan petani dibatasi berlangsung mulai sejak tahun 1998 hingga tahun 2009. Kasus perjuangan kolektif petani yang terjadi pada masa Orde Baru diposisikan sebagai bagian dari prakondisi yang mendorong munculnya gerakan petani, dan dalam penelitian ini diposisikan sebagai akumulasi sumberdaya mobilisasi potensial petani. Dipilih daerah penelitian di Provinsi Lampung berdasarkan dua alasan obyektif dan subyektif. Alasan obyektifnya adalah: (1) banyak konflik pertanahan antara petani berhadapan dengan pemerintah (negara) dan perusahaan (swasta); (2) konflik-konflik tersebut bersifat akumulatif dan menyebar di wilayah kabupaten/kota; (3) terutama pada awal-awal era reformasi marak terjadi aksi kolektif terorganisir (unjuk rasa dan reklamasi); dan (4) berkembang beberapa organisasi gerakan petani di tingkat wilayah provinsi, ke bawah memiliki anggota organisasi tani tingkat lokal atau basis, dan ke atas berjejaring dengan organisasi gerakan tingkat nasional. Seperti IPL berjejaring dengan Petani Mandiri, SPL berjejaring dengan Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), dan Mirak Nadai berjejaring dengan Aliansi Petani Indonesia (API). Sedangkan alasan subyektif adalah: (1) mulai sejak tahun 1989 hingga saat ini peneliti tinggal menetap di Lampung; (2) sering mengamati dan pernah meneliti konflik pertanahan; (3) sering mengamati dan pernah terlibat secara tidak langsung dalam aksi-aksi unjuk rasa pada awal reformasi; (4) sudah mengenal banyak kawan-kawan aktivis gerakan reformasi, khususnya gerakan petani di Lampung.

Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan dua kategori gerakan petani dilihat dari proses konstruksinya, yakni konstruksi gerakan dari bawah dan dari atas. Dimaksud dengan konstruksi gerakan dari bawah adalah suatu gerakan petani yang dimulai dari pengorganisasian berbagai komunitas petani basis, kemudian mereka disatukan dalam wadah organisasi gerakan petani tingkat wilayah provinsi, baru kemudian melakukan aksi-aksi kolektif. Kasus representatifnya adalah DTL yang kemudian pecah menjadi IPL. Sedangkan konstruksi gerakan dari atas dibentuk lebih dulu organisasi gerakan petani secara formal tingkat provinsi, baru kemudian melakukan mengorganisasikan komunitas petani lokal untuk melakukan aksi-aksi kolektif. Kasus representatifnya adalah SPL yang kemudian pecah menjadi MN.

*Kedua*, bentuk-bentuk pengumpulan data berupa wawancara mendalam, dokumentasi, observasi dan data sekunder (lihat sub bab Teknik Pengumpulan Data). Dengan cara ini dapat dikumpulkan berbagai informasi sesuai dengan pokok penelitian. Disini peneliti berusaha sedapat mungkin bersikap untuk tidak memihak dan mengumpulkan informasi dari pihak-pihak yang terlibat dan juga dari pihak lawan gerakan (pemerintah dan perusahaan).

*Ketiga*, pertanyaan-pertanyaan dijabarkan sesuai dengan pokok penelitian. Ada tiga persoalan yang menjadi pokok penelitian ini, yaitu: kondisi-kondisi yang berpotensi sebagai faktor pendorong utama terjadinya gerakan petani, aksi-aksi kolektif dalam gerakan petani, dan dinamika organisasi gerakan petani pasca aksi-aksi kolektif petani. Ketiga pokok penelitian tersebut dijabarkan secara rinci dalam Tabel 3.

*Keempat*, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan secara sosiologis diajukan beberapa pertanyaan umum (*generic proposition*). Peneliti cenderung mengikuti pendekatan etnografi praktis di mana wacana dijadikan fokus sekaligus pertanyaan umum. Peneliti berusaha menggali isu-isu yang banyak didiskusikan atau menjadi bahan pembicaraan inti dan umum oleh berbagai pihak, seperti di kalangan komunitas petani basis, praktisi, LSM, akademisi, mantan aktivis gerakan, dan pengurus inti organisasi gerakan petani. Oleh karena itu, berbagai informasi yang dapat diperoleh dari berbagai wilayah dan dari berbagai ruang interaksi dan komunikasi antar subyek gerakan petani baik formal maupun informal semaksimal mungkin untuk terus dapat diikuti.

## **Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara Mendalam dan Observasi**

Sebelum wawancara mendalam dilaksanakan, peneliti mencari kawan-kawan petani (pengurus inti IPL dan SPL) dan non petani (PUSbik, LBH Bandar Lampung, KBH Lampung, DRL, dan Dosen) yang sudah kenal dan dipastikan dapat menjadi informan kunci. Mereka adalah yang pernah mengadvokasi konflik pertanahan, ikutserta dalam gerakan petani dan menjadi pengurus inti organisasi gerakan petani.

Pada bulan April tahun 2007 sejak ijin penelitian diperoleh maka dokumen-dokumen tentang konflik pertanahan dan upaya penyelesaian kolektif (termasuk gerakan lokal-tradisional petani) mulai dikumpulkan. Wawancara dengan para pengurus inti DTL, IPL dan SPL dan non petani mulai dilakukan. Informasi awal

ini menjadi landasan untuk mendalami lingkup permasalahan penelitian. Setelah didapatkan gambaran yang cukup tentang pemetaan konflik pertanahan petani, persoalan gerakan dan organisasi gerakan petani, kemudian mulai bulan Juni 2008 dilakukan wawancara secara intensif dan berkesinambungan.

Beberapa informan awal di atas tetap diwawancarai lebih lanjut dan diperbanyak jumlahnya melalui cara *snowball*. Kemudian wawancara dilanjutkan dengan para pelaku petani dan non petani yang menjadi pengurus dan mantan pengurus DRL, DTL, IPL, SPL, Mirak Nadai dan Pramukti, Petani Mandiri (Jakarta), FSPI (Jakarta), dan Raca Institute (Jakarta). Dari kalangan akademisi wawancara dilakukan dengan mereka yang pernah dan masih menjadi anggota Tim 13 dan yang pernah ikut dalam gerakan petani. Dari kalangan perusahaan diwawancarai dua pejabat inti PT. HIM di Tulang Bawang dan Direktur PT. DA di Lampung Selatan. Dari Mirak Nadai wawancara dilakukan dengan dua pengurus inti dan empat pelaku utama aksi reklamasi. Dari instansi kehutanan dan BPN berhasil diwawancarai pejabat yang banyak tahu tentang konflik pertanahan, peristiwa gerakan dan perkembangan organisasi gerakan petani. Wawancara juga dilakukan terhadap para mahasiswa alumni yang ketika itu mereka aktif ikut terlibat dalam gerakan mahasiswa dan gerakan petani.

Pada tanggal 5-7 Nopember 2007 peneliti mengikuti Kongres SPL di desa Antar Berak, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus. Disitu peneliti dapat mengamati langsung jalannya kongres dan melakukan wawancara. Selain itu, peneliti juga menghadiri pertemuan bulanan organisasi basis SPL di kecamatan Bangun Rejo, Lampung Tengah; pertemuan antar petani di desa Wiyono-Gedung Tataan-Pesawaran; pertemuan antar petani basis DTL di Padang Cermin, dan mengikuti dan mewawancarai peserta dialog (aktivis LSM) tentang konflik pertanahan (diprakarsai ICRAF) di Wisma Dahlia Bandar Lampung; dalam acara ketua IPL, yakni peresmian pesantren dan kampanye partai politik tertentu; dan dalam acara Muscab SPI Lampung Tengah.

Khusus kepada para informan kunci selalu dijalin hubungan langsung karena wawancara intensif dengan mereka dilakukan secara berkelanjutan, dengan bertemu langsung, melalui telepon, Handphone dan email. Di antara mereka juga diminta untuk mengoreksi dan berdialog tentang hasil rekonstruksi dan interpretasi data yang dituangkan dalam bentuk tulisan, tabel dan gambar.

## **b. Dokumentasi.**

Melalui teknik ini peneliti mendapatkan bahan-bahan tertulis dan gambar yang berhubungan dengan konflik pertanahan, pembebasan dan pengambilalihan lahan, kebijakan agraria dan kebijakan kependudukan (khususnya transmigrasi lokal), gerakan petani dan organisasi tani. Dokumen tersebut berupa laporan kronologi dan analisis konflik pertanahan dan dampaknya terhadap komunitas petani, data wilayah dan komunitas petani yang mengalami konflik, keputusan pemerintah, surat-surat penting tentang aktivitas gerakan dan organisasi tani, keterlibatan pelaku, dan sebagainya. Dokumen-dokumen tersebut dapat diperoleh dari LSM (LBH Bandar Lampung, KBH Lampung, Walhi-Lampung, Kawan Tani Lampung, KPA-Lampung), dan Raca Institute (Jakarta), pemerintah provinsi (BPN Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Biro Tata Pemerintahan Provinsi Lampung), perusahaan (PT.HIM), organisasi gerakan (DRL, IPL, DTL, SPL, MN, SPI, API, Pramukti dan AGRA) dan para mantan aktivis gerakan lainnya yang pernah berperan sebagai pelaku strategis.

## **c. Data Sekunder.**

Selain wawancara dan dokumentasi juga diperoleh data-data sekunder yang menunjang. Data tersebut diperoleh dari KBH Lampung, PUSbik, Universitas Lampung, ICRAF, BPS, BPN, surat kabar harian di Lampung, bahan seminar kemiskinan dan reforma agraria di Lampung, buku, laporan penelitian, jurnal dan lain-lain yang sebagian datanya cukup penting digunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

### **Validitas Internal**

Penelitian ini menggunakan pendekatan intersubjektif, sehingga validitas internal atau kredibilitasnya yang lebih penting dijelaskan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Beberapa hal yang penting dilakukan dalam menjamin kredibilitas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara berulang. Karena penelitian ini dilakukan di wilayah Lampung, dan peneliti juga sudah tinggal lama di wilayah tersebut serta sudah kenal dengan banyak tneliti, maka wawancara berulang lebih mudah dan lebih sering dapat dilakukan guna memperoleh akumulatif data yang komprehensif

- dengan melakukan konfirmasi dan konfirmasi kembali dengan para informan dan atau responden (tineliti).
2. Trianggulasi. Data penelitian dikumpulkan menggunakan dua teknik utama yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi yang didukung dengan data sekunder dan observasi. Subyeknya adalah para pelaku strategis petani dan non petani yang terlibat langsung dan tidak langsung gerakan petani, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi gerakan petani.
  3. Masukan tineliti. Catatan hasil wawancara dan interpretasi akan diberikan kembali kepada tineliti untuk diperiksa dan dikomentari. Dengan cara ini dan dipadukan dengan cara pertama, selain memungkinkan peneliti dapat mengembangkan informasi lebih lanjut, juga memungkinkan mendapatkan tambahan untuk memperbaiki dan melengkapi data-data penelitian dan mempertajam hasil interpretasi.

### **Analisa Data**

Pilihan pada paradigma penelitian konstruktivisme mengarahkan penelitian ini pada praktik pendekatan kualitatif yang tidak mengabaikan penggunaan multi metode pengumpulan data dengan menggunakan desain penelitian studi kasus.<sup>185</sup> Melalui desain penelitian studi kasus terhadap keempat organisasi gerakan petani (DTL, IPL, SPL, Mirak Nadai) maka memungkinkan peneliti secara intensif menggunakan metode interaksi antara dan dalam kalangan peneliti dan tineliti (konstruktivisme).

Sesuai dengan pokok penelitian dan karakteristik metode yang digunakan, pengolahan dan analisis data kualitatif didasarkan pada fakta-fakta dan informasi yang dihasilkan. Secara ringkas pengolahan dan analisis data mengikuti tahapan reduksi data dan klasifikasi berdasarkan kategori yang dibangun oleh konsep, dan kemudian dibuat hubungan antar konsep.<sup>186</sup>

Dalam proses pengumpulan dan analisis data, peneliti selalu melakukan dialog dengan tineliti untuk mengonstruksi gerakan dan dinamika organisasi gerakan petani. Semua ini berkonsekuensi pada proses dari bawah yang bersifat konstruktif, atau dikenal dengan istilah *grounded*<sup>187</sup> meskipun disadari tidak sampai dalam bentuknya yang murni. Pilihan ini didasarkan pada asumsi menempatkan realitas gerakan dan organisasi gerakan petani sebagai hasil

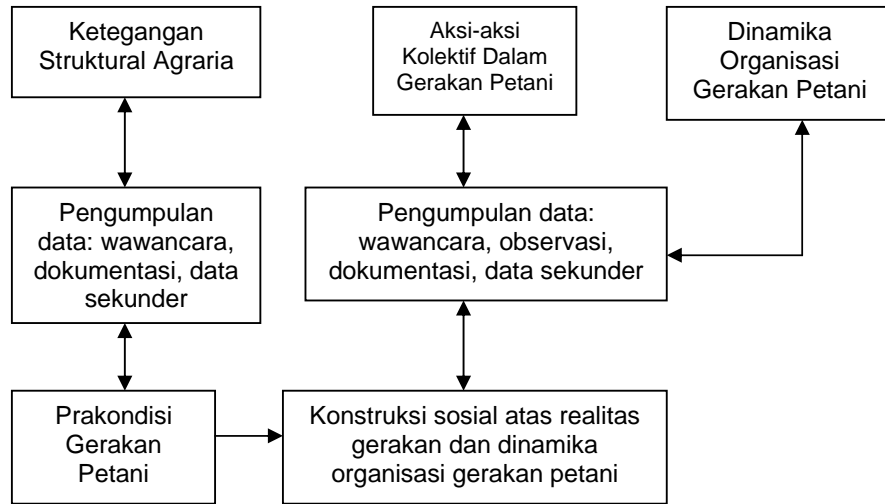
---

<sup>185</sup> Robert K. Yin. 1996. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Press., hal. 9.

<sup>186</sup> J. Dey. 1993. *Qualitative Data Analysis*. London: Routledge.

<sup>187</sup> Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Editors). 1994. *Op.Cit.*, hal. 273-283.

konstruksi dan bekerjanya proses pemingkalian kolektif (*collective framing process*) antar para aktor yang di dalamnya melibatkan berbagai proses pemaknaan subyektif dan intersubyektif.



Gambar 2 Proses Analisis Data Prakondisi Gerakan Petani dan Konstruksi Sosial atas Realitas Gerakan dan Dinamika Organisasi Gerakan Petani



## **BAB IV**

### **DINAMIKA KEPENDUDUKAN DAN PERSOALAN AGRARIA DI PEDESAAN LAMPUNG**

#### **4.1. Pluralitas Dalam Masyarakat Lampung**

Wilayah Lampung secara administratif menjadi provinsi sejak tahun 1964. Hingga saat ini (2008) provinsi Lampung dibagi menjadi 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) kabupaten. Sejak dulu wilayah Lampung sudah dihuni oleh beragam etnik, meskipun etnik pendatang bermukim dalam bentuk kampung (desa) mulai sejak awal abad 20. Kemajemukan etnik ini menurut sejarah sudah terjadi sejak menjadi bagian Kesultanan Banten dan kerajaan Sriwijaya. Asimilasi dan amalgamsi juga sudah terjadi sejak lama.<sup>188</sup> Masyarakat Lampung memiliki sikap pluralisme yang beproses secara mendalam dan dalam jangka sangat panjang.

Pada awalnya kemajemukan etnik tersebut dibedakan menjadi dua, yakni etnik asli Lampung (kalau bisa disebut asli) dan pendatang. Oleh karena itu wilayah Lampung disebut dengan "*Sang Bumi Ruwa Jurai*". Dengan alasan bahwa perkembangan dan kemajuan daerah Lampung tidak terlepas dari saling hubungan di antara kedua kelompok etnik tersebut, maka daerah Lampung disimbolkan sebagai "*Sai Bumi Ruwa Jurai*". Artinya, dalam masyarakat Lampung terbangun komitmen moral yang mengakui adanya perbedaan etnik, tetapi perbedaan itu dimaknai sebagai persatuan dan kesatuan dimana masing-masing etnik dapat mengaktualisasikan diri dan berprestasi secara bebas tanpa memandang afiliasi kelompok etniknya.

#### **4.2. Masyarakat Adat Lampung dan Tanah Marga**

##### **4.2.1. Struktur Genealogis dan Wilayah Teritorial**

Hingga saat ini, etnik Lampung masih tetap eksis dan dipelihara sebagai suatu komunitas masyarakat adat, berbasis genealogis dan memiliki wilayah teritorialnya sendiri. Pada mulanya pemukiman mereka terkonsentrasi di wilayah

---

<sup>188</sup> Contohnya di desa Canti, Lampung Selatan, terdapat tokoh adat Lampung yang disebut "*Dalom*" ternyata berasal dari keturunan etnik Jawa Timur (Surabaya). Kedudukan sebagai tokoh adat ini (keturunan Jawa) berlanjut secara turun-temurun hingga sekarang (Bappenas, 2000. *Studi Pemetaan Sosial Budaya di Provinsi Lampung*. Jakarta: BAPPENAS).

pegunungan dan dataran rendah sepanjang sungai di sekitar pantai timur dan selatan. Kemudian berkembang dalam wilayah kampung (desa) seiring dengan semakin bertambahnya jumlah warga. Kampung-kampung tersebut semakin menyebar dengan lahan pertanian disekitarnya. Mereka tetap berpegang pada garis keturunan laki-laki (*patrilineal*) yang tegas dengan anak laki-laki tertua sebagai pemimpin utama dalam struktur otoritas adat.

Setelah menetap, tata kehidupan masyarakat adat Lampung menganut sistem *keratuan*, yang dipimpin oleh *Ratu* atau *Umpu* dan dipilih berdasarkan asas *primus inter pares*.<sup>189</sup> Masing-masing *Ratu* berkuasa di wilayahnya bersama para pengikutnya dalam satu keturunan. Kesatuan masyarakat adat ini berbeda menurut asal suku yang masing-masing terdiri atas berbagai *buai* atau *kebuwayan* dan masing-masing *kebuwayan* terdiri atas beberapa *suku*. Setiap suku asal memiliki wilayah teritorial disebut *marga* dan setiap *kebuaiyan* memiliki wilayah teritorial disebut *kampung* atau *pekon*, *anek*, dan *tiyuh*. Masing-masing wilayah *pekon* terdiri atas beberapa *suku* dan masing-masing *suku* terdiri atas beberapa keluarga besar (*cangka*). Kemudian pada masing-masing keluarga besar terdiri atas beberapa keluarga inti (*nuwa*).<sup>190</sup>

#### 4.2.2. Prinsip Nilai Dan Struktur Masyarakat Adat

Masyarakat adat Lampung secara umum dibagi menjadi dua, yakni "*Pepadun*" yang berdiam di pedalaman dan "*Saibatin*" atau "*Peminggi*" yang berdiam di sepanjang wilayah pesisir. Dalam pergaulan hidup mereka berpedoman pada empat nilai dasar, yakni *bejuluk beadek* (memiliki gelar adat), *nemui nyimah* (ramah, terbuka, peduli), *nengah nyappur* (bermasyarakat, bergaul), dan *sakai sambayan* (tolong menolong, gotong-royong, bahu membahu, saling memberi dan menerima), yang semuanya disebut *Pi-il Pesenggiri*. Prinsip nilai *Pi-il Pesenggiri* ini berpedoman pada *Titie Gematei* adat dari leluhur, merupakan nilai dasar yang intinya setiap anggota dituntut untuk bermoral tinggi atau berjiwa besar agar hidup secara logis, etis dan estetis.<sup>191</sup> Nilai dasar tersebut diwadahi dalam struktur adat, dimana para *penyimbang* (kepala atau pemuka suku) berperan penting dalam menentukan tata cara dan haluan hidup masyarakat adat. Peran para *penyimbang* dalam kelembagaan adat antara lain selalu

<sup>189</sup> Depdikbud. 1977/1978. *Sejarah Daerah Lampung*. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya. Bandar Lampung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., hal. 54.

<sup>190</sup> Joan Hardjono (Ed). 1985. *Transmigrasi: dari kolonisasi sampai swakarsa*. Jakarta: Gramedia., hal. 17.

<sup>191</sup> Rizani Puspawidjaja. 2002. *Adat dan Budaya Lampung*. Bandar Lampung: Pusat Informasi Budaya Lampung dalam Jurnal Kabar Kampung Tuha, Edisi 01 Bulan September 2002, halaman 8.

melakukan *proatin* (bermusyawarah), yang diketuai oleh pemuka adat tertua, setiap melaksanakan kegiatan adat.

#### 4.2.3. Pergeseran Wilayah Teritorial Adat

Pada masa Kesultanan Banten, masyarakat adat Lampung sudah tidak lagi berbentuk keratuan, tetapi dalam bentuk “marga” yang membawahi “pekon-pekon”. Makna substantif marga sudah digeser ketika kedudukan pengetua marga dijadikan kepala marga yang disebut “bandar”, meskipun masih didasarkan pada faktor keturunan. Kemudian pada masa kolonial Belanda makna marga semakin dikaburkan menjadi semakin jauh dari makna substantifnya, dan kedudukan kepala marga menjadi terancam. Pada pertengahan abad 19 sistem marga tidak diakui dan dipersempit pada wilayah kampung (desa). Ini berarti hak ulayat marga menjadi hilang dan juga diperparah ketika berpedoman pada kekuatan hukum *domeinverklaring*. Struktur otoritas adat diubah menjadi struktur otoritas wilayah administratif pemerintah kolonial. Di atas kampung diangkat seorang demang (banyak yang bukan dari etnik Lampung) yang berada dibawah kontrol langsung seorang *controleur* Belanda.<sup>192</sup>

Baru pada tahun 1928 sistem marga diakui kembali sebagai *inlandse gemeente*, yakni daerah otonom tingkat terbawah yang membawahi kampung-kampung. Pada masa ini wilayah marga bukan lagi hanya dimiliki oleh masyarakat adat Lampung, tetapi juga untuk kelompok pendatang. Kepala marga masyarakat adat Lampung disebut *Pesirah* sedangkan kepala marga penduduk pendatang disebut *Pasemah*. Pasemah dipilih melalui pemilihan umum dan hubungan genealogis tidak lagi menjadi faktor utama.<sup>193</sup> Disini terkonstruksi dualisme ikatan sosio-kultural antar penduduk dalam kesatuan wilayah teritorial marga, yakni diikat secara adat dan secara administratif pemerintahan.

Ini jelas bahwa pembentukan struktur otoritas baru tersebut lebih ditujukan untuk memudahkan kontrol politik. Wilayah marga dengan hak ulayatnya dipersempit setelah dikurangi untuk wilayah cadangan hutan dan untuk dijadikan hak *erfpacht* yang kemudian diserahkan kepada pemodal asing.<sup>194</sup> Kedudukan tanah ulayat yang sudah berkurang itu menjadi terkonsentrasi kepada kewenangan kepala marga adat (pesirah) sebagai pemimpin wilayah otonom tingkat bawah. Di

<sup>192</sup> Luas tanah yang diakui hanya sejauh 6 km dari desa dan 3 km dari pemukiman sementara (Bruno Verbist dan Gamal Pasya. 2004. *Perspetif Sejarah Status Kawasan Hutan, Konflik dan Negosiasi di Sumberjaya, Lampung Barat, Provinsi Lampung*. Agrivita, Vol. 26 No.1 Maret 2004, hal. 22).

<sup>193</sup> Joan Hardjono (Ed). 1985. *Op.Cit.*, hal. 21.

<sup>194</sup> Mulai tahun 1890 sudah dibuka wilayah perkebunan di dekat pelabuhan Panjang dengan mendatangkan pekerja dari Jawa.

bawah kewenangan pesirah itulah banyak penduduk pendatang memanfaatkan untuk mendapatkan tanah.<sup>195</sup>

### 4.3. Struktur Penguasaan Agraria dan Kondisi Petani Pra Kemerdekaan

#### 4.3.1. Akibat Kebijakan Agraria Kolonial

Sebelum kedatangan VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) kehidupan masyarakat Lampung di bawah kekuasaan kesultanan Banten cukup tenteram, terutama masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1682). Masyarakat Lampung mulai terusik ketika VOC masuk menguasai hasil pertanian di wilayah Lampung. Ini diperoleh dari hasil adu domba mendukung Sultan Haji dalam merebut kedudukan Sultan dari Sultan Ageng Tirtayasa. Sejak itu mulai terjadi perpecahan antar tokoh adat, yakni ada yang mendukung Sultan Haji (seperti Jenang Raja Ngembar di Semangka) dan ada yang menolak (pendukung Sultan Ageng Tirtayasa). Masyarakat Lampung mulai terang-terangan menolak menjadi bagian dari wilayah kesultanan Banten ketika dipimpin oleh Aria Adi Sendika (1751) yang diangkat atas dukungan VOC. Resistensi secara besar-besaran melawan kolonial Belanda berlangsung sekitar selama 40 tahun (1817-1856) dan menewaskan ratusan korban di kedua belah pihak.

Selesai perang Diponegoro dikeluarkan kebijakan *cultuurstelsel* (1830-1870). Sistem ini merupakan intensifikasi sistem tradisional, dimana usaha perkebunan negara sedapat mungkin mereduksi biaya produksi dan kalau mungkin menghilangkannya dengan mengkaitkan sistem tradisional yang masih berjalan.<sup>196</sup> Peran dominan negara dalam sektor pertanian ini mendapat tekanan dari kelompok liberal karena menutup pintu akses mereka dalam mengembangkan usaha pertanian di daerah jajahan. Akhirnya dikeluarkan kebijakan *Domeinverklaring* melalui *Agrarische Wet* (1870) dan lebih dipertegas dalam *Agrarische Besluit* (1870). Kebijakan agraria ini mencabut keberlakuan hukum adat atas pemilikan tanah dan berubah menjadi tunduk di bawah hukum Eropa. Sejak ini semua tanah adat di Lampung menjadi tanah negara. Tanah ulayat marga diakui setelah dikurangi sebagai cadangan hutan dan tanah untuk hak *erfpacht* yang kemudian oleh Pemerintah Hindia Belanda diberikan hak pengelolaannya kepada para pemodal asing.<sup>197</sup> Menjelang akhir abad 19 banyak

---

<sup>195</sup> Joan Hardjono (Ed). 1985. Op.Cit., hal. 23.

<sup>196</sup> Suhartono. 1995. *Bandit-Bandit Pedesaan: Studi Historis 1850-1942 di Jawa*. Yogyakarta: Aditya Media, hal. 67.

<sup>197</sup> Joan Hardjono (Ed). 1985. Op.Cit.

perkebunan di buka di Lampung, yang pertama kalinya (1890) dibuka di onderafdeling Telukbetung.

#### 4.3.2. Program Kolonisasi

Memasuki abad ke-20 pemerintah kolonial Belanda mulai berkonsentrasi pada pembangunan sarana dan prasarana fisik, administrasi pemerintahan, kependudukan, kolonisasi, dan lain-lain. Semuanya menunjang kekuatan kontrol secara politik dan pertumbuhan ekonomi melalui meningkatkan hasil produksi pertanian. Langkah pertama wilayah Lampung dijadikan daerah Karesidenan, bagian dari provinsi Sumatera Selatan. Kemudian dikembangkan wilayah perkebunan dan pengadaan kebutuhan tenaga kerja melalui kebijakan kolonisasi. Selain berkembang desa-desa inti dari etnik Jawa, juga terjadi migrasi penduduk secara spontan menuju ke Lampung, terutama alasan ekonomi.<sup>198</sup> Arus migrasi spontan terus meningkat dan bermukim secara berkelompok, sehingga membentuk perkampungan-perkampungan baru.<sup>199</sup>

Program kolonisasi membuat desa-desa pendatang menjadi menyendiri (*enclave*) terpisah secara geografis dan sosio-kultural dengan komunitas etnik Lampung (*segregated pluralism*).<sup>200</sup> Kondisi ini menyebabkan berkembangnya situasi saling keterasingan, perselisihan dan pertantangan antar etnik. Selain itu, para kondisi para kolonis kembali miskin sebagaimana kemiskinan yang mereka alami di daerah asal.<sup>201</sup> Kondisi ini juga dialami oleh para migran yang menjadi buruh perkebunan di Sumatra Timur pada umumnya.<sup>202</sup> Program kolonisasi ternyata hanya sebatas slogan kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda guna membungkus kepentingan ekonomi agar lebih leluasa dan efektif dalam penguasaan tanah pertanian dengan tenaga kerja murah.<sup>203</sup> Disinilah nilai-nilai eksploitatif berbasis kapitalisme kolonial berkembang dengan leluasa. Arah perkembangan tata kehidupan politik-ekonomi yang mendukung *deagrarianisasi* sudah dibangun sejak masa kolonial.

---

<sup>198</sup> H. Sugianto. 1987/88. *Analisis Migrasi Penduduk Berdasarkan Data SUPAS 1985 Provinsi Lampung*. Yogyakarta: Kerjasama Kantor Menteri Negara, hal. 1-2.

<sup>199</sup> Joan Harjono (Penyunting). 1985. Op.Cit., hal. 24.

<sup>200</sup> Joan Harjono (Penyunting). 1985. Ibid., hal. 13.

<sup>201</sup> Amral M Syamsu. 1985. *Penyelenggaraan Kolonisasi dan Transmigrasi*. Dalam Hardjono (Penyunting), *Transmigrasi: Dari Kolonisasi sampai Swakarsa*. Jakarta: PT Gramedia, hal. 12.

<sup>202</sup> Razif. 1991. Op.Cit.

<sup>203</sup> H. Sugianto. 1987/88. Op.Cit., hal 1-2.

#### 4.4. Struktur Penguasaan Agraria dan Kondisi Petani Masa Kemerdekaan

##### 4.4.1. Migrasi Penduduk dan Persoalan Pertanahan Masa Orde Lama

Program transmigrasi yang dimulai tahun 1950 telah berhasil memukimkan penduduk pendatang secara menyebar dalam desa-desa baru. Dalam kurun waktu 15 tahun (1950-1965) kurang lebih ada 55.000 keluarga telah dimukimkan oleh Jawatan Transmigrasi Lampung.<sup>204</sup> Program ini memicu terjadinya migrasi swakarsa dan spontan murni yang juga membutuhkan lahan. Akibatnya, pertumbuhan penduduk di Lampung menjadi semakin melaju dengan cepat.

Kondisi tersebut menciptakan bertambahnya jumlah penduduk miskin dan mendorong dibukanya tempat-tempat pemukiman dan lahan-lahan pertanian baru (kondisi ini sebenarnya sudah terjadi pada masa kolonisasi). Pelzer menyimpulkan bahwa hanya dalam jangka waktu satu generasi saja mereka sudah akan menghadapi kekurangan lahan dan beberapa orang dari generasi baru sudah harus mencari lahan baru di luar daerah tersebut.<sup>205</sup> Penduduk pendatang banyak yang membuka lahan-lahan baru di kawasan hutan yang tidak terkait sama sekali dengan “marga”, karena daerah-daerah baru tersebut tidak berada di bawah wilayah “marga”. Penduduk etnik Lampung juga sudah mengalami penyempitan lahan dan merasa tecancam kelangsungan hidupnya.<sup>206</sup> Oleh karena itu pada masa ini gejala “*saring poverty*” (Geertz) atau berbagi kemiskinan (Sajogjo) dan keterkaitan antara “*carrying capacity*” dan “*sustainable development*”<sup>207</sup> sudah mulai tampak. Beberapa bentuk solusi baik langsung maupun tidak langsung antara lain adalah: (1) pada tahun 1960, persoalan tersebut sudah di diantisipasi oleh pemerintah daerah dengan memberi ijin membuka kawasan hutan kepada penduduk untuk dijadikan lahan pertanian; (2) terjadi proses nasionalisasi perkebunan kolonial yang secara berangsur dikuasai petani. Ini dianggap sebagai bentuk ‘*land-reform spontan*’ yang dilakukan oleh mereka yang dahulunya tergusur;<sup>208</sup> (3) dengan disahkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 memberi peluang penduduk yang memiliki tanah luas untuk ikut

---

<sup>204</sup> Sugiyanto H. 1987/88. Ibid., hal. 2; Sayogyo. 1982. *Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 287-291.

<sup>205</sup> Joan Harjono (Penyunting). 1985. Op.Cit., hal. 8.

<sup>206</sup> Sajogyo, 2006. *Ekosilogi: Deideologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi (Petani dan Perdesaan sebagai Kasus Uji)*. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, hal. 396.

<sup>207</sup> Roger Mark De Souza, John S. Williams, and Meyerson Frederick A.B. 2003. *Critical Links: Population, Health, and the Environment*. Population Reference Bureau: Population Bulletin, Vol.58, No.3. September 2003.

<sup>208</sup> Mansour Fakhri. 1995. Op.Cit., hal. 5.

melaksanakan program *land reform*, dengan menyerahkan sebagian tanahnya kepada negara untuk dibagikan kepada penduduk yang membutuhkan.

#### 4.4.2. Migrasi Penduduk dan Persoalan Pertanahan Masa Orde Baru

##### 4.4.2.1. Pertumbuhan Penduduk dan Kebutuhan Lahan

Pasca tahun 1960-an laju pertumbuhan penduduk semakin cepat dan kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> semakin meningkat (Tabel 4).<sup>209</sup> Faktor penyebabnya diduga karena tingginya pertumbuhan penduduk alami, keberhasilan para transmigran yang mampu menarik arus migrasi swakarsa, dan keberhasilan pembangunan di daerah Lampung menjadi daya tarik para migran spontan dari daerah lain, terutama dari Pulau Jawa.

Tabel 4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Tahun

Tahun	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan/Km <sup>2</sup>
1961	1.667.511	52
1971	2.775.695	78
1980	4.624.785	131
1990	6.015.803	170
2000	6.998.535	189

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2000.

Selama periode tahun 1971-1980 telah terjadi peningkatan volume migrasi masuk sebesar 78,7 persen atau setiap tahunnya terjadi peningkatan volume migrasi masuk sebesar 8,7 persen. Tetapi pada lima tahun berikutnya (1985) terjadi penurunan, yaitu selama periode tahun 1980-1985 migrasi masuk sebesar 0,76 persen per tahun.<sup>210</sup> Gejala ini diduga berkaitan dengan kebijaksanaan transmigrasi lokal (translok) dan ditutupnya Lampung sebagai daerah penerima program transmigrasi.<sup>211</sup>

Kebijakan formal tersebut tidak bertahan lama karena arus migrasi dari beragam etnik ke Lampung masih tetap besar. Bahkan mengalami peningkatan di luar kemampuan kontrol pemerintah daerah, tidak terkoordinir dan sebagian menempati kawasan hutan. Wilayah Lampung memang strategis menjadi tempat persinggahan awal para migran ke pulau Sumatera, dan sejak ketentuan

<sup>209</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2000. *Lampung Dalam Angka 2000*. Bandar Lampung: CV. Lima Saudara.

<sup>210</sup> Sugiyanto. 1987/1988. Op.Cit., hal. 35.

<sup>211</sup> Slamet Rusmialdi. 1995. *Kepeloporan Transmigran Dalam Pembangunan dan Motivasinya di Provinsi Lampung*, dalam Seri Monografi: "Transmigrasi dan Pembangunan Daerah", Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung; Menteri Transmigrasi dan Perambah Hutan. 1995. *Pidato Dies Natalis Universitas Lampung ke 30 dalam Seminar Memperingati 90 tahun Penempatan Kolonis yang Pertama di Lampung*. Bandar Lampung: Kanwil Departemen Transmigrasi dan PPH Provinsi Lampung.

Belanda tentang adat *gemeenschappen* dihapus, maka tidak ada rintangan lagi bagi mereka yang bukan warga “*marga*” untuk mendapatkan hak pakai tanah dalam wilayah bekas “*marga*”. Daya tarik hak pakai tanah tersebut antara lain yang mendorong penduduk luar bermigrasi ke Lampung.

Mereka itu kemudian dikenal sebagai penduduk liar (perambah hutan). Program translok sebagai solusi juga dianggap gagal, karena selain kurang diminati masyarakat juga memunculkan sejumlah masalah baru.<sup>212</sup> Mereka banyak yang frustrasi, terlunta-lunta, sedangkan persoalan yang terjadi di desa asal (kawasan hutan) juga belum seluruhnya tuntas dapat ditangani.<sup>213</sup> Kemudian mereka banyak kembali di daerah asal, memasuki kawasan hutan lebih jauh lagi untuk membuka lahan-lahan pertanian baru, menduduki lahan-lahan bekas hutan yang telah ditebang perusahaan HPH, menjadi pencuri kayu, dan menjadi kelompok yang oleh Loekman Soetrisno disebut sebagai *environment refugee*.<sup>214</sup>

Akibatnya, sebagaimana tampak pada Tabel 5 menurut catatan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bahwa hingga tahun 2002 sebanyak 54,46% kawasan hutan di Provinsi Lampung yang rusak dan sebagian besar berada di kawasan hutan lindung. Meskipun tidak semua akibat dari ulah para petani,<sup>215</sup> tetapi pemerintah pusat dan daerah tetap menuduh akibat ulah para petani. Kebijakan agraria pada satu sisi dengan jelas diorientasikan dengan meminimalisir akses petani, tetapi pada sisi lain membuka luas akses para pemodal. Jadi pada masa kemerdekaan, terutama selama masa kekuasaan rezim Orde Baru dengan jelas deagrarianisasi semakin diperkuat.

Tabel 5 Jenis Kawasan dan Tingkat Kerusakan Hutan di Provinsi Lampung Tahun 2002

Jenis Kawasan Hutan	Luas (Ha)	Kerusakan Hutan	
		Luas (Ha)	%
Hutan Suaka	462.030	191.003	41,34
Hutan lindung	317.615	222.012	69,90
Hutan produksi terbatas	33.358	19.891	59,63
Hutan produksi tetap	191.732	114.329	59,63
Jumlah	1.004.735	547.235	54,46

Sumber: Sunarto. 2007. Op. Cit., hal. 10.

<sup>212</sup> Slamet Rusmialdi. 1995. Ibid.

<sup>213</sup> Surat Kabar Harian Kompas, Desember 1992

<sup>214</sup> Loekman Soetrisno. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.

<sup>215</sup> Contohnya pada tahun 1999 terjadi kasus penebangan kayu di kawasan hutan lindung kabupaten Lampung Barat yang dilakukan oleh perusahaan atas ijin Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Tindakan tersebut diprotes keras oleh Dewan Tani Lampung.



#### **4.4.2.2. Berebut Tanah**

Pada sisi lain antara rakyat bawah, pemerintah dan perusahaan terus saling berebut tanah. Pada tahun 2002 tercatat status tanah berkonflik dengan masyarakat di wilayah Provinsi Lampung seluas 398.425 hektar dan yang paling banyak adalah lahan usaha agro industri, yakni seluas 159.640 hektar. Tanah-tanah tersebut terutama berada di bawah penguasaan dan pengelolaan para pemodal. Kemudian lahan-lahan yang sudah dikelola masyarakat yang berstatus sebagai kawasan hutan lindung seluas 121.250 hektar. Lahan-lahan usaha tambak moderen yang secara besar-besaran dikelola oleh perusahaan pada awal tahun 1990-an juga berkonflik dengan masyarakat seluas 78.650 hektar.<sup>216</sup> Belum lagi tanah-tanah akibat obyek *land reform* yang diserahkan kepada negara untuk program transmigrasi. Jumlahnya tidak sedikit dan menjadi sumber konflik horizontal dan vertikal akibat lemahnya manajemen pemerintahan.

Dilihat dari tataran institusional nampaknya bermuara pada tanggung jawab negara sebagai pemegang “kekuasaan” atas tanah untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Jika dilihat dari tataran perilaku para aktor, akibat dari tindakan kolaboratif yang secara sadar dilakukan antara para penguasa dan pengusaha. Bahkan mungkin mereka juga tahu berbagai konsekuensi yang tidak diharapkan dari tindakan yang dilakukan. Tetapi karena kesadaran palsu maka jeritan petani dalam kacamata pembangunan dianggap sebagai bagian dari harapan datangnya kesejahteraan yang akan dinikmati dalam jangka panjang.

#### **4.2.2.3. Kemiskinan Penduduk Pedesaan Sebagai Persoalan Mendasar**

Dalam dinamika kependudukan, masyarakat petani di pedesaan semakin dihadapkan pada akselerasi berbagai persoalan hidup yang antara lain tergantung pada ketersediaan lahan pertanian. Kebijakan agraria dan konflik pertanahan tidak terlepas dari praktek-praktek yang dilakukan penguasa pada masa Orde Baru. Akibat dari persoalan ini telah berimplikasi pada akselerasi perubahan sosial (politik, ekonomi dan kultural) yang negatif bagi perbaikan nasib petani.

Tidak heran jika hampir sewindu era reformasi berlangsung kondisi kehidupan petani di pedesaan tidak mengalami perbaikan yang berarti, bahkan masih tetap banyak yang miskin. Jumlah rakyat miskin di Lampung meningkat dilihat dari berbagai indikator garis kemiskinan, dan tingkat pengangguran bertam-

---

<sup>216</sup> Sunarto. 2007. Op.Cit. hal. 183.

bah.<sup>217</sup> Kedua angka vital ini daerah Lampung dikhawatirkan akan sulit mencapai target *Millenium Development Goals* (MDGs) dengan bebas rakyat miskin pada tahun 2015. Belum lagi jika dikaitkan dengan kemungkinan berhasil dalam mengurangi angka gizi buruk yang masih tinggi (225 kasus) mengalami lonjakan besar dibanding tahun 2005 (181 kasus). Renstra Provinsi Lampung Periode Tahun 2006-2009 juga secara tegas berkomitmen menanggulangi kemiskinan.

#### 4.5. Sejarah Ringkas Gerakan Agraria di Lampung

Konflik agraria berkepanjangan di Indonesia adalah warisan kolonialisme yang terpusat pada persoalan ekonomi-politik dan berlanjut pada masa kemerdekaan. Kondisi ini menurut teori Edward Azar,<sup>218</sup> minimal didasarkan pada empat kondisi utama. *Pertama*, adanya beragam identitas komunal yang mewarisi prinsip “memecah belah dan menguasai”. Negara dijadikan alat dominasi kelompok yang satu dan tidak mau merespon kebutuhan kelompok yang lain. *Kedua*, terjadi perampasan kebutuhan dasar kelompok masyarakat tertentu dan negara gagal mengatasinya. *Ketiga*, peran negara dalam posisi kritis (tidak mampu, picik, rapuh, dan otoriter) dalam memuaskan keinginan dasar rakyatnya. *Keempat*, keterkaitan internasional dalam posisi tergantung dalam hubungan politik-ekonomi. Formasi institusi sosial dan politik dalam negeri serta dampaknya terhadap peran negara sangat dipengaruhi oleh pola hubungan di dalam sistem internasional.

Kesimpulan Azar tersebut menunjukkan adanya dua gugus realitas sistem agraria, yakni masa kolonialisme dan kemerdekaan. *Pertama*, keduanya berbeda dalam episode kekuasaan rezim tetapi dalam beberapa hal mengandung unsur kontinuitas, seperti “hak menguasai (sumber agraria) oleh negara” yang bersifat antagonis terhadap petani. Dengan kata lain, kebijakan agraria kolonial berbasis “*domeinverklaring*” masih tetap berlaku pada masa kemerdekaan. *Kedua*, kedua gugus sistem agraria tersebut terpusat pada orientasi ekonomi-politik, berada pada jalur tahapan kapitalisme (kolonial hingga neoliberal) dan berjalan seiring

---

<sup>217</sup> Data resmi Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin tahun 2006 tercatat sebanyak 1.561.700 jiwa, atau 21,1 persen dari jumlah penduduk Lampung yang tercatat sebanyak 7,4 juta jiwa. Angka kemiskinan di Lampung ini ternyata lebih tinggi dari angka kemiskinan tingkat nasional sebesar 17,75 persen. Angka pengangguran pada tahun 2006 tercatat 375.325 jiwa, merupakan suatu peningkatan sangat signifikan dibanding angka pengangguran tahun 2005 yang tercatat 366.920 jiwa (Bappeda Propinsi Lampung, 2006. *Penganggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Lampung*. Makalah disampaikan dalam acara Seminar “*Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Lampung*”, yang diselenggarakan oleh KAGAMA Lampung, Tanggal 14 Desember 2006 di Bandar Lampung).

<sup>218</sup> Hugh Mial, Oliver Ramsbothan dan Tom Woodhouse. 2000. Op.Cit., hal. 105-117.

dengan munculnya dua realitas sosial lain yang terkait, yakni konflik dan gerakan agraria.

Gambaran historis tentang perkembangan kapitalisme dan gerakan agraria dari masa kolonial hingga masa kemerdekaan, pada satu sisi, dalam hal tertentu terdapat diskontinuitas, tetapi dalam beberapa hal lain bersifat kontinum. Sistem kapitalisme berkembang di dalam ruangnya sendiri sesuai dengan kepentingan rezim. Posisi petani dalam sistem agraria kolonial dan kemerdekaan tetap marginal dan karena posisinya itu selalu direspon oleh petani dengan gerakan perlawanan. Secara historis, gerakan-gerakan agraria di Lampung merupakan suatu proses reaksi adaptif terhadap perkembangan sistem agraria yang tetap tidak responsif terhadap nasib petani. Gerakan tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat, yakni: 1) gerakan tradisional, 2) gerakan transisi moderan, 3) gerakan moderen, dan 4) gerakan transnasional.

### **1. Gerakan Tradisional**

Selama masa kolonial di Lampung telah berkembang tiga tahapan sistem kapitalisme (perdagangan, negara dan korporasi) yang berpengaruh terhadap perubahan sistem agraria. Perubahan struktural tersebut memperlemah dan meminggirkan otoritas masyarakat adat. Kekuasaan tertinggi masyarakat adat atas sumberdaya agraria dirampas dan diganti dengan kekuasaan kolonial. Tindakan kolonial ini mendapat reaksi penolakan keras dari masyarakat adat. Reaksi penolakan tersebut diwujudkan dalam gerakan tradisional. Dikatakan gerakan tradisional karena didasarkan pada ikatan (solidaritas) tradisi yang memiliki kekuatan sentimen, perasaan dan ikatan primordial (masyarakat adat marga), serta diperkuat oleh ideologi tradisional. Bentuk gerakan tradisional ini bersifat komunal terpisah-pisah (*segmented*), sehingga memberi corak sebagai gerakan yang berlokus lokal, mudah dilokalisir dan dilemahkan. Di Lampung, gerakan perlawanan keras masyarakat adat terjadi mulai sejak intervensi VOC sampai terbunuhnya Raden Intan II tahun 1856. Hancurnya gerakan perlawanan masyarakat adat di Lampung bukan hanya karena kuatnya serangan balik pihak lawan (penguasa kolonial) tetapi juga karena terjadi penggerosakan (penghianatan) dari dalam gerakan itu sendiri. Kepala-kepala kampung mudah terjerat siasat kolonial Belanda yang terkenal, yakni *divide et empera*, mempengaruhi dan mengadu domba. Seperti Sultan Lingga berhasil dibujuk untuk menyerahkan buronan, yakni Raden Imba II, dan juga terbunuhnya Raden

Intan II oleh Belanda akibat pengkhianatan Raden Ngerapat, Kepala Kampung Tataan Udik.<sup>219</sup>

Seperti yang terjadi di Lampung, protes dan pemberontakan petani di Jawa selama masa kolonialisme sebagaimana disajikan dalam ketiga karya Sartono Kartodirdjo (*Protest Movement in Rural Java*, 1973; *Pemberontakan Petani Banten 1888*, 1984; *Ratu Adil*, 1984) juga dapat dilemahkan dan dipatahkan. Bahkan melalui kebijakan agraria yang dikeluarkan akibat tekanan para pemodal, maka sistem agraria semakin diperkuat menguntungkan pemerintah Belanda dan para pemodal asing. Gerakan-gerakan tradisional di Indonesia terjadi dengan basis ideologi tertentu sebagai tandingan.<sup>220</sup> Jika gerakan tradisional di Banten dan di Sukamanah Tasikmalaya berbasis ideologi agama, maka gerakan tradisional di Lampung pada masa awal pemerintahan kolonial berbasis pada ideologi nativisme, yakni berorientasi pada kembalinya tata kehidupan masyarakat adat.

## 2. Gerakan Transisi Moderen

Gerakan transisi moderen tidak lagi berbasis pada ideologi nativisme tetapi pada ideologi kedaulatan atau kemerdekaan. Gerakan ini muncul seiring dengan berdirinya beragam organisasi gerakan lintas etnik dan agama melancarkan aksi-aksi anti asing, menentang dominasi kolonial atau secara implisit termasuk menentang sistem agraria kolonial. Di Lampung, lawan gerakan tidak hanya tertuju kepada penguasa kolonial tetapi juga kepada para ketua marga (pesirah) bentukan kolonial (1928). Simbol penolakan diaktualisasikan dalam tindakan atau pernyataan dalam setiap aksi-aksinya. Sistem marga ditentang dan dituntut segera dihapuskan karena dianggap melestarikan feodalisme yang dikontrol kolonialisme dan imperialisme, sehingga melegitimasi keberlanjutan penderitaan petani. Mereka mendirikan kelompok Anti Sistem Marga (*Anti Marga Stelsel*) dan membentuk Panitia Penggugat Stelsel Marga, kemudian mereka dengan gencar melancarkan propaganda anti Pesirah. Gerakan ini didukung oleh PKI, SI dan PNI tetapi ciri gerakannya masih tradisional dan lokal (daerah Lampung) dan terkonsentrasi di perkotaan atau *segmented*.<sup>221</sup>

---

<sup>219</sup> Depdikbud. 1987. *Risalah Peperangan Di Daerah Lampung Tahun 1856: Gugurnya Raden Inten II Pahlawan Nasional Daerah Lampung*. Alih Bahasa M. Tahir Raden Batin. Bandar Lampung: 31/12/1987, hal. 43-89.

<sup>220</sup> Beberapa ideologi tandingan yang dipergunakan dalam gerakan tradisional adalah millerianisme (ajaran akan datangnya jaman keemasan), mesianisme (kepercayaan kepada ratu adil), nativisme (gerakan kembali ke abad kuno) dan perang suci (ajaran untuk berjihad) (Sartono Kartodirdjo. 1984. Op.Cit., hal. 8-10).

<sup>221</sup> Depdikbud. 1987. Op.Cit., hal. 100-105.

Mekipun dilihat pola organisasinya lebih maju dari gerakan tradisional, tetapi gerakan transisi moderen tersebut belum termanafestasi dalam solidaritas organisasional yang dapat mengintegrasikan masyarakat Lampung secara horizontal dan dalam jejaring skala nasional. Gerakan inipun gagal karena selain masih menyentuh pada kalangan menengah atau hanya sampai pada lapisan tipis penduduk desa juga terjadi penangkapan besar-besaran oleh penguasa kolonial sekitar tahun 1935-1937.<sup>222</sup>

### **3. Gerakan Moderen**

Aksi penangkapan tidak menyurutkan semangat perjuangan dan organisasi gerakan semakin berkembang ke arah bentuk gerakan moderen. Para elit organisasi semakin bersemangat untuk berjuang dan mampu mengkaitkan kekuatan vertikal dan horizontal. Ke atas memperkuat jejaring tingkat nasional dan ke bawah menjangkau akar rumput. Proses komunikasi (penyadaran) dan partisipasi politik tidak lagi terkonsentrasi pada kalangan elit organisasi tetapi semakin merasuk ke lapisan bawah. Aspirasi, partisipasi dan kesadaran politik petani menjadi semakin terbuka dan terintegrasi ke dalam arus gerakan nasional. Masyarakat Lampung semakin akrab berkenalan dengan ideologi-ideologi politik egalitarian dari luar desa dan melalukan afiliasi politik, sehingga gerakan petani meninggalkan ciri transisi menjadi gerakan bercorak moderen. Gerakan moderen lebih terintegrasi dan massa petani dapat dimobilisasi ke dalam gerakan-gerakan politik, sehingga berhasil merebut kemerdekaan Indonesia (1945).

Gerakan agraria meskipun tidak berposisi sebagai elemen sentral dalam arus gerakan perubahan tetapi keberadaanya tetap menjadi bagian utama dalam gerakan transformasi kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan obyek tanah menjadi masalah utama dan petani tampil sebagai basis utama dalam gerakan politik agraria moderen. Hanya saja, petani pada masa ini menjadi terpecah dalam beberapa afiliasi politik seiring berkembangnya beberapa organisasi gerakan dengan aliran atau ideologi politik yang beragam. Organisasi-organisasi petani lahir dan berkembang dibidani oleh partai-partai politik. Realitas ini mengubah posisi desa menjadi ladang politik nasional, atau persoalan politik agraria tingkat desa semakin terintegrasi ke arena politik nasional.

Realitas di atas menjadikan kepentingan petani sebagai bagian dari isu agraria yang terpolitisasi ke dalam agenda politik nasional melalui organisasi

---

<sup>222</sup> Depdikbud. 1987. *Ibid.*, hal. 110.

petani yang berada di bawah kontrol partai-partai induk. Keragaman afiliasi politik petani kemudian terpolarisasi ke dalam dua kelas, yakni petani miskin dan tuan tanah. Polarisasi ini jika ditarik pada arena ekonomi-politik internasional terpusat atau berporos pada pertarungan antara dua ideologi asing, yakni sosialisme dan kapitalisme. Pertentangan antara tuan tanah dan petani membuat ketegangan di desa jauh lebih keras daripada di kota. Tetapi, kapabilitas negara dan partai politik ternyata tidak cukup kuat dalam menghadapi gejolak agraria di pedesaan. Justru lembaga tradisional yang berakar pada masyarakat pedesaan yang cukup kuat mengatasi gejolak agraria di aras desa.<sup>223</sup> Agenda gerakan agraria yang syarat kepentingan petani miskin menjadi kandas.

#### 4. Gerakan Transnasional

Realitas di atas juga bermakna sebaliknya, yakni ruang kapitalisme semakin terbuka. Era modernisasi pembangunan bergerak cepat mencapai sasaran jauh ke dalam relung masyarakat pedesaan dan berjalan seiring dengan berkembangnya gerakan-gerakan moderen bersifat konsensus (*consensus movement*) yang terorganisir dan terintegrasi. Hingga akhir dasawarsa tahun 1980-an, ketika konflik pertanahan semakin sering terjadi akibat penggusuran, pengambil-alihan dan pembebasan tanah-tanah komunitas setempat maka gerakan petani bersifat konflikktual menjadi sering muncul, meskipun masih berciri sederhana seperti aksi-aksi protes yang sporadis, spontan, dan tidak terorganisir dengan baik. Memasuki dasawarsa tahun 1990-an mulai muncul gerakan-gerakan lokal-tradisional, yakni mengandalkan otoritas tradisional setempat. Gerak perjuangan petani tersebut tetap berbasis pada isu material (pertanahan).

Pada tataran makro nasional (dan juga dirasakan di wilayah Lampung) sejak masa itu terjadi tarik menarik antara kapitalisme aristokrasi (berporos pada keluarga cendana) yang mulai mapan dengan arus neoliberalisme internasional. Sejalan dengan berkembangnya fenomena tersebut, gerakan agraria mulai di dikembangkan ke arah gerakan sosio-politik berbasis pada isu-isu non meterial (termasuk kearifan lokal) yang terintegrasi dengan arus dukungan gerakan internasional. Tetapi lawan yang mereka bangun terkonsentrasi (secara tidak disadari) pada kekuatan negara dan belum terbangun jaringan horizontal (*segmented*) dan jaringan vertikal tingkat nasional (*integrated*).

---

<sup>223</sup> Djoko Suryo. 1984. *Gerakan Petani*. Dalam Prisma. 1984. *Kelas Menengah Baru: Menggapai Harta dan Kuasa*. Jakarta: LP3ES. No.2, Februari 1984 Tahun XIII, hal. 24.

Semakin kuat tekanan neoliberal berjalan seiring dengan semakin kuatnya tekanan masyarakat sipil terhadap rezim penguasa. Dengan semakin banyaknya terjadi konflik pertanahan di Lampung, maka tuntutan perubahan ke arah sistem agraria yang adil dan demokratis semakin kuat, termasuk di dalamnya gerakan petani. Ketika rezim penguasa sudah digulingkan, para aktivis gerakan tidak menyadari bahwa gerakan mereka masuk dalam jebakan arus kapitalisme global (neoliberal). Mereka inilah (rezim pasar bebas) yang semakin kuat mengontrol negara, berada di balik jatuhnya rezim Orde Baru dan kemudian diposisikan sebagai lawan gerakan.<sup>224</sup> Artinya, anggapan bahwa negara Orde Baru sebagai satu-satunya lawan gerakan yang harus digulingkan sebagaimana pandangan Gramsci, ternyata tidak sepenuhnya benar. Pandangan itu segera digeser diarahkan pada lawan gerakan yang lebih kuat berada di atas aras atau lokus negara, yakni rezim kapitalisme neoliberal yang mendominasi (mengontrol) kekuatan negara.<sup>225</sup> Realitas ini oleh Richard J.F. Day disebut “*domination of domination*”, sehingga teori Gramsci dalam konteks ini dianggap sudah mati (*Gramsci is Dead*).<sup>226</sup> Jejaring gerakan agraria nasional dengan gerakan transnasional semakin kuat, dan bahkan salah satu organisasi gerakan agraria transnasional dipegang oleh para penggiat (aktivis) organisasi gerakan di Indonesia, seperti organisasi *La Via Campesina*. Sering para penggiat gerakan petani di Lampung yang ikut aksi-aksi kolektif di luar negeri akibat dari intensifnya berjejaring dengan organisasi gerakan transnasional.

#### 4.6. Ikhtisar

Masyarakat Lampung bersifat majemuk terdiri atas beragam kelompok etnik asli Lampung dan pendatang. Masing-masing etnik tetap eksis dengan adat-istiadatnya yang khas. Masyarakat adat Lampung memiliki struktur adat dan wilayah teritorialnya sendiri yang diikat secara genealogis berdasarkan prinsip nilai Pil-il Pesenggiri. Makna struktur adat sudah mulai bergeser mulai sejak masa Kesultanan Banten, dan dipertegas pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Ini berkonsekuensi pada semakin menyempitkan wilayah teritorial

---

<sup>224</sup> Mansour Fakhri. 2003. Op.cit.

<sup>225</sup> Lihat: “Pandangan dan Sikap” dan “Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO)” Serikat Petani Indonesia (SPI) Periode 2007-2012. Jakarta: SPI, 2007.

<sup>226</sup> Dalam era globalisasi saat ini persoalan ekonomi, politik dan kultural semakin menguat menjadi kepentingan negara-negara, terutama antar negara-negara maju, dengan membangun kekuatan supra nasional. Persoalan yang muncul di suatu negara, seperti negara berbambang dan gerakan-gerakan sosial yang mengiringinya sebenarnya bukan lagi terletak pada kekuatan negara tersebut tetapi terletak pada (disebabkan dan diciptakan) kekuatan supra nasional tersebut (Richard J.F. Day. 2005. *Gramsci is Dead: Anarchist Currents in the Newest Social Movements*. London: Pluto Press).

masyarakat adat, terutama setelah dikeluarkannya kebijakan *Domeinverklaring* tahun 1870.

Perubahan penduduk Lampung menjadi semakin nyata ketika dilakukan program kolonisasi. Kebijakan ini diikuti banyaknya migrasi murni dengan alasan ekonomi. Semakin sempitnya lahan yang dimiliki petani mendorong mereka membuka lahan-lahan kawasan hutan. Realitas ini terus berlangsung pada masa pasca kemerdekaan hingga masa Orde Baru. Proses perubahan tersebut berjalan seiring dengan berubahnya status tanah pertanian di Lampung masa Orde Baru menjadi “aset negara” dan “komoditas” pasar. Meskipun realitas ini sebenarnya sudah berlangsung sejak masa kolonial, tetapi persoalan agraria (pertanahan) menjadi semakin kompleks pada masa Orde Baru. Penduduk Lampung tumbuh pesat, berebut tanah dan konflik pertanahan antara petani dengan negara dan swasta menjadi semakin tak terhindarkan.

Kondisi internal dan eksternal masyarakat petani di pedesaan Lampung secara khusus semakin mendorong meningkatnya persoalan stabilitas ekonomi rumah tangga tani dan secara umum semakin mendorong menurunnya stabilitas sosio-kultural masyarakat desa. Selama Orde Baru, upaya pembebasan dan pengambil-alihan tanah adalah banyak yang dikuasai oleh komunitas petani baik secara adat, secara historis, bahkan ada yang sudah memiliki bukti sertifikat. Saluran komunikasi sosio-politik dan hukum disumbat (mengabaikan hak-hak petani) sehingga aspirasi petani tidak dapat menjadi bagian penting dari berbagai kebijakan agraria di pedesaan. Hingga pasca reformasi kesejahteraan petani di pedesaan tidak mengalami perubahan berarti. Kemiskinan di pedesaan masih tinggi meskipun program-program pengentasan kemiskinan dengan berbagai cara sudah dilakukan.

Penderitaan petani yang bersifat struktural dan berlatar historis tersebut selalu melahirkan serangkaian perjuangan petani. Dalam rentang sejarah perkembangan masyarakat Lampung mulai masa penjajahan Belanda hingga saat ini telah terjadi empat kategori gerakan petani, yakni gerakan tradisional, gerakan transisi moderan, gerakan moderan, dan gerakan transnasional.



## **BAB V**

### **KETEGANGAN STRUKTURAL AGRARIA SEBAGAI PRAKONDISI UTAMA MUNCULNYA GERAKAN PETANI DI LAMPUNG**

#### **5.1. Sumber Utama Ketegangan Struktural Agraria**

##### **5.1.1. Pola Penguasaan Tanah dan Konflik Pertanahan**

Berbagai kasus penguasaan tanah oleh masyarakat di pedesaan Lampung yang melandasi munculnya gerakan petani secara umum dapat dibagi dua, yakni tanah adat dan non adat. Penguasaan tanah secara adat banyak terjadi pada etnik Lampung baik tanah hak kolektif (ulayat) marga maupun yang sudah menjadi hak perseorangan. Sedangkan tanah-tanah non adat sebagian besar dimiliki oleh penduduk pendatang yang diperoleh melalui berbagai cara, antara lain melalui pembelian, program kolonisasi dan transmigrasi, hasil pembukaan kawasan hutan (termasuk hasil pengolahan rawa-rawa), dan mengelola tanah-tanah negara bekas hak *erfpacht* yang ditinggalkan Belanda.

Rangkaian kebijakan agraria berhubungan kuat dengan proses perubahan hak penguasaan masyarakat petani atas tanah. Terdapat empat pola perubahan penguasaan tanah yang bersinggungan dengan hak masyarakat petani atas tanah, yakni: (1) tanah masyarakat yang diperuntukkan bagi areal perkebunan; (2) tanah masyarakat yang diperuntukkan bagi kepentingan program pemerintah; (3) tanah negara yang diperuntukkan bagi masyarakat; dan (4) tanah perkebunan bekas *onderneming* yang berpindah tangan menjadi hak penguasaan secara perseorangan. Sedangkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tanah dan berujung konflik dengan masyarakat dapat dibedakan dalam empat kategori, yakni: (1) antara masyarakat dengan pemerintah; (2) antara masyarakat dengan perusahaan negara; (3) antara masyarakat dengan perusahaan swasta; (4) antar anggota masyarakat akibat kebijakan pemerintah dan tindakan perusahaan.

Keempat kategori tersebut secara umum tidak berhubungan dengan derajat kontrol negara, karena relatif tidak berbeda atau sulit dibedakan. Perbedaannya tampak dari kasus yang terjadi di wilayah kehutanan atau non wilayah kehutanan dan derajat tindak kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap petani sesuai dengan kualitas persoalan pertanahan yang dihadapi dan derajat respon (perlakuan) pihak lawan terhadap petani.

Data pada Tabel 6 menunjukkan adanya konflik kepentingan penguasaan tanah antara negara dan perusahaan dengan masyarakat petani yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Banyak instansi pemerintah dan perusahaan (milik negara dan swasta) yang berkonflik dengan komunitas lokal. Departemen Transmigrasi juga menguasai ribuan hektar lahan yang seharusnya dibagikan kepada para transmigran justru diselewengkan peruntukannya, yakni dikelola sendiri bermitra dengan perusahaan.<sup>227</sup> Bahkan suatu realitas yang sulit difahami oleh petani bahwa seperti lembaga penelitian yang tugasnya adalah meneliti dan pengembangan teknologi harus menguasai tanah yang luasnya ratusan hektar. Salah seorang pengurus inti Mirak Nadai di kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah mengatakan:

“ Saya heran, seperti BPPT dalam kenyataannya kok harus menguasai lahan yang begitu luas, untuk apa ? Kalau membutuhkan singkong untuk diteliti misalnya, kan bisa berhubungan dengan para petani, tidak harus menanam singkong sendiri. Itupun dikerjasamakan dengan perusahaan. Mau berapa ribu ton yang akan diteliti, para petani di sini siap menyediakannya. Jadi tanah luas yang mereka kuasai itu mustahil hanya untuk kepentingan penelitian, tetapi pasti juga untuk kepentingan yang lain-lain.”

Nampaknya para petani di pedesaan sudah mampu berfikir kritis atas tindakan-tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh para pejabat pemerintah. Kapasitas berfikir kritis tersebut berkembang bukan hanya akibat dari proses interaksi dalam praktek sistem agraria dominan, tetapi juga melalui interaksi dan komunikasi dengan dunia luar yang semakin terbuka.

Pada tahun 2002 tercatat bahwa penguasaan tanah yang paling banyak bermasalah dengan masyarakat di Provinsi Lampung adalah lahan usaha agro industri, yakni seluas 159.640 Hektar, terutama yang berada di bawah penguasaan dan pengelolaan perusahaan swasta dan BUMN atau BUMS. Kemudian lahan yang berstatus sebagai kawasan hutan lindung seluas 121.250 Hektar, dan lahan usaha tambak moderen seluas 78.650 Hektar.<sup>228</sup> Belum lagi tanah-tanah rakyat akibat obyek *land reform* yang diserahkan kepada negara untuk program transmigrasi. Tanah yang terakhir juga luas dan bermuara pada konflik horizontal, karena cara administrasinya yang kacau, belum jelas batas-batasnya, dan belum tuntas penyelesaiannya, bahkan tidak sedikit lahan

---

<sup>227</sup> Disebutkan dalam Memorandum Hukum: *Dasar-dasar Pertimbangan Pentingnya Penyerahan Eks Lahan PT. PAGO/PT TDA Kepada Warga Pemohon 11 Kampung di Padang Ratu, Lampung Tengah*. Bandar Lampung, 2006.

<sup>228</sup> Sunarto. 2007. Op.Cit., hal. 183.

pertanian yang dikelola sendiri oleh Departemen Transmigrasi bekerjasama dengan perusahaan.<sup>229</sup>

Tabel 6 Tanah Dikuasai Negara Berujung Konflik Dengan Masyarakat Setempat

Negara	Kasus	Kabupaten	Keterangan
Transmigrasi	1. Lahan kurang	Way Kanan dan Lampung Barat	Lahan semestinya 2 hektar hanya mendapat 1 hektar
	2. Tata guna tanah	Lampung Tengah	Tanah diperuntukkan "untuk lokasi transmigrasi menjadi perkebunan swasta
	3. Posisi tanah	Lampung Selatan	Salah posisi lahan yang diberikan memicu konflik horizontal
Kehutanan	Pemanfaatan lahan di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Register 1, 8, 17, 19, 22, 28, 34, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, dan 48.	Tersebar di delapan wilayah kabupaten	Lahan diambil kembali oleh rakyat (reclaiming) untuk bertani atau karena klaim negara atas tanah adat/marga
PU	Tanah dijadikan milik pribadi oleh aparat PU	Lampung Selatan	Dituntut warga untuk fungsi kepentingan sosial
BPN	Kesalahan/ manipulasi administrasi	Lampung Selatan Bandar Lampung	Land reform Rawasragi Agusman C. Jaya dan kasus di Gotong Royong
Pemerintah Daerah	Perkantoran	Lampung Barat	Ganti rugi tidak memadai
	Rumah pejabat	Tulang Bawang Bandar Lampung	Kasus jalan pramuka dan perwira
	Pembangunan Jalan	Bandar Lampung	Kasus jalan Soekarno-Hatta
Angkatan Laut	Keamanan, pemukiman dan lahan pertanian	Lampung Selatan Lampung Utara	Kasus Pahawang Kasus Prokimal
BPPT	Pemberian Deptrans untuk penelitian	Lampung Tengah	Kasus Padang Ratu
LIPI	Klaim pihak LIPI	Lampung Selatan	Tanah Transmigran

Sumber: Dokumen KBH, 2005.

Secara institusional tampak bermuara pada tanggung jawab negara dalam menguasai tanah untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Dilihat dari perilaku para aktornya maka semua itu akibat dari tindakan kolaboratif yang secara sadar dilakukan antara para penguasa dan pengusaha. Oleh karena konstruksi kesadaran palsu yang mereka yakini kebenarannya, maka derita petani dianggap sebagai bagian dari proses upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum yang akan dinikmati dalam jangka panjang.

<sup>229</sup> Contohnya antara lain kasus konflik Kebon Damar Lampung Timur dan konflik Rawasragi Lampung Selatan, keduanya terjadi konflik horizontal akibat kebijakan pertanahan yang tidak jelas dan praktek penyelesaian oleh pemerintah yang tidak tegas dan tuntas. Di Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah ada penduduk transmigran di dua desa yang tidak diberi lahan, sedangkan lahan yang ada oleh Departemen Transmigrasi dikelola kepada perusahaan. Di Kabupaten Tulang Bawang pernah terjadi para transmigran hidup terlantar sangat memprihatinkan karena tidak mendapatkan lahan. Mereka kemudian membuat rumah-rumah darurat di sepanjang pinggir sungai dan di pekarangan penduduk setempat (etnik Lampung). Akhirnya mereka ditolong oleh masyarakat adat setempat dan diberi lahan pertanian masing-masing dua hektar. Sekarang mereka sudah berkembang menjadi desa Penumangan Baru yang kondisinya lebih maju dari desa induknya, yakni desa Penumangan Lama.

Tabel 7 Tanah Dikuasai Perusahaan Berujung Konflik Dengan Masyarakat Setempat <sup>230</sup>

PERUSAHAAN	DESA/KECAMATAN	KABUPATEN
PT. KCM	Bengkunat	Lampung Barat
PT. SIL	7 Desa di Kec. Menggala, Gedung Aji dan Gedung Meneng	Tulang Bawang
PT. ILP, PT. ILBM, PT. ILDP	Kec. Gedung Meneng, Gedung Aji, Mataram Udik Surabaya Ilir	Tulang Bawang Lampung Tengah
PT. Nk	Trimodadi, Kalibalak	Lampung Utara
PT. BNIL	Desa Bujuk Agung, Tulang Bawang Udik, Banjar Agung	Tulang Bawang
PT. HIM	Tulang Bawang Tengah	Tulang Bawang
PT. UJA (Eks. PT. AP)	Tulang Bawang Udik	Tulang Bawang
PT. SAC N.	Mesuji	Tulang Bawang
PT. CLP	Tulang Bawang Tengah	Tulang Bawang
PT. LPF (Eks. PT. CLP)	Tanjung Bintang	Lampung Selatan
PT. BSMI	Mesuji	Tulang Bawang
PT. KKS	Bujung Tenuk, Menggala Mas, Astra Ksetra	Tulang Bawang
PT. SIL	Gunung Terang Pakuan Ratu	Tulang Bawang Way Kanan
PT. DCD	Menggala, Mesuji	Tulang Bawang
PT. ADP	Pakuan Ratu	Way Kanan
PTPN VII	Blambangan Umpu Abung Timur Tanjung Bintang, Sidomulyo Tulang Bawang Udik	Way Kanan Lampung Utara Lampung Selatan Tulang Bawang
PT. TDA (Eks. PT. Int dan Pago)	Kecamatan Padang Ratu	Lampung Tengah
PT. GMP	Surabaya Ilir, Mataram Udik	Lampung Tengah
PT. TMI	Padang Ratu	Lampung Tengah
PT. S (BW)	Desa Mukti Karya	Tulang Bawang
PT. NTF	Way Jepara	Lampung Timur
PT. SBL	Padang Ratu (Sendang Ayu dan Surabaya)	Lampung Tengah
PT. KKS	Ujung Gunung Ilir	Tulang Bawang
PT. DGP (Eks. PN M, PT. Mit, PT. PJ)	Desa Mumbang Jaya, Ujung Selambu, Negeri Saka	Lampung Timur

Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa komunitas petani di pedesaan Lampung telah mengalami akselerasi berbagai persoalan kebutuhan hidup yang antara lain tergantung pada ketersediaan lahan pertanian. Kebijakan agraria dan konflik pertanahan tidak terlepas dari praktek-praktek yang dilakukan pada masa

<sup>230</sup> Kasus-kasus konflik pertanahan tersebut dikumpulkan dari beberapa sumber, yakni: (1) PUSsbik. 2002. *Tanah Lampung: Pertanahan dan Perjuangan Rakyat Tani Lampung*. Bandar Lampung: PUSsbik; (2) Sunarto, D.M. 2007. *Op.Cit.*; (3) Ikatan Petani Lampung (IPL); (4) Serikat Petani Lampung (SPL); (5) Aliansi Petani Indonesia (API); (6) Mirak Nadai; (7) Aliansi Gerakan Agraria (AGRA) Lampung; (8) Walhi Lampung; (9) Kawan Tani Lampung (KTL); dan (10) hasil wawancara dengan pengurus Dewan Rakyat Lampung (DRL), staf Kantor Bantuan Hukum (KBH) Bandar Lampung, staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, para akademisi, dan para tokoh petani.

Orde Baru dan berlanjut hingga era reformasi. Akibat dari persoalan ini telah berimplikasi pada akselerasi perubahan sosial (politik, ekonomi dan kultural) yang kurang mendukung bagi perbaikan nasib petani.

### 5.1.2. Kebijakan Pembangunan Mengabaikan Kepentingan Petani

Wilayah Lampung memang strategis menjadi tempat persinggahan awal para migran ke pulau Sumatera, dan sejak ketentuan Belanda tentang adat *gemeenschappen* dihapus, maka tidak ada rintangan lagi bagi mereka yang bukan warga “*marga*” untuk mendapatkan hak pakai tanah dalam wilayah bekas “*marga*”. Daya tarik hak pakai tanah tersebut antara lain yang mendorong penduduk luar bermigrasi ke Lampung.<sup>231</sup> Bahkan pada tahun 1960-an Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mengeluarkan kebijakan pembukaan kawasan hutan kepada penduduk sekitar dan jika dikelola dengan baik dapat ditingkatkan menjadi hak milik:

#### **Peluang Akses Atas Tanah dan Janji Pemerintah Kepada Petani**

Dalam Surat Ijin pembukaan kawasan hutan dari Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Lampung tahun 1966 terdapat klausul: “ *bila sipemegang surat idzin memenuhi Peraturan2 tersebut, sebaik-baiknja maka Dinas Kehutanan akan mengusahakan agar dalam waktu jang sesingkat mungkin tanah ini mendjadi hak miliknja*” (Sumber: Dokumen Petani di wilayah Register 40 Gedung Wani).

Pada tahun 1950 penduduk Lampung 718.000 jiwa dan telah meningkat pesat menjadi 6.998.535 jiwa pada tahun 2000. Faktor penyebabnya antara lain karena tingginya pertumbuhan penduduk alami, keberhasilan para transmigran yang dahulu mampu menarik arus migrasi swakarsa dari daerah asal, dan keberhasilan pembangunan di daerah Lampung menjadi daya tarik para migran spontan dari daerah lain, terutama dari Pulau Jawa. Begitu pesatnya arus penduduk masuk ke Lampung maka dibuat tiga kebijakan transmigrasi: yaitu (1) selama Pelita III transmigrasi ditempatkan ke Pulau Sumatera di luar Lampung, (2) pada Pelita IV Provinsi Lampung sudah tertutup sebagai daerah penerima program transmigrasi, (3) dan dikembangkan sistem transmigrasi lokal (translok).

Kebijakan tersebut ternyata tidak mempengaruhi migrasi penduduk dari daerah lain ke Lampung. Bahkan jumlahnya mengalami peningkatan dan sebagian di antaranya menempati kawasan hutan. Kondisi tersebut berada di luar kemampuan kontrol pemerintah daerah dan juga akibat ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan koordinasi. Pada kebijakan berikutnya mereka itu

<sup>231</sup> Sri Edi Swasono dan Masri Singarimbun. 1985. *Sepuluh Windu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*. Jakarta: UI-press.

dikenal sebagai “perambah hutan”. Kemudian untuk mengatasi para perambah hutan dan masalah kependudukan lainnya seperti kepadatan penduduk dan lahan kritis, maka Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan kebijakan Nomor: 074/DPD/HK/1980, tanggal 26 April 1980 tentang Program Transmigrasi Lokal atau dikenal dengan istilah “Translok”, yaitu:

... pemindahan penduduk Lampung yang tinggal di kawasan hutan, daerah kritis, daerah terkena proyek strategis, dan daerah padat penduduk ke daerah lainnya di wilayah provinsi Lampung yang masih luas dan telah ditetapkan pemerintah daerah (Sumber: Pemda Tk.I Lampung, 1984).

Meskipun tercatat sudah sebanyak 70.225 KK “perambah hutan” yang berhasil dipindahkan oleh Kanwil Deptrans dan PPH Provinsi Lampung, tetapi program translok tersebut justru yang paling kurang diminati oleh penduduk Lampung dibanding program transmigrasi lainnya, karena sebagian besar transmigran adalah petani yang sudah hidup mapan di daerah asal.<sup>232</sup> Menyimak definisi di atas jelas bahwa program translok memiliki orientasi berbeda, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang dipindahkan tetapi lebih pada penataan kembali persebaran penduduk di wilayah Lampung. Sasaran utamanya adalah penduduk yang telah menggarap dan bermukim di suatu areal kawasan hutan, mereka yang sudah tinggal dan berusaha di wilayah tertentu yang masih dianggap wilayah yang dikuasai negara. Seperti di desa Dwikora Lampung Utara, wilayah tersebut sudah dibuka lama oleh warga masyarakat sebagai lahan pertanian dan pemukiman, kemudian mereka diusir dan dipaksa pindah.

Pada praktiknya, penduduk yang hidupnya sudah mapan di daerah asal dipindahkan ke daerah yang sama sekali baru dan mereka harus memulai hidup baru sebagaimana para transmigran lain sebelumnya. Tekanan fisik, sosial dan psikologis terus menerus dialami selama mereka menolak dipindahkan dengan berbagai alasan yang tidak pernah didengar oleh pemerintah. Banyak petani yang frustrasi dan hidupnya tidak tetap. Mereka yang berada di daerah tujuan banyak yang menderita karena lahan yang diberikan pemerintah kondisinya tidak memadai, berupa lahan baru, kering dan kurang subur. Salah satu contoh seperti yang terjadi di wilayah Gunung Betung, sebagai berikut:

Tahun 1991 penduduk dusun Muara Tiga wilayah Gunung Betung kembali diusir dengan adanya proyek reboisasi. Mereka harus mengungsi atau ikut transmigrasi lokal ke Rawa Jitu Lampung Utara. Mereka dianggap sebagai perambah dan perusak hutan, maka harus pindah secara swadaya. Penduduk yang berangkat adalah dari Talang Pelita kurang lebih 20 KK, sebanyak 30 KK dari Talang Muara Tiga II dan Talang Sejali. Akan tetapi pada tahun 2000 mereka kembali lagi ke Muara Tiga. Alasannya bahwa lahan di Rawa Jitu sama sekali tidak subur, harus

---

<sup>232</sup> Slamet Rusmialdi, 1995. Op.Cit., hal. 7.

memulai dari nol lagi, dan mereka harus meninggalkan harta kekayaan yang berharga yaitu kebun yang sudah menghasilkan. Tingkat kesuburan tanahnya di Rawa Jitu jauh lebih jelek dibandingkan dengan yang di wilayah asal. Jangankan ditanami kopi atau padi, ditanami singkong saja tidak menghasilkan. Beberapa warga ada yang berangkat tapi banyak juga yang tidak, karena menurut Kepala Desa waktu itu jatah lahan untuk mereka diberikan kepada daerah lain. Beberapa warga yang ikut transmigrasi karena mereka tidak betah hidup disana kemudian pulang lagi ke Muara Tiga. Sebagian warga yang bersedia ikut transmigrasi ternyata tidak semua bisa diberangkatkan karena lokasi penempatan mereka telah di kuasai oleh oknum tertentu (warga dari daerah lain). Rupanya telah terjadi jual beli lahan transmigrasi oleh oknum pemerintah (Sumber: WALHI Lampung dan Kawan Tani Lampung, 2008)

Jelas bahwa program translok kurang diminati dan banyak mendapat perlawanan penduduk setempat. Seperti penduduk di Pulau Panggung diusir dan dipindahkan. Lahan yang sudah mereka kelola sejak tahun 1920-1930 kemudian oleh pemerintah dimasukkan dalam wilayah hutan lindung. Kasus yang sama terjadi di Register 19 Gunung Betung. Berdasarkan keputusan Menteri Kehutan No. 472/Kpts-II/ 1992 kawasan ini telah ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman yang berfungsi sebagai wilayah konservasi, tangkapan air, pendidikan dan pariwisata. Perlakuan yang sama terjadi pada masyarakat desa Dwikora, Lampung Utara dan di desa Sidorejo, Lampung Tengah.

Dilihat dari kebijakan agraria secara umum ketegangan struktural agraria di pedesaan Lampung bersumber dari tiga hal, yaitu: (1) terintegrasinya sumberdaya agraria (tanah) dalam struktur kepentingan ekonomi dan politik supra lokal; (2) penetrasi kapitalisme, yakni komersialisasi dan politisasi tanah yang mendorong masuknya para pemodal (investor); dan (3) tanah sebagai faktor produksi dikuasai secara besar-besaran (prakteknya dilakukan dengan cara yang tidak fair). Beberapa kebijakan agraria yang akhirnya bermasalah dengan komunitas setempat, antara lain adalah:

1. Eksploitasi hutan di Lampung (termasuk kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Way Kambas dan kawasan Hutan Lindung Kota Agung Utara Register 39) secara besar-besaran dimulai sekitar tahun 1965. Pada tahun 1969/1970 sudah ada sebanyak 29 perusahaan pemegang HPH berdasarkan PP. No.64/1957 dan PP No. 21/1967. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung juga mengeluarkan ijin terbang (ijin *kappersil* disebut HPHH). Pada tahun 1980-an jumlahnya meningkat menjadi 76 ijin.
2. Tahun 1975 tanah-tanah kawasan hutan yang sudah dikelola petani berdasarkan surat ijin tumpang sari dicabut melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung No. 1691/I/3/75 tanggal 25 Nopember 1975.
3. Kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan SK Gubernur No. 97/LG/Bappeda/ 1977 dan dikukuhkan melalui SK Menhut No. 67/Kpts-II/1991 dalam praktik sangat merugikan petani. Kebijakan tersebut hanya berupa penataan ulang kawasan hutan dan ternyata mengacu pada batas-batas yang telah ditetapkan pemerintah kolonial pada tahun 1935.

4. Program reboisasi hutan atau Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dilakukan oleh pemerintah bersama perusahaan termasuk tanah-tanah yang sudah dikuasai secara aktif oleh petani setempat.

Pada awal Orde Baru, kebijakan agraria secara sistematis dikeluarkan terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi. Ini dapat dicapai melalui kerjasama dengan para pemodal. Mulai 1972 sudah muncul protes petani kepada Gubernur Lampung terkait dengan persoalan pertanahan (kasus Padang Ratu). Ini sejalan dengan praktik pembebasan tanah masyarakat adat untuk kepentingan industri perkebunan. Beberapa implikasi dan dampaknya adalah:

1. Lahan dan penduduk pedesaan diarahkan semakin teintegrasi ke dalam pasar yang lebih luas.
2. Berkembangnya komersialisasi pertanian yang dikuasai oleh para pemodal besar dan didukung kuat oleh negara.
3. Mendorong munculnya tindakan-tindakan yang mengancam kelangsungan hidup petani. Banyak lahan-lahan di Lampung yang sudah dikuasai secara produktif oleh petani tiba-tiba diambil-alih atau dibebaskan secara paksa atau dengan cara halus baik oleh pemerintah maupun perusahaan.

Akibatnya, terdapat sekitar 398.425 Hektar lahan di provinsi Lampung yang dikuasai pemerintah dan perusahaan dan sebagian besar tersangkut masalah pembebasan tanah dengan komunitas masyarakat setempat baik tanah adat maupun non adat. Seluas 159.640 Ha merupakan lahan usaha agro industri, 6.675 Ha merupakan lahan kawasan hutan tanaman industri, 78.650 Ha merupakan lahan tambak moderen, dan 915 Ha merupakan lahan kawasan pariwisata.<sup>233</sup> Kapitalisasi sumberdaya agraria tersebut jelas ikut andil menjadi sebab berkembangnya persoalan pertanahan di Lampung. Faktor lain adalah penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara dengan cara mengambil paksa lahan-lahan yang dikuasai dan dikelola oleh penduduk sekitar, dengan mengusir atau memindahkan penduduk yang ada di dalamnya. Meraka dicap sebagai perambah dan perusak hutan. Program ini untuk kepentingan konservasi, pengembangan hutan produksi, dan pembangunan waduk untuk PLTA.<sup>234</sup>

---

<sup>233</sup> Sunarto D.M. 2007. Op.Cit., hal. 183.

<sup>234</sup> Kasus tersebut terjadi di wilayah kawasan Taman Nasional Way Kambas, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, di Register 1, 8, 17, 19, 22, 28, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 44,45, 46, 47, dan 48.



### 5.1.3. Praktik Penguasaan Tanah Komunitas Setempat Oleh Negara dan Perusahaan Dengan Cara Tidak Fair

Secara khusus ketegangan struktural agraria di Lampung bersumber pada beragam tindakan. Semuanya merupakan implementasi atas kebijakan agraria yang tidak responsif terhadap kepentingan petani. Berdasarkan kasus-kasus yang diteliti paling sedikit terdapat enam kesalahan tindakan, yakni: (1) delegitimasi bukti-bukti alas hak petani atas tanah; (2) buruknya sistem ganti rugi; (3) praktik pembebasan tanah yang cacat hukum; dan (4) buruknya administrasi pertanahan; dan (5) janji dan kesepakatan dengan petani yang diingkari oleh pemerintah dan perusahaan.

#### 1. Deligitimasi Bukti-Bukti Alas Hak Atas Tanah

Berdasarkan kebijakan agraria yang dikeluarkan kemudian maka lahan-lahan yang dikuasai petani dengan alas hak (secara adat dan non adat) tidak diakui keberadaannya. Banyak petani yang memiliki bukti ijin hak penguasaan dan pemilikan lahan (hasil pembukaan hutan), tetapi alas hak tersebut menjadi lemah ketika bersentuhan dengan kepentingan pembangunan. Salah satu contoh kasus terjadi di Register 19 Gunung Betung.

#### Delegitimasi Alas Hak Atas Tanah di Register 19

Di Register 19 Gunung Betung tahun 1977 salah seorang penduduk perintis bernama Rupawi memperoleh sertifikat hak milik atas tanah melalui Sub Direktorat Agraria Kabupaten Lampung Selatan dengan Nomor: 3116962 Desa Hurun, Hak Milik Nomor. 226/TB, Gambar Tanah Nomor: 283. Sertifikat tersebut diperkuat dengan keputusan Gubernur Lampung Nomor: AG 230/DA 339/SK/HM/77, Gambar Nomor: 283/1977 wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yang diterbitkan tanggal 29 Juli 1977. Pada tahun 1992 statusnya ditingkatkan menjadi Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman melalui Kepmenhut Nomor. 472/Kpts-II/ 1992. Akibatnya semua penduduk di wilayah tersebut tidak diakui keberadaannya (Sumber: Kawan Tani Lampung, 2007)

Kebijakan agraria yang mengabaikan kepentingan petani ternyata konsisten pada tataran implementasinya. Beberapa indikasinya dalam praktik dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Proses lahirnya kebijakan agraria (penetapan peralihan hak atas tanah masyarakat menjadi areal perkebunan atau untuk kepentingan lain) bersifat sepihak tidak melibatkan masyarakat secara penuh. Dari rangkaian kebijakan yang dibuat sikap pemerintah sangat jelas berpihak kepada pengusaha

paralel dengan sikapnya yang meminggirkan petani. Salah satu contoh kasus terjadi di Padang Ratu, Lampung Tengah:

Tanah masyarakat adat di kecamatan Padang Ratu seluas 10.000 hektar pada tahun 1970 oleh Gubernur Lampung disewa selama 25 tahun untuk dikelola oleh PT. PAGO dengan pemberian ganti rugi tanam tumbuh. Rakyat setuju dengan harapan akan terjadi kemajuan wilayah. Pada perkembangannya terjadi pergantian pengelolaan oleh perusahaan lain, sebagian di ambil Departemen Transmigrasi dan sebagian lagi diberikan BPPT tetapi juga diserahkan kepada perusahaan tertentu. Semua itu tidak melalui musyawarah dengan masyarakat setempat (Sumber: Dokumen Mirak Nadai, 2005).

- b. Sikap diskriminatif dan ambivalensi pemerintah tampak nyata dan terstruktur. Posisi pemerintah pusat lebih dominan dan kondisi ini juga memberi peluang semakin bersemainya konflik kepentingan dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak mengizinkan kawasan hutan dikelola dan dihuni oleh masyarakat, tetapi Dinas Kehutanan Provinsi masih memberikan ijin kepada perusahaan untuk menebang hutan di kawasan Hutan Lindung.
  1. Konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mencuat setelah diberlakukan UU No. 22/1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Akibatnya masyarakat khususnya yang mengelola lahan di kawasan hutan menjadi korban seiring dikeluarkan Peraturan Daerah No.7/2000 tentang "*Iuran Hasil Hutan Bukan Kayu (IHHBK)*" dengan ijin pemanfaatan hutan yang masa berlakunya satu tahun dan dapat diperpanjang (Sumber: Tim PSDHBM Watala. 2004).
  2. Contoh kasus: (1) di Kabupaten Lampung Barat, tepatnya di wilayah Way Bambang dan Way Lampung Kecamatan Perwakilan Bengkunt Pesisir Selatan telah terjadi penebangan Hutan Lindung (wilayah Register 49 dan 50) secara besar-besaran yang dilakukan oleh PT. Tegas dengan mendapat ijin operasi atas tender yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Pengrusakan hutan lindung tersebut telah diprotes oleh Dewan Tani Lampung melalui suratnya Nomor: 09/B/DTL/III/1999, tanggal 4 Maret 1999 (Sumber: dokumen DTL, 1999); (2) di kawasan hutan Register 45 banyak petani yang diusir tetapi dengan kasat mata ada oknum aparat negara yang menguasai tanah puluhan hektar di wilayah yang sama tetapi tidak ditindak (Sumber: Dokumen Persatuan Petani Miskin Way Serdang, 2008).
- c. Dalam pelaksanaan program pembangunan kawasan hutan, para petani diposisikan sebagai obyek mobilisasi dan partisipasi pasif pada lahan-lahan yang dulunya sudah dikuasai secara produktif. Kemudian mereka mengalami intimidasi dan suaranya tidak pernah didengar (setiap dikumpulkan yang didapat hanya amarah para petugas), seperti kasus program rehabilitasi DAS dengan sistem jalur yang dilaksanakan oleh BUMN tahun 1995.<sup>235</sup>

---

<sup>235</sup> Tim PSDHBM Watala. 2004. *Kepastian Pengelolaan di Kawasan Hutan Negara: Pengalaman Belajar Bersama di Sumber Jaya*. Bandar Lampung: Watala, hal. 45.

## 2. Buruknya Sistem Ganti Rugi

Penetapan ganti rugi (sewa tanah) dilakukan secara sepihak, tidak ditepati, tidak sesuai dengan janji dan dengan harga pasaran, banyak yang tidak menerima, dan dilakukan dengan tidak transparan. Masyarakat pada akhirnya merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Ganti rugi tersebut ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah.

Formasi hubungan yang demikian jelas menempatkan petani berada pada posisi lemah dan dalam kondisi tekanan yang kuat. Terjadi persetujuan semu karena masyarakat menerima begitu saja ganti rugi yang ditetapkan secara sepihak, tetapi dibalik sikapnya itu menyimpan rasa ketidakpuasan. Ada juga masyarakat yang berani melakukan protes karena nilai ganti rugi tidak sesuai dengan harga pasaran, dimanipulasi, tidak merata dan tidak transparan. Buruknya sistem ganti rugi dapat disimak dalam beberapa contoh kasus berikut:

1. Kasus di PTPN Kalianda, Lampung Selatan bahwa nilai pembayaran ganti rugi tidak sesuai dengan harga pasar dan atau nilai pembayaran tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kwitansi. Pada saat itu mereka tidak berani protes karena takut mendapat tekanan dan dianggap tidak mendukung program pemerintah.<sup>236</sup>
2. Kasus yang terjadi di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 1972 PT. Intrada memberikan ganti rugi tanam tumbuh antara Rp 500 – Rp 1.500 per tanaman. Dalam praktik banyak warga yang tidak mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi dilakukan melalui kepala desa dan disalahgunakan. Masyarakat protes dan ada beberapa kepala desa yang masuk penjara. Menurut perjanjian, tanah tersebut akan disewa dengan harga Rp 25/meter, dengan memberikan ganti rugi tanam tumbuh yang ada di atas tanah tersebut sebesar Rp 5.000/batang (kopi, lada, karet, petai dan jengkol). Pihak perusahaan menentukan secara sepihak jumlah pohon yang akan diganti rugi, yakni sebanyak 1.200 batang/Hektar. Tetapi pada kenyataannya hanya 600 pohon yang diberi ganti rugi.<sup>237</sup>
3. Di desa Jatimulyo, Way Hui, Lampung Selatan pada tahun 1994 dikenal dengan "Kasus tanah 5 Perak (Rp 5,00)", karena tanah mereka telah diambil paksa oleh pemerintah (menurut cerita penduduk setempat dibelakangnya ada kepentingan Tomi Soeharto) dengan ganti rugi yang sangat tidak memadai, yakni sebesar Rp 5,00 per meter persegi (Sumber: Hasil wawancara dengan bapak WY penduduk setempat, 2008)

## 3. Praktik Pembebasan Tanah Cacat Hukum

Banyak kasus tanah yang sudah dikuasai secara aktif dan produktif oleh petani kemudian diambil-alih dan dibebaskan secara paksa dengan berbagai macam cara. Masyarakat merasa tidak pernah diajak musyawarah dan prosedur pembebasan tanah dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum baik hukum

<sup>236</sup> Undang Fajar dan Herman. 2002. *Analisis Kebijakan Pengendalian Konflik Antar Masyarakat Sekitar dengan Perkebunan Besar*. Bogor: Kantor Pusat Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian., hal. 42

<sup>237</sup> PUSsbik, 2002. Op.Cit., hal. 33.

positif maupun hukum adat. Memang tidak dapat dihindari telah terjadi kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dan dengan pihak perusahaan dalam pengambil-alihan dan pembebasan tanah masyarakat. Salah satu contoh kasus adalah perolehan tanah HGU oleh PT. BNIL di wilayah Desa Bujuk Agung, Indraloka II dan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

Menurut hasil kajian Komisi A DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang dilaporkan pada tanggal 17 juli 2000 menyimpulkan bahwa terdapat penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam pembebasan lahan masyarakat, yakni: "*Dengan memperhatikan kronologis perolehan Hak Guna Usaha No. 25 untuk PT. BNIL terlalu menyimpang dari prosedur dan terkesan terdapat rekayasa dipaksakan eksistensinya*". "*Bahwa tanah tersebut adalah tanah hak Ulayat/Marga/Negeri yang diserahkan kepada individual.*" (Sumber: Dukumen DPRD Kabupaten Tulang Bawang, 2007).

Contoh kasus lainnya adalah perluasan kawasan hutan tanaman industri oleh BUMN yang mengambil-alih tanah-tanah hak milik dan tanah ulayat masyarakat Gunung Terang, Tulang Bawang. Pengambilan tanah tersebut tidak disertai musyawarah dengan masyarakat adat setempat. Mereka menganggap bahwa tindakan perusahaan tersebut tidak sah dan cacat hukum.

#### **4. Buruknya Sistim Administrasi Pertanahan**

Mencermati banyaknya praktik penguasaan tanah dalam proses kapitalisasi oleh kekuatan institusi supra desa, maka terdapat indikasi bahwa telah terjadi kesenjangan antara meningkatnya persoalan pertanahan dengan sikap pemerintah yang kurang jelas dan tegas untuk menyelesaikannya. Terjadinya tumpang tindih pemilikan dan penguasaan tanah, batas lahan tidak jelas, proses administrasi simpang siur, yang semuanya tidak direspon secara cepat dan tegas. Pembentukan kepanitiaan pengadaan tanah untuk 'pembangunan' hanya melibatkan aparatus negara sampai ke tingkat desa. Kondisi ini tampak tidak ada peluang partisipasi petani melalui perwakilan dan hak-hak mereka atas tanah selalu berada dalam posisi yang rentan untuk dikalahkan.

Seperti kasus penyelesaian tanah obyek *landreform* yang konflik horizontal di wilayah Rawasragi II Lampung Selatan akibat mengadministrasikan tanah yang buruk sehingga proses sertifikasi tanah menjadi tak kunjung selesai hingga saat ini. Masyarakat setempat justru dibingungkan dengan simbol-simbol bukti penguasaan tanah seperti pemilikan "kartu hijau" dan "kartu kuning" yang rentan praktik manipulasi dan tidak tepat sasaran. Di Sukarame Bandar Lampung, pada tahun 1979 terdapat lahan rawa-rawa yang dibuka oleh petani. Tahun 1984 lahan tersebut diambil alih oleh Pemda untuk kepentingan KORPRI. Tetapi pada

tahun 1990 tanah tersebut disertifikatkan oleh Pemda dan dibagikan kepada para “pejabat”. Proses ini kemudian muncul konflik antara petani penggarap dengan para pemilik sertifikat.<sup>238</sup>

## 5. Janji dan Kesepakatan Diingkari

Manipulasi persetujuan petani dan pengingkaran terhadap janji-janji dan kesepakatan yang telah dibuat ternyata juga ikut memicu maraknya persoalan pertanahan di Lampung. Petani tidak dapat berbuat banyak ketika terjadi pengingkaran oleh pemerintah maupun oleh perusahaan. Beberapa kasus yang berhasil diidentifikasi sebagai berikut:

1. Para petani di desa Sinar Rezeki dan sekitarnya pada tahun 1997 melalui Gema Trikora bermusyawarah dengan PT. DHL dan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Mereka mengusulkan diperbolehkan bercocok tanam di wilayah PT. DHL dengan sistem tumpang sari. Dalam pertemuan tersebut disepakati boleh melakukan tumpang sari seluas 300 hektar. Surat persetujuan dibuat oleh pemerintah kabupaten Lampung Selatan. Tetapi kesepakatan itu tidak pernah dipenuhi, bahkan muncul ancaman bagi masyarakat yang protes akan ditindak tegas oleh aparat keamanan. (Sumber: Hasil wawancara dengan bapak PS, seorang tokoh petani di desa Sinar Rezeki Lampung Selatan, 2008).
2. Di Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, masyarakat merasa ditipu perusahaan melalui pendekatan kepala desa. Janji perusahaan bahwa setelah tiga tahun masyarakat dapat mengolah kembali lahannya ternyata diingkari. Selain itu, SK ijin operasi perusahaan yang dikeluarkan tahun 1996 ternyata tahun 1992 perusahaan sudah menguasai dan mengusahakan lahan. (Sumber: Hasil wawancara dengan ketua IPL, 2008).
3. Di kecamatan Padang Ratu sejak tahun 1970 masyarakat bersepakat tanahnya disewa oleh perusahaan selama 25 tahun dan menurut janji Gubernur Lampung tanah tersebut akan dikembalikan. Tetapi pada kenyataannya dibagi-bagi untuk perusahaan lain, untuk lahan transmigrasi dan untuk pengembangan Lembaga Penelitian (baik lahan transmigrasi maupun Lembaga Penelitian keduanya tidak difungsikan sebagaimana mestinya, tetapi justru dikerjasamakan dengan perusahaan). (Sumber: Hasil wawancara dengan ketua Mirak Nadai, 2008).
4. Di desa Dwikora, kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara para petani merasa ditipu oleh para pejabat kehutanan. Pada tahun 1964 banyak yang telah memiliki surat ijin garap yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Tingkat I Lampung. Pada tahun 1983 surat ijin garap tersebut dikumpulkan oleh pemerintah dan dijanjikan akan ditingkatkan statusnya menjadi hak milik. Tiba-tiba pada tahun 1994 mereka dikejutkan akan adanya “Operasi Jagawana” dengan alasan demi kelancaran pembangunan Waduk PLTA Way Besai. (Sumber: Hasil wawancara dengan ibu NS, seorang aktivis gerakan tani dari desa Dwikora, 2008)

Persoalan “janji” dan “ingkari” yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan dalam pertarungan penguasaan tanah-tanah petani tradisional di Lampung tidak lagi tepat jika dipandang sebagai suatu tindakan kasuistik tetapi sudah menjadi realitas sosial yang menjadi bagian dari strategi penaklukan

---

<sup>238</sup> PUSsbik, 2002. Ibid., hal. 47.

struktural. Realitas ini diperkuat dengan sikap pemerintah yang cenderung diam dan terkesan tidak mau tahu bahkan ‘membiarkan’ ketika aparat keamanan digunakan perusahaan untuk meredam reaksi masyarakat. Bahkan pada kasus lain, pemerintah oleh masyarakat setempat dianggap telah turut membantu pengusaha dalam melakukan tindak penipuan dan membodohi petani dengan menebar janji-janji palsu demi suksesnya pembangunan.

## 5.2. Menurunnya Kondisi Kehidupan Petani

Struktur hubungan agraria asimetris di Lampung ternyata mengandung sifat statika, sehingga dalam jangka panjang petani tetap lemah dalam akses, partisipasi dan kontrol atas penguasaan sumberdaya tanah. Bahkan hingga saat ini struktur hubungan tersebut tidak pernah berubah secara berarti.<sup>239</sup> Petani tetap berada dalam jangkauan kontrol negara secara ketat sesuai dengan aturan main yang berlaku yang tidak memihak kepentingan petani. Kondisi struktural tersebut menyebabkan berkembangnya deprivasi (absolut dan relatif), merasa diperlakukan tidak adil, dan berkembangnya ideologi egalitarian. Saling terkait di antara kondisi-kondisi tersebut menjadi landasan bagi munculnya protes-protes petani berkembang menjadi gerakan sosial petani.

1. *Deprivasi absolut/obyektif*. Di beberapa wilayah konflik pertanahan banyak petani yang miskin dan tidak memiliki lahan garapan. Kebijakan agroindustri, hutan lindung, hutan konservasi dan program translok sebagai solusi justru menyengsarakan petani. Mereka banyak yang tidak lagi menjadi petani otonom, menguasai dan menggarap lahannya sendiri. Dampak terhadap penurunan kondisi obyektif lainnya seperti rumah yang hilang atau hancur, pendidikan anak terlantar, pekerjaan yang hilang, beban psikologis yang berat dan sebagainya. Contoh kasus kondisi kemiskinan penduduk di Padang Ratu ibarat “kelaparan dalam himpitan lumbung padi”:

Di kecamatan Padang Ratu, Anak Tuha dan sekitarnya telah beroperasi empat perusahaan perkebunan besar yakni CV. Bumi Waras Group, PT. Taring Mas, PTPN VII, dan PT.Tris Delta Agrindo. Perusahaan tersebut menggunakan tanah Marga Anak Tuha sehingga tanah yang dikuasai masyarakat setempat adalah sisanya yang sempit dan berada di sela-sela antar areal perkebunan besar. Akibatnya banyak penduduk yang miskin, terasing secara geografis dan sosio-kultural dengan lingkungan perkebunan, dan wilayah tersebut rawan kejahatan.

---

<sup>239</sup> Banyak contoh kasus di Lampung yang masih terjadi hingga saat ini, antara lain: (1) Pada hari Sabtu, 16 Januari 2009 warga Kampung Gunung Keramat, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara melakukan unjuk rasa berhadapan dengan PT. GGP dan terjadi keributan sehingga 14 orang warga ditangkap; (2) Sebanyak 2.122 warga Moro-Moro yang menempati wilayah Register 45 mereka mempunyai hak pilih tetapi tidak bisa memilih karena tidak memiliki KTP dan usulan penerbitan KTP di wilayah tersebut di tolak pemerintah setempat. Wilayah yang diduduki petani tersebut merupakan wilayah HTI yang dikuasai PT. SI melalui keputusan Menteri Kehutanan No.93/KPTS-11/1997, tanggal 17 Februari 1997.

Meskipun sebagian lahan yang dikuasai perusahaan sudah dikuasai kembali oleh masyarakat setempat (di reklamings), hingga tahun 2005 masih terdapat 7.000 keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga prasejahtera. Wilayah ini juga termasuk wilayah kecamatan yang menerima Raskin (beras untuk rakyat miskin) terbesar di kabupaten Lampung Tengah (Sumber: Dokumen KBH Lampung dan Mirak Nadai. *Memorandum Hukum*, 2005).

2. *Deprivasi relatif/subyektif*. Paling tidak terdapat lima kelompok kasus yang dapat diidentifikasi terkait dengan deprivasi relatif. *Pertama*, melalui program translok, banyak petani yang kemudian dipindah paksa oleh pemerintah di wilayah lain. Ternyata kondisi lahan di tempat tujuan jauh lebih buruk dari kondisi di tempat asal, sehingga mereka harus merangkak lagi dari bawah. *Kedua*, karena akan dibuat perkebunan oleh perusahaan maka petani yang sudah bermukim dipindah paksa di tempat lain yang tidak jelas statusnya dan kondisinya jauh lebih buruk dari kondisi semula. *Ketiga*, mereka membanding petani lain yang hidupnya berkecukupan secara ekonomi karena memiliki lahan yang dikelola sendiri. *Keempat*, petani yang kecewa karena tanahnya sudah diambil-alih oleh perusahaan tetapi mereka tidak diberi kesempatan yang baik untuk bekerja di perusahaan tersebut. *Kelima*, dalam aksi reklamings jumlah petani yang mengambil kembali haknya atas tanah relatif sama banyaknya dengan yang “menjarah”. Mereka yang ikut dan yang menguasai lahan hasil reklamings banyak yang tidak miskin secara obyektif.
3. *Meningkatnya rasa ketidakadilan*. Program-program pembangunan di pedesaan berdampak pada penurunan drastis kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis petani. Mereka menjadi obyek atau subyek pasif sehingga lemah dalam akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat pembangunan. Mereka ditaklukkan melalui stigma politik, pendekatan keamanan dan tuduhan melakukan serangkaian tindakan melawan hukum dan diberi sanksi. Komunikasi dan hukum di sumbat rapat-rapat, sehingga mereka banyak yang menjadi korban pembangunan. Sifat dan kondisi pedesaan di Lampung yang sudah terbuka terhadap dunia luar atau dengan lingkungan pergaulan yang lebih luas memungkinkan aspirasi kehidupan mereka meningkat. Tuntutan terhadap peningkatan kualitas hidup sudah merasuk dalam relung kehidupan masyarakat desa. Meningkatnya aspirasi kehidupan yang tidak diimbangi capaian yang sesuai mendorong munculnya berbagai ketidakpuasan.
4. *Pengaruh ideologi egalitarian atau populis*. Kondisi dan posisi petani yang lemah dan merasa diperlakukan tidak adil dalam proses pembangunan, menyadarkan mereka untuk berjuang dan memungkinkan masuknya ideologi

perjuangan yang sesuai. Petani difahami memiliki otonomi kehidupan, harus memiliki lahan dan bebas menggarapnya sendiri. Tuntutan petani menjadi berubah seiring semakin kuat diterimanya ideologi perjuangan yang sesuai. Ideologi egalitarian atau neo-populis tumbuh subur, berkembang pesat dan dapat diakses dari berbagai sumber. Paket ideologi yang diusung dari luar dan lebih berorientasi *postmaterial* bersifat strategis yang mendukung pencapaian kepentingan material petani (tanah) yang bersifat praktis.

Seperti tuntutan petani desa Sinar Rejeki dan sekitarnya di wilayah Register 40 Gedung Wani pada awalnya berupa pengelolaan lahan tumpang sari. Tuntutan ini diajukan karena desakan kebutuhan ekonomi dan saat itu masih masa Orde Baru. Ketika aktif menjadi anggota organisasi gerakan maka tuntutan mereka berubah, yakni tanah kembali kepada petani dan sertifikasi tanah. Tetapi dalam banyak kasus pembebasan tanah petani pada awalnya direspon dengan tuntutan ganti rugi yang memadai atau memperoleh hak garap kembali. Tuntutan petani harus berdaulat, hutan kerakyatan, reforma agraria dari petani dan sebagainya itu bukan dari petani tetapi dari kawan-kawan aktivis (Sumber: Hasil wawancara dengan bapak MZ, seorang tokoh gerakan petani di desa Sukadamai, 2008).

### **5.3. Sulitnya Perjuangan Petani di Era Orde Baru**

Ketegangan struktural agraria di Lampung sebagaimana telah dijelaskan di muka berproses cukup lama dan terjadi secara akumulatif. Bahkan praktik penguasaan tanah (lahan) oleh negara dan swasta yang berujung berkonflik dengan berbagai komunitas lokal (petani) mulai menguat pada dasawarsa tahun 1980-an, dan semakin meluas hingga dasawarsa tahun 1990-an. Kondisi ini mengganggu kelangsungan hidup petani dan eksistensi komunitasnya, sehingga memunculkan perjuangan kolektif petani.

Sistem agraria yang memarginalkan petani telah memacu berkembangnya kemampuan kritis petani dalam mencerna, memahami dan menafsirkan konteks ruang (fisik dan sosio-kultural) yang mereka dihadapi. Dengan semakin kuat tekanan yang mengancamnya justru petani semakin berusaha keras untuk mengembangkan stok pengetahuan praktisnya, mengembangkan cara dan tindakan alternatif meskipun bertentangan dengan sistem agraria yang mapan. Semua itu dilakukan dalam batas kritis untuk mengatasi kebutuhan hidup yang bersifat dasar. Ini berarti bahwa pengetahuan, sikap dan perilaku petani tidak selalu harus sejalan dengan sistem agraria yang ternyata merugikan meskipun mendapat tekanan kuat. Suatu kondisi yang dirasa mengganggu melampaui batas toleransi kebutuhan dasarnya, maka petani akan mencari berbagai cara untuk mengatasinya. Selama episode kekuasaan otoritarian Orde Baru, reaksi-



reaksi kolektif petani tetap muncul mulai dari protes, kemudian gerakan konsensus hingga berkembang menjadi gerakan lokal-tradisional.

Dalam banyak kasus pertanahan di Lampung terdapat variasi penyebab langsung munculnya perjuangan kolektif petani terkait dengan perlakuan tidak fair oleh penguasa dan pengusaha yang menjadi sumber ketegangan struktural. Saling terkait antara deprivasi (absolut dan relatif), ketidakadilan, dan pengaruh ideologi egalitarian dengan jelas secara bersama-sama menjadi landasan bagi munculnya protes-protes petani berkembang menjadi gerakan sosial.

Deprivasi absolut dalam beberapa kasus sudah dapat menjadi sebab munculnya perilaku kolektif petani, seperti aksi protes petani karena terusir dari wilayahnya sehingga tidak memiliki lahan dan tempat tinggal. Tetapi, dalam beberapa kasus lain bahwa penurunan kondisi obyektif petani saja tidak cukup, perlu didukung meningkatnya deprivasi relatif (subyektif). Secara akumulatif, meningkatnya deprivasi relatif didukung oleh meningkatnya rasa ketidakpuasan (perlakuan tidak adil). Semuanya mendorong petani untuk meminta bantuan hukum atau bantuan mediasi kepada pihak lain (non petani) dalam penyelesaian persoalan pertanahan yang dialami. Tindakan kolektif petani secara institusional ini disebut gerakan konsensus karena dilakukan menurut tata aturan hukum yang mapan. Sejalan dengan semakin kuatnya arus masuknya ideologi egalitarian (populis) maka kondisi-kondisi di atas menjadi saling terkait dalam mendorong munculnya gerakan lokal-tradisional. Gerakan terakhir ini perlu dukungan lebih kuat dari kalangan non petani (mahasiswa aktivis dan LSM) dibanding aksi-aksi protes dan gerakan konsensus untuk menghadapi tindakan represif negara.

### **5.3.1. Aksi Protes**

Protes merupakan perilaku kolektif petani yang paling dasar dalam gerakan sosial dan biasanya tidak berbentuk (*amorph*). Aksi ini dilakukan oleh semua komunitas di wilayah konflik pertanahan dengan bentuk dan intensitasnya yang beragam. Ini lebih merupakan reaksi-reaksi emosional yang biasanya disertai dengan kekerasan dan amuk massa. Karena tindakannya bersifat emosional, spontan dan sporadis maka tidak terorganisir dengan baik. Berbagai upaya mereka lakukan seperti menyandera atau merusak peralatan, gedung, rumah, tanaman, jalan, dan sebagainya. Tindakan demikian biasanya dilakukan ada yang bermakna mempertahankan diri sebagai respon balik (balas dendam) dan ada yang bermakna perusakan atau penghancuran atau pemusnahan.

Protes merupakan tindakan primer yang lebih bersifat ekspresif daripada instrumental. Perilaku ini cenderung dilakukan untuk menumpahkan kemarahan, frustrasi, atau emosi-emosi lainnya.<sup>240</sup> Perilaku tersebut mereka lakukan karena mendapat tekanan yang kuat dari aparat keamanan dan sumber kehidupannya (kebutuhan dasar) terancam secara mendadak. Seperti kasus yang terjadi di Tanjung Bintang berikut ini:

Di wilayah Tanjung Bintang, ancaman aparat keamanan yang disiapkan oleh PT. HIRMA ternyata bukan hanya gertakan saja. Dengan melihat lemahnya kekuatan komunitas setempat, maka program perusahaan dapat terus dilakukan. Seperti yang terjadi di desa Sumber Jaya, pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 1976 tanaman masyarakat digusur habis tanpa ada pemberitahuan lebih dulu dan tidak ada ganti rugi apapun. Pada hari Senin tanggal 26 Juli 1976 pihak aparat melancarkan teror berupa ancaman kepada Kepala Kampung dan warga masyarakatnya bahwa mereka akan membakar rumah dan akan menculiknya. Tindakan semena-mena dan semakin menjadi-jadi yang dilancarkan perusahaan melalui kaki tangan aparat keamanan inilah yang kemudian menyulut amarah dan perlawanan masyarakat. Dalam perlawanan tersebut terjadi jatuh korban meninggal dunia dan banyak menderita luka-luka. Akibat dari peristiwa tersebut banyak warga masyarakat yang ketakutan dan mengungsi. Kepala Kampung waktu itu juga mengungsi ke Tanjung Karang sesuai surat yang dibuatnya pada tanggal 1 Agustus 1976, dan baru kembali setelah diperintah oleh Camat berdasarkan Surat Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kedaton Nomor 297/1 Des/1976 (Sumber: Dokumen IPL dan hasil wawancara dengan bapak Kpl, seorang petani, 2008).

Perilaku protes tersebut terjadi di banyak tempat ketika tindakan pembebasan dan mengambil-alihan lahan-lahan petani setempat. Tetapi karena perilaku tersebut sangat lemah atau hampir tidak terorganisir, dan belum mendapat dukungan kuat dari kalangan non petani, maka dengan mudah dapat dilemahkan, dipatahkan dan dilokalisir agar tidak meluas.

### 5.3.2. Gerakan Konsensus

Persoalan pertanahan bersifat mendasar bagi petani sehingga akan terus diaktifkan sebelum terselesaikan secara tuntas di lapangan. Ketika memakai strategi protes tidak berhasil secara memuaskan, kemudian petani membangun strategi baru, yakni "gerakan konsensus" (*consensus movement*).<sup>241</sup> Dalam studi ini gerakan konsensus, meskipun termasuk gerakan sosial, tetapi eksistensinya cenderung lebih dekat dengan ciri-ciri sebagai kelompok kepentingan (*interest group*) daripada gerakan sosial. Melalui gerakan konsensus, para petani secara kolektif berupaya menyelesaikan persoalan pertanahan sesuai prosedur yang

<sup>240</sup> Steven E. Barkan dan Lynne L. Snowden, 2001. Op.Cit., hal. 6.

<sup>241</sup> Konsep "gerakan konsensus" (*consensus movement*) menurut McCarthy dan Wolfson (1988: 26) menunjuk pada mobilisasi sosial yang didukung oleh masyarakat luas (80-90 % penduduk) dan "sedikit atau bukan oposisi terorganisir". Sedangkan menurut Lofland (1989:163) dibedakan antara "*consensus movements*" dan "*conflict movements*" dilihat dari derajat kepentingan obyektif yang berlawanan dan upayanya untuk merubah kebijakan sosial (Lihat Aldon D. Morris dan Carol McClurg Mueller. 1992. Op.Cit., hal. 205, 275).

berlaku (*institutional concensus*) dan berhubungan dengan para pemegang otoritas setempat.<sup>242</sup> Paling sedikit terdapat enam unsur yang memungkinkan para petani berpartisipasi di dalam proses perjuangan bersama, terutama melalui pendekatan konsensus (disajikan dalam Tabel 7).

1. Kepercayaan petani terhadap hak penguasaan tanah tidak bersifat magis, tetapi lebih didasarkan pada bukti-bukti tertentu (fisik dan non fisik). Bukti-bukti tersebut di kalangan petani dianggap sudah sah dan menjadi alas hak yang cukup kuat untuk menguasai dan memilikinya.
2. Tuntutan petani menguat seiring dengan semakin berkembangnya kekuatan perjuangan. Ketika menjadi anggota organisasi gerakan tani, maka tuntutan tersebut menguat bahwa lahan dapat dikuasai kembali oleh petani.
3. Meskipun berada pada wilayah konflik yang sama tetapi mereka cenderung membuat kelompok sendiri-sendiri (terpisah) dan berjuang sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi dan kekuatan masing-masing.

Tabel 8 Unsur-Unsur Gerakan Konsensus

Unsur-Unsur	Keterangan
Kepercayaan	Merasa berhak atas tanah sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki.
Kepentingan (Tuntutan)	Pengembalian tanah, ganti rugi yang memadai, pembagian tanah, pengusaha lahan, sertifikasi tanah.
Kelompok	Informal dengan struktur sangat sederhana dan anggotanya masih terbatas dalam suatu komunitas di masing-masing wilayah konflik.
Kepemimpinan	Tradisional dan kharismatik
Kesadaran	Konflikual berhadapan dengan penguasa dan pengusaha.
Strategi Perjuangan	Institusional-konsensus

Sumber: Hasil riset, 2008.

4. Peranan pemimpin sangat menentukan dan sebagai simpul perjuangan komunitasnya. Pada komunitas adat yang menjadi pemimpin adalah para pemuka adat, sedangkan pada komunitas non adat para pemimpinnya bisa muncul dari warga setempat yang ditokohkan. Secara umum ciri para pemimpin kelompok adalah memiliki wawasan luas, memiliki kemampuan

<sup>242</sup> Menurut Michael Schwartz dan Shuva Paul, terdapat dua faktor kunci yang membedakan antara kelompok kepentingan dan gerakan sosial. *Pertama*, kelompok kepentingan selalu berhubungan dengan para pemegang otoritas yang diberi mandat secara institusional dan mengikuti prosedur institusional yang ada untuk mencapai tujuannya. Sedangkan gerakan sosial dapat melakukan itu, tetapi juga melakukan tindakan-tindakan kolektif yang merusak aturan dan mengacaukan proses normal dalam upaya untuk mencapai tujuannya. *Kedua*, kelompok kepentingan dapat menyerukan konstituennya untuk aktif mendukung, tetapi modus operandi utamanya (dan barangkali eksklusif) adalah interaksi antara pemimpinnya dengan para pemegang otoritas institusional. Sedangkan gerakan sosial lebih mengandalkan mobilisasi massa konstituen untuk mencapai tujuannya (Aldon D. Morris dan Carol McClurg Mueller. Editor's. 1992. Ibid., hal. 221).

kesaktian, mampu membangun jaringan ke luar, konsisten dan komitmen tinggi, relatif sudah mapan, mampu berargumentasi, mampu melakukan koordinasi dan negosiasi, dan berani dalam berjuang. Kepemimpinan umumnya masih kuat mengacu pada struktur otoritas tradisi setempat.

5. Perasaan senasib (*in group*) sudah tumbuh dan mereka sadar berhadapan dengan para pemegang otoritas (*out-group*) setempat. Paling tidak mereka berada pada tingkat kesadaran perjuangan karena adanya pertentangan nilai dan kepentingan dengan negara dan perusahaan. Ini merupakan bentuk awal terjadinya konsensus gerakan skala mikro (lokal). Mereka dapat lebih intensif berinteraksi mengembangkan kesadaran konflikturnya.
6. Pertimbangan biaya (*costs*) dan keuntungan (*benefits*) dalam berjuang tidak bisa diabaikan. Strategi perjuangan yang ditempuh ditentukan oleh kekuatan kelompok yang berkembang seiring dengan kekuatan kontrol negara. Tetapi, secara umum mereka cenderung menggunakan jalur institusional, baik melalui jalur hukum (pengadilan) maupun melalui cara musyawarah (mediasi dan negosiasi).

Melalui strategi institusional (gerakan konsensus) ternyata juga tidak efektif, yakni banyak yang kasusnya masih terkatung-katung. Krisis kepercayaan petani terhadap lembaga hukum formal semakin kuat menjelang jatuhnya rezim Orde Baru dan tetap tinggi pada awal-awal reformasi. Indikasinya, penyelesaian persoalan pertanahan melalui jalur hukum kurang diminati oleh petani dibanding dengan cara musyawarah, meskipun dengan cara ini juga banyak yang kandas. Salah satu contoh kasus terjadi di wilayah PT DHL sebagaimana diungkapkan oleh bapak PS, seorang tokoh petani yang ikut bermusyawarah waktu itu:

Pada tahun 1997 pernah dilakukan musyawarah antara petani dengan PT.DHL yang dimediasi oleh Gema Trikora dan pemerintah kabupaten Lampung Selatan. Hasilnya, terjadi kesepakatan antara petani dengan perusahaan, yakni masyarakat boleh melakukan tumpang sari seluas 300 Ha. Sudah ada suratnya dari pemerintah kabupaten Lampung Selatan waktu itu. Tetapi, alhamdulillah pihak perusahaan tidak mau melaksanakan kesepakatan itu.

Kata "Alhamdulillah" yang diucapkan tersebut memiliki dua makna terkait dengan gerakan petani di kemudian hari. *Pertama*, jika waktu itu ternyata pihak perusahaan mau melaksanakan kesepakatan bersama tanaman tumpang sari, maka ini dapat dipakai sebagai alasan perbuatan baik pihak perusahaan dan sebagai bukti peduli terhadap nasib petani di sekitarnya. Hal ini di kemudian hari dapat menjadi tekanan psikologis bagi petani untuk melakukan reklamasi. *Kedua*, sebaliknya sikap perusahaan yang mengingkari kesepakatan tersebut

merupakan peluang bagi petani dikemudian hari (pada tahun 1998) untuk berani melakukan reklamasi.

Di Trimodadi, Lampung Utara di mana masyarakat setempat bahkan sudah berjuang sejak 1960-an ketika tanah yang sudah dikuasainya diambil paksa oleh perusahaan. Pada masa Orde Baru sudah meminta penyelesaian ke pemerintah pusat tetapi tidak ada tanggapan. Akhirnya mereka melakukan aksi reklamasi meskipun tetap gagal. Bapak SP seorang tokoh petani di Lampung Tengah dan pernah memimpin aksi reklamasi di Trimodadi menceritakan:

“... perjuangan masyarakat Trimodadi untuk memperoleh kembali tanah yang dicaplok perusahaan sudah sejak Orde Lama. Ketika itu dipimpin oleh kepala kampung dan dibantu oleh BTI. Kemudian pada masa pak Harto mereka juga sudah berupaya secara baik-baik dan sudah mengadu ke pusat Jakarta, tetap tidak ada tanggapan. Bahkan ketika perusahaan melakukan perluasan lahan maka tanah-tanah penduduk di sekitarnya juga diambil lagi. Mereka tahu bagaimana kerasnya Orde Baru dan waktu itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa sakit hati dan terus mengadu pada pemerintah. Mereka juga sering diancam-anam dan dicap anggota PKI, BTI. Ketika jaman reformasi saya bersama mereka sudah berusaha merebut kembali tanah-tanah itu, bahkan barisan ibu-ibu dikerahkan, dan dibantu oleh SPL, tetapi tetap tidak berhasil “.

Penyelesaian pertanahan oleh berbagai komunitas petani selama lima tahun (1998-2002), seperti di lima wilayah kabupaten/kota di provinsi Lampung (Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tulang Bawang dan Way Kanan) dari 220 kasus yang ada hanya 71 (32%) kasus yang dapat diselesaikan. Dari 43 kasus yang diajukan dengan cara penal terdapat sebanyak 24 (56%) kasus yang terselesaikan, sedangkan dari 177 kasus yang diajukan dengan cara non penal terdapat 47 (27%) kasus yang diselesaikan.<sup>243</sup>

### **5.3.3. Gerakan Lokal-Tradisional**

Gagalnya perjuangan petani melalui pendekatan hukum dan negosiasi mendorong petani membangun strategi gerakan lokal-tradisional, yakni aksi-aksi kolektif non-institusional, berlokus lokal dan berbasis pada otoritas tradisi setempat. Mereka melakukan tindakan-tindakan kolektif yang cenderung keluar dari tata aturan yang berlaku atau lebih mengandalkan pada aksi massa melakukan tekanan ke atas untuk mencapai tujuannya. Misalnya, komunitas petani di Dwikora, Lampung Utara dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat berunjuk rasa ke Gubernur dan berusaha mempertahankan diri tidak mau dipindahkan mengikuti program Translok. Mereka tetap menguasai lahan meskipun menghadapi tekanan-tekanan sangat kuat.

---

<sup>243</sup> Sunarto, 2007. Op.Cit., hal. 219.

Gerakan lokal-tradisional dilakukan juga karena upaya melalui jalur-jalur institusional tetap kandas. Upaya penyelesaian melalui jalur hukum (minta bantuan hukum dari LSM) memakan waktu lama dan tidak ada kejelasan dan kepastian. Upaya negosiasi untuk mengolah lahan tidur dan tumpang sari seperti di wilayah Register 40 Gedung Wani juga tidak berhasil. Para pemegang otoritas cenderung mempertahankan status quo dengan tetap memperkuat hegemoni dan pendekatan keamanan.

Kondisi tersebut menyebabkan kesadaran konsensus petani berkembang menjadi kesadaran konfliktual-oposisional.<sup>244</sup> Kegagalan petani menggunakan pendekatan institusional memungkinkan untuk beralih pada pendekatan non institusional yang diwujudkan dalam gerakan lokal-tradisional. Cirinya, gerakan ini masih mengandalkan cara, struktur organisasi, data-data atau informasi dan manajemen aksi yang sederhana dan terikat pada struktur otoritas tradisi masyarakat setempat. Gerakannya masih bersifat lokal, *fragmented* (terbatas di komunitasnya), lebih didasarkan pada kesadaran konfliktual (belum sampai pada kesadaran politik) dan lebih ditujukan untuk mencapai kepentingan material (lahan pertanian).

Pada sisi lain semakin menguatnya solidaritas, kepercayaan, loyalitas dan komitmen moral menjadi pertanda telah disituasikannya semangat kolektif petani. Dalam gerakan lokal-tradisional, petani semakin kuat dalam pendefinisian bersama tentang siapa “kita (*in-groups*)” dan siapa pihak “lawan (*out-groups*)”. Mereka melakukan proses interaktif dan dalam pendefinisian bersama tersebut (konstruksi, negosiasi, aktivasi dan formasi) berhubungan dengan orientasi gerakan dan menginterpretasikan peluang dan tekanan-tekanan di mana gerakan tersebut dilakukan. Mereka yang di dalam komunitasnya menjadi tokoh masyarakat adalah sekaligus menjadi simpul gerak perjuangan petani tersebut.

Para anggota gerakan lokal-tradisional cenderung terbatas dalam wilayah komunitas yang sama. Tetapi, keadaannya berbeda ketika aksi-aksi petani sudah sampai keluar desa (kecamatan, kabupaten dan provinsi). Aksi kolektif ini sudah mulai bertambah mendukungnya dan semakin beragam. Hal ini dilakukan karena kuatnya tekanan pihak lawan. Mereka beranggapan bahwa semakin banyak partisipan maka semakin kuat posisi tawarnya. Meskipun alas hak dalam

---

<sup>244</sup> Pada tingkat kesadaran konsensus petani memposisikan persoalan tanah yang dianggap menjadi haknya sebagai dalam kondisi konflik tetapi upaya untuk menyelesaikannya cenderung melalui jalur institusional. Pada tataran kesadaran konfliktual memposisikan persoalan tersebut cenderung perlu dimunculkan melalui aksi-aksi kolektif non institusional melalui wadah tatanan tradisi setempat meskipun jalur institusional bukan hukum seperti negosiasi dan mediasi masih tetap terbuka untuk dilakukan.

perjuangan petani tetap penting, tetapi dengan pendekatan terbuka seperti itu berkorelasi pada terbuka peluang pihak luar untuk ikut mencapai kepentingannya, bahkan termasuk di dalamnya para penunggang bebas (*free-riders*). Selain itu, dalam gerakan tersebut aksi-aksi kolektif petani sering kurang dapat dikontrol antara lain karena cara pengorganisasian yang masih sederhana. Beragamnya latar belakang partisipan membuat strategi gerakan berbasis otoritas tradisional menjadi semakin kurang efektif.

#### **5.4. Berkembangnya Sub Kultur Oposisi Petani**

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa upaya petani dalam mengelola beragam struktur mobilisasi sumberdaya telah menghasilkan strategi aksi-aksi kolektif institusional dan non institusional. Tetapi semua upaya yang dilakukan tetap tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang mereka hadapi. Pada masa rezim Orde Baru kontrol politik negara sangat kuat dan menutup rapat upaya petani untuk memperjuangkan haknya atas tanah.

Dari banyak kasus kegagalan aksi-aksi kolektif petani dapat disimpulkan bahwa sejauh berbagai upaya kolektif petani masih bersifat lokalistik, terpisah-pisah dan tidak mendapat dukungan kuat dari pihak lain (non petani) maka tidak akan berhasil. Kesimpulan ini didasarkan pada fakta bahwa sistem agraria dominan terintegrasi secara nasional dan sikap politik negara tetap konsisten diarahkan pada arus utama modernisasi pembangunan. Otoriterianisme tetap berlaku untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, sedangkan petani harus membatasi hak-hak demokrasi agar memberi ketenangan politik bagi pertumbuhan ekonomi.<sup>245</sup> Pada sisi lain, petani tetap pada pendiriannya terus berjuang memperoleh hak kuasa atas tanah. Keteguhan pendirian petani tersebut telah melahirkan suatu konsepsi yang disebut “sub kultur oposisi petani”.

Konsep “sub kultur” dapat dimaknai sebagai seperangkat perilaku dan kepercayaan sekelompok orang yang berbeda dan yang membedakan mereka dari kultur dominan di mana mereka menjadi bagiannya. Sedangkan konsep “oposisi” menunjuk pada pandangan, sikap dan perilaku yang bertentangan dengan pihak lain yang dianggap sebagai lawan. Jadi “sub kultur oposisi petani” diartikan sebagai realitas sosio-kultural melawan dominasi yang direproduksi secara aktif dalam struktur schemata petani, di dalam ruang-ruang interaksi dan berkembang selama persoalan pertanahan struktural berlangsung. Sub kultur

---

<sup>245</sup> Ignas Kleden. 2004. Op.Cit., hal. 32

oposisi petani lebih dinamis dibanding kultur dominan, tetapi sifatnya kurang cair (*fluid*) dibanding frame kolektif. Di dalam sub kultur oposisi petani selain terdapat akumulasi ketidakpuasan juga terdapat penguatan kesadaran konfliktual sejalan dengan kegagalan atas perjuangan yang pernah ditempuh.

Terbentuknya sub kultur oposisi petani membuka ruang bagi meningkatnya situasi hubungan agraria konfliktual yang berkembang di kalangan petani. Di dalam situasi hubungan tersebut sudah ada kesadaran oposisional tetapi masih berada pada derajat kesadaran konfliktual belum sampai pada kesadaran politik. Dimaksud kesadaran oposisional (*oppositional consciousness*) menurut Aldon D. Morris (1992) adalah menunjuk pada seperangkat ide-ide dan kepercayaan “memberontak” yang dikonstruksi dan dikembangkan oleh kelompok tertekan dengan tujuan mengarahkan perjuangannya untuk merusak atau meruntuhkan, mereforma atau menggulingkan suatu sistem dominasi.<sup>246</sup> Secara sederhana kesadaran oposisional tersebut terungkap dalam penuturan bapak MZ, seorang tokoh gerakan petani di Register 37 dan 40 sebagai berikut:

Disini tahun 1960-an banyak penduduk yang memiliki surat ijin pembukaan lahan. Tahun 1992 kontrak perusahaan sudah habis, maka penduduk kembali menggarap lahannya. Para orang tua menyuruh anak-anaknya untuk masuk ke wilayah perusahaan menggarap tanahnya kembali. Pada tahun 1997, para penggarap ditangkap dan digiring oleh TNI ke rumah kepala desa. Tanaman digusur dan orang-orang yang ditangkap disuruh menanda tangani surat pertanyaan bermeterai dan kemudian dilepaskan. Setelah itu kami pikir-pikir bahwa sebenarnya kita ini hanya melawan satu orang yaitu manager perusahaan. Maka orang ini harus dihantam, disingkirkan maka semuanya akan selesai. Kemudian muncul gagasan: “Sekarang begini saja, kita kompak kalau mau menggarap lahan satu hektar ya digarap sama-sama, begitu seterusnya ketika kita beralih ke tempat lain” (Sumber: wawancara dengan tokoh petani di desa Sukadamai, 2008).

Sub kultur oposisi petani berkembang sejalan dengan berkembangnya situasi hubungan konfliktual dan tekanan struktural. Situasi ini mendorong rasa “frustasi aktif” (ketidakpuasan) dan meningkatkan ketegangan struktural. Rasa ketidakpuasan tersebut sempat dimunculkan dalam beberapa kasus tindakan kolektif secara spontan, gerakan konsensus hingga gerakan lokal-tradisional.

Kontinuitas dalam tahapan tindakan kolektif petani tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada deprivasi absolut (obyektif), tetapi juga secara bersama-sama oleh faktor deprivasi relatif (subyektif) dan faktor lainnya. Tidak semua partisipan dalam aksi kolektif adalah miskin dan tidak memiliki lahan pertanian. Akan tetapi, realitas tersebut merupakan pertanda bahwa sistem hubungan agraria dominan tidak lagi kebal (*immune*) dan bahkan dapat

---

<sup>246</sup> Aldon D. Morris and Carrol McClurg Mucller (Ed's.). 1992. Op.cit. hal. 363.



mendorong berkembangnya perilaku oposisi petani. Kesadaran konfliktual petani tumbuh sejalan dengan berkembangnya sub-kultur alternatif dengan segenap unsur-unsurnya yang terwujud dalam sub kultur oposisi petani. Ini dapat menjadi suatu “*tool kit*” yang sangat berguna untuk mengkonstruksi tindakan-tindakan strategis dalam perjuangan selanjutnya.

### **5.5. Ikhtisar**

Obyek ketegangan struktural agraria di Lampung berbasis pada persoalan pertanahan, khususnya persoalan penguasaan tanah yang merugikan petani. Persoalan pertanahan tersebut bersifat akumulatif karena tidak terselesaikan secara tuntas, dan bersifat masif dan merata di wilayah kabupaten dan kota. Secara umum sumber utama ketegangan terletak pada kebijakan pembangunan, seperti program translok dan kebijakan agraria yang mengabaikan pentingnya penguasaan tanah bagi komunitas lokal (petani). Secara umum pada masa Orde Baru makna tanah yang dikuasai negara diubah menjadi suatu komoditas atau lebih dilihat dalam fungsi ekonomi daripada fungsi sosio-kultural. Komodifikasi pertanahan ini kemudian diintegrasikan ke dalam pasar yang lebih luas merangsang berkembangnya iklim agroindustri. Para pemodal besar masuk, sektor agroindustri tumbuh pesat dengan penguasaan tanah secara besar-besaran sebagai faktor produksi utama.

Secara khusus sumber utama ketegangan struktural agraria terletak pada tataran implementasi. Dalam praktek kebijakan pembangunan tersebut berjalan seiring dengan jumlah petani yang kehilangan tanahnya karena terjadi pembebasan dan pengambil-alihan tanah oleh nagara secara besar-besaran demi pembangunan. Tanah-tanah tersebut sudah dikuasai secara aktif oleh petani baik secara hukum, secara adat, maupun secara historis.

Fenomena tersebut menunjukkan bangunan sistem agraria antagonis yang meminggirkan komunitas lokal (petani) dan terciptanya struktur hubungan agraria yang timpang (asimetris). Dampaknya terhadap kondisi kehidupan petani adalah berkembangnya deprivasi (relatif dan absolut) dan rasa ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Maraknya konflik-konflik pertanahan di Lampung menunjukkan bahwa ketidaksesuaian hubungan antar elemen sistem agraria (antara negara dan swasta dengan komunitas petani) tidak pernah diarahkan menuju pada satu titik temu, bahkan semakin melegitimasi praktik peminggiran masyarakat petani. Pada masa Orde Baru, tumbuhnya ideologi egalitarian atau neo-populis pada

aras lokal memperkuat daya dorong munculnya protes-protes petani berkembang menjadi gerakan lokal-tradisional.

Dengan demikian, sumber utama ketegangan struktural agraria di Lampung tidak semata-mata terletak pada interest masing-masing pihak terhadap tanah maupun pada praktik ketidakadilan, tetapi lebih pada konstruksi struktur hubungan agraria berbasis kepentingan pembangunan yang termanifestasikan dalam praktek ketidakadilan. Sistem agraria Orde Baru disadari oleh petani sebagai penghalang struktural berlapis yang sulit ditembus (dengan mengandalkan gerakan lokal). Posisi petani yang *underdog*, termarginalkan dan tersubordinasi yang demikian kuat dengan jelas dilakukan secara sistematis (struktural). Kondisi ini melahirkan dua bentuk sikap petani, yakni pasif dan reaktif. Sikap reaktif petani termanifestasikan dalam bentuk perjuangan kolektif berkembang sesuai dengan tingkat kekuatan struktur sumberdaya mobilisasi dan derajat tekanan atau peluang untuk bergerak.

Pada masa otoriterianisme Orde Baru perjuangan kolektif petani sudah dilakukan mulai dari protes, gerakan konsensus dan terakhir gerakan lokal-tradisional. Pada satu sisi, proses dan tahapan tersebut menunjukkan adanya inovasi strategi perjuangan petani. Akan tetapi, upaya-upaya mereka mengalami kegagalan dan gerak perjuangannya menjadi stagnan, mudah dihambat dan dilemahkan.

Kegagalan gerak perjuangan petani pada tataran lokal di Lampung tersebut secara akumulatif memicu muncul dan berkembangnya sub kultur oposisi petani. Sub kultur oposisi petani ini mengandung sumberdaya mobilisasi petani. Ketika terbuka peluang politik (reformasi) akumulasi sumberdaya potensial tersebut dengan mudah dapat dimobilisir dalam bangunan kekuatan aksi-aksi kolektif dalam gerakan sosio-politik petani (gerakan petani terorganisir).

Tabel 9 Sumber Utama Ketegangan Struktural Agraria dan Perjuangan Petani

Kebijakan Pembangunan (Sumber Umum)	Praktik Penguasaan Tanah (Sumber Khusus)	Dampaknya Terhadap Kondisi Petani
1. Terintegrasinya tanah dalam struktur kepentingan ekonomi dan politik supra lokal.	1. Delegitimasi alas hak atas tanah pe-tani tradisional.	1. Deprivasi obyektif/absolut (Mis-kin, pekerja kasar/rendahan, buruh tani dan buruh perusa-haan, pekerja tak tetap, meng-anggur).
2. Penetrasi kapitalisme: komersialisasi dan politisasi tanah yang mendorong masuknya para pemodal.	2. Mengabaikan sistem ganti rugi yang adil.	2. Deprivasi subyektif/relatif (ingin hidup lebih sejahtera seperti mereka yang memiliki tanah).
3. Tanah sebagai faktor produksi utama yang harus dikuasai secara besar-besaran.	3. Pembebasan tanah melanggar hukum. 4. Memperburuk sistem administrasi pertanahan. 5. Mengingkari janji dan kesepakatan.	3. Berkembangnya rasa ketidakadilan dan ketidakmerataan (akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat pembangunan). 4. Pengaruh ideologi luar (demokrasi, egalitarian, neo populis).

#### Perjuangan Petani Dalam Sistem Politik Otoriter Orde Baru

1. **Protes:** Gerakan tak berbentuk, berupa reaksi-reaksi spontan, emosional, sporadis baik sembunyi maupun terbuka (biasanya dalam bentuk kekerasan fisik atau amuk massa). Hasilnya selalu gagal dan dengan mudah ditekan dan dilemahkan.
2. **Gerakan Konsensus:** Komunitas petani lokal berjuang bersama bertujuan untuk menyelesaikan persoalan pertanahan baik melalui jalur hukum maupun dengan cara mediasi dan negosiasi. Hasilnya banyak yang tidak terselesaikan.
3. **Gerakan Lokal-Tradisional:** Aksi-aksi kolektif non institusional dengan ciri-ciri organisasi sederhana, berbasis data dan strategi aksi; terikat oleh otoritas tradisi setempat; berlokus lokal (wilayah komunitas petani tertentu); berorientasi material (tanah kembali atau ganti rugi).
4. **Berkembang Sub Kultur Oposisi Petani:** realitas sosio-kultural melawan dominasi yang direproduksi secara aktif dalam struktur schemata petani, di dalam ruang-ruang interaksi dan berkembang selama persoalan pertanahan struktural berlangsung.

Sumber: Hasil riset, 2008.

## **BAB VI**

### **DEKONSTRUKSI STRUKTUR POLITIK, MOBILISASI SUMBERDAYA, PEREBUTAN KUASA DAN STAGNASI GERAKAN AGRARIA**

#### **6.1. Struktur Sumberdaya Mobilisasi dan Anatomi Gerakan Petani**

Gerakan petani di Lampung tidak terlepas dari bagaimana latar internal organisasionalnya, terutama terkait dengan prakondisi munculnya gerakan, peran jaringan kelompok pendukung, dan posisi aktor strategisnya. *Pertama*, gerakan petani di Lampung dipicu oleh kondisi khusus, yakni berkembangnya ketegangan struktural agraria. *Kedua*, persoalan pertanahan tidak terselesaikan secara tuntas di lapangan, bahkan terjadi secara akumulatif dan merata. *Ketiga*, gerakan tersebut didukung kuat oleh elemen masyarakat sipil. *Keempat*, peran elemen non petani sama kuatnya dengan elemen petani dalam mencapai keberhasilan dan dalam menentukan pasang surutnya aktivitas gerakan petani.

Sebagai suatu gerakan sosial dalam skala provinsi, maka gerakan petani ini direncanakan dengan matang dan terorganisir dengan baik. Meskipun dilihat dari proses penguatan struktur organisasi gerakan petani dibedakan antara gerakan konstruksi dari atas dan dari bawah, kesamaan di antara keduanya adalah disyahkan melalui kongres, yakni semakin diformalkannya organisasi gerakan petani baik sebelum maupun sesudah melakukan aksi-aksi kolektif. Oleh karena itu, gerakan petani di Lampung dapat dikatakan sebagai gerakan sosial karena memenuhi semua unsur-unsurnya.

##### **6.1.1. Konstruksi Gerakan dari Atas: Kasus Serikat Petani Lampung (SPL)**

Sebelum SPL berdiri, pada tanggal 21 September 1998 para aktivis petani dan non petani dari berbagai daerah di Lampung diajak untuk mengikuti seminar Pembaruan Agraria di Musium Lampung, Gedung Meneng, Bandar Lampung. Mereka dari aktivis LSM terdiri dari anggota Walhi, Bina Desa, YPBHI, Yasa-dana, LBMD Metro, dan dari Banser NU (PKB). Semua lembaga itu (LSM, Ormas dan Partai Politik) mengikutkan anggotanya sebagai wakil untuk ikut ke Jakarta. Sedangkan yang dari wakil petani berasal dari Lampung Selatan, Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Tengah dan Tulang Bawang. Semuanya sebanyak 60 orang utusan perwakilan pergi ke Jakarta yang difasilitasi oleh YPBHI

Lampung. Seminar itu diselenggarakan oleh Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) bekerjasama dengan YPBHI Lampung dan Walhi Lampung. Selesai seminar mereka berdiskusi di kantor Walhi dengan agenda membentuk organisasi gerakan petani di Lampung.

Pada tanggal 22 September 1998 mereka mengikuti aksi unjuk rasa di DPRD Provinsi Lampung. Karena belum mempunyai wadah organisasi tani, maka dalam aksi tersebut mengatasnamakan "Masyarakat Tani Lampung". Pada tanggal 24 September 1998 mereka pergi ke Jakarta untuk memperingati Hari Tani dan melakukan aksi di DPR-RI. Setelah aksi mereka kembali ke UI Depok untuk mendengarkan mimbar bebas.

Pada bulan Oktober 1998 (sebulan setelah dari Jakarta) mereka bertemu menindaklanjuti perlunya dibentuk organisasi gerakan petani. Pertemuan dihadiri oleh LSM, Ormas dan Partai Politik dan diikat dalam wadah "korsorsium". Dari hasil pertemuan itu mereka mempersiapkan diri untuk melakukan kongres yang rencananya dilaksanakan pada bulan Desember 1998. Kemudian pada hari Rabu 9 Desember 1998 berhasil dilakukan kongres pertama di Kelurahan Pelita Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kotamadya Bandar Lampung. Hari dan tanggal tersebut sekaligus disepakati sebagai hari lahirnya SPL.

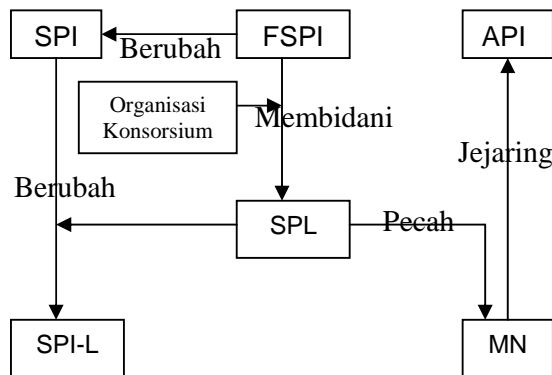
Model organisasi SPL adalah federatif dan sebagai wadah perjuangan massa dan kader petani yang mandiri dan berdaulat. Tujuannya adalah merombak dan memperbaharui, memulihkan dan menata (1) model pembangunan ekonomi secara umum dan kebijakan agraria secara khusus, dan (2) demokrasi di bidang politik secara umum dan kedaulatan politik petani secara khusus, keduanya agar sesuai dengan Pancasila dan UUD'45. Strategi perjuangannya adalah: (1) selalu mempertimbangkan kebutuhan permasalahan, kehendak, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh massa dan kader petani; (2) memadukan gerakan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan petani secara tepat, menyeluruh, sistematis dan penuh perhitungan; (3) perombakan, pembaharuan, pemulihan dan penataan sistem agraria nasional yang sejati untuk keadilan dan kemakmuran bersama bagi petani dan seluruh rakyat Indonesia; (4) memperjuangkan terjadinya pemulihan kedaulatan politik petani dan seluruh rakyat Indonesia untuk keadilan dan kemakmuran bersama bagi petani dan seluruh rakyat Indonesia; (5) memperjuangkan terjadinya perombakan sistem agraria agar menjadi adil dan beradab serta pemulihan kedaulatan politik petani untuk keadilan dan kemakmuran bersama bagi kaum tani dan rakyat seluruh

dunia sebagai pelaksana tanggung jawab bersama petani dan masyarakat Indonesia sebagai warga dunia.

Kepengurusan SPL sesuai dengan hasil konggres pertama adalah selama tiga tahun. Dalam kepengurusan tersebut terdiri dari dua badan, yakni Dewan Pimpinan Petani (DPP) dan Badan Pimpinan Pelaksana (BPP). Organisasi petani basis anggota SPL disebut Organisasi Tingkat Lokal (OTL). Jumlah DPP ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan cakupan wilayah kerjanya setingkat kabupaten. DPP inilah yang mengangkat BPP, dan masing-masing anggota DPP memiliki sekretariat di daerah yang berasal dari daerah asalnya. Dalam Anggaran Dasar SPL juga dinyatakan bahwa kalangan non petani dapat menjadi pengurus BPP.

Setelah SPL terbentuk keanggotaan petani basis diperluas, persoalan pertanahan dan pertanian diangkat diwujudkan dalam aksi-aksi kolektif. Seperti aksi unjuk rasa bersama petani di 9 desa di wilayah kecamatan Natar yang menjadi korban pemalsuan pupuk, bibit dan obat-obatan pertanian. Kemudian aksi reklamasi di desa Air Panas Kecamatan Natar Lampung Selatan, di 11 desa di kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah, di desa Trimodadi kecamatan Kali Balak Lampung Utara, dan wilayah Rawasragi Lampung Selatan.

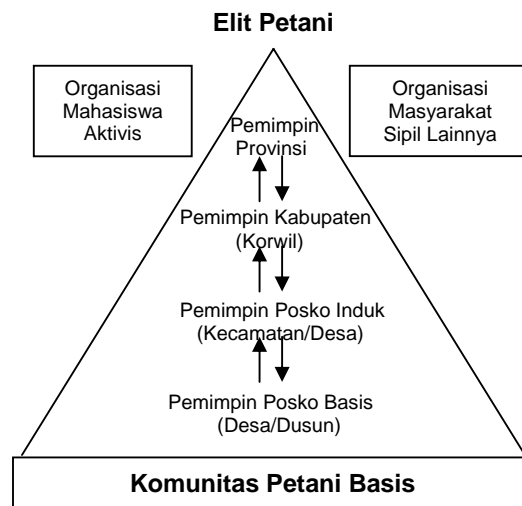
Sejak awal SPL menjadi anggota atau berjejaring kuat dengan FSPI. Sejak awal SPL juga sudah mengalami krisis kepemimpinan, kemudian berkembang konflik internal dan mengalami fragmentasi. Tahun 2002 sebagian anggotanya memisahkan diri dan membentuk Mirak Nadai (MN). Organisasi ini tahun 2004 diklaim sebagai anggota Aliansi Petani Indonesia (API). Bersamaan dengan berubahnya FSPI pada akhir tahun 2007 menjadi SPI maka SPL juga berubah menjadi SPI-Lampung hingga saat ini. Dinamika SPL hingga saat ini dapat disajikan sebagaimana tampak pada Gambar 3.



Gambar 3 Dinamika Organisasi Gerakan SPL

### 6.1.2. Konstruksi Gerakan dari Bawah: Kasus Dewan Tani Lampung (DTL)

Gerakan petani konstruksi dari bawah diawali dengan pembukaan Posko Pengaduan, kemudian dilanjutkan dengan pengorganisasian berbagai komunitas petani yang disebut Posko Reformasi Rakyat dan Mahasiswa Bersatu (PRRMB). Organisasi petani ini pada tingkat basis disebut Posko Basis, dan yang mengkoordinir beberapa Posko Basis disebut Posko Induk. Pada tingkat wilayah Kabupaten disebut Koordinator (Korwil) dan pada tingkat provinsi disebut Dewan Tani Lampung atau disingkat DTL (Gambar 4).



Gambar 4 Struktur Sumberdaya Mobilisasi DTL

Gambar 4 menyajikan struktur sumberdaya mobilisasi (*human resources/assets*) gerakan petani konstruksi dari bawah. Selain itu bahwa posisi para aktor strategis non petani berada sejajar dengan posisi para elit petani. Meskipun mereka berada di luar struktur organisasi gerakan, tetapi peran mereka sangat menentukan pasang-surutnya aktivitas gerakan petani.

Aksi kolektif secara besar-besaran dilakukan tanggal 25-26 Agustus 1998 di mana seluruh PRRMB di Provinsi Lampung dengan segenap pendukungnya melakukan aksi dan negosiasi dengan para pejabat Pemda Provinsi Lampung. Aksi massa waktu itu di pusatkan di lapangan Korpri Bandar Lampung. Sasaran aksi kali ini ditujukan kepada Gubernur Lampung.

Terbentuknya PRRMB berarti petani sudah memiliki wadah identitas kolektif sendiri. Tetapi sebagai suatu gerakan sosio-politik bersama petani, para aktor non petani masih belum terwadahi. Label "mahasiswa" dalam PRRMB pada dasarnya merepresentasikan kelompok non petani, tetapi dalam organisasi itu

lebih menunjukkan penguatan identitas kolektif petani. Sedang gerakan reformasi yang menjadi agenda gerakan masyarakat sipil tidak hanya dilakukan petani tetapi mencakup semua elemen organisasi pendukung (non petani). Semua elemen pendukung kemudian diikat dalam wadah organisasi Dewan Rakyat Lampung (DRL), yakni sebagai organisasi berbentuk korsosium terdiri dari 36 elemen organisasi masyarakat sipil, termasuk di dalamnya PRRMB. Jadi sejak awal terbentuknya PRRMB menjadi elemen dan memperkuat struktur organisasi DRL (posisinya tidak otonom).

Pasca aksi unjuk rasa dan reklamasi perdana di Register 40 Gedungwani Lampung Selatan, kemudian tanggal 1 September 1999 dijadikan hari lahir dan tanggal 9 September 1999 sebagai hari berdirinya DTL. Sejak ini DTL memiliki sekretariat sendiri di Jalan Pelita I, Nomor 14, Kelurahan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Dalam pembentukan DTL berhasil dirumuskan beberapa tuntutan menurut bidangnya sebagai berikut.

1. Bidang ekonomi: (a) menuntut dikembalikannya tanah petani yang dirampas secara paksa oleh rezim Orde Baru; (b) menuntut diutamakannya ekonomi rakyat secara konkrit (ekonomi kerakyatan); (c) menuntut diberhentikannya penindasan dan perampasan tanah petani.
2. Bidang politik: (a) tolak Habibie dan adili Soeharto; (b) menuntut dikembalikannya harta Soeharto dan kroninya untuk mengatasi krisis ekonomi; (c) menuntut dicabutnya Dwi Fungsi ABRI; (d) turunkan harga; (e) bentuk pemerintahan transisi yang dipimpin oleh pemerintahan sipil demokratik; (f) pemutusan sistem sentralisasi; (g) referendum untuk rakyat Timor Leste.<sup>247</sup>
3. Bidang sosial: (a) rakyat menolak disebut perambah hutan; (b) desa-desa yang dihilangkan secara paksa status hukumnya harus dikembalikan lagi menjadi desa definitif; (c) desa-desa yang berada di areal register harus di *enclave*.

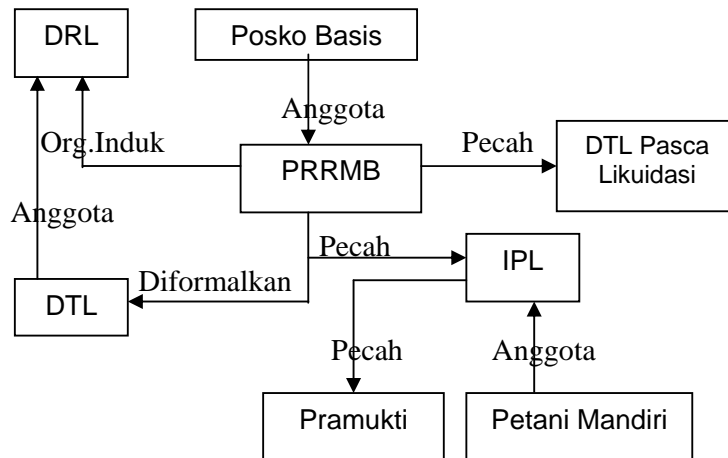
Pada tanggal 14-17 Mei 1999 berlangsung kongres DTL bertempat di dusun Cipadang, desa Way Lima, kecamatan Gedung Tataan, Lampung Selatan. Dari sini mulai mencuat konflik-konflik kepentingan antar kelompok pendukung. Akhirnya DTL dilikuidasi oleh DRL dan terjadi fragmentasi organisasi basis dalam tiga wadah organisasi. *Pertama* menjadi anggota DRL, karena DTL dilikuidasi

---

<sup>247</sup> Pada waktu itu para mahasiswa dari Timor Leste yang sedang tugas belajar (biaya negara) di Lampung juga bergerak memanfaatkan momentum dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Gerakan mereka berbau dan berada di tengah-tengah gerakan reformasi mahasiswa di Provinsi Lampung.



maka semua basis anggotanya secara organisatoris kembali berada di bawah kendali DRL. *Kedua*, masih menjadi Anggota DTL. Meskipun dilikuidasi, ketua DTL tidak mengakuinya dan DTL tetap menjalankan program organisasi bersama beberapa anggota basis yang masih loyal. *Ketiga*, membentuk organisasi gerakan yang baru bernama Ikatan Petani Lampung (IPL). Secara lebih jelas, dinamika DTL disajikan dalam Gambar 5.



Gambar 5 Dinamika Organisasi Gerakan DTL

Karena DTL akhirnya mati suri, maka sebagian besar anggotanya pada tahun 2001 mendirikan IPL. Organisasi baru ini mengklaim bahwa keberadaannya sebagai bentuk lain tetapi sama dengan DTL. Bedanya, IPL semakin mengerucut dipegang oleh kalangan petani, sebagai organisasi independen tidak menjadi bagian dari organisasi manapun (termasuk bagian dari DRL) dan tidak menjadi bagian (*underbouw*) dari partai politik apapun (seperti Serikat Tani Nasional atau STN-Lampung). Dalam beberapa kali pertemuan tingkat nasional akhirnya berhasil di bentuk wadah organisasi gerakan tingkat nasional bernama Pergerakan Tani-Nelayan Indonesia Mandiri (Petani Mandiri), dan salah satu pengurus inti IPL berhasil menduduki posisi sebagai ketua umum, yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen). Sejak ini IPL berjejaring dengan organisasi gerakan tingkat nasional dengan model struktur yang bersifat federatif.

Terdapat seorang tokoh gerakan yang berperan besar dalam membawa keberhasilan gerakan di Register 40 Gedung Wani. Hubungannya dengan ketua IPL kurang harmonis karena pernah di pecat sebagai ketua Posko Induk. Dia membawahi beberapa posko basis dan karena konflik tersebut tidak pernah terselesaikan maka akhirnya dia mendirikan organisasi petani baru bernama

“Pramukti”. Organisasi ini mengklaim bahwa semua posko basis IPL terutama di wilayah Register 40 Gedung Wani dan sekitarnya adalah menjadi anggotanya.

### **6.1.3. Anatomi Gerakan Petani**

Gerakan petani sebagai suatu gerakan sosial karena memiliki struktur sumberdaya mobilisasi yang jelas dalam bentuk organisasi gerakan sosial (*social movement organization*). Mengacu pada kriteria Landsberger (1984) dan Lofland (1996) terdapat tujuh unsur utama gerakan sosial, yakni sebab, tujuan dan sasaran, strategi, ideologi atau kepercayaan, keanggotaan, kepemimpinan, struktur organisasi dan efek gerakan. Sesuai dengan tujuh unsur tersebut maka gerakan petani di Lampung baik konstruksi dari bawah maupun dari atas sudah memenuhi semua unsur sebagai organisasi gerakan sosial.

Struktur gerakan petani merupakan instrumen perjuangan petani yang dikembangkan bukan lagi hanya untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek (*material*) dan jangka panjang (*posmaterial*). Dibandingkan dengan struktur gerakan sebelumnya seperti dalam gerakan lokal-tradisional, maka gerakan petani ini merupakan gerakan sosio-politik yang lebih sempurna dalam semua unsurnya. Tabel 10 menunjukkan bahwa organisasi gerakan petani baik konstruksi dari bawah maupun dari atas membangun ideologi egalitarian/populis dengan basis massa utamanya petani. Kecuali SPL ketika pecah berdiri MN sebagian anggota basisnya yang memiliki latar historis konflik pertanahan diambil alih oleh MN. Kemudian ketika SPL merubah bentuknya menjadi SPI-Lampung dia mengembangkan anggota basis dari komunitas petani yang memiliki potensi konflik (wilayah desa Antar Berak, Tanggamus) dan bukan wilayah konflik pertanahan (kecamatan Bangun Rejo, Lampung Tengah).

DTL menjadi peletak awal organisasi gerakan petani konstruksi dari bawah dan sempat membangun jejaring tingkat nasional. Tetapi umurnya tidak bertahan lama, “mati suri”, setelah dilikuidasi DRL karena terjadi perebutan antara jalur partai dan jalur LSM. Kemudian sebagian anggota basis ditarik oleh DRL dan sebagian lainnya berkonsolidasi membentuk IPL. Dalam perkembangannya IPL dan SPL mampu membangun jaringan pendukung tingkat nasional. Bahkan SPL pada akhir tahun 2007 setelah Kongres ke-II berubah membentuk organisasi unitarian menjadi SPI-Wilayah Lampung bagian dari SPI pusat Jakarta. Secara normatif sebagaimana tertuang dalam AD/ART, bahwa organisasi-organisasi

gerakan petani di Lampung memiliki ciri-ciri sebagai organisasi gerakan sosial moderen.

Tabel 10 Anatomi Organisasi Gerakan Petani Konstruksi dari Bawah dan Atas

Aspek	Konstruksi Gerakan Dari Bawah (DTL kemudian pecah menjadi IPL)		Konstruksi Gerakan Dari Atas (SPL kemudian pecah menjadi MN)	
	DTL	IPL	SPL	MN
Ideologi	Egalitarian/ Populis	Egalitarian/ Populis	Egalitarian/ Populis	Egalitarian/ Populis
Basis Massa	Petani	Petani	Petani	Petani
Basis Etnis	Jawa, Lampung, Semendo, Bali	Jawa, Lampung	Jawa, Lampung	Lampung
Kelompok Pendukung	Konsorsium DRL (terdiri dari 36 organisasi)	LSM	Konsorsium LSM	LSM
Ruang manuver	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
Jejaring	Provinsi dan nasional	Provinsi dan nasional	Provinsi dan nasional	Provinsi
Perubahan Bentuk	Ketika DTL dilikuidasi (sebagian anggota basis diambil DRL dan IPL)	Tetap (sebagian anggota basis diklaim organisasi Pramukti)	Akhir 2007 berubah menjadi SPI- Lampung (sebagian anggota basis diambil MN)	Tetap
Afiliasi Politik	Sebagian ke PRD dan sebagian ke LSM	Independen	Independen	Independen

Tabel 11 menunjukkan gambaran lebih rinci tentang ciri-ciri umum gerakan petani di Lampung sebagai gerakan sosial sesuai dengan unsur-unsur yang disyaratkan oleh Landsberger (1984) dan Lofland (1996). Tujuan dan sasarannya tidak hanya bersifat praktis atau pragmatis, dalam skala otoritas lokal tetapi mengarah pada tujuan jangka panjang dan dalam skala otoritas wilayah dan nasional. Tujuan dan sasaran tersebut berjalan seiring dengan strategi dan ideologi gerakan petani yang bersifat dualitas *material* dan *postmaterial*. Hanya saja keanggotaannya masih bersifat kolektif terdiri dari beberapa organisasi basis dan berdasarkan klaim. Struktur organisasi bersifat hirarkhis dan jelas pembagian tugasnya, dengan pola kepemimpinan berbasis pada kecakapan individual. Hasil gerakan sangat jelas, ke atas dapat mempengaruhi perubahan kebijakan pertanahan dan ke bawah dapat menguasai lahan pertanian di berbagai wilayah konflik pertanahan mencapai puluhan ribu hektar.

Tabel 11 Anatomi Gerakan Petani di Lampung Sebagai Gerakan Sosial

Aspek	Uraian
Sebab atau sumber gerakan	Kebijakan agraria dan implementasinya, pengaruhnya terhadap petani (deprivasi absolut, deprivasi relatif, tidak adil dan merata, peningkatan aspirasi kehidupan) dan masuknya ideologi luar
Aktor gerakan	Terdiri dari elemen petani dan non petani. Tetapi dalam perkembangannya semakin mengerucut pada elemen petani.
Lawan gerakan	Abstrak: Imperialisme dan neo-kolonialisme Kongkrit: negara (pemerintah) dan swasta (perusahaan).
Tujuan dan Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Jangka pendek</i>: penguasaan tanah pertanian bagi petani penggarap dan perubahan kebijakan yang memihak petani.</li> <li>• <i>Jangka panjang</i>: perubahan tatanan agraria lebih baik dan kondusif terhadap peningkatan kesejahteraan petani.</li> <li>• <i>Sasaran</i>: pemerintah pusat dan daerah.</li> </ul>
Strategi Gerakan	Makro: gerakan sosio-politik (belum sampai pada gerakan sosio-kultural). Mikro: unjuk rasa dan pendudukan lahan (strategi gerakan jangka pendek).
Ideologi Gerakan	Egalitarian, neo-populis.
Keanggotaan	Bersifat suka-rela dan kolektif dalam wadah organisasi petani tingkat basis <sup>248</sup>
Organisasi dan Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Organisasi</i>: terstruktur secara hirarkhis dan jelas.</li> <li>• <i>Kepemimpinan</i>: (1) pada tingkat basis lebih ditentukan oleh tradisi setempat baik dalam komunitas adat maupun non adat; (2) pada level provinsi lebih ditentukan kapabilitas individu aktor.</li> <li>• <i>Sumber dana</i>: swadaya dan sumber dana lain dari LSM mitra dan jaringan pendukung (dalam dan luar negeri), dari jaringan organisasi nasional, perusahaan dan pemerintah daerah.</li> </ul>
Efek Gerakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan sikap proaktif pemerintah pusat dan daerah.</li> <li>• Dikeluarkan kebijakan pertanahan yang menguntungkan komunitas lokal (petani).</li> <li>• Dikuasai (kembali) tanah pertanian.</li> </ul>

Sumber: Hasil riset, 2008.

## 6.2. Dekonstruksi Struktur Politik dan Respon Terhadap Peluang Gerakan

### 6.2.1. Terbukanya Peluang Politik

Dimaksud dengan dekonstruksi struktur politik pusat adalah runtuhnya rezim otoritarianisme Orde Baru. Kondisi ini sekaligus berarti peluang gerakan sosio-politik petani terbuka. Lengsernya presiden Soeharto menjadi momentum dekonstruksi struktur politik pusat. Kekuatan rezim Orde Baru telah runtuh dan para elit politik sudah tidak lagi solid di dalam mengawal otoritarianisme, bahkan terjadi konflik dan fragmentasi. Kekuatan tekanan politik negara melemah dan

<sup>248</sup> Pada perkembangannya pada akhir tahun 2007 SPL merubah model struktur federatif menjadi unitarian (SPI-Lampung). Dia mulai mempraktikkan keanggotaan bersifat personal meskipun belum diterapkan secara penuh atau masih mengandalkan keanggotaan kolektif.

kelompok elit yang kontra Orde Baru mendukung gerakan masyarakat sipil dalam melakukan perubahan. IJ, seorang mantan Sekjen DRL mengatakan:

Memang waktu itu bidikan kita adalah turunnya presiden Soeharto karena dia yang menjadi simpul kekuatan rezim Orde Baru. Berdasarkan analisis kita sesuai dengan perkembangan situasi politik nasional waktu itu maka presiden Soeharto dapat diprediksi segera dapat diturunkan. Para petinggi di pusat sudah tidak kompak lagi, banyak yang mendukung gerakan arus bawah. Ternyata perkiraan kita tidak meleset, Soeharto mengundurkan diri, rezim Orde Baru runtuh, dan kita-kita yang disini (Lampung) segera menyusun agenda perjuangan lebih lanjut, termasuk membantu perjuangan petani.

Terbukanya peluang politik diposisikan sebagai unsur pendorong utama berkembangnya kesadaran kolektif petani dan penguatan struktur mobilisasi sumberdaya gerakan petani. Indikasinya dapat dilihat dari derajat keterbukaan rezim pasca Orde Baru terhadap tuntutan-tuntutan petani. Berbagai elemen masyarakat sipil seperti LSM, elit agama (MUI Lampung), kalangan perguruan tinggi, dan bahkan dari partai politik semua mendukung gerakan petani. Bukti keterbukaan lain adalah aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa sudah ditolerir dilakukan di luar kampus dan pemerintah daerah juga sudah mau membuka dialog untuk menyelesaikan kasus-kasus pertanahan yang dialami petani.

Asumsi dasar pentingnya struktur peluang politik adalah bahwa mobilisasi sumberdaya gerakan dimungkinkan ketika terjadi perubahan iklim politik yang membuat tindakan kolektif lebih memungkinkan untuk sukses. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peluang politik meningkat pada level penerimaan para pemegang otoritas terhadap aksi-aksi kolektif petani atau dalam melakukan penstrukturan kembali hubungan-hubungan kekuasaan yang ada. Meningkatnya peluang politik juga telah mendorong dikembangkannya tujuan-tujuan dan taktik gerakan yang diartikulasikan oleh organisasi gerakan petani.

### **6.2.2. Respon Terhadap Peluang Politik**

Terbukanya peluang politik dengan cepat direspon dengan penguatan sumberdaya gerakan petani di Lampung. Terutama bagi kalangan komunitas petani korban pembangunan, terbukanya peluang politik tersebut memperkuat semangat mereka untuk meneruskan perjuangan sosio-politik. Sinyal responsif di kalangan petani disambut baik oleh para aktivis gerakan reformasi atau pro-demokrasi dan didukung oleh segenap elemen masyarakat sipil lainnya.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa betapapun kuatnya struktur mobilisasi sumberdaya masih tidak bebas dari tekanan-tekanan politik, karena “ruh” otoritarianisme Orde Baru masih belum mati. Sebagian besar

komunitas petani baru bergerak segera setelah ancaman politik negara melemah atau peluang politik benar-benar terbuka. Kondisi ini ternyata direspon secara dinamis dan beragam oleh berbagai komunitas petani basis. Beragamnya respon kolektif petani tersebut sesuai dengan karakteristik persoalan yang dihadapi. Bahkan dalam wilayah yang sama respon masing-masing komunitas petani berbeda. Seperti respon komunitas petani di desa Sukadamai lebih cepat dari respon komunitas petani di desa Sinar Rezeki dan sekitarnya padahal mereka berada di wilayah konflik pertanahan yang sama (Register 40 Gedung Wani). Ini terkait dengan persepsi tentang situasi yang mereka hadapi, kalkulasi resiko (*costs*) yang akan ditanggung dan hasil (*benefits*) yang akan dicapai. Kalkulasi partisipasi petani dalam aksi kolektif selain mempertimbangkan faktor obyektif (eksternal) juga faktor subyektif dari pengalaman petani sendiri.

Perbedaan respon petani juga didukung oleh fakta bahwa perubahan peluang politik di dalamnya masih tidak bebas dari unsur tekanan politik yang dapat menghambat berkembangnya aktivitas gerakan. Lemahnya kontrol negara tidak sepenuhnya menghilangkan upaya pemerintah (dan perusahaan) untuk mempertahankan kepentingannya dengan berbagai cara. Masih belum terbuka sepenuhnya peluang politik di daerah (Lampung) dilihat dari beberapa kasus oleh petani masih dianggap berkonsekuensi negatif terhadap pengambilan keputusan partisipasi mereka di dalam gerakan. Pada kasus lain, tekanan politik dan upaya persuasif pemerintah dan perusahaan juga dapat mempengaruhi menurunnya aktivitas gerakan petani selanjutnya.

Di wilayah Register 40 Gedung Wani para petani merespon secara positif perubahan politik nasional dan lokal. Para petani di desa Sukadamai dan sekitarnya lebih cepat merespon daripada para petani di desa Sinar Rezeki dan sekitarnya. Ada 9 orang petani di desa Sukadamai dan sekitarnya yang bergerak cepat dan mereka kemudian diakui sangat berjasa dalam mengawali perjuangan petani. Mereka dianggap sebagai tokoh perintis perjuangan petani yang kemudian disebut "*Tim Wali Songo* (Gerakan Wali Sembilan)". Sedangkan para petani di desa Sinar Rezeki dan sekitarnya belum ada reaksi yang nyata. Mereka masih menunggu upaya penyelesaian persoalan pertanahan yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, para tokohnya juga sedang mengalami masalah internal organisasi yang menjadi andalan perjuangan petani, yakni Gema Trikora. Kedua persoalan tersebut yang menjadi kendala mereka sehingga lebih lambat dalam merespon peluang politik. (Sumber: Hasil wawancara dengan MZ dan PS, 2008).

Derajat responsif petani terhadap perubahan struktur peluang politik dilihat dari fungsinya dalam gerakan juga tidak cukup dengan telah berkembangnya sub kultur oposisi petani. Dalam beberapa kasus, sub kultur oposisi petani dapat mempercepat respon terhadap terbukanya peluang politik. Tetapi pada tataran

praksis dalam diri petani masih melekat perasaan tekanan psikologis akibat pengalaman traumatik (trauma politik) masa lalu. Pandangan petani terhadap para pemegang otoritas masih melekat watak otoritarianisme negara yang pada tataran praksis juga masih sering dialaminya.

Berkembangnya sub kultur oposisi petani didukung dengan terbukanya peluang politik menjadi daya dorong perkembangan kesadaran konflikual petani menjadi kesadaran politik dan proses transformasi kesadaran politik tersebut ke dalam tindakan kolektif petani. Situasinya memungkinkan karena telah terjadi masa transisi di mana sistem otoriter telah kehilangan legitimasinya. Banyak komunitas petani yang tadinya fatalistik, kemudian bersama elemen non petani mereka mulai berani menuntut perubahan dan mengembangkan sensitifitas baru terhadap kemajuan sistem agraria yang adil dan demokratis.

Meskipun demikian, kerja pendampingan dalam pengorganisasian petani basis oleh elemen non petani masih sangat diperlukan. Fungsi lainnya adalah membantu petani dalam merefleksikan kondisi dan pengalaman subyektif, menginterpretasikan peluang-peluang dan merumuskan kepentingan bersama mereka. Kesadaran petani dirubah tidak hanya dalam memahami posisinya yang marginal dalam sistem agraria dominan, tetapi juga ditawarkan tata kehidupan agraria baru sebagai solusi alternatif yang pantas terhadap kedudukan petani dalam sistem agraria. Alienasi, marginalisasi, dan subordinasi petani semakin kental difahami bersama sebagai wujud dari praktik ketidakadilan yang harus dihilangkan karena menyebabkan petani menderita.

Proses-proses pemingkakan isu-isu strategis petani di atas merupakan indikasi bahwa penguatan struktur sumberdaya gerakan dalam perjuangan petani sangat tergantung pada kekuatan elemen pendukung dari luar (non petani) terutama yang berposisi sebagai aktor strategis gerakan. Peluang elemen non petani berperan dalam posisi strategis gerakan mendorong: (a) penguatan sumberdaya non petani terkait dengan respon positifnya terhadap berubahnya struktur peluang politik guna memberi dukungan terhadap gerakan petani; (b) para elit partai politik tertentu mendukung gerakan pro-demokrasi dan bergabung dengan berbagai organisasi masyarakat sipil; dan (c) mengalirnya dukungan berbagai elemen masyarakat sipil dan partai politik tersebut dengan cepat dapat dikonsolidasikan di dalam suatu wadah konsorsium DRL. Ini membuktikan bahwa respon kolektif aktor non petani terhadap peluang politik memposisikan petani

berada lebih dekat sebagai basis akumulasi sumberdaya mobilisasi utama dalam gerakan petani.

### 6.3. Mobilisasi Sumberdaya Dalam Gerakan Petani

Pada dimensi sosio-politik, gerakan petani ini merupakan jawaban atas lemahnya ancaman politik karena negara sedang dihadapkan pada kondisi yang labil atau anomali. Untuk memanfaatkan momentum tersebut maka menciptakan konfigurasi gerakan menjadi penting. Langkah ini menjadi target utama yang perlu segera dilakukan. Tetapi, dilihat dari tahapan perjuangan petani maka sebenarnya gerakan sosio-politik petani merupakan kelanjutan dari perjuangan yang telah dilakukan sebelumnya, yakni pada masa kekuasaan rezim otoritarian.

Potensi sumberdaya mobilisasi petani di tingkat lokal sangat ditentukan oleh derajat kekuatan hubungan antar organisasi basis yang dibentuk. Ini disebut dengan "*block recruitment*" dan memang lebih memudahkan kontrol jaringan (rentang kendali) dalam gerakan terorganisir. Misalnya pada konstruksi gerakan dari bawah disebut "Posko Induk" yang membawahi beberapa organisasi basis (Posko), sedangkan pada konstruksi gerakan dari atas disebut Dewan Pimpinan Petani (DPP) yang membawahi beberapa OTL. Struktur mobilisasi sumberdaya basis tersebut juga sangat ditentukan oleh struktur mobilisasi tingkat wilayah. Solidaritas dan komitmen awal antar organisasi basis menyediakan dasar bagi berlakunya insentif kolektif yang diharapkan bersama. Konsep "*bloc recruitment*" dengan tersedianya solidaritas antar kelompok dalam struktur mobilisasi tingkat basis merupakan cara yang sangat baik dan tipikal dalam gerakan petani.<sup>249</sup>

Sumberdaya potensial sebenarnya sudah tersedia jauh sebelum gerakan petani dibangun. Berkembangnya sub kultur oposisi petani menunjukkan bahwa sumberdaya petani selalu diaktifkan, dan potensi sumberdaya tersebut semakin menguat sejak awal proses rekrutmen. Sejak proses awal mobilisasi sudah terjadi akumulasi sumberdaya dan secara bersamaan telah dilakukan "aktivasi" mobilisasi potensial. Upaya ini disebut dengan "mobilisasi konsensus", yakni upaya sengaja yang dilakukan untuk menciptakan konsensus antara partisipan petani dan non petani untuk siap melakukan gerakan. Proses awal dalam gerakan dimaksudkan untuk memperkuat dukungan ideologis, meningkatkan semangat perjuangan untuk mengejar tujuan praktis dan strategis.

---

<sup>249</sup> Batas wilayah dan jumlah anggota basis dalam *block recruitment* bervariasi, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Seperti di wilayah Register 40 Gedung Wani dibentuk tiga Posko Induk I, II dan III di mana masing-masing membawahi beberapa Posko Basis. Sedangkan di kecamatan Padang Ratu dibuat satu DPP (sama dengan Posko Induk) yang membawahi 11 OTL terdiri dari 11 desa.



Gerakan petani di Lampung yang terdiri dari perpaduan antara sumberdaya petani dan non petani ternyata tidak bisa sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan untung-rugi berbasis asumsi rasionalitas material, meskipun unsur tersebut tidak dapat diabaikan. Pertimbangan untung-rugi dapat mereduksi persoalan gerakan ke dalam motivasi partisipasi untuk memperoleh insentif selektif. Dasar pertimbangan tersebut sulit digunakan untuk menjelaskan motivasi partisipasi para aktor strategis pada masa pra sampai dengan aksi pendudukan lahan (reklaiming). Dasar pertimbangan untung-rugi secara material ternyata relevan untuk menjelaskan dinamika gerakan petani pasca reklaiming. Pada masa ini kepentingan para partisipan dengan jelas muncul ke permukaan, yakni kepentingan sesungguhnya yang menjadi dasar partisipasinya di dalam gerakan. Indikasinya dapat dilihat dari pergeseran dasar orientasi tindakan yang semula terkonsentrasi pada pencapaian kepentingan “substansif” petani menjadi berubah berbasis pada “potensi”, yakni kekuatan sumberdaya petani basis yang dapat dimobilisir untuk mencapai kepentingan praktisnya meskipun menyimpang dari tujuan strategis gerakan.

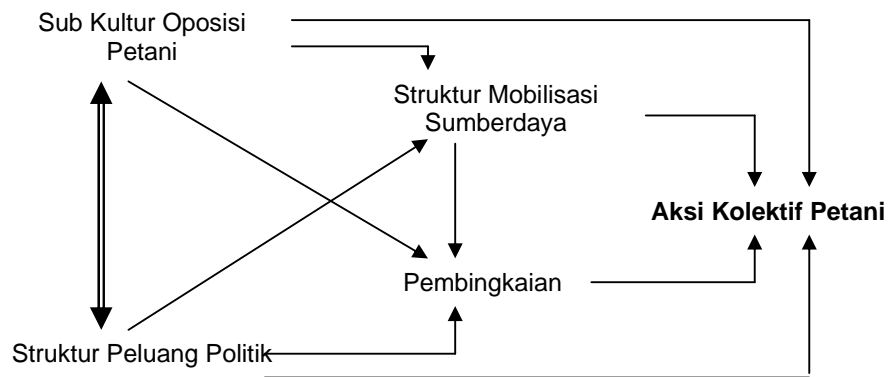
Menyimak fenomena di atas maka tantangan utama gerakan terpusat pada keunggulan insentif moral atau purposif yang dapat ditawarkan dalam gerakan. Dilihat dari keberhasilan pendudukan lahan tampak bahwa ternyata insentif selektif tidak hanya dinikmati oleh para kontributor tetapi juga oleh banyak non-kontributor (*free-riders*). Banyaknya non kontributor ikut memanfaatkan peluang memperoleh keuntungan menjadi tidak terkontrol. Gejala ini menunjukkan bahwa kekuatan jaringan internal (solidaritas sosial dan komitmen moral) gerakan petani mulai memudar. Solidaritas sosial dan insentif purposif adalah berdimensi kolektif karena mengandung peleburan antara kepentingan personal dan kolektifitas aktor gerakan. Ternyata anggapan tersebut menjadi semakin tidak berarti ketika tindakan para aktor strategis gerakan dalam mencapai tujuan praktisnya justru semakin jauh jaraknya dengan tujuan strategis gerakan itu sendiri.

### **6.3.1. Saling Keterkaitan Antar Unsur-Unsur Keberhasilan Aksi-aksi Kolektif Dalam Gerakan Petani**

Dengan terbukanya peluang politik, maka sub kultur oposisi petani menjadi berfungsi baik dalam mendukung akselerasi respon positif dalam memperkuat kesiapan struktur sumberdaya mobilisasi petani. Isu-isu agraria berbasis ideologi egalitarian dengan mudah didesiminasikan karena sesuai dengan kepentingan

dan pengalaman praktis petani. Mengandalkan isu-isu utama yang dikemas dalam paket ideologi gerakan, terbukanya peluang politik dan sub kultur oposisi petani masih belum cukup, masih diperlukan penguatan struktur sumberdaya mobilisasi dalam bentuk organisasi gerakan. Proses penguatan unsur-unsur tersebut berjalan melalui pemingkaihan kolektif untuk segera ditransformasikan dalam aksi-aksi kolektif petani. Oleh sebab itu konfigurasi gerakan sosio-politik petani paling tidak ditentukan oleh empat unsur utama yang saling terkait sebagaimana tampak disajikan pada Gambar 6.

Untuk sampai pada penguatan struktur mobilisasi sumberdaya petani diperlukan proses perubahan kesadaran konfliktual menjadi kesadaran sosio-politik. Ini dilakukan melalui proses pendampingan terhadap komunitas petani di berbagai wilayah konflik pertanahan, terutama dalam mesosialisasikan ideologi gerakan berbasis pada isu-isu yang secara politis sangat strategis. Strategi “sapu lidi” dipilih, yakni target utamanya dikonsentrasikan pada upaya cepat penyadaran terhadap para tokoh petani yang menjadi simpul perjuangan di lingkungan komunitasnya.



Gambar 6 Determinan Aksi Kolektif Dalam Gerakan Petani

Meskipun masih selektif dikonsentrasikan pada para tokoh petani, selain menjadi simpul perjuangan petani, mereka yang banyak memiliki kemampuan lebih sebagai prosesor aktif dan derajat emosi tertentu dalam mengkonstruksi makna-makna sosio-kultural oposisional di dalam sub kultur oposisi petani.<sup>250</sup> Seiring dengan perkembangan struktur peluang politik (reformasi) maka makna-

<sup>250</sup> Dipilihnya para tokoh petani sebagai target utama penyadaran sosio-politik didasarkan pada alasan tertentu. Kesadaran sosio-politik berbasis ideologi egalitarian memang masih belum cukup menggerakkan petani miskin berpartisipasi aktif dalam gerakan petani. Insentif material (tanah) jauh lebih memikat bagi partisipasi petani kebanyakan. Insentif ideologis hanya menarik bagi petani kecukupan (para tokoh/pemimpin) karena mereka memiliki kapabilitas untuk itu. Pada kenyataannya mereka itu sebagai penggerak utama gerakan petani dan lebih mudah menerima ideologi gerakan yang menjanjikan tata kehidupan agraria lebih baik.

makna sosio-kultural oposisional petani paling tidak sudah diorganisasikan melalui bingkai-bingkai interpretatif (pembingkai) kolektif. Mereka memahami apa yang menjadi persoalan bersama, bukan hanya pada tataran lokal tetapi juga pada tataran provinsi bahkan nasional. Oleh karena itu mereka cepat diajak untuk memahami pentingnya membangun kekuatan bersama (solidaritas) dalam gerakan skala supra lokal (provinsi). Kesepakatan aksi dan aksi-aksi kolektif petani yang dipengaruhi oleh sistem sosio-kultural oposisional dapat berkembang dalam kerangka ideologi alternatif yang disosialisasikan oleh para pendamping non petani dan juga dikembangkan melalui diskursus baik sebelum maupun selama berlangsungnya proses aksi-aksi kolektif dalam gerakan petani.

### **6.3.2. Rekrutmen dan Pengorganisasian Petani Basis**

Untuk dapat memanfaatkan momentum reformasi, upaya untuk segera meningkatkan kesadaran politik dan penguatan struktur mobilisasi sumberdaya petani sangat penting. Meskipun sudah berkembang sosio-kultural oposisional di kalangan petani, tetapi mereka masih terbatas pada kesadaran konfliktual belum memiliki kesadaran politik. Kebanyakan petani basis hanya tahu tanahnya telah diambil alih dan akan mengambilnya kembali. Kemudian para pendamping (non petani) terjun di lapangan melakukan mengorganisasian. IJ, seorang mantan pengurus inti DRL dan KMPRL mengatakan:

Rakyat petani kebanyakan di Lampung ini pikirannya masih kosong (*blank*). Mereka hanya menginginkan bagaimana caranya agar tanahnya dapat kembali. Mereka mengklaim tanah yang dikuasai perusahaan adalah milik mereka dengan menyodorkan bukti-bukti agar dapat kembali. Lalu mereka kita organisir, diskusi-diskusi dan muncul beberapa kesimpulan berupa tuntutan-tuntutan.

Rekrutmen partisipan di kalangan petani dapat dibagi dua, yakni individual dan kolektif. Rekrutmen individual terjadi di kalangan para tokoh petani atau para petani aktivis pembangunan. Sedangkan rekrutmen di kalangan komunitas petani basis dilakukan secara kolektif. Secara umum rekrutmen komunitas petani basis memiliki ciri: (1) terkonsentrasi pada komunitas petani korban pembangunan (konflik pertanahan dengan pemerintah dan perusahaan); (2) keanggotaan bersifat kolektif terdiri atas komunitas petani di wilayah tertentu; (3) datang sendiri ke Posko Pengaduan dan didatangi untuk diaktifkan. Pola rekrutmen anggota dan pengorganisasian komunitas petani basis konstruksi dari bawah dapat dilihat dari penjelasan berikut:

Rekrutmen anggota basis, pertama membuka pos pengaduan di sekretariat LSM di Bandar Lampung. Kemudian di ikuti oleh organ-organ mahasiswa aktivis yang juga membuka pos pengaduan di kampus masing-masing. Komunitas petani yang

pertama kali menyampaikan pengaduan dan langsung ditindaklanjuti dengan melakukan unjuk rasa di Kanwil Kehutanan Provinsi Lampung adalah dari wilayah Register 37 dan 40. Cara ini dengan cepat diikuti oleh berbagai komunitas petani lainnya. Sehingga dalam waktu singkat (sekitar satu bulan) sudah ratusan komunitas petani yang dapat direkrut menjadi anggota. Pos pengaduan inilah yang menjadi pintu masuk (*entry point*) dan disepakati bersama untuk memulai melakukan pendampingan sampai dengan terbentuknya organisasi basis untuk siap mobilitasi. Dari sejumlah organisasi basis yang dibentuk kemudian diadakan pertemuan di Way Hurik Bandar Lampung, dan berhasil dibentuk organisasi dengan nama "Posko Reformasi Rakyat dan Mahasiswa Bersatu" (PRRMB). Ini merupakan bentuk awal pengorganisasian tingkat wilayah provinsi terdiri atas para petani dan para aktivis mahasiswa (dan LSM). Organisasi ini merupakan embrio terbentuknya organisasi gerakan dan nantinya dapat ditingkatkan statusnya menjadi organisasi formal (Sumber: Hasil Wawancara dengan IJ, NS, PS, EH dan AR, 2008).

Untuk merekrut komunitas basis menjadi anggota gerakan sedikitnya melalui empat cara, yakni: (a) membuka pos pengaduan; (b) memperkuat jaringan yang sudah ada (sebagai klien dalam advokasi hukum); (c) mengangkat kasus secara langsung di lapangan; (d) memakai instrumen kekuatan keanggotaan Tim 13 (yang dibentuk bersama pemerintah provinsi).<sup>251</sup> Hasil rekrutmen anggota terbentuk organisasi-organisasi gerakan di tingkat basis dan kemudian dapat dikonsolidasikan dalam kesatuan organisasi tani tingkat wilayah kabupaten dan provinsi. Tetapi pada kasus lain proses pengorganisasian petani bersifat top-down, yakni konstruksi gerakan dimulai dari atas.

Selama proses pengorganisasian di tingkat basis dan tingkat wilayah dalam proses aksi reklamasi terdapat beberapa kesepakatan penting, yakni:

1. Pengembangan dan artikulasi sebab perlunya dilakukan aksi-aksi kolektif. Ini menunjuk pada penguatan konstruksi "*injustice frame*" petani. Di dalam sistem hubungan agraria di mana petani selalu berada pada posisi *underdog*, marginal, deskriminatif dan subordinat.
2. Identifikasi dan artikulasi persoalan petani sehingga minimal dapat dihasilkan rencana dan strategi aksi kolektif. Disini ternyata terjadi penguatan dan bahkan perubahan tuntutan dan strategi gerakan yang dianggap paling tepat untuk memperjuangkan tuntutan tersebut.<sup>252</sup>

---

<sup>251</sup> Tim 13 adalah tim mediasi penyelesaian kasus pertanahan di provinsi Lampung yang dibentuk antara pihak aktivis gerakan dan pemerintah provinsi. Tim ini dibentuk pertama kali ketika terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran tanggal 25-26 Agustus 1998. Kemudian pada tahun 2001 Tim 13 tersebut oleh para aktivis gerakan petani dituntut untuk diaktifkan kembali bersamaan dengan dideklarasikan IPL. Ketika keanggotaan masih dikuasai para aktivis gerakan petani, terutama ketika masa IPL, sering dipakai untuk merekrut anggota komunitas petani basis yang baru.

<sup>252</sup> Penguatan tuntutan juga berarti meningkatkan akurasi data kasus dan status penguasaan lahan. Sedangkan perubahan tuntutan petani pada awalnya berupa permintaan ganti rugi yang sesuai, kemudian berubah menguat. Tujuan utama gerakan adalah penguasaan lahan, dan setelah dapat dikuasai kemudian tuntutan berubah menjadi pemilikan (sertifikat). Faktor yang mendasari berubahnya tuntutan tersebut adalah kuatnya posisi tawar petani dan kuatnya definisi "petani" sebagai prinsip gerakan, yakni "mereka yang memiliki lahan dan mengelolanya secara aktif dan produktif untuk kelangsungan hidupnya". Oleh karena itu, dalam gerakan petani tidak ada istilah ganti-rugi, tetapi yang ada adalah lahan pertanian harus dikuasai dan dimiliki petani.

3. Terjadi persamaan pandangan, motivasi, sikap dan persetujuan terhadap prinsip-prinsip gerakan, seperti prinsip komando dan diskusi (musyawarah) tertuang dalam slogan “*Satu Aksi Satu Komando, Komando Hasil Diskusi*”.

Dilihat dari perspektif partisipan hingga pada titik puncak gerakan, sikap partisipatif petani dan non petani merupakan hasil dari motivasi bersama mereka untuk benar-benar mengentaskan nasib petani. Artinya, partisipasi mereka dalam aksi-aksi kolektif merupakan konsekuensi dari motivasinya untuk menyelesaikan persoalan substantif petani daripada menjadi sebab yang mendasari motivasi tersebut.

Mengkonsolidasikan sumberdaya gerakan pada lokus supra desa juga berarti memperluas pemahaman tentang struktur dan kultur gerakan. *Pertama*, skala oposisional petani diperluas dan struktur kognisinya dirubah sampai pada pemahaman tentang persoalan pertanahan dalam skala makro nasional bahkan global. *Kedua*, telah terjadi perkembangan institusionalisasi dan diferensiasi organisasi gerakan dalam ranah sosio-politik. *Ketiga*, posisi dan peran antar aktor strategis dan organisasi gerakan semakin terdiferensiasi, sehingga manajemen gerakan tidak lagi berbasis pada struktur otoritas tradisional, tetapi sudah mengarah pada karakteristik manajemen moderen yang didominasi oleh aktor non petani. *Keempat*, dominasi aktor strategis non petani berkonsekuensi pada gerak organisasi gerakan yang cenderung diarahkan sesuai dengan kepentingan dan kultur mereka daripada kepentingan dan kultur petani.

### **6.3.3. Penguatan Struktur Mobilisasi Sumberdaya Pendukung**

Meskipun secara keseluruhan terjadi percepatan proses rekrutmen partisipan (anggota) dalam gerakan, rekrutmen di kalangan non petani lebih mudah dan lebih cepat dibanding rekrutmen di kalangan petani. Dimungkinkan percepatan akumulasi sumberdaya mobilisasi di kalangan non petani karena keberadaan mereka terkonsentrasi di wilayah perkotaan, lebih mudah diakses, dan di antara mereka sudah terjadi hubungan baik. AR, seorang mantan Sekjen DRL mengatakan:

Banyak organisasi yang kita libatkan, tapi mereka sebenarnya adalah orang kita-kita juga. Sebab waktu itu kita perlu membentuk wadah gerakan yang legal formal dan kuat. Memang waktu itu banyak yang dari partai politik oposisi Orde Baru, karena mereka merupakan basis strategis untuk koalisi dalam proses menghadapi suatu kepentingan politik. Meskipun ada beberapa lembaga lain yang ikut bergabung, tapi sebenarnya mereka ya dari kita-kita juga.

Oleh karena itu, meskipun nampak bahwa gerakan petani itu didukung oleh berbagai elemen masyarakat sipil dan partai politik, tetapi para aktornya tidak banyak yang baru, karena di antara mereka sudah saling kenal dengan baik. Ciri ini juga berlaku dalam rekrutmen individu petani yang mampu berperan penting dalam ikut membidani lahirnya gerakan dan organisasi gerakan petani.<sup>253</sup>

Solidaritas sosial dan komitmen moral untuk mendukung perjuangan petani nampak menonjol dalam tahap awal gerakan sehingga mempermudah proses konsolidasi para partisipan kelompok pendukung. Gerak langkah mereka sangat solid di dalam mengawal aksi-aksi kolektif meskipun belum diikat secara formal dalam suatu wadah organisasi. Pada konstruksi gerakan dari bawah, organisasi konsorsium (DRL) baru dibentuk (12 Agustus 1998) menjelang dilakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di Kantor Gubernur (25-26 Agustus 1998).

Terbentuknya struktur mobilisasi sumberdaya pendukung dalam wadah konsorsium juga memiliki ambivalensi. Kehadirannya selain memiliki kekuatan tersendiri juga mengurangi otonomi organisasi tani. Organisasi konsorsium selain terdiri dari beragam karakteristik anggota juga jelas sarat dengan beragam kepentingan. Eksistensinya tidak bisa menjadi pusat artikulasi kepentingan dan partisipasi petani. Oleh karena itu, ketika organisasi tani masuk menjadi bagian dari jangkauan kontrol DRL, maka secara otomatis dia rentan menjadi ajang perebutan kepentingan dari berbagai kelompok.

Terbentuknya Tim 13 tahap I (26 Agustus 1998) dan tahap II (27 Maret 2001) selain menunjukkan kekuatan organisasi konsorsium dan organisasi tani dalam melakukan tekanan-tekanan politik, pada dasarnya juga merupakan suatu bentuk terjadinya kompromi politik antara organisasi gerakan dengan pemegang otoritas (pemerintah provinsi). Kesepakatan ini pada satu sisi dapat meredam aksi-aksi kolektif petani dalam gerakan, tetapi pada sisi lain menjadi bias kepentingan negara dan pengusaha. Banyak rekomendasi yang berhasil dibuat dan diajukan ke Gubernur tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Dalam perkembangannya mulai tahun 2002 keanggotaan Tim 13 sudah murni bentukan pemerintah dengan persetujuan Menteri dan keanggotaan dari organisasi tani ditiadakan karena dianggap “duri dalam daging”. Dengan demikian, jelas bahwa

---

<sup>253</sup> Termasuk “individu petani aktivis” adalah mereka yang terlibat secara individual karena pengalaman peran mereka yang penting di dalam pemberdayaan masyarakat (petani). Seperti dalam tubuh SPL mereka banyak yang sudah berpengalaman menjadi kader Bina Desa sebagai PO (*Peasant Organizer*) tetapi tidak mewakili komunitas petani di wilayah tertentu atau tidak berposisi sebagai tokoh atau pemimpin komunitas petani di wilayah tertentu.

keberadaan Tim 13 di bawah kontrol pusat (Menteri) semakin menjadi instrumen efektif untuk melemahkan gerakan-gerakan petani di Lampung.

#### **6.3.4. Aksi Kolektif Petani dan Efeknya**

Terdapat dua bentuk aksi kolektif utama dalam gerakan petani, yakni unjuk rasa dan reklamasi. Kasus aksi unjuk rasa yang representatif adalah yang dilakukan pada tanggal 25-26 Agustus 1998 di kantor Gubernur Lampung. Sedangkan aksi pendudukan lahan yang representatif dilakukan di register 40 Gedung Wani pada tanggal 13 – 17 September 1998. Terdapat keterkaitan yang erat antara kedua bentuk aksi kolektif tersebut, karena pada umumnya ketika aksi unjuk rasa tidak ditanggapi maka mereka langsung ke lokasi melakukan pendudukan lahan (reklamasi). Mereka memiliki suatu slogan (menjadi prinsip) gerakan, yakni: "*Satu aksi satu komando, komando hasil diskusi*".

Kedua bentuk aksi kolektif tersebut mereka lakukan merupakan bagian dari upaya meningkatkan posisi tawar petani. Dukungan non petani sudah tergalang kuat (dalam wadah DRL). Untuk menarik perhatian masyarakat yang lebih luas di luar provinsi Lampung mereka juga menyampaikan pengaduan ke DPR, Komnas HAM, departemen atau lembaga non departemen yang menjadi atasan pihak lawan, dan juga menjalin dukungan dengan lembaga-lembaga di provinsi lain dan di tingkat nasional.

##### **6.3.4.1. Unjuk Rasa**

Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk aksi kolektif yang dilakukan di wilayah pusat-pusat kekuasaan untuk melakukan tekanan-tekanan kepada para pemegang otoritas. Kasus unjuk rasa berikut merupakan salah satu bentuk mobilisasi sumberdaya dalam tindakan kolektif. Dalam aksi ini sudah dibangun kerja sama secara sinergis antara dua kelompok utama sebagai elemen inti gerakan, yakni petani dan non petani. Contoh kasus terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran tanggal 25-26 Agustus 1998 di lapangan Gubernur Provinsi Lampung:

Dalam aksi unjuk rasa besar-besaran di lapangan Gubernur tersebut juga secara intensif dilakukan proses negosiasi antara wakil pengunjuk rasa dengan para pejabat pemerintah provinsi. Hasil negosiasi adalah berhasil dibentuk Tim 13, yang keanggotaannya sebanyak 8 (delapan) orang diambil dari DRL. Tugas utama Tim 13 ini adalah melakukan mediasi dalam penyelesaian berbagai kasus konflik pertanahan di Provinsi Lampung.

#### **6.3.4.2. Pendudukan Lahan**

Pada umumnya aksi pendudukan lahan dilakukan karena aksi unjuk rasa tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Seperti kasus aksi pendudukan lahan di Register 40 Gedung Wani pada tanggal 13 – 17 September 1998. karena dipicu oleh beberapa kondisi berikut:

1. Para elit aktor kurang percaya bahwa strategi aksi unjuk rasa akan segera direspon secara positif oleh para pemegang otoritas.
2. Tim 13 masih belum menunjukkan hasil kerjanya.
3. Terdapat pemahaman kolektif (hasil musyawarah) bahwa pendudukan lahan merupakan langkah perjuangan yang paling efektif dan langkah yang paling strategis untuk segera dilakukan agar tidak ketinggalan momentum.

Aksi pendudukan lahan merupakan strategi terakhir dalam gerakan petani dan sedikitnya terdapat tiga ciri utama, yakni:

1. Dilakukan secara massal dengan melibatkan seluruh anggota petani basis. Aksi-aksi pendudukan lahan terorganisir di Lampung dibantu oleh para petani dari beberapa wilayah lain yang datang secara bergantian dan terkoordinir dengan baik.
2. Terbentuk pengendalian terstruktur dari tingkat organisasi basis (posko basis atau OTL) hingga tingkat provinsi.
3. Terdapat pembagian tugas yang jelas, yaitu ke bawah terus melakukan koordinasi di lapangan dan ke atas terus melakukan negosiasi.

#### **6.3.4.3. Efek Gerakan**

##### **a. Perubahan Kebijakan**

Ada dua keberhasilan gerakan petani yang penting dijelaskan, yakni perubahan kebijakan dan luasnya lahan pertanian yang dapat dikuasai oleh petani. Perubahan kebijakan pertanahan terjadi dalam dua kategori, yakni kebijakan tingkat provinsi dan tingkat lokal.

Perubahan kebijakan tingkat provinsi antara lain: (1) Surat Keputusan Gubernur Lampung No:G/302/B.IX/HK/2000 tanggal 23 September 2000 tentang Penunjukan Lokasi Eks. Areal Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) seluas 145.125 hektar, menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang merupakan tanah negara; (2) Surat BPN Provinsi Lampung No: 600-283 Tahun 2001 tanggal 4 April 2001 yang di tujukan kepada Kepala Badan Pertanahan



Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Perwakilan Pertanahan se Propinsi Lampung tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Ajudikasi Swadaya di lokasi eks. Areal Kawasan Hutan di Provinsi Lampung.

Perubahan kebijakan secara khusus dapat diketahui antara lain di wilayah kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan dan di kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah. Di wilayah kecamatan Tanjung Bintang antara lain adalah: (1) secara simbolik diserahkan tanah Register 40 Gedung Wani seluas 1.500 Hektar kepada petani; (2) Surat Keputusan Gubernur Lampung No: 06 Tahun 2000 tanggal 19 Februari tahun 2000 yang menetapkan desa Karang Rejo (eks rekaliaming) sebagai desa persiapan dan tahun 2004 menjadi desa definitif (termasuk beberapa desa lainnya).

Sedangkan perubahan kebijakan di kecamatan Padang Ratu antara lain adalah: (1) Menteri Negara Transmigrasi dan PPH mengeluarkan surat No. 05/MEN/XI/1999, tanggal 10 Nopember 1999 agar membentuk tim terpadu dalam rangka penyelesaian kasus Padang Ratu; (2) tanggal 19 April 2000, Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan mengeluarkan surat No. 805.PA. 01.13.2000 tentang penyelesaian tanah HPL di Padang Ratu; (3) tanggal 3 Agustus 2000, DPRD dan Pemda Lampung Tengah membuat surat pernyataan mengenai penghentian kegiatan di areal oleh PT. TDA; dan (3) tanggal 13 Oktober 2000, Bupati Lampung Tengah memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah untuk mengukur lahan yang dimohon masyarakat 11 Desa di kecamatan Padang Ratu.

Rangkaian perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terhadap persoalan pertanahan di Lampung terkait dengan rangkaian tuntutan petani. Tetapi pada tingkat lokal terdapat keragaman perubahan kebijakan sesuai dengan jenis dan derajat persoalan masing-masing. Contohnya di Rawasagi I dan II, di Halangan Ratu, di Gunung Terang, di wilayah Gunung Betung, di desa Air Panas. Pada sisi lain, banyak hasil rekomendasi penyelesaian konflik pertanahan yang telah dikeluarkan oleh Tim 13 Provinsi Lampung yang terkesan masih di "peti es-kan" oleh pemerintah daerah dan tidak ada tindak lanjutnya atau terkesan sengaja diabaikan. Tindakan menimbulkan kecurigaan dan dugaan negatif di kalangan masyarakat. Tidak adanya tindak-lanjut dari hasil rekomendasi Tim 13, maka kecurigaan itu paling tidak menyangkut lima hal:

1. Konflik pertanahan terutama di wilayah kehutanan menjadi tanggung-jawab pemerintah pusat sehingga prosesnya sangat panjang.

2. Diduga ada konspirasi antara pemerintah daerah dengan para pengusaha yang ijin oprasinya belum selesai.
3. Adanya kepentingan pemerintah terhadap lahan yang telah dikuasai kembali oleh rakyat untuk perusahaan.
4. Adanya kesan keberadaan Tim 13 hanya sebagai peredam konflik pertanahan terhadap rakyat bawah, sehingga hasil rekomendasi itu sengaja diisukan untuk segera diselesaikan, tetapi sebenarnya masuk ke "tong" sampah atau masuk ke "peti es".
5. Adanya upaya untuk mengkondisikan status tanah di wilayah konflik terus diambangkan sehingga pada saatnya nanti akan dapat diambil kembali oleh pemerintah dan atau dapat diberikan kembali kepada perusahaan.

Berdasarkan berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah pada kenyataannya di lapangan (di tingkat lokal) belum sepenuhnya berhasil direalisasikan. Di lapangan masih ada upaya tarik menarik kepentingan antara pemerintah (pusat dan daerah), para pengusaha, dan petani. Kondisi ini di kemudian hari rentan terhadap konflik baik horizontal maupun vertikal.

#### **b. Hasil Pendudukan Lahan dan Persoalan Distribusinya**

Keberhasilan penguasaan tanah secara sistematis oleh petani seluas puluhan ribu hektar (termasuk juga di dalamnya yang gagal bertahan dikuasai kembali oleh petani pasca aksi reklamining). Keberhasilan aksi reklamining tersebut bukan berarti persoalan tanah sudah selesai, tetapi masih rentan terhadap tindakan balik oleh pihak lawan. Ini adalah persoalan klasik, tetapi tindakan balik tersebut mampu melemahkan kekuatan petani, seperti kasus reklamining oleh SPL di Trimodadi, Lampung Utara. Akibatnya, apa yang tadinya sudah disepakati menguntungkan bagi petani kemudian menjadi mentah kembali seperti kasus reklamining di Halangan Ratu, Lampung Selatan. Tindakan balik pihak luar ini merupakan ancaman eksternal yang setiap saat bisa muncul dan menghantui ketenangan petani dalam menguasai lahan pertaniannya.

Kendala internal juga semakin menguat dan mengaburkan tujuan gerakan. Dalam banyak kasus setelah tanah berhasil dikuasai justru terbuka peluang muncul dan berkembangnya berbagai persoalan baru di tingkat komunitas lokal.

1. Terdapat ungkapan: "*Asu gede menang kerahe*" (Anjing besar menang kelahinya). Ketika melakukan aksi semua ikut berjuang sama-sama. Tetapi

setelah lahan dikuasai yang “berkuasa” merasa lebih berjasa dan mendapat bagian paling banyak. Sedangkan yang lemah hanya mendapatkan bagian sisanya, bahkan ada yang tidak mendapatkan bagian.

2. Banyak pihak luar (non petani) yang tidak ikut berjuang tetapi mendapat bagian. Atau beralihnya lahan kepada orang-orang yang tidak ikut berjuang. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang justru menguasai lahan yang luas.
3. Seperti di Desa Karang Rejo (Register 40 Gedung Wani) terjadi kekacauan dalam pembagian lahan, yakni dari ketiga Posko Induk I,II dan III rata-rata terdapat tingkat kekacauan mencapai 70 %.

MZ, seorang pengurus inti IPL merasa sangat prihatin terhadap kondisi tersebut dan mengatakan:

Masa lebih mudah mendapatkan lahan daripada mempertahankannya. Kalau terjadi konflik antar warga, justru merupakan peluang bagus bagi pemerintah sebagai alasan untuk mengambil kembali lahan tersebut. Lama-kelamaan bosan juga pihak Kehutanan untuk selalu mengincarnya jika tidak ada konflik tanah antar warga masyarakat. Tetapi jika terjadi sebaliknya menjadi kesempatan baik bagi pihak Kehutanan. Jika semua warga tetap baik dan kompak, ada payung organisasinya yang kuat, maka tidak mudah digoyahkan oleh pihak lain.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa antar warga terdapat konflik terpendam (*latent*) terutama terkait dengan persoalan pertanahan dan sewaktu-waktu dapat meledak menjadi konflik terbuka. Organisasi gerakan petani yang tadinya diandalkan dapat menyelesaikan persoalan penguasaan tanah justru kondisinya semakin melemah.

#### **6.4. Deformasi Struktur Gerakan Petani**

Dalam perkembangannya, terutama pasca aksi reklamasi, struktur gerakan petani yang tadinya begitu kuat kemudian mengalami deformasi, yakni terjadi perubahan struktur baru yang tidak mengarah pada penguatan formasi gerakan yang ada tetapi justru terjadi konflik internal, antar elemennya struktur terjadi pembelahan dan akhirnya terjadi perpecahan dan bercerai-berainya organisasi basis. Antar kelompok aktor pendukung saling berebut petani basis dan masing-masing ingin menguasai organisasi gerakan petani. Posisi organisasi gerakan petani berada dalam kondisi kritis sebagai ajang pertarungan kepentingan yang mengarah pada terjadinya komodifikasi sumberdaya manusia (*human assets*).

##### **6.4.1. Konflik dan Perpecahan: Kasus Gerakan Konstruksi dari Bawah**

Konflik dan perpecahan dalam organisasi gerakan lebih disebabkan oleh kesalahan konsekuensi tindakan para elit aktor non petani. Seperti konflik di DTL

sebenarnya sudah muncul sebelum dilakukan konggres dan mencuat ke permukaan dalam konggres pada tanggal 14-17 Mei 1999 di dusun Cipadang, desa Way Lima, kecamatan Gedung Tataan, kabupaten Lampung Selatan. Konflik bermula ketika dilakukan pembahasan tentang rancangan AD/ART. Ada dua rancangan AD/ART yang masing-masing dibawa oleh Ketua dan Sekjen. Perbedaan mendasarnya terkakit dengan garis perjuangan. Bermula dari situ kedua kelompok tersebut bersitegang ingin mengegulkan rancangannya masing-masing. Perseteruan ini berkembang hingga pasca konggres, sehingga terjadi perpecahan menjadi dua kubu, yakni kubu Ketua dan Sekjen.

Di belakang Ketua adalah kelompok garis partai, yakni PRD. Tokoh inti PRD juga berada pada posisi inti DRL, sedangkan DTL berada di dalam struktur (menjadi elemen) DRL. Mereka ingin segera menguasai DTL yang memiliki massa petani. Tetapi cara-cara yang dilakukan kurang fleksibel, cenderung memaksakan agar berada dalam barisan PRD menyongsong Pemilu 1999. NS, yang secara *de jure* masih menjabat sebagai pengurus inti DTL mengatakan:

Tujuan Konggres itu tidak lain akan mendongkel saya dalam posisi sebagai Ketua DTL. Karena saya kan keras orangnya dan saya nggak mau ada kepentingan di dalam konggres itu. Jadi mereka berupaya untuk menggantikan posisi saya sebagai Koordinator Presidium. Sebelum Konggres sudah dibuat draf AD/ART oleh Tim DTL yang akan dibahas dalam konggres. Tetapi anehnya kok Sekjen juga punya (membuat) draf sendiri, sehingga masing-masing dibawa. Dia membawa draf AD/ART itu pada saat rapat dengan kapasitas dia sebagai Sekjen.

Sedangkan di belakang Sekjen adalah kelompok LSM yang berada pada garis netral dan independen, tidak berpihak kemana-mana termasuk kepada organisasi politik manapun dan organisasi lain apapun. PS yang sampai saat ini masih menjadi pengurus inti IPL mengatakan:

Cuma ya itu tadi, di konggres itu juga terjadi perpecahan. Terutama dalam pembahasan rancangan AD/ART terjadi perdebatan yang menegangkan. Sedangkan yang ada dibelakang Ketua DTL dari PRD". Akhirnya peserta kongres banyak yang menyetujui rancangan dari Sekjen yang berpandangan netral. Kata Sekjen DTL: " Baiklah kalau mau kerjasama, mau aliansi apa saja silahkan asal tidak mengikat". Bahkan saat itu di luar forum konggres terjadi keributan tapi bukan dari petani. Keributan itu dilakukan oleh pihak lain yang mendukung Ketua dan Sekjen DTL itu.

Dari penjelasan tersebut di atas diketahui bahwa sebenarnya yang bekerja secara aktif dalam mempengaruhi organisasi gerakan petani adalah kelompok aktor non petani. Mereka ada di belakang Ketua dan Sekjen DTL dan masing-masing berhasil mengarahkannya. Ketua DTL sendiri meskipun di belakangnya adalah PRD, tetapi dia tidak sejalan dengan garis perjuangannya. Akhirnya, posisinya menjadi terjepit dijauhi baik oleh kelompok PRD maupun LSM. Ketua DTL mengatakan:

Jadi dalam kongres DTL itu dibelakang Sekjen adalah dari LSM. Ketika itu saya bilang: "Yang di dalam ini hanya dewan tani dan selain dewan tani harus keluar". Karena saya sebagai pimpinan sidang, dan dengan berat hati mereka akhirnya keluar. Mereka kemudian berupaya bagaimana caranya agar saya harus diganti karena dianggap tidak bisa diarahkan, sehingga terjadi cek-cok di luar. Maunya mereka kan aksi-aksi. Kalau menurut saya tidak begitu, karena petani itu tidak bisa dibuat begitu dan pikiranya belum sampai kesana. Mereka belum tahu ideologi itu apa karena kesadaranya baru pada masalah kepentingan ekonomi. Nanti dulu, penuhi dulu kepentingan mereka dan selesaikan dulu masalah mereka, dan kemudian kesadaran mereka kita bangun, itu mau saya. Tetapi mereka tidak mau dengan cara itu, dan beranggapan bahwa tidak akan selesai kalau kita tidak aksi. Akhirnya dari situ hancurlah pergerakan petani di Lampung ini.

Sikap netral ketua DTL dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Edaran DTL tanggal 20 Mei 1999 tentang independensi DTL, sebagai berikut:

#### **Sikap Independensi DTL Setelah Kongres**

Mensikapi perkembangan politik dewasa ini dan posisi anggota adalah petani, maka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Tani Lampung perlu terus menjaga sifatnya yang independen terhadap seluruh organisasi politik yang ada. Untuk itu, Dewan Tani Lampung perlu menegaskan kembali bahwa untuk menjaga independensi organisasi – seluruh pengurus di lingkungan Dewan Tani Lampung tidak diperkenankan merangkap sebagai fungsionaris partai politik apapun. (Sumber: Dokumen DTL, 1999).

Sebenarnya di dalam tubuh PRD juga terjadi perpecahan. Mereka juga berusaha menguasai DRL dan DTL untuk tujuan politik praktis. Mereka adalah kelompok Poros Indonesia atau embrio Partai Nasional Banteng Keadilan (PNBK). Mereka termasuk pemrakarsa dilakukannya Sidang Tinggi DRL dan melikuidasi DTL. Hasilnya DRL dapat dikuasai dan dilakukan restrukturisasi organisasi, serta mengeluarkan DTL dari elemen DRL. Konsekuensinya semua posko basis kembali menjadi di bawah koordinasi DRL. AR, seorang mantan Sekjen DRL mengatakan:

DTL sebenarnya pada bulan Maret 1999 sudah tidak ada, tidak lama berjalan. Salah satu basis DRL adalah para petani yang diwadahi DTL. Dulu kita berupaya untuk kompak agar koalisi dalam tubuh DRL menjadi besar. Banyak organisasi yang mendukung, meskipun kita-kita juga yang ikut membuat. Hanya saja "strategi dan taktiknya" yang tidak bisa ketemu. ada perbedaan prinsip mengenai garis perjuangan. Artinya, kita-kita tidak setuju jika DTL sebagai elemen DRL di PRD-kan. Termasuk harus legal sebelum pemilu 1999, karena pertentangannya cukup kuat waktu itu. Ketua DTL waktu itu ikut aksi bahkan mendeklarasikan PRD menjadi Partai Politik. Semua itu ditariknya sesuai dengan situasi politik nasional juga. Tahun 1999 kita punya posko sebanyak 196 tempat. Makanya Budiman Sujatmiko (Ketua PRD) yang waktu itu berangkat dari Lampung, bukan dari Yogya. Itulah yang kita persoalkan, sebenarnya mereka tetap jalan tapi tidak punya basis massa petani. Mereka tetap pakai DTL, tetapi kita tetap tidak mengakui bahwa mereka bagian dari DRL.

Pasca likuidasi maka DTL menjadi stagnan dan mati suri. Ketuanya diisolir (ditekan) agar tidak dapat leluasa berada di ruang publik. Tekanan dan

penyingkiran tersebut antara lain dia (dan beberapa organisasi tani basis pendukungnya) tidak dilibatkan dalam pertemuan DRL pada tanggal 11 Agustus 1999, sehingga hampir terjadi bentrok fisik antara DRL dan LBH dengan para tokoh petani.

Indikasi penyingkiran tersebut sudah diketahui sebelum dilakukan rapat DRL. Pada tanggal 7 Agustus 1999, ketua DTL mengeluarkan surat tentang Instruksi Rapat Koordinasi DTL (bersifat rahasia dan tidak melibatkan Sekjen DTL) yang ditujukan kepada Koordinator dan Sekretaris Posko yang masih mendukungnya. Rapat dilakukan pada hari Selasa, 10 Agustus 1999 untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dilakukan dalam rapat DRL tersebut.

Sehubungan dengan akan adanya Rapat DRL yang tidak sah, dimana DTL dan seluruh Posko di bawahnya diundang untuk hadir (dengan diskriminasi – ada posko yang tidak diundang) pada hari Rabu-Kamis, tanggal 11-12 Agustus 1999 di LBH Bandar Lampung, maka ketua DTL menginstruksikan seluruh Koordinator dan Sekretaris Posko Induk dan Posko Desa (atau diwakilkan oleh 2 orang dengan membawa mandat posko menghadiri Rapat DRL tanggal 11-12 Agustus 1999, yang ditandatangani dan disahkan oleh Ketua dan Sekretaris Posko) harus hadir pada acara Rapat DTL yang diselenggarakan pada hari Selasa, 10 Agustus 1999.” (Sumber: Dokumen DTL, 1999).

Dalam rapat DTL tersebut para peserta diharapkan membawa stempel posko dan bekal selama tiga hari di Bandar Lampung. Dalam surat instruksi tersebut juga dinyatakan:

Mengingat rapat koordinasi DTL kali ini sangat penting dan tertutup bagi posko yang tidak mengakui kepemimpinan Sekjen DRL lama, maka rapat ini kami nyatakan rahasia dari posko yang pro DRL rekayasa.” (Sumber: Dokumen DTL, 1999).

Pada pihak lain, para pengurus inti DTL berketetapan bahwa DTL masih ada dapat berjalan sendiri meskipun sudah dikeluarkan dari DRL dan tidak berhubungan lagi dengan LBH Bandar Lampung. Lebih lanjut Ketua DTL mengatakan:

DTL itu secara *de facto* memang sudah bubar, tetapi secara *de jure* tidak, dan saya hingga saat ini tetap masih ketuanya. Semua pergerakan di Lampung adalah dari aktivitas kerja Dewan Tani, kecuali yang ada di bawah Serikat Petani Lampung (SPL). Dimana ada pergerakan petani di wilayah lain, maka masyarakat Dwikora ikut aktif mendukungnya baik secara moral maupun secara fisik ikut melakukan aksi di lapangan.

Dalam perkembangannya dalam tubuh DRL terjadi perpecahan dan terjadi perbedaan sikap antara mereka yang pro dan yang kontra dengan kelompok Sekjen DTL. Dengan tidak aktifnya DTL maka perebutan basis petani hanya terjadi antara DRL dan kelompok Sekjen DTL. Kelompok Sekjen DTL termasuk yang menganggap DTL masih tetap ada, meskipun langkahnya juga sudah tidak sejalan dengan Ketua DTL. Ini berkaitan dengan persoalan bagaimana agar DTL

bisa tetap mempertahankan posko-posko basis dan dikemudian hari menjadi aset yang dapat di gunakan untuk mendukung berdirinya organisasi gerakan petani baru. PS sebagai pengurus inti IPL mengatakan:

Kalau setelah terbentuknya IPL, kita ini kan organisasi petani dan masyarakat petani merupakan basis kita. Justru nggak lucu kalau IPL itu tidak mempunyai basis petani. Sedangkan DRL dilihat dari sejarahnya, basisnya adalah berbagai elemen organisasi dan bukan langsung pada petaninya. Misalnya dari buruh bukan masuk ke buruhnya, tapi organisasi buruh itulah yang menjadi anggota DRL. Jadi dalam tataran organisasi DRL itu bukan langsung mengklaim bisa masuk ke basis-basisnya. Sedangkan IPL sampai sekarang tidak berhubungan dengan DRL dan juga belum tahu apa visi dan misinya sehingga perlu masuk menjadi anggota DRL, tapi kayaknya tidak perlu.

Semakin lemahnya DTL pada sisi lain merupakan peluang tersendiri bagi kelompok Sekjen DTL sebagai alasan untuk mendirikan organisasi sendiri. Pada tanggal 2-4 Juli 2001 berhasil diselenggarakan kongres IPL yang lepas dari elemen DRL. Dalam IPL tersebut Sekjen DTL (dibantu LBH Bandar Lampung)<sup>254</sup> berhasil menduduki jabatan sebagai Ketua. Kepentingan politis kelompok Sekjen DTL mendirikan organisasi baru dengan tetap mempertahankan organisasi petani basis yang tadinya menjadi anggota DTL, tersirat dari pernyataan salah seorang pengurus inti IPL. SL, sebagai pengurus inti IPL mengatakan:

Terbentuknya IPL itu bukan merupakan organisasi baru, tetapi tetap DTL yang hanya diubah namanya menjadi Ikatan Petani Lampung.

Belakangan, massa inti basis petani ini menjadi ajang rebutan lebih lanjut antara IPL dengan DRL, serta dengan para aktivis lainnya yang membentuk LSM baru seperti Redec, Ragom dan Pramukti.<sup>255</sup>

#### **6.4.2. Berebut Sumberdaya Mobilisasi**

Pasca aksi-aksi kolektif petani kemudian sepak terjang para aktor non petani menampakkan tujuannya masing-masing, baik dalam tubuh DTL maupun SPL. Tindakan mereka itu berdampak pada berkurangnya pencapaian tujuan

<sup>254</sup> Dalam perjalanannya di tubuh LBH Bandar Lampung sendiri juga terjadi kemelut perebutan posisi kepemimpinan. Meraka ada yang pro IPL, ada yang pro DRL dan ada yang pro Tim 13. Bahkan ada yang keluar dari LBH kemudian mendirikan LSM dan bergabung dengan IPL.

<sup>255</sup> Kekecewaan ketua Pramukti mulai muncul setelah dipecat dari jabatan Koordinator Posko Induk II oleh Sekjen DTL, dan tindakan itu tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam AD/ART. Pada tanggal 9 Oktober 1999, para petani di bawah koordinasi Posko Induk II wilayah Gedung Wani dipimpin koordinatornya hadir di sekretariat DTL untuk menyampaikan perkembangan terakhir perjuangan petani di wilayahnya. Diceritakan bahwa massa petani yang semula menyatu dengan kelompok mereka, sekarang telah terjadi pembelahan yang mengkristal nyaris terjadi konflik horizontal. Pembelahan massa petani ini tidak terlepas atau bermuara dari dua hal. *Pertama*, adanya kudeta internal di tingkat Posko Induk II yang dimotori oleh Sekjen DTL, yakni diberhentikannya Koordinator Posko Induk II tanpa melalui prosedur yang berlaku. Tindakan ini menyimpang dari statuta organisasi, sebab bila mengacu pada AD/ART DTL yang layak melakukan pemecatan adalah melalui rapat atau keputusan presidium DTL. *Kedua*, terjadi tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Sekjen DTL dan kawan-kawan yang ada di lapangan terhadap perlakuan ketidakadilan dan perampasan hak secara sewenang-wenang. Kekecewaan berikutnya adalah ketika pendirian IPL, dia tidak masuk dalam kepengurusan inti. Kemudian tahun 2002 dia dan pendukungnya mendirikan organisasi "Pramukti" (Paguyuban Reformasi Aktif Masyarakat Tani Indonesia) yang mengklaim anggota basisnya sama dengan anggota basis IPL, terutama di wilayah Register 40 Gedung Wani.

substantif petani yang seharusnya diperankan oleh organisasi gerakan petani. Masing-masing kelompok pendukung bersaing membangun jaringan informal untuk memanipulasi hubungan kekuasaan dan afeksi agar dapat mengontrol organisasi gerakan petani dalam mencapai kepentingannya. Pada kondisi ini, tindakan-tindakan mereka menjadi tidak terarah pada berbagai konsekuensi positif, tetapi justru mengarah pada berbagai konsekuensi negatif terhadap struktur inti gerakan petani dan pemberdayaan petani basis. PS, seorang pengurus inti IPL mengatakan:

...tapi nggak tahu kalau di Lampung ini hebatnya itu kalau bisa berantem dengan temannya sendiri. Kita ini sebagai petani tidak pernah ikut campur apa yang terjadi di dalamnya, tahu-tahu diantara mereka sendiri sudah pecah karena rebutan basis. Tahu-tahu katanya mereka sudah pecah, tahu-tahu ada yang nggak boleh masuk kesini karena ini adalah basis mereka, dls. Padahal kita disini tenang-tenang saja. Jadi justru ini bagi petani yang malah bingung dengan ulah mereka yang tidak jelas. Kalau mereka itu komitmen mendampingi petani, saya rasa akan maju petani kita ini. Ini kadang menjadi bahan tertawaan kawan-kawan di luar.

Pada tingkat basis juga tidak ada kontrol organisasi yang jelas dan tegas, sehingga banyak terjadi penyimpangan pembagian tanah yang tidak sesuai dengan tujuan gerakan. Hasil wawancara dengan AR, MZ, SL dan PS dapat di rangkum sebagai berikut:

Ya memang, ketika itu urusan pembagian tanah hasil reklamasi disepakati diserahkan sepenuhnya kepada posko masing-masing, berdasarkan anggapan bahwa masalah tanah itulah yang menjadi kepentingan petani. Kami tidak tahu mengapa akhirnya mereka cekcok sendiri rebutan tanah dan sulit diatur. Saya kira ini semua karena organisasi taninya yang tidak kompak. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing.

Seperti di Karang Rejo ini, terjadinya kekacauan dalam pembagian lahan tersebut sudah cukup mengkhawatirkan karena jika di buat rata-rata dari ketiga Posko Induk tersebut sudah mencapai 70 %. Paling besar terjadi penyimpangan adalah di wilayah Posko Induk II, kemudian di wilayah Posko Induk III dan di wilayah Posko Induk I. Itu belum termasuk yang alih-tanggalkan (dijuang) ke pihak lain yang tidak ikut berjuang. Jika organisasi taninya kuat saya kira masalah ini dapat diatasi dengan baik, tetapi ya bagaimana kalau organisasinya sudah tidak punya gigi."

Daftar anggota basis hingga saat ini masih utuh seperti semula, dan jika anggotanya berganti bisa dicoret diganti anggota yang baru. Kalau organisasi tidak bisa tegas, ya percuma saja daftar anggota itu. Kalau caranya seperti itu maka orang yang lebih berkuasa bisa saja jual lahan sebanyak-banyaknya, karena semuanya bisa gelap mata. Siapa orangnya yang tidak ingin kekayaan ? Tetapi yang menjadi masalah adalah siapa yang akan menertibkan dan bagaimana caranya ? Mengapa banyak orang lain yang mau membeli lahan dan apa alasan para anggota menjual lahannya ? Seharusnya semua itu segera dapat diatasi oleh organisasi. Kalau memang ada anggota yang sudah tidak membutuhkan lahan, maka mereka dapat mengembalikan ke organisasi untuk membesarkan organisasi dalam melanjutkan perjuangannya. Setelah kembali ke organisasi kemudian organisasi yang menentukan lagi siapa yang berhak menerimanya. Kalau umpamanya organisasi ini tutup atau bubar kemudian siapa lagi yang akan memperjuangkan mereka ?



Dalam komitmen awalnya bahwa tujuan dibentuknya organisasi gerakan petani tingkat wilayah provinsi adalah sebagai wadah penguatan sumberdaya mobilisasi dan sebagai katalis gerakan yang menyediakan struktur sumberdaya yang memadai. Manipulasi hubungan kekuasaan dan hubungan afeksi tampak ketika tindakan-tindakan para alit aktor gerakan dengan jelas ditujukan untuk mencapai kepentingan praktis masing-masing. Sasarannya adalah menguasai organisasi gerakan petani yang berarti juga berpeluang untuk memanfaatkan sumberdaya petani basis. Akibatnya, otonomi organisasi gerakan petani menjadi semu, tidak lagi berorientasi populis melainkan bias kepentingan elitis, kurang responsif terhadap kepentingan substantif petani basis, dan rentan terhadap komodifikasi. SP, mantan ketua SPL mengatakan:

Bagi saya apapun bentuk organisasinya sejauh untuk rakyat silahkan. Asal jangan dipolitisir, buat proposal dan sebagainya. Ada banyak, dan saya menjadi korban juga. Tanpa tanda tangan saya juga ada, tapi akhirnya ya sudahlah. Tapi akhirnya nggak nempel, dananya ya hilang juga. Mereka mengatasnamakan anggota kelompok. Memang itu hak mereka, tetapi menurut saya itu tidak sesuai dengan niat baik untuk memperjuangkan petani.

Sementara itu KP, seorang tokoh gerakan petani di desa Sukadamai mengatakan:

Saya tidak tahu mau di bawa kemana organisasi tani ini. Sekarang lebih sering untuk tujuan politik daripada mengurus petani basis. Saya tidak setuju itu, sedangkan kami disini, misalnya, sedang memerlukan pupuk untuk tanaman saja masih susah.

Fenomena tersebut mengarah pada proses pembelahan. Organisasi gerakan petani merupakan kolektivitas sumberdaya yang merefleksikan sistem gerakan yang nampak besar berada dalam skala provinsi, tetapi dalam batas-batas tertentu perkembangannya semakin menjauh dari lingkungan sosio-kultural gerakan yang hidup dan dihidupkan oleh komunitas petani basis. Artinya, ruang gerak organisasi gerakan petani semakin berjarak dengan organisasi basis, dan komunikasi di antara mereka semakin lemah. Misalnya, konflik kepentingan antar kelompok elit aktor pendukung gerakan membuat DTL mati suri, tetapi organisasi petani basis banyak yang tidak tahu sebabnya. Dalam pertemuan antar para tokoh DTL di Cipadang, Way Lima tanggal 11 Agustus 2008 terungkap bahwa banyak organisasi petani basis ikut melemah merasa "*bagaikan anak ayam kehilangan induknya*".

Pada sisi lain, organisasi gerakan petani yang masih tetap eksis bahwa ketika struktur dominasi berada di bawah kendali para elit aktornya, maka ia menjadi rentan terhadap proses komodifikasi. Struktur sumberdaya mobilisasi dapat diarahkan menjadi suatu komoditas yang dapat dijual sejalan dengan

peluang-peluang politik yang muncul di dalam dinamika politik lokal. Organisasi gerakan petani yang posisinya strategis karena memiliki klaim sebagai organisasi massa petani, maka ia dapat diarahkan menjadi komoditas politik praktis. Mereka diarahkan sebagai sumberdaya mobilisasi dalam dinamika politik lokal di daerah Lampung. Seorang petani penduduk desa Sinar Rezeki (yang hadir dalam acara peresmian pesantren milik pengurus inti IPL) menceritakan respon seorang pengurus inti IPL terhadap peluang politik di daerah:

...ya dia dulu menjadi tim sukses Calon Bupati Lampung Selatan dan berhasil. Sekarang kita dikumpulkan disini selain untuk meresmikan pesantren juga untuk mensukseskan salah satu Calon Gubernur Lampung dalam pemilihan pada bulan September (2008) mendatang. Calon itu diusung oleh PKS yang sedang berpidato di panggung itu.

Organisasi gerakan petani yang memiliki basis massa petani memang posisinya strategis sebagai basis mobilisasi politik elektoral dalam dinamika politik di daerah. Tetapi pada sisi lain, justru mengandung makna yang semu. Kehadirannya dapat dimanipulasi oleh para pemimpin dan juga menjadi incaran kelompok pendukung. Dalam pemilu 1999 di mana DTL sudah menjadi ajang perebutan kepentingan, diarahkan menjadi pendukung utama partai politik tertentu, dan dimobilisir untuk mendukung pencalonan anggota legislatif atau DPD (ini juga terjadi dalam tubuh SPL).

Gejala lain bahwa kehadiran organisasi gerakan petani nampak lebih disebabkan adanya momentum. Secara internal tersedia sumberdaya mobilisasi, semangat perjuangan yang membara, dan dekonstruksi struktur politik nasional. Pembentukannya terkesan dipaksakan, kurang perencanaan yang matang, dan ketersediaan sumberdaya non material yang kurang memadai. Oleh sebab itu segera setelah terbentuk organisasi gerakan petani (baik konstruksi gerakan dari bawah maupun dari atas) maka agenda utamanya adalah menjadikan segenap kegiatan untuk mempertahankan hidup (*survival*) organisasi. Seakan-akan survival itu sebagai satu-satunya tujuan yang hendak dicapai.

Sejak awal berdirinya organisasi gerakan petani sudah dihadapkan pada konflik kepentingan dalam kepemimpinan dan perebutan sumberdaya mobilisasi. Seperti SPL sejak awal sudah terjadi aksi "mosi tidak percaya" dan perombakan kepengurusan inti yang dimotori oleh para aktivis non petani. Kemudian dimanfaatkan untuk memobilisasi petani basis dalam pencalonan anggota DPD. Tetapi setelah calonnya tidak jadi mereka kembali pergi meninggalkannya. Bahkan ketika mereka diberi tanggung jawab untuk membangkitkan kembali SPL ketika akan melakukan kongres ke II tanggal 3-5 Nopember 2007 juga tidak

dilaksanakan. SP sebagai ketua SPL sebelum berubah menjadi SPI-Lampung mengatakan:

Sebelum kongres SPL berlangsung jauh-jauh hari (Februari 2007) sudah dibentuk TKPO yang terdiri dari 5. Mereka adalah para aktivis, berpendidikan, sudah berpengalaman dalam membina organisasi, dan keberadaan mereka juga tidak begitu tergantung pada aktivitas pertanian karena bukan murni sebagai petani. Dipilihnya mereka itu dengan harapan dapat melakukan konsolidasi di bawah dan dapat mempersiapkan kongres. Tetapi, nyatanya setelah beberapa bulan berjalan mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik, tidak diketahui dimana keberadaan mereka masing-masing dan tidak ada laporan perkembangan hasil kerjanya. Karena waktunya sudah mendesak, kemudian mereka diganti 5 orang murni dari petani. Ternyata tim yang baru ini dapat melaksanakan tugas dengan baik termasuk dalam mempersiapkan kongres SPL..

#### **6.4.3. Pertarungan Garis Perjuangan Kelompok Pendukung**

Sejak awal kelahirannya baik gerakan konstruksi dari bawah maupun dari atas sudah dihadapkan pada persoalan pemantapan struktur organisasi dan garis ideologi perjuangan. Dalam perkembangan keduanya mengalami masa kritis, karena menjadi ajang tarik menarik di antara kelompok aktor pendukung yang masing-masing memiliki garis ideologi perjuangan yang berbeda secara diametral, yakni partai politik dan LSM. Masing-masing saling menawarkan garis ideologi perjuangannya, sehingga secara substantif mengarah pada dua kemungkinan, yakni persetujuan (*agreement*) atau pertentangan (*confrontation*). Persetujuan dicapai ketika terjadi adopsi aturan-aturan dengan masing-masing pihak saling menyalurkan energi positif terhadap penguatan organisasi petani sebagai organisasi gerakan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, mereka saling bertentangan tidak mencapai persetujuan dan saling menyalurkan sangsi negatif terhadap pihak lain.

Iklim pertentangan tersebut menunjukkan bahwa dalam struktur hubungan terjadi minimalisasi unsur mediasi. Masing-masing pihak saling memaksakan kehendak dan saling menghambat atau bahkan saling meniadakan (negasi) dengan berusaha mengubah struktur dan formasi gerakan yang dapat dikontrolnya. Artinya, masing-masing pihak memiliki prinsip-prinsip garis ideologi yang berbeda yang sama-sama dipaksakan untuk diterapkan sejalan dengan perkembangan organisasi gerakan petani. GP, seorang mantan aktivis gerakan petani di Lampung mengatakan:

Pada waktu itu DTL sudah dilikuidasi oleh kelompok yang kemudian memegang DRL karena dianggap dekat dengan PRD. Tapi sebenarnya kalau bicara masalah politik semua mempunyai kepentingan politik. Pertentangan yang nampak kental waktu itu adalah antara NGO, PRD dan Poros Indonesia (embrio PNBK). Jadi tidak benar kalau salah satu di antara mereka itu benar-benar mau membawa organisasi

tani ke jalan yang benar. Di dalam tubuh LBH sendiri sering terjadi rebutan kepemimpinan.

Dalam tubuh DTL dihadapkan pada dilema hubungan afeksi (kedekatan) dengan kelompok pendukung tertentu yang dapat dimaknai oleh kelompok pesaing dapat berakibat pada manipulasi hubungan kekuasaan atas organisasi gerakan petani. Kelompok PRD dan Serikat Petani Nasional (STN) yang secara nyata lebih aktif mendekatinya. NS sebagai ketua DTL mengatakan:

Kami tidak dapat menolak mereka yang mendekati DTL karena semua sama-sama teman seperjuangan dan ingin terus mendukung perjuangan. Ketika yang dekat adalah dari kawan-kawan PRD yang silahkan kami tidak dapat menolak karena mereka juga berniat mau membangun DTL.

Keragaman garis ideologi dan persaingan yang berkembang menunjukkan adanya keragaman interpretasi. Jika di antara mereka benar-benar berniat untuk memperkuat garis perjuangan organisasi gerakan petani seharusnya mencapai titik temu dan dapat memperhatikan empat hal. *Pertama*, saling mempengaruhi tidak terhindarkan karena adanya usaha untuk melakukan perubahan schemata garis ideologi kelompok lain, tetapi tetap pada koridor tujuan substantif gerakan petani. *Kedua*, kualitas interpretasi kelompok yang satu menunjukkan adanya potensi kritik interpretasi terhadap garis ideologi kelompok lain, tetapi tindakan itu diwujudkan dalam perjuangan untuk membangun organisasi gerakan petani. *Ketiga*, di dalamnya terdapat peluang untuk melakukan refleksi kritis terhadap relasi kekuasaan dalam struktur dominasi, terutama terkait dengan latar belakang dan model perjuangan yang dipertahankan dalam gerakan petani. *Keempat*, kualitas interpretasi garis ideologi inilah yang memungkinkan lahirnya kritik terhadap upaya dominasi kelompok yang satu terhadap kelompok lainnya.

Ketika semua itu tidak mengarah pada titik temu dalam bangunan komitmen, maka yang terjadi adalah kehancuran formasi struktur gerakan petani itu sendiri. Mengedepankan unsur bernegasi berarti mempertajam kontradiksi. Interpretasi ideologi oleh kelompok yang satu dapat mendatangkan reaksi keras dari kelompok lain yang memiliki garis ideologi berbeda. Ini terjadi karena garis ideologi yang ditawarkan oleh masing-masing pihak mampu menyentuh syaraf kekuasaan dalam struktur dan formasi gerakan petani dan menyoroti posisi kelompok lain yang memiliki kepentingan dalam relasi kekuasaan terhadap organisasi tani dan komunitas petani basis.

Tidak semua garis ideologi perjuangan tersebut bersifat positif, progresif dan harus diterima dalam memperkuat formasi dan struktur gerakan petani. Kelompok LSM cenderung berada pada garis ideologi kompromistis, sedangkan

kelompok PRD cenderung berada pada garis “radikal”. Tetapi, pada dasarnya perkembangan kematangan ideologi gerakan petani yang terepresentasikan dalam organisasi gerakan petani membutuhkan unsur mediasi antar ideologi kelompok pendukung. Dia menjadi sebuah organisasi gerakan yang secara organisatoris terpisah dari komunitas petani di tingkat basis tetapi mampu mengartikulasikan kepentingan konstituen.

Lemahnya posisi petani dalam struktur hubungan kekuasaan di dalam gerakan petani juga karena karakter sosio-kulturalnya. Selain kondisi kerja petani yang terbiasa tidak terorganisir juga bangunan hubungan-hubungan produksi pertanian yang membuat kekuatan politik petani cenderung bersifat konservatif. Kondisi ini hanya menyediakan visi bersama antar petani tetapi belum mampu mengorganisasikan kerangka tindakan mereka. Petani lebih mengandalkan semangat untuk berjuang terhadap penguasaan tanah yang diyakini benar, dan karena itu mereka memiliki ketergantungan besar terhadap para pemimpinnya dan dukungan berbagai kelompok non petani.

Bagi para aktor strategis gerakan, tujuan kekuasaan tidak hanya bermakna kontrol terhadap sumberdaya mobilisasi tetapi juga bermakna memperoleh keuntungan terhadap sumberdaya petani basis. Konflik kepentingan terjadi ketika mereka saling berebut untuk memperoleh kedua tujuan kekuasaan (kontrol dan keuntungan) sekaligus. Kelompok Partai Politik berusaha mencapai kepentingan politik untuk dapat masuk ke dalam ruang-ruang politik institusional. Kelompok LSM berusaha mencapai kepentingan berhubungan dengan donor dan juga kepentingan politik praktis. Sedangkan kelompok aktor strategis petani berusaha mencapai kepentingannya sejalan dengan kepentingan (ekonomi dan politik) dengan kelompok mana mereka dapat bekerjasama. Kepentingan yang beragam tersebut cenderung dipertajam sejalan dengan struktur kontrol dan keuntungan yang tidak seimbang. Kondisi ini membuat para petani di tingkat basis merasa terombang-ambing, kembali merasa tidak aman, dan semakin tidak menentu. Dalam pertemuan antar para tokoh petani di Posko Induk DTL Kabupaten Pesawaran tanggal 11 Agustus 2008, bapak PM seorang tokoh petani setempat mengatakan:

Dampaknya jelas sangat besar. Banyak petani di Lampung ini yang sekarang berhenti berjuang karena mereka lemah dan tidak ada kekuatan lagi seperti dulu. Bahkan di dalam terjadi adalah pengambil-alihan lahan oleh pihak lain. Salah satunya lahan hasil aksi pendudukan dulu yang sekarang berubah dikuasai oleh para preman dan mereka yang mempunyai kekuatan sehingga banyak petani yang kemudian hanya sebagai penggarap tetapi tidak dapat menguasainya.

Gerakan petani di Lampung dilihat dari tipe aktor dalam elemen status, orientasi utama, dan capaian langsung bisa dikatakan sama dengan kasus gerakan petani di Kalibakar Malang Selatan di mana orientasi utama aktor idealis adalah penerapan program *landreform by leverage*.<sup>256</sup> Tetapi hasil penelitian di Lampung membuktikan bahwa telah terjadi pergeseran orientasi utama dan capaian langsung yang dikejar oleh para aktor idealis, yakni mereka cenderung menjauh dari tujuan strategis gerakan dan banyak yang berubah menjadi oportunis. Kepentingan substantif petani basis menjadi tergerus oleh kepentingan praktis mereka. Kondisi ini memperkuat keberadaan petani basis pada makna sebagai “komoditas” ekonomi dan politik dalam sirkuit perilaku elitis.

Pertarungan pelembagaan garis ideologi gerakan, konflik internal dan fragmentasi organisasi yang terjadi semuanya bermuara pada sirkuit kepentingan para elit aktor gerakan. Jaringan antar kelompok aktor gerakan menjadi semakin renggang bukan hanya terjadi antar kelompok aktor non petani tetapi juga terjadi antar organisasi gerakan petani hingga antar organisasi petani basis. Fenomena elitis ini merupakan indikasi terjadinya perubahan drastis sikap partisipatif dari motivasi membela kepentingan petani menjadi sebagai pelembagaan yang mendasari motivasi partisipasinya. Sikap partisipasi para elit aktor gerakan bukan sebagai konsekuensi dari motivasi mereka untuk mencapai tujuan strategis, melainkan menjadi sebab yang mendasari motivasinya (ekonomi dan politik) yang sesaat itu. Disinilah letaknya mengapa tujuan strategis gerakan petani menjadi semakin jauh jaraknya dengan tujuan instrumental (praktis). Akar gerakan petani (komunitas petani basis) semakin tercerabut dari batang tubuhnya (organisasi tani). Suatu hal yang logis ketika tujuan instrumental gerakan yang semakin dibuat berjarak dengan tujuan strategisnya akan berdampak pada luruhnya soliditas perjuangan petani.

#### **6.5. Decoupling Antara Persoalan Substantif Petani Dengan Kepentingan Para Elit Aktor Gerakan**

Beberapa studi menggunakan konsep *decoupling* untuk tujuan analisis, yang secara umum menunjuk pada sesuatu yang tadinya sebagai satu kesatuan kemudian terpisah atau terputus dan masing-masing berjalan sendiri-sendiri.

---

<sup>256</sup> Dalam penelitiannya tentang formasi dan struktur gerakan sosial petani di Kalibakar Malang Selatan, Wahyudi menghubungkan antara tipe aktor dan orientasinya. Aktor idealis adalah para pemimpin gerakan petani, LSM, dan mahasiswa aktivis. Orientasi utamanya adalah penerapan program *land reform (norm oriented)* dengan capaian langsungnya adalah tersosialisasikannya ide *land reform* sebagai sesuatu yang bisa dilaksanakan (Uraian lebih rinci lihat Wahyudi. 2005. Op. Cit., hal. 198).

Goodman dan Jinks (2004) sesuai konteks kajiannya mengartikannya sebagai “keterputusan antara tujuan resmi dan struktur formal dengan tuntutan fungsional”.<sup>257</sup> Chen (1995) memaknainya sebagai “keterpisahan fungsi”.<sup>258</sup> Demikian juga Weick (1976) memaknainya sebagai “keterputusan hubungan antara kebijakan dan hasil substantifnya, antara kebijakan dan prakteknya di lapangan”.<sup>259</sup>

Mengacu pada makna substantif di atas, dimaksud dengan “*decoupling*” dalam studi ini adalah terjadi suatu pemisahan antara persoalan substantif petani (material dan postmaterial) dengan kepentingan para elit aktor gerakan petani. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa secara faktual terjadinya gerakan petani pada tataran sosio-politik merupakan hasil kerja bersama antara elemen petani dan non petani. Akumulasi sumberdaya di antara keduanya memang memiliki latar historis yang berbeda. Seperti akumulasi sumberdaya non petani (yang terdiri atas kaum intelektual dan kelas menengah kota) berangkat dari gerakan politik secara umum untuk meruntuhkan kekuatan rezim Orde Baru. Sedangkan akumulasi sumberdaya petani secara khusus berbasis pada intensitas dan akumulasi persoalan pertanahan. Kedua elemen sumberdaya tersebut bersatu membangun kekuatan gerakan dan bersinergi melakukan aksi-aksi kolektif dalam gerakan petani.

Dalam perkembangannya pasca aksi-aksi reklamasi terjadi pemisahan di dalam dan antar kedua elemen tersebut. Masing-masing kelompok aktor gerakan yang tadinya bersinergi secara solid, kemudian bersaing untuk saling mengontrol organisasi gerakan petani, dan akhirnya masing-masing terpisah, saling bergerak menjauh dan bekerja sendiri-sendiri. Kondisi tersebut melemahkan pencapaian tujuan substantif petani sesuai dengan klaim-klaim yang diperjuangkan semula, baik dalam mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. IJ, seorang mantan pengurus inti DRL mengatakan:

Menurut saya, gerakan petani sekarang ini sudah lemah tidak mampu bergerak dan sulit untuk digerakkan lagi sekompak dan sekuat seperti dulu. Selain momentumnya sudah berlalu, kawan-kawan penggerak dulu juga sudah larut dalam kesibukannya sendiri, sedangkan para petani sekarang sudah banyak yang menjadi ‘borjuis kecil’.

---

<sup>257</sup> Ryan Goodman dan Derek Jinks menyatakan bahwa: “...“*decoupling*” (*within states*): *official purposes and formal structure are disconnected from functional demands*”. (Ryan Goodman dan Derek Jinks 2004. *How to Influence States: Socialization and International Human Rights Law*. Duke Law Journal, Vol 54 December 2004 No.3., hal. 649).

<sup>258</sup> Jin Chen. 1995. *Get Green or Get Out: Decoupling Environmental From Economic Objectives in Agricultural Regulation*. The Nasional Agricultural Law Center: University of Arkansas School of Law [NatAgLaw@uark.edu](mailto:NatAgLaw@uark.edu), atau [www.NationalAgLawCenter.org](http://www.NationalAgLawCenter.org), hal. 340.

<sup>259</sup> Karl E. Weick. 1976. “*Educational Organizations as Loosely Coupled Systems*.” *Administrative Science Quarterly*, 21:1-19.

Dalam pertemuan antar para pimpinan petani di Cipadang, Way Lima tanggal 11 Agustus 2008 juga terungkap bahwa telah terjadi transaksi politik antara petani dengan para aktor non petani. Dua pimpinan dari wilayah komunitas petani basis yang berbeda menyatakan bahwa mereka akan dijamin tetap aman lahannya tidak diganggu jika mau mendukung salah satu calon Gubernur dalam pemilihan bulan September 2008.

Kemudian, dilihat dari perkembangan gerak langkah beberapa organisasi gerakan agraria di Lamung pada umumnya dan organisasi gerakan petani pada khususnya, terdapat kesamaan pandangan bahwa strategi aksi langsung (unjuk rasa dan aksi reklamasi) sudah kurang diperhatikan. Meskipun berada pada derajat yang beragam, mereka mulai berupaya untuk merespon perkembangan peluang politik institusional. Upaya ini mereka anggap sebagai strategi baru gerakan agraria, sesuai dengan berkembangnya iklim demokratisasi. *Pertama*, ada yang masih berada pada taraf wacana politik organisasi, meskipun secara individual atau kelompok aktor sudah mulai melakukannya, seperti IPL dan Mirak Nadai. *Kedua*, ada yang sudah menjadi program organisasi dan mekanismenya sudah diatur dalam AD/ART, seperti SPI-Lampung. *Ketiga*, ada yang sudah menjadi program organisasi dan sudah mulai melakukannya, seperti DRL, Walhi dan Kawan Tani Lampung.

Hanya saja, antar kelompok elit aktor gerakan agraria tersebut masih belum mampu membangun satu visi, misi, tujuan dan program bersama (*common platform*). Masing-masing bergerak terpisah dan saling memisahkan diri serta berkuat pada aktivitasnya sendiri. Perbedaan strategi dan orientasi dukungan politik institusional dalam merespon peluang politik lokal tidak berbasis pada komitmen bersama, tetapi lebih pada kepentingan individu dan kelompoknya. Misalnya, kelompok aktor yang satu secara politik mengarahkan dukungannya pada calon tertentu bersaing dengan kelompok aktor lain yang mengarahkan dukungannya pada calon yang berbeda. Persaingan terhadap dukungan politik tersebut berjalan seiring dengan adanya penurunan derajat komunikasi dan rentan mengganggu ikatan solidaritas antar komunitas petani basis yang sudah terbangun kuat sebelumnya. Peluang politik tingkat lokal (desa) juga direspon oleh para elit aktor gerakan. Mereka menampilkan calonnya masing-masing merebut jabatan Kepala Desa. Disatu sisi, cara itu mereka dianggap sebagai strategi gerakan agar dapat mengontrol kebijakan pemerintah desa dalam mendukung tujuan perjuangan. Tetapi, pada sisi lain terjadi perenggangan ikatan



antar komunitas petani basis karena tidak didasari oleh sistem koordinasi yang terpusat pada organisasi gerakan petani.

Strategi dan orientasi politik lokal yang terpisah tersebut menunjukkan bahwa masing-masing masih tersekat “ego organisasi” (termasuk ego ketokohan dan ego kelompok) sehingga di balik itu semua justru kepentingan para elitnya yang nampak lebih menonjol dibanding kepentingan perjuangan nasib petani. Ada kecenderungan bahwa perubahan strategi dan orientasi gerakan yang ingin masuk dalam ruang politik institusional nampaknya lebih didasarkan pada isu potensi sumberdaya mobilisasi daripada didasarkan pada komitmennya untuk mengatasi berbagai persoalan substantif yang dihadapi petani. Bapak SP, seorang tokoh petani yang juga menjadi pengurus inti SPL mengatakan:

Kalau yang ada di daerah Lampung ini antar organisasi tani dari dulu sudah sibuk mengurus kepentingannya masing-masing. Dulu pernah melakukan pertemuan dan waktu itu ada seorang pejabat kabupaten juga. Saya tanya, apa tujuannya. Kalau hanya untuk kepentingan politik saya tidak mau. Akhirnya tidak ketemu dan tidak ada kesepakatan. Jadi, dari dulu memang sudah ada upaya-upaya untuk menggiring ke arah politik. Mereka terjebak pada kepentingan ekonomi-politik. Ini bukan kehendak dari para petaninya tetapi dari para aktivis itu.

Akibatnya tingkat kepercayaan (*trust*) konstituen terhadap keberadaan organisasi tani semakin menurun (derajat legitimasi rendah). Sikap konstituen petani basis terhadap peluang komunikasi dialogis dengan para elit organisasi guna mengembangkan organisasi gerakan menjadi semakin tertutup meskipun tujuannya jelas untuk kemajuan petani. Kondisi tersebut terjadi berdasarkan pengalaman sebelumnya atas berbagai kesalahan konsekuensi yang dilakukan oleh para elit gerakan, terutama akibat pengaruh dari perilaku aktor non petani. Pencapaian makna substantif agraria sesuai dengan kepentingan petani justru semakin dimanipulasi sejalan dengan perkembangan peluang-peluang politik dan ekonomi dalam dinamika politik lokal. Oleh karena itu, seperti yang terjadi dalam tubuh IPL, cacat perilaku elit di dalam perkembangan organisasi tani bukan hanya menurunkan kepercayaan (*trust*) petani basis tetapi juga menjauhkan solidaritas perjuangan di antara mereka dalam kelanjutan gerakan petani. Cacat masing-masing elit aktor bukan menjadi pelajaran tetapi justru dikhawatirkan akan menjadi “kartu kunci” untuk saling menjatuhkan.

## **6.6. Stagnasi Gerakan Petani**

Terjadinya deformasi dan decoupling dalam gerakan petani sebenarnya sudah mengindikasikan bahwa telah terjadi proses pelemahan struktur internal gerakan petani. Dengan hadirnya bukti-bukti lain dengan jelas lebih memperkuat

arah kecenderungan tersebut. Aktivitas organisasi gerakan petani dengan segenap ciri-cirinya berada pada kondisi stagnan. Dilihat secara historis kondisi ini kembali terulang seperti yang terjadi pada perjuangan petani sebelumnya ketika berada pada sistem politik otoritarian.

#### **6.6.1. Pengeroposan Dari Dalam**

Pasca aksi pendudukan lahan istilah “mabuk kemenangan” menjadi akrab di kalangan petani. Fenomena ini justru mengarah pada perilaku dan pengaruh negatif yang berimplikasi pada makna perjuangan yang semakin memudar, “soliditas sosial” semakin melemah, tingkat kepercayaan antar sesama semakin turun, jaringan hubungan antar elemen aktor gerakan semakin mengendur, dan komitmen perjuangan semakin melemah. Singkatnya, modal sosial gerakan petani mengalami peluruhan secara drastis. Meskipun banyak yang mengklaim bahwa gerakan petani di Lampung adalah sukses, tetapi sebenarnya tidak mengubah kondisi kehidupan petani basis secara berarti. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa anggapan seperti itu justru mendorong munculnya tindakan-tindakan yang berindikasi terjadinya pengeroposan dari dalam.

1. Sikap menjadi fungsi kepentingan. Selama aksi-aksi langsung (unjuk rasa dan reklamasi), orientasi tindakan para partisipan terkonsentrasi pada tercapainya tuntutan-tuntutan praktis yang mendukung tujuan strategis gerakan. Pasca reklamasi orientasi tindakan mereka berubah semakin berjarak dengan tujuan strategisnya. Komunitas petani basis diposisikan sebagai sumberdaya mobilisasi potensial dan menjadi ajang perebutan pendukung utama tercapainya kepentingan kelompok-kelompok elit aktor gerakan itu sendiri.
2. Praktik saling menegasikan. Jatuh bangun dalam kepemimpinan SPL, upaya membunuh karakter dalam DTL, menyebar fitnah dan mempersempit gerak pihak lain dalam akses di ruang publik adalah bagian dari indikasi upaya meningkatkan derajat kekuasaan diri dan kelompoknya dengan cara menurunkan atau mengeliminir derajat kekuasaan kelompok lain yang dianggap pesaing atau lawan.
3. Pola kepemimpinan lebih bersifat transaksional daripada transformasional. Upaya untuk menguasai sumberdaya petani, baik melalui kontrol terhadap organisasi gerakan petani maupun secara langsung terhadap organisasi petani basis bukan dalam rangka penyelesaian persoalan substantif petani

tetapi lebih dilihat (dimaknai) memiliki nilai jual yang bisa mendatangkan keuntungan politik dan ekonomi.

Oleh karena itu, gerakan petani dalam perkembangan organisasionalnya lebih bersifat sebagai gerakan praktis daripada gerakan strategis. Kualitas kepemimpinannya semakin nampak keropos, saling mengklaim petani basis sebagai anggotanya, saling menegasikan pihak lain dan perpecahan sebagai jalan keluar dengan membentuk organisasi petani sendiri. Indikasinya adalah: (1) kepemimpinan yang jatuh bangun; (2) tidak ada kaderisasi; (3) tidak mampu tampil sebagai kelompok penekan dengan inovasi isu-isu kritis dan strategis petani secara produktif; (4) kepemimpinan yang tidak demokratis; (5) keanggotaan bersifat kolektif dan berbasis klaim; (6) tidak dapat mengatasi persoalan pembagian lahan hasil pendudukan sesuai dengan tujuan gerakan, yakni mendahulukan yang berhak dan para petani miskin; (7) tidak mandiri dan tidak memiliki garis massa yang jelas; dan (8) organisasi gerakan petani semakin kurang dipercaya sebagai wadah perjuangan petani karena para elit aktor membawanya masuk terlibat proses transaksi (politik dan ekonomi) dalam merespon peluang politik lokal.

4. Kesadaran petani basis dalam mendukung keberlanjutan organisasi tani semakin lemah. Kuat anggapan bahwa perjuangan petani telah selesai ketika mereka sudah mendapatkan tanah pertanian. Tujuan petani adalah spesifik, kongkrit dan material bukan pada tujuan strategis. Realitas ini merupakan kelemahan para elitnya karena tidak mampu mentransformasikan tujuan strategis gerakan dalam struktur schemata petani.
5. Struktur komunikasi secara organisasional semakin kurang efektif karena para elit organisasi kurang pendekatan secara periodik kepada petani basis. Pada tataran perilaku para elit juga sudah cacat di mata petani basis karena berbagai kesalahan konsekuensi dari tindakan yang telah mereka lakukan. Petani basis sering menjadi alat mobilisasi untuk mencapai kepentingan praktisnya, sehingga sangat sulit untuk membangkitkan kembali kepercayaan mereka yang sudah terlanjur luntur. MZ seorang tokoh petani di Register 40 Gedung Wani dan WGM seorang tokoh petani di Pesawaran mengatakan:

Berbagai kasus yang terjadi di mana rakyat petani semakin jelas menjadi obyek kepentingan politik dan ekonomi para pemimpinnya yang berujung mereka sebagai korban. Lama-lama rakyat petani menjadi sadar sebagai obyek mereka dalam dukung-mendukung untuk mencapai kekuasaan sehingga rasa simpati, loyalitas dan kepercayaan petani semakin luntur. Dalam kasus koperasi tani di register 40 dan di pesawaran yang pada awalnya didukung oleh para petani (iuran modal/simpanan wajib), tetapi oleh pengelolanya

diselewengkan dengan tidak ada pertanggung jawaban yang jelas. Koperasi menjadi gulung tikar dan modalnya juga ikut habis tidak diketahui kemana larinya. Kejadian-kejadian tersebut kemudian melunturkan kepercayaan petani dan sikap mereka menjadi pasif dan bahkan cenderung tidak mau tahu terhadap kondisi organisasi yang juga semakin rapuh.

6. Terjadi pembelahan arus sumberdaya gerakan sampai terjadi polarisasi antara yang terkonsentrasi pada organisasi tani dan yang terkonsentrasi pada massa petani basis. Para elit aktor gerakan semakin larut bermain pada ruangannya sendiri berada di dalam organisasi gerakan petani. Mereka sengaja memanfaatkannya untuk dapat bermain pada ruang relasi kekuasaan dalam struktur jaringan eksternal.<sup>260</sup> Kemudian terjadi dua stratifikasi ruang yang terpisah antara kelompok elit organisasi gerakan petani dan komunitas petani basis. Jarak stratifikasi ruang tersebut selain menunjukkan lemahnya soliditas jaringan internal juga menunjukkan bahwa kedua kelompok aktor tersebut berada dalam ruangannya masing-masing, sehingga sama-sama terjebak pada upaya pemuasan kepentingannya sendiri dalam jangka pendek.
7. Rendahnya sumberdaya manusia (*human assets*) dalam kepengurusan organisasi. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan organisasi dan kualitas penyelesaian setiap persoalan substantif petani. Tujuan pragmatis petani memperoleh tanah tidak mampu dikontrol secara baik dan distribusinya diserahkan sepenuhnya kepada organisasi petani tingkat basis (paling tinggi tingkat posko induk). Akibatnya, pembagian tanah hasil reklamasi menjadi kacau dan tidak dapat dibendung (muncul para borjuis kecil, aksi premanisme, maraknya para spekulasi tanah dan para *free-riders* dari berbagai kalangan).<sup>261</sup> Sesuai dengan tujuan gerakan bahwa para partisipan inti dan para petani miskinlah yang seharusnya menjadi sasaran utama mendapatkan lahan. Bapak SP (diperkuat oleh bapak SBT) sebagai tokoh gerakan petani oleh SPL yang juga terlibat dalam aksi-aksi reklamasi dengan nada kecewa mengatakan:

Terdapat ungkapan "*asu gede menang kerahe*" (anjing besar menang berkelahi). Artinya, ketika melakukan aksi unjuk rasa dan reklamasi semua partisipan (dengan beragam latar belakang) bekerjasama bahu membahu. Bahkan banyak petani dari berbagai wilayah juga ikut serta membantu. Tetapi

---

<sup>260</sup> Masing-masing kelompok elit aktor memiliki kapabilitas membangun jaringan kepentingan dengan pihak luar secara politik maupun ekonomi yang berkaitan atau tidak dengan kepentingan substantif petani. Jaringan hubungan tersebut menjadi lintas batas termasuk berhubungan dengan para pemegang otoritas institusional atau dengan pihak lain meskipun harus menjual diri dan menjual massa petani basis anggota organisasi.

<sup>261</sup> Capaian langsung para oportunist bukan hanya untuk mendapat citra sebagai pejuang, sebagai pahlawan petani, serta untuk memperoleh kekuasaan sosial politik sebagaimana yang terjadi pada kasus gerakan petani di Kalibakar Malang Selatan (Wahyudi, 2005. Op.Cit., hal. 198). Lebih dari itu, mereka juga berkeinginan mendapatkan keuntungan materi dan bagian tanah pertanian. Bahkan sebagian besar motivasi aktor strategis (petani dan non petani) pada akhirnya terlihat bahwa partisipasi mereka dalam gerakan hanya sebagai alat untuk mencapai kepentingannya yang bersifat oportunist.

setelah tanah dapat dikuasai, kemudian muncul saling mengaku bahwa dia yang paling berjasa dengan mengedepankan kekuasaan untuk mendapatkan bagian yang paling banyak. Mereka adu kekuatan untuk saling menyingkirkan yang lain, dan yang paling kuat adalah mereka yang mampu memperoleh bagian yang paling banyak sesuai keinginan. Sedangkan mereka yang lemah hanya mendapatkan sisanya, bahkan ada anggota yang tidak mendapatkan bagian atau hanya sebagai penggarap lahan-lahan yang dapat dikuasai oleh pihak-pihak lain disitu.

8. Komunitas petani basis secara terus menerus berpotensi menjadi ajang perebutan pengaruh oleh berbagai kelompok elit aktor yang secara historis pernah berjasa terhadap keberhasilan perjuangan petani di masa lalu. Para elit gerakan (petani dan non petani) semakin sulit untuk bisa bersatu karena kuatnya kepentingan praktis masing-masing. Mereka saling menganggap bahwa komunitas petani basis itu juga menjadi anggota organisasinya. Beberapa contoh kasus adalah: (1) berdirinya Posko (baru) di dalam Posko (lama); (2) munculnya isu akan dilakukan gerakan 40.000 petani dengan mudah dibatalkan secara sepihak oleh kelompok aktor non petani karena mereka sudah berhasil mengurus ijin operasi perusahaan dan mendapatkan sejumlah uang; (4) perebutan pengaruh dalam acara peringatan sewindu pasca reklamasi di kecamatan Jati Agung Lampung Selatan; dan (5) berdirinya LSM dan organisasi petani (baru) yang mengklaim sebagian besar anggotanya adalah juga yang menjadi anggota organisasi tani lain (lama).

Semua itu membawa suatu kondisi bahwa konflik horizontal masih rentan terjadi. Suatu persoalan yang krusial adalah belum adanya tanda-tanda upaya penyatuan kembali gerak langkah perjuangan berbagai organisasi gerakan petani. Lemahnya peran organisasi gerakan petani berdampak pada munculnya persoalan horizontal, semakin menurunnya soliditas perjuangan, komitmen moral dan jaringan (*networks*) di antara para elit aktor petani dan non petani.

#### **6.6.2. Pengeroposan dari Luar**

Kemampuan gerakan petani juga dipengaruhi oleh penyumbatan dari luar, baik langsung maupun tidak langsung. Proses penyumbatan terjadi dalam berbagai cara terkait dengan kondisi spesifik pada masing-masing kasus.

1. Secara umum terkesan adanya upaya pemerintah untuk mengambangkan persoalan pertanahan yang dihadapi petani. Secara politis upaya ini mampu melemahkan semangat perjuangan petani. Soliditas perjuangan kembali seperti semula (sebelum terjadi gerakan sosio-politik petani), menjadi terpecah-pecah dan terpisah-pisah antara satu komunitas dengan komunitas

lainnya. Sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Baru, ketika mereka kembali bergejolak maka akan mudah diredam dan dilokalisir (diblokir) baik dengan cara persuasif maupun represif.

Sebagian besar kasus pertanahan terutama pada komunitas petani anggota organisasi basis hingga saat ini belum terselesaikan. Beberapa contoh kasus sebagai berikut:

- a. Tanah bekas *erfpacht* di desa Gunung Rejo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran yang sudah dikelola oleh masyarakat setempat sejak tahun 1940, hingga saat ini BPN masih belum mau memberikan sertifikat tanah karena masih berurusan dengan pihak TNI. Proyek serifikasi tanah oleh BPN (yang katanya menjadi agenda *aset reform*) masih sebatas pada tanah-tanah yang dikuasai rakyat dan tidak ada konflik di dalamnya.
  - b. Di Register 40 Gedung Wani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan meskipun sudah dibentuk Tim Koordinasi Antar Desa (TKAD) untuk meningkatkan status tanah yang sudah dikuasai petani menjadi bersertifikat, sampai saat ini masih diambangkan;
  - c. Tanah pertanian di desa Air Panas Lampung Selatan yang sudah dikuasai petani sekarang digugat kembali oleh perusahaan yang dulu menguasainya; (4) pembagian tanah obyek transmigrasi di wilayah Rawasragi sampai saat ini juga belum jelas.
2. Melemahnya soliditas perjuangan petani berjalan seiring dengan menguatnya serangan balik dari pihak lawan dan pihak lain yang berkepentingan. Serangan balik antara lain dapat berupa uang, kedudukan, menciptakan isu penaklukan, pengkaburan kebijakan pertanahan, dan mencitrakan kondisi petani yang tidak aman melalui adu domba.
    - a. Uang dan kedudukan lebih bersifat individual diberikan kepada para elit organisasi tani. Dampaknya cukup kuat terhadap lemahnya organisasi tani. Mereka cenderung tidak dapat berbuat apa-apa kecuali berkiblat pada kepentingan pemberi uang dan kedudukan. Ketika terjadi persoalan petani mereka cenderung menghindar dan menyerahkan persoalan kepada pemerintah. Organisasi tani semakin tidak memiliki kekuatan sebagai wadah perjuangan nasib petani.
    - b. Isu penanaman jarak, sertifikasi komunal dan penjualan tanah oleh tokoh petani yang dikembangkan oleh para pemegang otoritas dan perusahaan tertentu yang berujung saling menyalahkan dan membuka kedok organisasi tani yang sudah tidak punya gigi (kekuatan legitimatif) lagi.
    - c. Diterbitkan SK tentang luas wilayah pertanahan lebih dari satu yang masing-masing berbeda ukurannya dan hingga saat ini belum jelas batas-batasnya.
    - d. Diisukan petani yang melakukan reklamasi di wilayah kehutanan sekaligus melakukan *illegal logging*. Dibangun pos-pos penjagaan di wilayah kehutanan dengan menyingkirkan tokoh petani tertentu dan merangkul tokoh petani lain di wilayah yang sama (Sumber: hasil wawancara, 2008).
  3. Terbentuknya Tim 13 memiliki ambivalensi, yakni posisi strategis (gerakan) bagi petani dan posisi taktis (peredaman) bagi penguasa. Posisi strategis karena petani memiliki kekuatan setara, sedangkan posisi taktis karena persoalan petani bisa cairkan, di "wadahi", dilokalisir, ketegangan dapat dikurangi dan reaksi petani dapat disumbat. Proses penyumbatan perjuangan

petani antara lain ketika wakil dari petani di dikeluarkan dari keanggotaan Tim 13 pada tahun 2002. Kedudukan Tim 13 semakin jelas ketika SK Gubernur dikuatkan dengan SK Menteri.

#### **Nasib Petani Dalam Dinamika Peran Tim 13**

Sejak terbentuknya tahun 1998 kerja Tim 13 sudah menghasilkan banyak rekomendasi penyelesaian konflik pertanahan, tetapi tidak banyak yang sampai ditindaklanjuti di lapangan. Ada kesan dibentuknya Tim 13 sebagai upaya untuk menampung persoalan pertanahan berhadapan dengan petani. Rekomendasi yang dihasilkan bukan untuk diselesaikan tetapi sebagai upaya penggembosan amarah petani. Hasil rekomendasi disimpan dimasukkan ke dalam "lemari es", tidak dihilangkan tetapi dibekukan.

Hingga tahun 2001 kinerja Tim 13 mandul dan pada tahun yang sama petani kembali menggugat dan berhasil melakukan perombakan susunan keanggotaan Tim 13. Hasil perubahan hanya berjalan kurang dari satu tahun, anggota wakil dari petani disingkirkan karena dianggap sebagai "duri dalam daging" dan orientasi kerja Tim 13 semakin tidak berpihak pada kepentingan petani. Dengan tidak ada penghalang dari wakil petani maka penyelesaian kasus konflik pertanahan semakin kuat dapat diarahkan sesuai dengan hukum positif. Proses penyelesaian yang demikian syarat dengan kepentingan pihak lawan (penguasa dan pengusaha) dan karena itu penyelesaian secara hukum ditentang oleh para wakil petani (Sumber: Hasil wawancara dengan para aktor inti gerakan petani dan anggota Tim 13 seperti PS, SL, NS, AY dan AR).

#### **6.6.3. Stagnasi Gerakan Petani**

Gerakan petani kembali berada dalam kondisi stagnan, tidak bergerak maju, dan tidak menghasilkan perubahan struktural agraria yang berarti bagi perbaikan nasib petani. Efeknya dalam dimensi gerakan petani adalah telah muncul kembali derajat tekanan-tekanan sosial-psikologis tertentu bagi para elit aktor gerakan, strategi gerakan petani kembali pada pendekatan konsensus, dan organisasi gerakan semakin kehilangan kepercayaan dan legitimasi, baik oleh pemerintah maupun oleh konstituennya.

Para elit gerakan cenderung berpandangan sama bahwa aksi massa petani tidak lagi sebagai strategi gerakan yang efektif. Seperti IPL dan Mirak Nadai bahwa bagi mereka persoalan pertanahan bukan lagi menjadi agenda kerja organisasi gerakan petani tetapi diintegrasikan dalam tata kerja pemerintah desa dan pemerintah daerah. Kondisi ini melemahkan ciri organisasi gerakan ke dalam posisi stagnan, menjadi penunggu dan berharap akan datang kebaik hati para pemegang otoritas. Legitimasi organisasi terkait dengan derajat *trust* konstituen juga semakin melemah, sehingga posisi tawar petani menjadi menurun.

Selama berada pada kondisi seperti itu, maka masih sangat jauh jika kita tetap manaruh harapan kepada organisasi petani sebagai organisasi gerakan

untuk dapat mewujudkan kedaulatan petani dan meningkatkan daya tahan petani baik secara ekonomi, sosial, politik, psikologis maupun kultural. Jika beberapa organisasi gerakan petani dalam kondisinya hingga saat ini dapat dibuat suatu kiasan, maka masing-masing berada dalam kondisi yang relatif sama, yaitu: (a) DTL tidak bertahan lama dan sampai saat ini berada dalam kondisi “mati suri”. Ini terjadi ketika elit aktornya tahun 1999-2000 berhasil ditekan oleh kelompok pesaingnya untuk tidak memiliki akses di ruang publik. Kemudian pada tahun 2001 sebagian anggota basisnya menyatu membentuk IPL; (b) IPL dalam kondisi pasif. Irama gerak IPL ini sebenarnya lebih dekat dengan tujuan praktis petani daripada tujuan strategis gerakan. Kondisinya yang pasif tersebut terjadi sejak dikeluarkan dari keanggotaan Tim 13 tahun 2002, karena di anggap “duri dalam daging”. Pada tahun 2005 upaya penyelesaian status tanah di 6 (enam) desa diserahkan kepada pemerintah desa melalui Tim Koordinasi Antar Desa (TKAD). Jaringan dengan Petani Mandiri masih sebatas komitmen, sedangkan realisasinya belum ada. Gairah untuk bangun bersama Raca Institute hingga saat ini baru sebatas wacana; (c) SPL baru sembuh dari sakit kronis setelah berubah menjadi SPI-Lampung pada awal tahun 2008. Elemen organisasi masih dalam kondisi sakit dan dalam proses pembenahan. Para elitnya masih sering berbenturan terkait dengan pemahaman dan praktik kerja SPI sebagai organisasi petani yang baru dengan beberapa anggota basis yang juga baru; (d) Mirak Nadai (MN) dalam posisi menunggu kebijakan dari pemerintah, terutama dalam menyelesaikan persoalan pertanahan di Padang Ratu. Sama dengan IPL bahwa MN ini lebih dekat dengan tujuan pragmatis petani.

Sejak melemahnya aksi-aksi reklamasi hingga saat ini tidak ada isu-isu kritis gerakan yang diproduksi, tidak adanya kaderisasi, lemahnya konsolidasi antar organisasi dan menguatnya kontrol negara terhadap gejolak petani.

a. Tidak ada kaderisasi sebagai indikasi semakin lemahnya keberlanjutan gerakan petani. Satu-satunya organisasi petani yang sudah melakukan kongres ke II adalah SPL (pada akhir tahun 2007) ketika akan berubah menjadi SPI-Lampung. Kondisinya sama dengan pada awal berdirinya (kongres ke-I) tahun 1998. Mantan para elit aktor SPL yang sudah tidak aktif di dalamnya memaknai berubahnya SPL menjadi SPI-Lampung terkesan ada unsur pengkarbitan kembali seperti dulu dan itu sebagai alat politik dan legitimasi normatif dalam mencapai kepentingan status quo para elit di pusat (FSPI) daripada kepentingan petani dalam SPL. Bapak Mt.R mengatakan:



Banyak kawan-kawan yang menganggap bahwa konggres ke-II SPL kemudian berubah menjadi SPI-Lampung itu bukan karena kemauan anggota SPL atau karena tuntutan internal demi peningkatan kapabilitas organisasi gerakan, tetapi lebih karena kepentingan status quo para pengurus pusat (FSPI). Seperti ketua FSPI sekarang sudah menjabat selama dua periode dan menurut AD/ART tidak dapat dipilih kembali. Dengan berubahnya FSPI (Federatif) menjadi SPI (Unitarian) maka berubah pula AD/ART organisasi dan itu merupakan organisasi baru. Dengan cara ini sangat memungkinkan ketua FSPI dan kawan-kawannya untuk dapat dipilih kembali. Ternyata benar dia terpilih menjadi ketua SPI dan juga kembali menjadi koordinator *La Via Campesina*. Ini bukan kaderisasi atau estafet atau istilah lainya jika ternyata di pusat tetap dipegang oleh mereka sebagai wajah lama yang ingin terus berkuasa.

Pada pihak lain, ada dua arah kecenderungan sifat organisasional antara sistem federatif dan unitarian dalam hubungannya dengan organisasi tingkat nasional. Sistem federatif masih dipegang kuat oleh konstruksi gerakan dari bawah, sedangkan sistem unitarian digunakan oleh konstruksi gerakan dari atas. Dengan mempertahankan sistem federasi membuat organisasi petani tingkat daerah larut dalam kehidupan petani basis dan semakin jauh dari irama kehidupan organisasi tingkat nasional. Sedangkan sistem unitarian membuat organisasi petani di tingkat wilayah semakin tergantung (bahkan terkesan sebagai bempet) dalam irama kehidupan organisasi tingkat pusat.

- b. Kondisi organisasi gerakan petani semakin melemah. DTL masih “mati suri”, sedangkan IPL, SPL dan MN menjadi asosiasi-asosiasi gerakan (*movements association*) atau kelompok swalayan (*self-help groups*). Perhatian tidak lagi tertuju pada produksi isu-isu kritis dan strategis yang menjadi persoalan substantif petani dalam jangka panjang dan umum, tetapi lebih tertuju pada persoalan kejelasan status tanah dan bersifat kasuistik. Karena pendekatan konsensus atau mekanisme institusional yang dipergunakan maka hubungan dengan pemegang otoritas dan perusahaan menjadi tergantung (tidak setara lagi). Dominasi sumberdaya agraria kembali sepenuhnya berada pada para pemegang otoritas dan tetap lebih berpihak kepada pengusaha. Bapak SL mengatakan:

Ketika masih memiliki posisi tawar yang kuat dan berada dalam hubungan kekuasaan setara (1998-2002) para wakil petani sering berdialog dengan para pemerintah daerah dan dengan para pengusaha dalam ikut menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di Lampung. Sekarang posisi tawar petani seperti itu tidak dimiliki lagi dan bahkan beberapa Posko semakin tidak solid dan tidak mampu menghadapi setiap gangguan baik dari dalam apalagi dari luar, terutama dari pemerintah dan perusahaan, meskipun belum sampai pada titik kritis yang mengusik kebutuhan dasar mereka sebagai petani.

- c. Kepentingan ego kelompok atau ego organisasi masih tetap mengemuka berada di atas kepentingan substantif petani. Sebagai aktor gerakan

mestinya semuanya bermuara pada tujuan yang sama, yakni perubahan sistem agraria (transformasi struktural) sebagai basis utama ideologi gerakan. Meskipun secara tekstual tujuan strategisnya sama, tetapi dalam praktik belum adanya konsolidasi dalam menyatukan visi, misi dan gerak langkah perjuangan bersama.

- d. Kesadaran politik petani hanya sampai pada tataran elit dan tidak sampai pada tataran akar rumput (petani basis). Elit petani mampu memobilisir petani basis karena mereka menginginkan tercapainya tuntutan-tuntutan praktis. Ketika tuntutan mereka sudah terpenuhi maka komitmen perjuangan menjadi melemah sejalan dengan semakin melemahnya hubungan struktural perjuangan. Disini peran elit petani menjadi berada di antara dua sisi, yakni berada pada ruang bermain para elit organisasi gerakan atau berada pada ruang para petani basis.
- e. Meskipun peluang politik tetap terbuka bagi gerakan petani, tetapi kontrol negara terhadap perjuangan petani semakin menguat dan berjalan seiring dengan semakin melemahnya organisasi gerakan petani. Gejolak petani di tingkat akar rumput dapat dilokalisir sedemikian rupa sehingga solidaritas di antara mereka semakin sulit ditegakkan kembali. Hingga saat ini persoalan pertanahan masih banyak yang dihadapi petani dan belum tahu kapan dapat terselesaikan.

Secara lebih rinci arah kecenderungan perkembangan organisasi gerakan petani (DTL, IPL, SPL/SPI-Lampung dan MN) di Lampung sebagaimana tampak disajikan dalam Tabel 12.

Tabel 12 Ciri-Ciri Perkembangan Organisasi Gerakan Petani (DTL, IPL, SPL/SPI-Lampung dan MN) di Lampung

No	Aspek	Uraian
1	Isu kritikal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih tetap terkonsentrasi pada persoalan material (pertanahan).</li> <li>• Tanah dikuasai oleh petani penggarap.</li> </ul>
2	Orientasi gerakan	Gerakan petani yang pada awalnya bersifat populis kemudian berubah menjadi bias sebagai gerakan bersifat elitis.
3	Orientasi organisasi gerakan petani	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Orientasi klien (komunitas petani basis): sebagai organisasi sukarela atau yang memperjuangkan kepentingan lokal sendiri melalui jalur pemerintah.</li> <li>b. Orientasi otoritas: kembali berciri sebagai kelompok kepentingan ikut berpartisipasi dalam dinamika politik lokal.</li> </ol>

Lanjutan:

No	Aspek	Uraian
4	Strategi gerakan	Aksi-aksi kolektif tidak dilakukan lagi dan cenderung menggunakan pendekatan konsensus (akomodatif) .
5	Hubungan antar organisasi gerakan petani	Tidak terjadi kesamaan pandangan dan kesatuan gerak-langkah perjuangan ( <i>common platform</i> ).
6	Posisi kelompok aktor pendukung (Non petani)	Lemah, kembali sebagai advokasi hukum, tidak mendukung aktivitas organisasi gerakan petani.
7	Struktur organisasi	Federatif, hanya SPL yang berubah dari federatif menjadi unitaris (SPI-Lampung).
8	Strategi perjuangan	Kembali menggunakan pendekatan institusional
9	Regenerasi/kaderisasi	Minim, tidak ada kaderisasi (kecuali SPL); masih mengandalkan figur ketokohan.
10	Orientasi tindakan elit aktor	Menjadikan organisasi tani dan sumberdaya basis sebagai alat mobilisasi dan komoditas dalam dinamika politik lokal.
11	Hubungan dengan Pemerintah daerah	Semakin berjarak, tidak masuk dalam Tim 13.
12	Dukungan petani basis	Banyak komunitas petani basis yang secara de facto keluar dari keanggotaan dan tidak terurus.
13	Hasil pendudukan lahan	Distribusinya tidak tepat sasaran, banyak <i>free rider</i> , dan belum jelas statusnya.

Sumber: Hasil riset, 2008.

## 6.7. Ikhtisar

Struktur sumberdaya gerakan petani secara umum terdiri atas dua elemen petani dan non petani. Dilihat dari proses konstruksinya, struktur gerakan petani dapat dibagi menjadi dua, yakni konstruksi gerakan dari atas seperti SPL dan dari bawah seperti DTL. Sedangkan dilihat dari anatominya maka gerakan petani memenuhi unsur-unsur sebagai gerakan sosial.

Mobilisasi sumberdaya dalam gerakan petani didorong terjadi dekonstruksi struktur politik nasional. Kondisi ini membuka peluang dilakukan gerakan sosio-politik petani dan dengan cepat direspon oleh petani di berbagai wilayah konflik pertanahan bersama non petani pendukungnya. Rekrutmen elemen non petani dilakukan dengan memperkuat jaringan antar berbagai organisasi sosial-kemasyarakatan. Sedangkan rekrutmen elemen petani melalui pembentukan organisasi basis. Perpaduan antar kedua elemen tersebut kemudian dibentuk struktur gerakan petani tingkat provinsi, hingga berhasil dilakukan aksi-aksi

kolektif. Keberhasilan aksi-aksi kolektif petani ditandai dengan adanya perubahan kebijakan agraria dan tanah pertanian berhasil dikuasai kembali oleh petani.

Keberhasilan aksi-aksi kolektif dalam gerakan petani tersebut ditentukan oleh empat unsur utama, yakni sub kultur oposisi petani yang didalamnya mengandung akumulasi sumberdaya mobilisasi potensial (petani), terbukanya struktur peluang politik, berhasil dibangun struktur mobilisasi sumberdaya tingkat provinsi, dan terjadinya proses pembingkai kolektif yang menghasilkan prinsip-prinsip perjuangan bersama.

Pasca aksi reklamasi terjadi proses penguatan organisasi gerakan petani. Dalam perkembangannya justru terjadi penurunan peran organisasi gerakan petani sebagai organisasi gerakan agraria. Antar kelompok aktor non petani dengan latar ideologi dan garis perjuangan yang berbeda (garis partai politik dan LSM) saling berebut kuasa atas sumberdaya organisasi gerakan petani dan organisasi petani basis. Perebutan kuasa antar kelompok aktor tersebut semakin mempertajam konflik internal dan berakhir dengan fragmentasi organisasi.

Disorientasi tindakan berbagai kelompok aktor (elit petani dan non petani) gerakan petani tersebut sampai pada proses komodifikasi petani basis dalam merespon peluang politik institusional untuk mencapai kepentingan praktisnya. Akibatnya, terjadi *distrust*, delegitimasi dan penurunan kredibilitas organisasi gerakan petani. Elemen organisasi gerakan petani semakin mengerucut terdiri atas unsur petani, gerak langkah elemen aktor non petani semakin terpisah dari organisasi gerakan petani, antar organisasi basis anggota menjadi tercerai-berai tidak mampu dikelola dengan baik, dan kemampuan kontrol organisasi gerakan petani semakin menyempit terkonsentrasi pada lingkungan wilayah di mana pengurus inti berada.

Fenomena elitis gerakan petani skala provinsi tersebut sebagai indikasi terjadinya perubahan drastis sikap partisipatif sebagai hasil dari motivasinya menjadi sebagai pelembagaan yang mendasari motivasi partisipasi mereka. Artinya, sikap partisipasi para elit aktor gerakan bukan sebagai konsekuensi dari motivasi mereka untuk mencapai tujuan strategis gerakan, melainkan menjadi sebab yang mendasari motivasinya (ekonomi dan politik) yang sesaat. Disinilah letaknya mengapa tujuan strategis gerakan petani menjadi semakin jauh jaraknya dengan tujuan instrumental (praktis). Akar gerakan petani (komunitas petani basis) semakin tercerabut dari batang tubuhnya (organisasi tani). Suatu hal yang logis ketika tujuan instrumental gerakan petani yang semakin dibuat

berjarak dengan tujuan strategisnya akan berdampak pada luruhnya soliditas perjuangan petani.

Tabel 13 menunjukkan bahwa hingga masa reklamining para pemimpin organisasi gerakan petani, LSM, dan para mahasiswa aktivis pendukungnya menjadi aktor idealis, berorientasi pada penerapan program *land reform by leverage* dan dapat tersosialisasikannya ide tersebut. Pasca reklamining, banyak dari kelompok aktor gerakan tersebut yang kemudian berubah menjadi oportunistis. Akibat lebih lanjut adalah struktur gerakan petani mengalami deformasi, decoupling dan akhirnya hingga saat ini mengalami stagnasi.

Tabel 13 Tipe Aktor dan Orientasinya

Elemen	Tipe Aktor			
	Masa Reklamining Idealis	Pasca Reklamining Oportunistis	Materialis	Oportunistis
Status	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan organisasi gerakan petani</li> <li>• LSM</li> <li>• Mahasiswa aktivis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan organisasi gerakan petani</li> <li>• LSM</li> <li>• Mahasiswa aktivis</li> </ul>	Petani pengikut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Free riders</li> <li>• Aktivistis partai politik</li> <li>• Penguasa formal</li> </ul>
Orientasi Utama	Penerapan Program <i>land reform (norm oriented)</i>	Kekuasaan sosial-politik dan ekonomi	<i>Land property (resource-oriented)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejabat/Tuan yang baik hati</li> <li>• <i>Social-political power.</i></li> </ul>
Capaian Langsung	Tersosialisasikannya ide <i>land reform</i> sebagai sesuatu yang bisa dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Citra sebagai pejuang dan pahlawan petani.</li> <li>• Kekuasaan sosial-politik dan ekonomi</li> </ul>	Pemilikan aset tanah untuk kepentingan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Citra sebagai pejuang dan pahlawan petani.</li> <li>• Kekuasaan sosial politik</li> </ul>

Sumber: Diadaptasi dari Wahyudi, 2005. Op.Cit., hal. 198.

## BAB VII

### INVOLUSI GERAKAN AGRARIA

#### 7.1. Kearah Konstruksi Teori Involusi Gerakan Agraria

Konsepsi involusi dalam perubahan sosial berada pada dimensi struktural, yakni menunjuk pada suatu kondisi struktur yang stagnan (tetap, tidak berubah), sehingga eksistensi dan perkembangannya tidak mampu memproduksi sistem gerakan sebagai wadah institusional perubahan sosial. Clifford Geertz memakai konsepsi “involusi” sebagai alat analitik terhadap usaha tani sawah di Jawa. Konsepsi tersebut diperoleh dari Alexander Goldenweiser, seorang antropolog Amerika, yang digunakan untuk melukiskan pola kebudayaan yang ketika sudah mencapai bentuk yang pasti kemudian dia tidak berhasil menstabilisasinya atau mengubahnya menjadi suatu pola yang baru, tetapi terus berkembang ke dalam sehingga menjadi semakin rumit, seperti tampak pada seni dekoratif Maori dan dalam Gothik akhir.<sup>262</sup>

Misalnya, seni dekoratif Maori...Tidak dapat dihindari lagi, hasilnya adalah kerumitan yang makin lama makin hebat, keanekaragaman dalam keseragaman, keahlian seni dalam monoton”. Contoh lain, seperti dalam Gothik akhir. Bentuk-bentuk dasar dari kesenian telah mencapai puncaknya, unsur-unsur struktural telah membantu dan tidak mungkin ada variasi-variasi lagi, keaslian yang diciptakan telah tidak ada lagi. Namun perkembangan terus berjalan. Terkepung oleh pola yang telah membantu di segenap penjuru, maka dipergunakanlah fungsi ketelitian pada garis-garis kecil. Daya cipta yang luas telah mengering di sumbernya, dan digantikan oleh sejenis keahlian seni yang khusus, semacam penjelimitan teknis....

Konsepsi “involusi” dari Alexander Goldenweiser yang menjadi alat analisis Clifford Geertz, oleh Sajogyo<sup>263</sup> digambarkan lebih jelas dalam suatu kiasan sebagai berikut:

Kemandegan atau kemacetan pola pertanian yang ditunjukkan oleh tidak adanya kemajuan yang hakiki. Jika pun ada gerak, misalnya orang berjalan, berlari, atau menunjukkan gerakan lain di dalam lingkungan air, tidak ada gerakan yang menghasilkan kemajuan: orang tetap berada di tempat sama, misalnya di perairan, berenang di tempat menjaga diri tidak tenggelam tanpa mencapai tujuan lain.

Pada sisi lain Farhad Nomani and Sohrab Behdad menggunakan konsepsi “involusi struktural” untuk melihat terjadinya erosi serius dalam hubungan

---

<sup>262</sup>Clifford Geertz. 1983. *Involusi Pertanian: Proses perubahan ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara., hal. 85-86i. Dia mendefinisikan konsep “*Involution*” menunjuk pada “*overdriving of an established form in such a way that it becomes rigid through an inward overelaboration of detail*” (Clifford Geertz. 1963. *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, p. 82).

<sup>263</sup>Clifford Geertz. 1983. *Ibid.*, hal. xxiii.

produksi kapitalis di Iran yang berjalan seiring dengan munculnya produksi komoditas kecil (*petty-commodity production*).<sup>264</sup>

Mengacu pada pandangan Alexander Goldenweiser, Clifford Geertz, Sajogyo dan Farhad Nomani and Sohrab Behdad tersebut di atas, maka konsep “involusi gerakan agraria” dalam studi ini dapat dimaknai menunjuk pada suatu kondisi gerakan petani yang stagnan (tetap, tidak berubah) atau lemahnya peran organisasi gerakan petani dalam melakukan perubahan tatanan agraria yang setara dan adil sebagai dasar bagi peningkatan kesejahteraan petani sejalan dengan perkembangan upaya-upaya yang telah dilakukan. Memang selama proses perjuangan petani terjadi inovasi-inovasi strategi dan taktik gerakan, berupaya memperkuat jaringan, tetapi kehadiran dan perannya tetap saja tidak mampu menghasilkan perubahan substantif nasib petani sesuai dengan klaim-klaim yang diperjuangkan.

Konsepsi involusi gerakan agraria juga dapat dilihat dari perkembangan organisasionalnya. Mengacu pandangan Hanspeter Kriesi, organisasi gerakan petani dapat bertahan dalam jalur *radicalization* sebagai organisasi gerakan *countercultural*, juga dapat berubah menjadi organisasi gerakan *subcultural* ketika karakteristik dan aktifitasnya berubah, yakni masuk pada jalur *involusi*, *institusionalisasi* dan *komersialisasi*.<sup>265</sup> Radikalisasi merupakan jalur organisasi gerakan sosial yang memperkuat struktur mobilisasi sumberdaya. *Involusi* menekankan secara eksklusif pada aspek “insentif sosial”. Organisasi gerakan berubah menjadi asosiasi dan aktivitasnya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggotanya. Organisasi gerakan tersebut mendukung mobilisasi konstituen tetapi hanya sebatas melayani kebutuhan mereka atau menggunakan strategi berorientasi klien. *Institusionalisasi* menunjuk pada keseluruhan transformasi yang memungkinkan organisasi gerakan menjadi partai politik atau kelompok kepentingan dan eksistensinya masuk dalam sistem intermediasi kepentingan lembaga yang sudah mapan. Sedangkan *komersialisasi* menunjuk pada proses transformasi yang mengarah pada bentuk organisasi layanan komersial, yakni layanan yang dibayar oleh para anggotanya.

---

<sup>264</sup> Hasil kajian Farhad Nomani and Sohrab Behdad terhadap perkembangan kekuatan produksi di Iran menyimpulkan bahwa telah terjadi erosi serius dalam hubungan produksi kapitalis berjalan seiring dengan munculnya produksi komoditas kecil (*petty-commodity production*). Proses ini disebut degeneratif “involusi struktural”, karena terjadi kekusutan dalam kemunculan struktur ekonomi, terganggunya proses akumulasi, dan terjadi krisis ekonomi yang semakin intensif. *Pertama*, proses “*involusioner*” terjadi ketika jumlah borjuis kecil dan para fungsionaris politik meningkat, sedangkan jumlah kelas pekerja menurun. *Kedua*, proses “*deinvolusioner*” terjadi ketika jumlah borjuis kecil dan fungsionaris politik menurun, sedangkan jumlah kelas pekerja meningkat (Lihat Farhad Nomani and Sohrab Behdad. 2006. *Class and Labor in Iran: Did the Revolution Matter?* Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press).

<sup>265</sup> Doug McAdam, John D. McCarthy, Mayer N.Zald (Editor's). 1996. Op.Cit, hal. 156.

Pada sisi lain, intensitas mobilisasi komitmen menjadi penting karena hal ini dapat menghasilkan berbagai alternatif strukturasi internal dalam menjaga stabilitas organisasi gerakan dalam jangka panjang. Tetapi, sebagai gerakan instrumental maka pelembagaan arus sumberdaya secara khusus menjadi problematik bagi gerakan agraria yang memiliki isu spesifik tinggi dan terfokus pada isu-isu internasional yang siklusnya cukup singkat. Suatu gerakan yang hanya menfokuskan pada isu tunggal maka secara eksternal semakin tergantung pada siklus perhatian terhadap isu tersebut. Gerakan agraria yang tadinya memiliki sifat radikal (*countercultural*) ketika berposisi sebagai gerakan instrumental sangat mungkin terlembagakan menjadi gerakan subkultural dan berpeluang masuk pada jalur involusi dan komersialisasi. Kondisi eksternal (ekonomi, politik dan kultural) juga berpengaruh terhadap perkembangan gerakan agraria. Seperti struktur peluang politik secara umum berpengaruh terhadap perkembangan organisasi gerakan petani dalam melancarkan gerakan-gerakan jangka pendek (sosio-politik), tetapi ketika mengembangkan gerakan sosio-kultural (jangka panjang) maka struktur peluang politik tersebut menjadi kurang berpengaruh. Dengan tidak mengabaikan pengaruh kondisi ekonomi dan kultural, maka involusi gerakan agraria terjadi karena dipengaruhi oleh struktur relasi kekuasaan dalam sistem agraria yang mapan.<sup>266</sup>

Dalam teori konflik klasik bahwa di dalam sistem sosial selalu melekat unsur dominasi dan hegemoni, dan selalu berada dalam arus kepentingan kelompok atas dengan memperkuat unsur kontradiksi dan negasi terhadap kelompok bawah.<sup>267</sup> Secara umum teori konflik mendasarkan pada tiga asumsi utamanya, yakni berkenaan dengan: (1) kepentingan dasar yang selalu harus diperjuangkan untuk dipenuhi, (2) relasi kekuasaan sebagai inti struktur sosial dan ini melahirkan perjuangan untuk mendapatkannya, (3) nilai dan gagasan sebagai senjata konflik.<sup>268</sup> Akan tetapi, gerakan-gerakan sosial kontemporer tidak lagi terkonsentrasi pada orientasi material, tidak terpolarisasi hanya dalam dua kelas, dan karenanya keluar dari determinisme material.

Mengadopsi konsepsi Griffin,<sup>269</sup> proses dialektika materialisme berada pada ranah inter-sektoral (kelas) bukan pada ranah intra-sektoral. Padahal di dalam sektor (kelas) itu sendiri juga terdapat peluang kontradiksi dan bernegasi yang

---

<sup>266</sup> Doug McAdam, John D. McCarthy, Mayer N.Zald (Editor's). 1996. *Ibid.*, hal. 159.

<sup>267</sup> Robert Freedman (Editor). 1961. *Marx On Economics*. New York: A Harcourt, Brace & World, Inc.; Terrell Carver. 1982. *Marx's Social Theory*. Oxford University Press.

<sup>268</sup> Mansour Fakhri. 2004. *Op.Cit.* 43.

<sup>269</sup> Henry Berstein, T.J. Byress, S. Borrás, dan Cristobal Kay, dkk. 2008. *Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.



melekat unsur dominasi dan hegemoni. Negasi struktural intra dan inter-sektoral bukan hanya dapat memperlemah elemen sistem tetapi juga dalam hubungan antar elemen. Hubungan antar elemen sistem bersifat dinamis dan dialektis, dan dialektika negatif terjadi karena mengabaikan kemungkinan dikembangkan unsur bermediasi. Perubahan formal tidak berjalan seiring dengan perubahan substantif, sehingga kelompok bawah meskipun perjuangannya dapat merubah bentuk dan kualitas organisasi sistem sebenarnya lebih merupakan bentuk adaptasi terhadap kepentingan kelompok atas. Involusi gerakan terjadi ketika kelompok bawah tetap berada pada arus kuat kepentingan kelompok atas sedangkan kondisi mereka tetap “menderita”.

Gerakan transformasi sebenarnya mengandung tuntutan mediasi yang harus dipenuhi yang menghasilkan imperatif-imperatif etis. Menurut Giddens, gerakan perubahan realitas tersebut masuk dalam kerangka politik emansipatoris dan politik kehidupan. Namun realisasi tujuan di dalamnya seringkali tergantung kepada intervensi agen-agen yang mendukung strata atas. Dari perspektif realisme utopis gerakan transformasi diakui menjadi basis perubahan menuju realitas yang lebih aman dan manusiawi. Tetapi ketika unsur utopis tampak nyata, para aktor gerakan akan samar melihat kedalaman intervensi pihak lain yang sebenarnya juga ikut ambil bagian dalam menyeret ke arah yang mungkin dapat melemahkan posisi gerakan sosial itu sendiri.<sup>270</sup>

## **7.2. Strukturasi Internal**

Sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa perjuangan petani di Lampung mulai dari era Orde Baru hingga saat ini telah berhasil mengembangkan struktur gerakan yang semakin berkualitas, mulai dari aksi protes, gerakan konsensus, gerakan lokal-tradisional, hingga menjadi gerakan sosio-politik. Perjuangan petani terutama berbasis pada klaim-klaim material (tanah), kemudian dengan hadirnya elemen non petani dalam gerakan sosio-politik maka orientasi gerakan tidak lagi hanya material tetapi juga *postmaterial* (keadilan dan demokrasi agraria). Rendahnya kualitas sumberdaya petani dalam struktur gerakan agraria (sosio-politik) tersebut semakin membuka peluang bagi elemen non petani untuk menduduki posisi strategis dalam struktur gerakan skala wilayah provinsi.

---

<sup>270</sup> Anthony Giddens. 2005. *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana., hal. 216.

Struktur sumberdaya petani dan non petani memiliki posisi yang sama pentingnya dalam dinamika gerakan agraria meskipun keduanya memiliki sifat-sifat struktural yang berbeda. Dilihat dari sudut pandang diferensiasi-integrasi, perbedaan tersebut cenderung mengarah pada pola pembagian tugas masing-masing dalam satu kesatuan irama kerja gerakan sesuai dengan sifat-sifat strukturalnya. Elemen non petani cenderung berperan aktif dalam melakukan tekanan ke atas dan berhubungan dengan struktur otoritas, sedangkan elemen petani cenderung berperan dalam menjaga dan mengembangkan jaringan hubungan ke bawah hingga sampai pada komunitas petani basis. Tidak dapat dihindari bahwa untuk menjaga kekuatan struktur sumberdaya mobilisasi, maka kepemimpinan yang semakin dekat dengan jalur komunitas petani basis selain semakin dikuasai oleh unsur petani juga semakin terikat pada sistem otoritas tradisi setempat. Oleh karena itu, secara umum struktur sumberdaya mobilisasi dalam gerakan agraria terjadi dua kutub pola organisasi dan kepemimpinan moderen (tingkat wilayah provinsi yang diwarnai oleh aktor non petani) dan tradisional (tingkat komunitas petani basis, yang diwarnai oleh aktor petani).

Akan tetapi, temuan pokok di lapangan menunjukkan bahwa isu gerakan agraria masih tetap berkuat pada persoalan klasik (material). Misalnya di wilayah kehutanan, basis isu faktualnya masih tidak beranjak dari persoalan pertarungan kuasa atas tanah pertanian antara komunitas petani melawan dominasi negara yang masih melekat ruh asas *domeinverklaring*. Jika gerakan agraria tersebut dimasukkan sebagai gerakan reforma agraria dari bawah (*agrarian reform by leverage*) maka hingga saat ini masih tidak beranjak dari persoalan *asset reform*, belum sampai pada *access reform*. Keberhasilan pendudukan lahan bisa diklaim sebagai prestasi gerakan. Akan tetapi, prestasi tersebut pada kenyataannya tidak berjalan seiring dengan keberhasilan dalam menjalankan *asset reform* sesuai dengan klaim-klaim yang diperjuangkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani miskin. Padahal peran strategis organisasi gerakan petani bukan hanya sebagai katalis gerakan, tetapi juga sebagai wadah penyelesaian persoalan agraria dan wadah pemberdayaan petani dalam dimensi politik, ekonomi dan kultural. Hingga saat ini masih banyak kasus pertanahan di Lampung yang belum selesai secara tuntas, bahkan berkembang persoalan baru dan rentan terhadap konflik horizontal. Hasil wawancara dengan SL, AG, dan NS dapat disajikan sebagai berikut:

Menurut saya, meskipun perjuangan kita-kita dulu bisa dikatakan berhasil dalam reklamings, tetapi secara umum saya menganggap gagal. Pengurusan lahan

diserahkan sepenuhnya kepada organisasi tani di bawah (Posko Induk dan Posko Basis), malah tidak karuan, ada yang dijual dan dimiliki oleh mereka yang tidak ikut aksi. ...banyak kepentingan yang ikut barmain di dalamnya. Seperti di Gunung Terang (kabupaten Tulang Bawang) itu bagus, hasilnya disisihkan 10 % untuk organisasi dan pembangunan setempat. Tetapi, ya secara umum termasuk gagal juga, mengalami ketidakjelasan seperti itu.

...untuk organisasi tani kemudian dipegang oleh para aktivis, bersama para tokoh petaninya. Kemudian terjadi rebutan kepentingan dan akhirnya “blunder”, terjadi cek-cok dan kental dengan tujuan politik. Karena kepentingannya tidak terpenuhi akhirnya mereka meninggalkannya. Memang masih ada yang mendukung, tetapi kebanyakan secara pribadi. Seperti Mirak nadai itu masih kerjasama dengan KBH tapi hanya sebatas menyelesaikan persoalan pertanahan di Padang Ratu, bukan mengembangkan organisasi tani. Sekarang rata-rata kondisi organisasi tani di lampung sudah lemah, dipegang oleh petani sendiri dan tidak didukung sepenuhnya oleh LSM seperti pada awal-awal gerakan dulu. Namanya petani ya begitu, pendidikannya rendah, tidak memiliki pengalaman berorganisasi, banyak “okol” tapi kurang “akal”, kalau tidak digerakkan ya tidak mau bergerak.

Dalam perkembangannya, kekuatan struktur gerakan semakin melemah. Legitimasi dan kredibilitasnya semakin menurun baik dihadapan konstituen (terutama kelompok pendukung dan komunitas petani basis) maupun dihadapan para pemegang otoritas yang dibuktikan dikeluarkannya dari keanggotaan Tim 13. Isu-isu kritis dan strategis tentang persoalan petani sudah tidak diproduksi lagi, dan bahkan terjadi komodifikasi petani basis. Kondisi ini menambah *distrust* petani terhadap peran organisasi gerakan petani sebagai wadah perjuangan petani. Kekuatan struktur gerakan dianggap tidak mampu lagi mengartikulasikan kepentingan petani dalam berhubungan dengan para pemegang otoritas. Secara obyektif aksi-aksi kolektif terorganisir sudah menurun sangat drastis dan secara subjektif memang sudah tidak lagi menjadi pilihan strategi gerakan yang utama.

Aktivitas gerakan oleh kalangan konstituennya juga dianggap sudah jauh mengalami disorientasi akibat perilaku para elitnya untuk mencapai kepentingan sesaat. Pada sisi lain, pasca formalisasi gerakan petani maka keberadaannya selain semakin mengerucut terdiri dari unsur petani juga semakin tidak didukung sepenuhnya oleh elemen non petani. Kondisi ini semakin memperkuat posisi gerakan secara organisasional semakin lekat dengan irama dan kultur kehidupan komunitas petani basis di pedesaan, semakin kehilangan karakternya sebagai organisasi gerakan, dan keberadaannya semakin menyempit terkonsentrasi di wilayah sekitar tempat tinggal pengurus inti. Misalnya IPL wilayahnya kerjanya menyempit hanya terkonsentrasi di desa Sinar Rejeki dan sekitarnya; Mirak Nadai terkonsentrasi di wilayah Padang Ratu; dan SPL/SPI sebagian besar basisnya sudah lepas dan kemudian mencari anggota baru yang bukan dari komunitas petani basis di wilayah konflik. Bukti ini menunjukkan bahwa struktur

sumberdaya gerakan cenderung kembali terkonsentrasi di wilayah komunitas petani basis yang terikat dengan otoritas tradisi setempat. Posisi basis selain terlepas dari struktur induknya juga dukungan non petani semakin melemah dan menjauh. MWN, seorang ketua organisasi basis dari Padang Cermin yang menguasai tanah hak *erfpacht* mengatakan:

Dulu kami ikut demo besar-besaran di kantor Gubernur sampai menginap disitu. Sekarang kami ditinggalkan begitu saja, tidak didampingi lagi. Sampai sekarang tanah kami masih sering diganggu oleh aparat. Saat ini kami sedang mengusulkan ke BPN provinsi untuk disertifikatkan, tetapi BPN tidak berani karena masih bermasalah dan harus diselesaikan dulu.

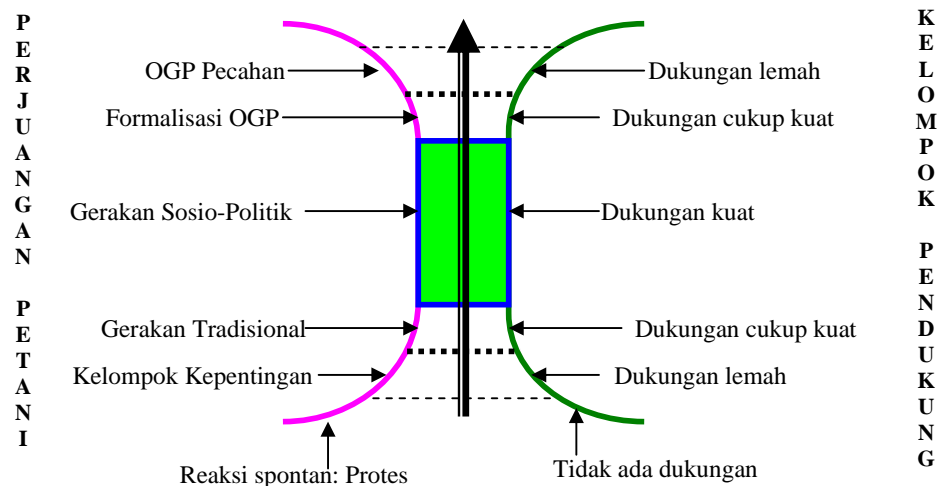
Menurunnya derajat legitimasi dan kredibilitas organisasi gerakan petani juga terjadi dihadapan para pemegang otoritas. Kekuatan posisi tawar dalam struktur hubungan agraria menurun sejalan dengan perubahan momentum peluang politik. Ketika momentumnya mendukung (saat krisis politik pada awal reformasi) maka dukungan para pemegang otoritas terhadap keberadaan organisasi gerakan petani cukup kuat. Tetapi saat ini, para pejabat di daerah yang dulu mendukung sudah berganti, momentumnya sudah terlewati, keanggotaan petani sudah dikeluarkan dari Tim 13, sehingga posisi tawarnya menurun pada posisi terendah. Aktivasnya tidak lagi menunjukkan sebagai organisasi gerakan, tetapi sebagai organisasi tani yang berkarakter konservatif berjalan mengikuti arus sistem agraria yang mapan. Semakin mandulnya peran organisasi gerakan petani skala provinsi, maka kekuatan gerakan dan persoalan petani di Lampung kembali berada pada posisinya semula, yakni menyebar, terlokalisir, dan terkonsentrasi pada lokus wilayah komunitas lokal (petani basis) masing-masing. NS dengan nada tinggi dan kesal mengatakan:

Semua tahu, sebagian besar basis-basis petani yang dulunya menjadi anggota organisasi tani sekarang mereka berjuang sendiri-sendiri. Bahkan persoalan yang muncul di dalam juga dihadapi sendiri, dan banyak yang tidak selesai sampai sekarang kalau kita mau konsisten dengan tujuan semua untuk petani penggarap. Mereka yang sudah dapat tanah asyik dengan urusannya sendiri, terjadi jual beli. Organisasi tani sudah tidak mampu ngurus lagi. Kita tahu apa sih kuatnya kalau hanya berjuang sendiri-sendiri tidak didukung oleh organisasi tani yang kuat? Juga para "petingginya" (elit organisasi tani) semakin asyik dengan usuan politik. Menurut saya, ketika organisasi tani di bawa pada kepentingan ekonomi-politik tinggal tunggu saja kehancurannya, seperti DTL itu.

Penjelasan di atas memperkuat kesimpulan bahwa dilihat dari rentang historis gerak perjuangan petani berangkat dari kesendirian dan saat ini kembali dalam kesendirian. Gambar 7 menunjukkan struktur perjuangan petani mulai masa Orde Baru hingga saat ini. Dilihat dari dejarat integratif antara petani dengan segenap pendukungnya selama perkembangan perjuangan petani telah terjadi tiga tahapan perubahan struktur sumberdaya mobilisasi, yakni: 1) tahapan

pra-struktur (*unintegrated*), 2) tahapan penguatan struktur (*integrated*), dan 3) tahapan disintegrasi (*disintegrated*).

1. Tahap pra-struktur (*unintegrated*). Ini terjadi pada awal gerak perjuangan petani dalam bentuknya yang paling sederhana. Seperti dalam aksi-aksi protes baik langsung berhadapan dengan pihak lawan maupun secara tidak langsung (terselubung atau tersembunyi) semuanya relatif masih murni dilakukan oleh petani korban dan belum mendapat dukungan dari elemen non petani. Perilaku kolektif petani ini masih dalam lingkup lokal-kasuisistik, tidak terorganisir (*amorph*), emosional, sporadis, spontan, dan sebagainya.
2. Tahap penguatan struktur (*integrated*). Awal penguatan struktur mobilisasi sumberdaya dengan dukungan elemen non petani terjadi ketika petani korban secara kolektif mulai berjuang untuk mendapatkan haknya atas tanah melalui jalur institusional (gerakan konsensus). Mereka bekerjasama dengan LSM untuk mendapatkan advokasi hukum. Karena dengan menggunakan strategi ini tidak berhasil maka struktur perjuangan petani semakin diperkuat dengan melibatkan elemen non petani yang lebih banyak (LSM, mahasiswa aktivis, dan elemen masyarakat sipil lainnya) untuk melakukan gerakan lokal-tradisional. Puncak penguatan struktur sumberdaya mobilisasi terjadi dalam gerakan sosio-politik mersepon terbukanya era reformasi. Dalam gerakan ini dukungan elemen non petani sangat kuat terdiri atas berbagai kalangan masyarakat sipil dan partai politik, tingkat lokal dan nasional.



Gambar 7 Strukturasi Internal Gerakan Petani

Sumber: Diolah dari hasil riset 2007-2009.

3. Tahap disintegrasi (*disintegrated*). Ini terjadi pasca aksi-aksi kolektif dan dalam proses penguatan organisasi gerakan petani. Pada masa ini terjadi perebutan kepentingan dan kekuasaan, terjadi konflik antar elemen struktur sumberdaya gerakan yang diikuti dengan fragmentasi organisasi. Akhirnya terjadi deformasi, yakni terjadi perubahan struktur gerakan baru yang tidak mengarah pada penguatan formasi gerakan tetapi justru terjadi konflik internal, pembelahan elemen struktur gerakan dan akhirnya mengarah pada perpecahan organisasi gerakan petani dan bercerai-berainya organisasi petani basis. Selain itu juga terjadi *decoupling*, yakni terjadi suatu pemisahan antara persoalan substantif petani (material dan postmaterial) dengan kepentingan para elit aktor gerakan petani. Antara elemen petani dan non petani terpisah atau tidak menyatu lagi dalam satu kesatuan struktur gerakan. Masing-masing bergerak menurut arahnya sendiri-sendiri sesuai dengan sifat-sifat strukturalnya masing-masing. Elemen petani bergerak mengarah pada sifat-sifat struktural (dalam sosio-kultural) tradisional, sedangkan elemen non petani bergerak mengarah pada sifat-sifat struktural (dalam sosio-kultural) moderen. Fenomena tersebut berpengaruh terhadap keberlanjutan gerakan karena entitas strukturnya menjadi terpecah dan bergerak sendiri-sendiri. Pada kondisi ini orientasi masing-masing elemen aktor semakin tidak dapat disatukan lagi dalam suatu struktur gerakan yang solid dan *integrated* seperti yang terjadi sebelumnya. MZ dengan perasaan kecewa mengatakan:

...Apalagi dengan kawan-kawan aktivis yang memang berangkat dari kepentingan berbeda, dengan sesama pemimpin organisasi tani di sini saja sudah ribut dan sulit disatukan kembali. Sepak terjang dia itu yang sebenarnya tidak bisa menyatu dengan organisasi tani ini. Memang ceritanya panjang. Pada tahun 2003 sudah sering diuyapkan untuk bisa bersatu, tetapi belum berhasil. Pernah dibuatkan panggung pertemuan dan hiburan dengan mengundang para tokoh perjuangan petani dan Bupati Lampung Selatan, dengan harapan agar di antara mereka bersepakat bergandengan tangan dan dapat menyatu kembali. Ternyata setelah selesai dilakukan acara itu mereka bubar lagi dan tetap pada pendirian masing-masing.

Sebab dan konsekuensi terjadinya destrukturisasi internal dapat dijelaskan antara lain dari dua aspek. *Pertama*, tindakan para aktor yang cenderung saling mempertajam kontradiksi dan bernegasi. Kondisi ini jelas berkonsekuensi pada menimalisasi unsur mediasi. *Kedua*, akibatnya adalah terjadi degradasi struktur sumberdaya mobilisasi. Organisasi tani semakin kehilangan karakternya sebagai organisasi gerakan yang *legitimate* dan *credible* dalam mengemban amanah mengentaskan nasib petani miskin.

### 7.3. Pola Hubungan Kekuasaan Dalam Gerakan Agraria

Strukturasi internal gerakan agraria tidak terlepas dari konsistensi perspektif dan keyakinan antar pihak-pihak yang terlibat dalam struktur makna kekuasaan dalam dinamika organisasi gerakan petani. Gangguan struktur gerakan muncul ketika makna kekuasaan tidak lagi berhimpitan dengan makna pembelaan dan pemberdayaan petani. Ini terjadi di dalam kompleksitas hubungan konfliktual antar kelompok aktor, yakni antar petani, antar non petani, dan antara petani dan non petani.<sup>271</sup>

Hasil penelitian ditemukan bahwa praktik hubungan kekuasaan di antara pihak-pihak yang berperan aktif dalam penguatan struktur gerakan yang tadinya mengarah pada pola "*generative power*" kemudian berubah mengarah pada pola "*distributive power*". Perubahan ini menunjukkan bahwa dalam proses penguatan struktur gerakan di mana masing-masing pihak memandang pihak lain sebagai elemen penting dalam suatu bangunan gerakan, kemudian berubah di mana masing-masing menganggap pihak lain sebagai lawan yang dapat menghambat pencapaian kepentingannya, harus ditundukkan atau disingkirkan. Mendominasi struktur gerakan merupakan cara utama agar pihak lain dapat mengikuti atau berjalan sesuai dengan kemauannya.

Kekuasaan dalam struktur hubungan tersebut di atas dimaknai sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendak pada pihak lain. Karena itu makna kekuasaan dalam perkembangan gerakan sejalan dengan konflik kepentingan, saling memaksakan garis perjuangan, dan benturan tujuan yang hendak dicapai. Kepentingan masing-masing pihak dibalut dengan ideologi yang berbeda secara diametral. Misalnya, hubungan antar kelompok LSM dan partai politik keduanya berbeda dalam garis perjuangan. Tetapi, orientasi tindakan keduanya adalah sama, yakni lebih berorientasi karikatif (*developmentalism*) daripada transformatif struktural agraria.

Perbedaan garis perjuangan dalam gerakan agraria yang semakin dipertajam maka semakin menutup ruang untuk bermediasi, yakni mencari titik temu yang memperkuat kembali struktur gerakan yang sudah terbelah. Ini berarti bahwa warna hubungan kekuasaan cenderung bersifat "*zero-sum*" atau saling bernegasi. Artinya, jika kelompok yang satu memiliki atau memperoleh tambahan

---

<sup>271</sup> Contoh masing-masing adalah: 1) dalam kasus hubungan antar kelompok petani, misalnya antara kubu ketua dan kubu sekjen DTL; 2) dalam kasus hubungan antar kelompok non petani, seperti antara kelompok semi-legal dan pra-legal (dalam garis perjuangan LSM) dengan kelompok legal (dalam garis perjuangan partai politik); 3) dalam kasus hubungan antara kelompok petani dan non petani, seperti kasus perombakan kepemimpinan dalam SPL, antara IPL dengan DRL.

kekuasaan (terhadap sumberdaya mobilisasi) berarti kelompok yang lain tidak memiliki atau kehilangan derajat kekuasaannya. Sehingga masing-masing pihak saling mencegah pihak lain dan tindakannya cenderung berjarak dengan upaya bermediasi karena berarti akan mengurangi derajat kekuasaan yang dimiliki. Misalnya, perebutan dominasi dalam struktur kekuasaan antar kelompok aktor pendukungnya menyebabkan DTL menjadi mati suri, kepemimpinan SPL sering jatuh bangun, sering terjadi konflik internal dan berakhir dengan fragmentasi (DTL pecah menjadi IPL dan SPL pecah menjadi Mirak Nadai).

Sifat ambivalensi peran elemen aktor non petani dalam gerakan agraria selain memperkuat juga melemahkannya ketika terjadi disorientasi tindakan. Pengaruh negatifnya adalah: 1) keputusan organisasi gerakan syarat campur tangan pihak lain (tidak independen), 2) organisasi gerakan menjadi tidak bebas mengatur diri sendiri (tidak otonom) dan semakin berjarak dengan basisnya, dan 3) terjadi benturan kepentingan yang mengganggu stabilitas organisasi petani sebagai organisasi gerakan agraria. Kuatnya unsur bernegasi tersebut berakibat antar elemen struktural gerakan (antar petani, antar non petani, dan antara petani dan non petani) menjadi terpisah dan sulit disatukan kembali.

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa beragamnya organisasi gerakan petani yang berkembang di Lampung terutama bukan sebagai akibat dari keterbatasan jangkauan kontrol masing-masing tetapi lebih sebagai produk fragmentasi akibat konflik internal, yang pada tataran wilayah provinsi lebih diwarnai oleh tindakan-tindakan elemen aktor non petani daripada oleh elemen aktor petani sendiri. Oleh karena itu, selain masing-masing organisasi petani mengalami penurunan perannya sebagai organisasi gerakan agraria, interaksi di antara mereka juga tidak didasari oleh *common platform* dalam memperjuangkan kepentingan substantif petani.

#### **7.4. Kuatnya Sistem Agraria Dominan**

Srukturasi eksternal menunjuk pada integrasi gerakan agraria di dalam lingkungan organisasionalnya. Pada tataran meso dapat dilihat hubungannya dengan jaringan pendukung, dengan aliansinya, dan dengan para pemegang otoritas. Temuan pokok penelitian bahwa semakin terkonsentrasinya struktur sumberdaya gerakan pada komunitas petani basis ternyata berjalan seiring dengan semakin renggang hubungannya dengan jaringan pendukung. Realitas



ini difahami berbeda antara sisi petani dan non petani.<sup>272</sup> Perbedaan pandangan tersebut menyebabkan terjadi trauma jejaring antara elemen petani dan non petani. Selain itu, dalam perjalanannya memang pernah terjadi tindakan para elit aktor non petani yang menodai perjuangan petani untuk mencapai kepentingan sesaat mereka, sedangkan kepentingan substantif petani menjadi terabaikan.

Semakin mudarnya jaringan pendukung (networks) sejalan dengan mudarnya hubungan aliansi dengan berbagai pihak, karena aksi-aksi kolektif petani yang non institusional sudah tidak dilakukan lagi. Momentumnya sudah terlewat dan biaya yang harus ditanggung untuk membangun kembali struktur gerakan seperti dulu terlalu besar, terlalu beresiko dan tidak sebanding dengan hasil-hasil yang akan dicapai terutama yang menguntungkan bagi kalangan non petani. Sementara itu menurut kalangan non petani, bahwa para petani sekarang ini sudah menjadi "borjuasi kecil" (sudah mendapatkan tanah yang cukup) sehingga susah untuk diajak berjuang lagi. Ritme kehidupan petani kembali pada karakternya yang mengarah pada pola (pandangan, sikap dan perilaku) yang cenderung konservatif.

Demikian juga hubungan antara organisasi gerakan petani dengan para pemegang otoritas semakin melemah (kehilangan legitimasi dan kredibilitas) dan kembali berada pada posisi subordinat dalam struktur hubungan agraria. Selain terkesan adanya sikap "pembiaran" oleh pemerintah daerah dalam penyelesaian persoalan pertanahan, aspirasi petani secara politik juga semakin tidak mampu lagi terartikulasikan melalui wadah organisasi gerakan petani. Bercerai-berainya elemen struktur gerakan juga berarti bahwa kekuatan perjuangan petani kembali terkonsentrasi pada struktur sumberdaya petani di tingkat basis.

Dilihat dari dimensi makro struktural juga menunjukkan bahwa strukturasi eksternal gerakan agraria berhubungan dengan kekuatan sistem agraria dominan. Ketegangan struktural di Lampung yang berbasis pada akumulasi dan persebaran persoalan pertanahan struktural berakar pada sistem agraria antagonistik, dan kondisi ini sudah berlangsung lama sejak masa kolonial Belanda.<sup>273</sup> Kondisi ini tetap terkonsentrasi pada dimensi politik-ekonomi dan

---

<sup>272</sup> Menurut para tokoh petani mereka tidak mau lagi "diatur-atur" oleh pihak lain seperti yang dialami ketika masih gencar melakukan aksi-aksi kolektif. Sekarang posisi petani adalah sejajar dan sudah waktunya untuk mengatur diri sendiri, tidak tergantung pada siapapun dan dengan organisasi manapun. Sedangkan menurut kalangan non petani bahwa sikap petani seperti itu karena mereka merasa sudah menjadi "borjuis kecil" sehingga sulit disatukan lagi dalam struktur sumberdaya gerakan yang lebih besar.

<sup>273</sup> Sistem agraria "antagonistik" adalah kebalikan dari "simbiosis mutualisme". Dimaksud dengan sistem agraria simbiosis mutualisme menunjuk pada pola hubungan antar elemen sistem (negara, perusahaan, dan masyarakat petani) dengan meminimalisir sifat-sifat struktural kontradiktif dan mengembangkan unsur bermediasi. Sedangkan dimaksud dengan sistem agraria antagonistik menunjuk pada pola hubungan antar

eksistensi dalam setiap episode kekuasaan rezim.<sup>274</sup> Fakta historis membuktikan bahwa selama sistem agraria terkonsentrasi pada dimensi politik-ekonomi dan mengabaikan dimensi sosio-kultural, maka institusi ekonomi moderen (swasta) akan tetap berkolaborasi kuat dengan institusi politik (negara). Realitas ini sekaligus menunjukkan bahwa dimensi sosio-kultural tradisional yang melekat pada masyarakat petani akan terus-menerus terpinggirkan atau terus terperangkap masuk dalam putaran arus utama sistem agraria dominan yang antagonistik terhadap eksistensi masyarakat petani.

Gerakan agraria pada awal reformasi hanya berpengaruh sementara (sesaat) dalam menggoncang sistem agraria dominan. Katakanlah iklim gerakan tersebut bersifat momental terjadi pada lima tahun pertama era reformasi. Gerakan agraria pada masa ini mampu mempengaruhi para pemegang otoritas untuk memenuhi sebagian klaim-klaim yang diperjuangkan. Lima tahun kemudian, hingga saat ini, di mana struktur politik negara semakin stabil, ternyata peluang politik terasa semakin tertutup sejalan dengan semakin melemahnya kekuatan organisasi gerakan petani.

Peluang politik di era reformasi (demokratisasi) saat ini cenderung dimaknai sebagai suatu ruang yang secara struktural menjanjikan penyelesaian persoalan petani secara adil dan demokratis, tanpa harus diikuti dengan aksi-aksi kolektif. Ini merupakan kesadaran palsu yang tertanam di dalam schemata para aktor gerakan. Pada kenyataannya sistem agraria dominan kembali pada jalannya sendiri dan tetap tidak responsif terhadap kepentingan petani. Melemahnya aksi-aksi kolektif dalam gerakan agraria di Lampung selain berarti melemahnya kekuatan posisi tawar petani juga berarti terbuka kembali ruang gerak bagi pihak swasta bersinergi dengan negara. Sikap pemerintah yang mengabaikan persoalan pertanahan yang dialami petani jelas tampak antara lain karena sulitnya untuk merubah pola hubungan agraria dengan pihak swasta tersebut dan belum terselesaikannya persoalan petani secara tuntas di lapangan. PS, seorang tokoh petani yang pernah aktif menjadi anggota Tim 13 mengatakan:

...yang jelas Tim 13 itu sudah tidak bisa lagi membawa aspirasi masyarakat tani. Satu contoh, saya sudah beberapa kali melalui Tim 13 menandatangani surat

---

elemen sistem agraria dengan mengembangkan sifat-sifat struktural kontradiktif dan mengembangkan unsur bernegasi.

<sup>274</sup> Pada episode: 1) rezim kolonial Belanda lihat hasil penelitian Sartono Kartidirdjo. 1984. Op.Cit; Kartodirdjo, Sartono. 1973. *Pretest Movement in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centeries*. Singapore: Oxford University Press; 2) rezim imperialisme Jepang lihat hasil penelitian Aiko Kurasawa.1993. *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang perubahan sosial di pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: Grasindo; 3) rezim orde lama lihat hasil penelitian Soegijanto Padmo. 2000. *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965*. Yogyakarta: Media Pressindo.

rekomendasi yang harus disampaikan kepada Gubernur. Tapi ternyata apa, nggak kunjung sampai surat rekomendasi itu. Contoh lagi, kasus di Way Mati register 44, sampai batas waktunya habis tidak ada jawaban. Belum ada surat keterangan atau apa itu bisa atau tidak. Saya selaku wakil petani dituntut masyarakat. Tim 13 tahu pembahasannya bahwa waktu itu diberi batas waktu untuk perusahaan agar meninggalkan tempat dan tidak aktif lagi. Ternyata tidak ada jawaban. Saya tidak tahu ada apa antara Tim 13 dengan perusahaan. Karena kasus register 44 itu kan sudah sampai ke Menteri Kehutanan untuk pengembalian tanah adat. Sampai hari ini tidak ada jawaban.

Dengan demikian, gerakan agraria selama ini nampak lebih sebagai luapan ungkapan ketidakpuasan kolektif petani (dengan segenap pendukungnya) secara terorganisir terhadap keberlakuan sistem agraria dominan yang sudah kokoh. Perkembangan gerakan agraria semakin tidak menunjukkan dirinya sebagai kekuatan penyeimbang dalam mengontrol konstruksi dan keberlakuan sistem agraria dominan yang masih antagonis tersebut. Gerakan-gerakan agraria tetap saja tidak mampu menembus (merubah) sifat-sifat struktural sistem agraria dominan menjadi lebih responsif terhadap persoalan substantif petani.<sup>275</sup> GP, mantan aktivis gerakan petani di Lampung dan sekarang menjadi staf inti sebuah LSM di Jakarta mengatakan:

Bukan hanya di Lampung, di tingkat nasional saja kawan-kawan pada mendekat pemerintah dan donor untuk mendapatkan kegiatan. Mereka terjebak semakin “memoderasi” diri. Mereka bertemu sekali waktu untuk ikut bersuara, tetapi setelah itu kembali pada kesibukannya sendiri.

## 7.5. Desinstitusionalisasi Program Gerakan

Gerakan agraria pada akhir tahun 1990-an (awal era reformasi) dianggap sebagai gelombang gerakan kedua setelah gelombang gerakan agraria pertama tahun 1960-an. Keduanya sama-sama menuntut dilaksanakan pembaruan agraria (*agrarian reform*) dan hasilnya juga sama-sama tidak mampu merubah sistem agraria dominan yang responsif terhadap kepentingan petani. Gelombang gerakan agraria pertama ternyata bias kepentingan para elit organisasi tani dan partai politik. Program *landreform* ini akhirnya kandas di tengah jalan, mengalami kemampatan karena pengeroposan dari dalam dan penyumbatan dari luar. Gerakan-gerakan agraria dari bawah (*landreform by leverage*) akhirnya berhasil

---

<sup>275</sup> Kesimpulan tersebut tidak mengabaikan telah terjadinya perubahan-perubahan struktur hubungan agraria pada tataran normatif, seperti telah disahkannya Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang reforma agrarian dan Keppres Nomor 34/2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Menurut kalangan aktivis kedua kebijakan tersebut saling terkait dan berpengaruh terhadap kekuatan sistem agraria dominan. Justru keduanya ditengarai memiliki pengaruh negatif terhadap reforma agraria, yakni semakin berada pada kondisi ketidakpastian. *Pertama*, lahirnya Tap MPR tersebut menutup peluang penerapan UUPA 1960 secara konsisten di satu sisi dan pada sisi lain membuka peluang perubahan atas UUPA 1960. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya Keppres tersebut. *Kedua*, kelahiran Tap MPR itu telah membuka peluang yang semakin besar bagi rejim neoliberal untuk mengarahkan kebijakan agraria yang selaras dengan kepentingannya

dilumpuhkan.<sup>276</sup> Bersama dengan berkuasanya Orde Baru maka program *landreform* menjadi terabaikan dan tidak terlembagakan.

Pada tahun 1990-an isu-isu *landreform* dibangkitkan kembali dalam kajian diskursus pembangunan. Pada masa ini isu *landreform* mengalami metamorfosis beririsan dengan paradigma neoliberal, terkait dengan kelompok dominan dalam lingkaran akademisi dan praktisi kebijakan.<sup>277</sup> Berjalan seiring dengan kegagalan pembangunan Orde Baru, terjadi gelombang gerakan agraria kedua. Gelombang gerakan agraria kedua ini juga mengalami bias kepentingan para elit aktornya. Dalam beberapa hasil studi disimpulkan bahwa gerakan tersebut menjadi relatif stagnan, yakni tidak mampu menjadi struktur gerakan yang solid, menjadi wadah aspirasi dan partisipasi petani, dan menjadi kekuatan penekan dalam merubah sistem agraria yang responsif terhadap kepentingan petani.<sup>278</sup>

Dalam kasus di Lampung ditemukan bahwa meskipun aktivitas organisasi gerakan petani semakin masuk pada arus utama sistem agraria dominan, tetapi program-program gerakan sesuai dengan klaim-klaim yang diperjuangkan belum terlembagakan sebagai bagian dari program utama pembangunan. Belum muncul kemauan pemerintah yang kuat dan dengan jelas mengarah pada komitmennya untuk menuntaskan persoalan agraria (pertanahan) yang selama ini bersinggungan dengan kepentingan komunitas lokal (petani), apalagi memberdayakan mereka.

Arah perkembangan aktivitas organisasi gerakan petani cenderung masuk pada ruang konservatif dan bersifat akomodasionis.<sup>279</sup> Posisinya cenderung memelihara jalinan hubungan dengan pimpinan organisasi basis, dengan para penyandang dana, dengan organisasi pendukung, semuanya diperlukan untuk keberlangsungan hidup organisasi gerakan petani. Tetapi perannya sebagai pengimbang kekuatan negara dan swasta dalam struktur hubungan sosial agraria, sebagai kekuatan gerakan pemberdayaan masyarakat petani, dan

---

<sup>276</sup> Gerakan agraria berhasil dilumpuhkan karena terjebak pada ideologi kelas yang dikembangkan oleh partai politik. Dari dalam petani menjadi instrumen mobilisasi aktif organisasi tani dan partai politik (Kuntowijoyo. 1997. *Esei-Esei Sejarah Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama). Pelaksanaan program *landreform* juga gagal mengubah ketidakadilan agraria (Soegijanto Padmo. 2000. Op.Cit.). Di balik kacaunya demokrasi terpimpin (1960-1965) terjadi konflik antar elit yang upaya menggagalkan program *landreform*. Pada tataran interna-sional terjadi perebutan pengaruh antara negara-negara blok sosialis dan blok kapitalis terhadap Indonesia.

<sup>277</sup> Hanry Berstein, Terence J. Byress, Saturnimo M. Borrás Jr., Cristobal Kay, dkk. 2008. Op.Cit, hal. 28.

<sup>278</sup> Hasil kajian Ngadisah (2003. Op.Cit.), tentang gerakan sosial rakyat Papua yang diarahkan pada PT Freport tidak membuahkan hasil yang berarti sehingga berkembang menjadi gerakan politik ingin memisahkan diri dari NKRI. Hasil kajian Victor Silaen (2006. Op.Cit.), tentang perlawanan rakyat lokal pada kasus Indorayon di Toba Samosir juga belum menunjukkan hasil yang jelas: "*perlawanan itu, entah sampai kapan*". Hasil kajian Wahyudi (2005. Op.Cit.) dan Mustain (2007. Op.Cit.) terhadap gerakan petani di Malang, Jawa Timur juga masih dihantui oleh ketidakjelasan status tanah pertanian yang telah dikuasai kembali oleh petani.

<sup>279</sup> Contohnya seperti sikap IPL dalam penyelesaian kasus pertanahan di Register 40 Gedung Wani, dan sikap Mirak Nadai dalam penyelesaian kasus pertanahan di Padang Ratu.

sebagai lembaga perantara antara masyarakat petani dengan negara dan swasta maupun dengan segenap lembaga pendukung baik dalam konteks jejaring (*networks*) maupun koalisi, semakin menurun. Fenomena tersebut semakin kuat mengindikasikan bahwa mulai terjadi penguatan tekanan sosio-kultural eksternal terhadap kemungkinan dapat dilakukan penguatan kembali struktur gerakan agraria, meskipun tampak dipermukaan di mana arah aktivitas gerakan masih dapat dikontrol oleh para elit aktornya.

Bahkan ketika fungsi organisasional diarahkan sebagai suatu komoditas politik dan ekonomi yang menjadi tujuan praktis para elit aktor, maka sebenarnya telah terjadi suatu "*proses pembiasaan*" antara kepentingan organisasi gerakan dengan kepentingan individu atau kelompok aktor. Arah perubahan orientasi gerakan ini berkaitan dengan perubahan perilaku organisasional (diarahkan oleh para elit aktornya) yang cenderung menjadi lebih moderat, bersifat karikatif bahkan pragmatis. Pada sisi lain, seperti IPL dan Mirak Nadai mengalami eksklusifisme ditandai dengan berubahnya konsentrasi tindakan elit aktor yang mengarah pada bentuk oligarkhi (konsentrasi kekuasaan di tangan para elit minoritas). Kondisi ini dengan sengaja dilanggengkan dengan tidak dilakukan kongres, yang berarti tidak terjadi proses kaderisasi. Persoalan agraria di tingkat basis terkait dengan pembagian lahan hasil aksi kolektif juga semakin rumit, yakni distribusinya masih belum beres, banyak dikuasai *free rider*, dan belum jelas statusnya.

## **7.6. Arah Perkembangan Gerakan Agraria**

Gerakan petani merupakan bagian dari gerakan agraria karena mengusung isu reforma agraria dari bawah (*agrarian reform by leverage*). Peran utama elemen non petani dalam gerakan petani di Lampung memperkuat suatu tesis bahwa secara historis sesuai dengan karakteristiknya yang khas komunitas petani lokal lebih bersifat konservatif.<sup>280</sup> Para petani cenderung adaptif terhadap kondisi lingkungannya dan tidak akan bergerak secara terorganisir meskipun peluang politik telah terbuka jika tidak ada yang menggerakannya. Petani lebih kuat digerakkan oleh mitos yang menyediakan sebuah visi bersama, tetapi mereka belum mampu mengorganisir diri sendiri.<sup>281</sup> Peran utama elemen non petani tersebut juga akan tampak kemana gerakan agraria akan diarahkan.

---

<sup>280</sup> Ecksten. 1989. Op.Cit., hal. 13.

<sup>281</sup> Sztompka. 2004. Op.Cit., hal. 349.

Hasil penelitian di Lampung membuktikan bahwa stagnasi gerakan agraria yang direpresentasikan oleh peran organisasi gerakan petani lebih diwarnai oleh berbagai kesalahan konsekuensi tindakan beberapa kelompok aktor non petani. Mereka saling berebut sumberdaya mobilisasi organisasi gerakan petani dan komunitas petani basis dengan berusaha melembagakan garis perjuangan masing-masing dan saling memanfaatkan sumberdaya gerakan tersebut untuk mencapai kepentingan praktisnya (Tabel 13). Disorientasi tindakan tersebut menyebabkan stagnasi peran organisasi gerakan petani sebagai wadah perjuangan substantif petani. Oleh karena itu, kekuatan struktur sumberdaya gerakan sebenarnya lebih disebabkan oleh adanya momentum, seperti peluang krisis politik negara, luapan ketidakpuasan petani, dan semangat perjuangan yang membara. Momentum gerakan ini tidak berbasis pada *common platform* perjuangan dan kesiapan sumberdaya manusia yang memadai. Isu gerakan yang semakin mengarah pada lawan yang abstrak (neo-kolonialisme, imperialisme dan neo-liberalisme) juga semakin membuat para aktor gerakan samar melihat kedalaman intervensi pihak lain yang sebenarnya juga ikut ambil bagian dalam menyeret ke arah yang mungkin dapat melemahkan posisi gerakan agraria itu sendiri.

Secara historis kekuatan politik-ekonomi pada tataran makro struktural menentukan strukturasi gerakan agraria, sampai pada kondisinya yang stagnan. Beberapa studi di Amerika Latin, Afrika, Asia Tenggara, termasuk Indonesia terkait dengan perubahan struktural agraria di aras lokal akibat desakan kepentingan supra lokal.<sup>282</sup> Bahkan akibat pengaruh kapitalisme global (neo-liberalisme) yang berlangsung sampai saat ini.<sup>283</sup> Sehingga gerakan agraria semakin kuat berhadapan dengan kendala makro struktural yang pada akhirnya mampu menghambat atau melemahkan gerakan transformasi struktural agraria.

Hasil penelitian di Lampung menemukan bahwa ketidakmampuan dalam menghadapi setiap kendala yang hadir membuat gerakan agraria mengalami krisis kredibilitas, krisis legitimasi, diskontinuitas, destrukturasi internal dan eksternal, dan deinstitutionalisasi. Organisasi gerakan petani tetap tidak memiliki corak genuin lagi sebagai katalis gerakan agraria seperti dalam perjuangan pada awal-awal reformasi. Posisinya semakin dekat dengan alam konservatif, semakin tertutup mengarah pada pendekatan berorientasi klien (terutama komunitas

---

<sup>282</sup> Scott, 1979, 1989, 2000. Op.cit.; Eric Wolf, 1969; Samuel Popkin. 1979. Op.Cit.; R.H. Bates. 1981. Op.Cit.; Ghimire. 2001. Op.Cit.; Landsberger dan Alexandrov.1984. Op.Cit.

<sup>283</sup> Andi Widjajanto, dkk. 2007. Op.Cit.

petani basis), kembali mengandalkan pendekatan institusional (konsensus), dan mengalami krisis produksi isu substantif petani. Sementara itu program-program perjuangan masih belum terlembagakan meskipun sering melakukan bargaining politik dalam dinamika politik lokal. Kondisi ini memperkuat kesimpulan bahwa gerakan petani berada pada kondisi stagnan (tetap, tidak berubah) dan tidak mampu berperan dalam transformasi struktural agraria meskipun terjadi inovasi cara-cara gerakan yang semakin berkualitas.

Secara keseluruhan terjadi perkembangan yang relatif tetap dalam gerakan agraria yang direpresentasikan oleh peran organisasi gerakan petani. Semakin diformalkan organisasi petani justru perannya sebagai organisasi gerakan semakin menurun; semakin terdiferensiasi struktur internal justru semakin rentan terhadap konflik; dan akhirnya terjadi pemisahan dan fragmentasi yang sulit disatukan kembali. Semua fenomena tersebut menunjukkan bahwa struktur sumberdaya gerakan cenderung mengarah pada kondisi disintegrasi. Kondisi yang sama terjadi ketika dilihat dari aspek organisasionalnya, maka sebagian besar aspek organisasi gerakan petani cenderung berkembang negatif (Tabel 12). Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa gerakan agraria di Lampung berada pada kondisi "*involusi*", atau "*Involusi Gerakan Agraria*". Involusi tersebut terjadi pada peran organisasi gerakan petani dalam transformasi struktural agraria. Involusi gerakan tersebut lebih disebabkan oleh disorientasi tindakan para elit aktor, terutama non petani.

Sebagaimana disajikan pada Tabel 14 tampak bahwa arah perkembangan gerakan agraria yang direpresentasikan oleh peran organisasi gerakan petani (DTL, IPL, SPL/SPI-L, dan MN) semakin kuat berada pada jalur involusi dibanding berada pada jalur radikalisisasi, institusionalisasi, dan komersialisasi. Indikasinya bahwa aktivitasnya semakin terfokus pada orientasi konstituen dan masuk pada ruang konservatif mendukung sistem agraria yang mapan. Pada sisi lain, juga mulai diarahkan masuk pada jalur institusionalisasi. Perannya menguat menjadi kelompok kepentingan dalam merespon dinamika politik lokal mengakses peluang politik institusional. Konsekuensinya adalah perkembangan peran organisasi gerakan petani semakin lemah berada pada jalur radikalisisasi, karena aksi-aksi kolektif *countercultural* sudah menurun. Akan tetapi, meskipun posisinya kuat menjadi organisasi berorientasi konstituen, ketika muncul gangguan dari luar dalam derajat tertentu dapat memobilisir komunitas petani basis untuk kembali melakukan aksi-aksi kolektif.

Tabel 14 Arah Perkembangan Organisasi Gerakan Petani (DTL, IPL, SPL/SPI-L, dan MN) di Lampung

Aspek	Orientasi Klien/ Konstituen	Orientasi Otoritas
Partisipasi Konstituensi Langsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuat mengarah sebagai organisasi sukarela yang berorientasi konstituen.</li> <li>• Sebagai organisasi gerakan subkultural</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Jalur involusi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemah sebagai gerakan sosio-politik.</li> <li>• Lemah sebagai gerakan konterkultural yang berciri sebagai gerakan radikal</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Jalur Radikalisasi</b></p>
Partisipasi Konstituensi Tidak Langsung	<p>Belum mengarah menjadi organisasi layanan, sebagai organisasi subkultural</p> <p style="text-align: center;"><b>Jalur Komersialisasi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mulai merespon peluang politik institusional dalam dinamika politik lokal (dan nasional).</li> <li>• Sebagai kelompok kepentingan atau gerakan instrumental dalam rangka pelebagaan program-programnya</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Jalur Institusionalisasi</b></p>

Sumber: Diadaptasi dari Doug McAdam, John D. McCarthy, Mayer N.Zald (Editor's). 1996. Op.Cit., hal. 152-157



## **BAB VIII**

### **NASIB PETANI DAN PENGUATAN STRUKTUR SUMBERDAYA GERAKAN AGRARIA**

Pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa tidak berubahnya nasib petani karena mereka hidup di dalam alam kehidupan (sistem agraria) yang begitu berbeda dari yang dipikirkan dan yang secara simbolik dinyatakan oleh para pemikir bijak masa lalu.<sup>284</sup> Posisi petani dalam sistem agraria demikian secara ekonomi termarginalkan, secara politik tidak memiliki hak suara, dan secara kultural sebagai elemen masyarakat yang terancam.

Realitas kehidupan petani yang tetap berada pada posisi lemah tersebut dalam struktur dominasi berjalan seiring dengan kondisi gerakan yang involutif. Gerakan agraria bersifat stagnan, berjalan ditempat, tidak berubah dan tidak mampu melakukan perubahan struktural yang berarti sebagai landasan bagi perbaikan nasib (keberdayaan) petani. Pertanyaannya adalah: Apakah kondisi gerakan yang involutif tersebut pada masa mendatang berarti tidak ada celah bagi upaya perubahan ke arah tatanan agraria yang lebih adil ? Seberapa jauh struktur sumberdaya gerakan agraria dapat ikut berperan dalam mengendalikan sistem agraria, atau paling tidak ikut mengarahkannya sedemikian rupa sehingga dapat meminimalisir marginalisasi petani dan memaksimalkan peluang yang dapat ditawarkan bagi kesejahteraan petani ? Uraian pada bab ini difokuskan pada refleksi dan proyeksi dalam upaya transformasi tatanan agraria yang didasarkan pada hasil-hasil temuan di lapangan sebagaimana sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

#### **8.1. Nasib Petani Dalam Sistem Agraria Antagonis**

Lemahnya sistem agraria di Indonesia dalam mengangkat nasib petani (meningkatkan kesejahteraan) tidak hanya bersifat praktis tetapi juga bersifat struktural-ideologis. Sifat strukturalnya tampak dari arah kecenderungan sistem agraria yang cenderung antagonis daripada simbiosis mutualisme. Kondisi ini termanifestasi dalam pembangunan yang kontra produktif dan kurang

---

<sup>284</sup> Sebagaimana ungkapan para pemikir utopia klasik di Jawa seperti "*Toto titi tentrem kerto raharjo*" dan "*Gemah ripah loh jinawe*" yang intinya mengangankan dunia yang serba indah (aman, tenteram, sejahtera dan serba kecukupan).

berorientasi populis (berorientasi pemetaraan).<sup>285</sup> Dengan mengadopsi tiga elemen struktural menurut Giddens yang terdiri atas struktur signifikansi, struktur dominasi (otoritatif dan alokatif) dan struktur legitimasi, maka sifat-sifat struktural sistem agraria yang secara institusional menentukan keterpurukan nasib petani dapat dijelaskan.<sup>286</sup>

*Pertama*, struktur signifikansi agraria terdiri atas gugus pengetahuan ideologis dan praktis yang dapat meningkatkan kesadaran aktor dan di dalamnya terlekat ide-ide modernisasi, pembangunan dan pertumbuhan yang dominan dibangun berbasis kolaborasi antara negara dan swasta. Konsepsi ini berkiblat pada ideologi kapitalisme-liberalisme yang secara kultural sudah melekat kuat (menghegemoni) dalam struktur shemata aktor di semua elemen sistem agraria. Termasuk struktur schemata aktor intelektual gerakan yang seharusnya posisi mereka berada pada lingkungan (ruang) masyarakat sipil (*civil society*), di mana masyarakat petani berada di dalamnya. Realitas ini sudah sampai pada tataran paradigmatik (*developmentalism-modernism*).<sup>287</sup>

*Kedua*, struktur dominasi sumberdaya otoritatif (politik) dan alokatif (ekonomi) agraria yang masih sangat timpang. *Pertama*, eksistensi petani dalam struktur politik agraria selalu berada pada posisi ter subordinasi. Sifat atau karakter politik petani tetap lemah dan terlembagakan dalam posisi subordinat (*underdog*) dalam struktur sumberdaya otoritatif. Di dalam ruang masyarakat sipil sendiri, petani menjadi terkotak-kotak dalam berbagai kelompok di mana masing-masing masuk pada arus kepentingan politik dan ekonomi. Dalam situasi tertentu petani sering dimobilisir untuk mendukung kepentingan mereka. *Kedua*, alokasi sumberdaya ekonomi agraria juga masih sangat timpang. Kondisi sumberdaya agraria (tanah) yang bergerak ke arah komersialisasi berakibat banyaknya tanah absentee dan petani tunakisma. Kondisi ini memperlebar kesenjangan ekonomi, ketimpangan aset, akses dan kontrol atas tanah pertanian bagi petani.

---

<sup>285</sup> Dimaksud dengan konsepsi "antagonis" menunjuk pada pola hubungan yang cenderung diwarnai oleh unsur bernegasi daripada bermediasi. Contohnya, antara negara (pemerintah) dan swasta (perusahaan) berada dalam pola hubungan simbiosis mutualisme, tetapi keduanya berada dalam pola hubungan antagonis dengan masyarakat petani.

<sup>286</sup> Struktur (*rules* dan *resources*) terdiri dari tiga kategori abstrak, yakni struktur signifikansi, dominasi dan legitimasi. Pada struktur signifikansi domain teoritisnya adalah teori pengkodean dan tatanan institusionalnya adalah tatanan simbolis/mode wacana. Pada struktur dominasi ada dua: (1) yang domain teoritisnya adalah teori otoritas sumberdaya, tatanan institusionalnya adalah institusi politik; dan (2) yang domain teoritisnya adalah alokasi sumberdaya, tatanan institusionalnya adalah institusi ekonomi. Pada struktur legitimasi domain teoritisnya adalah regulasi normatif dan tatanan institusinya adalah institusi legal. (Lihat Adi Loka Sujono, penerjemah. 2004. *Anthony Giddens -The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Pasuruan: Pedati, hal. 39).

<sup>287</sup> Uraian lebih rinci lihat Mansour Fakih, 2004. Op.Cit.

*Ketiga*, struktur legitimasi agraria yang timpang (deskriminatif). Ini menunjuk pada *schemata* normatif agraria yang pada tataran praktis terwujud dalam tatanan agraria yang tidak adil terhadap eksistensi petani. Schemata normatif demikian di Lampung melahirkan rangkaian kebijakan agraria yang tidak responsif terhadap kepentingan petani. Pola penguasaan tanah oleh negara masih kuat ruh “*domeinverklaring*”,<sup>288</sup> sehingga meskipun UUPA/1960 oleh Mendagri pada tahun 1978 dinyatakan tetap berlaku, pada kenyataannya secara sistematis dikebiri atau dimandulkan.<sup>289</sup> Simbol-simbol legitimasi agraria dalam kerangka kerja pembangunanisme dimitoskan untuk menjaga konsistensi sistem komunikasi, kekuasaan dan kebijakan agraria.

Dalam struktur agraria yang demikian itu jelas bahwa dimensi sosio-kultural tradisional tetap diposisikan dalam hubungan asimetris dengan dimensi ekonomi dan politik dalam sistem agraria dominan. Jika mengikuti perspektif pesimistis, di mana hegemoni *developmentalism* dan *modernism* yang masih begitu kuat mengakar ke seluruh sistem agraria, maka rasanya tetap sulit ditembus hanya dengan gerakan lokal, daerah, bahkan nasional.

## **8.2. Kegagalan Peran Gerakan Agraria Dalam Mengentaskan Nasib Petani**

Sejak zaman dahulu gerakan petani telah menjadi instrumen perubahan tatanan agraria. Bahkan secara historis, dalam setiap episode kekuasaan rezim, gerakan agraria menjadi penting ketika penguasa tidak peduli terhadap perbaikan nasib petani. Menyimak fenomena gerakan agraria yang berlangsung pada era demokratisasi saat ini tidak cukup lagi jika difahami dengan cara pandang lama (klasik). Dilihat dari struktur sumberdaya yang ada, di mana para aktor gerakan saat ini memiliki kapasitas interpretasi yang lebih terhadap situasi agraria yang dihadapi, dalam membangun kekuatan sumberdaya mobilisasi, dalam memahami dan merespon perkembangan situasi sosio-politik, dan dalam memanfaatkan peluang politik untuk melakukan transformasi agraria. Hasil penelitian menemukan bahwa dengan terbangunnya sub kultur oposisi petani, struktur mobilisasi sumberdaya, peluang politik, dan proses pembingkaihan, maka aksi-aksi kolektif dapat dilakukan. Hasilnya terjadi perubahan kebijakan agraria dan tanah pertanian dapat dikuasai kembali oleh petani. Tetapi dalam perkembangan berikutnya gerakan agraria mengalami deformasi, *decoupling* dan stagnasi, sehingga berada pada kondisi involusi.

---

<sup>288</sup> Sitorus, MT. Felix. 2006. Op.Cit., hal. 24.

<sup>289</sup> Soerjo Adiwibowo, Melanie A. Sanito dan Lala M. Kolopaking. 2008. Op.Cit., hal. 100.

Belajar dari pengalaman di Lampung ternyata dalam dinamika gerakan agraria di era demokratisasi selain mengalami tekanan-tekanan eksternal yang kuat, pada sisi internal juga mengalami disorientasi dan *discontrol*. Artinya, banyak tindakan para aktornya (terutama para elit gerakan) yang tidak dikehendaki konsekuensinya dan tidak dapat dikendalikan akibat negatifnya. Gerakan yang demikian tidak mampu memelihara karakter, visi dan misinya terkait dengan tujuan transformasi agraria. Terjadi pembelokan arah dari gerakan populis bergeser menjadi gerakan elitis, sehingga tidak jelas arahnya hendak di bawa ke mana. Pada kondisi ini, terjadi proses pembiasaan antara tindakan sadar yang terfokus pada pengentasan nasib petani dari arus sistem agraria yang antagonis dan tindakan para aktor gerakan yang secara kultural terkooptasi oleh kerangka ideologis tertentu yang bersifat karikatif, bahkan pragmatis. Struktur gerakan yang solid kemudian terbelah dan mengelompok berdasarkan latar belakang dan kepentingannya. Terjadinya disorientasi tindakan para elit aktor sebagai petanda bahwa antara tujuan praktis dan strategis gerakan mengalami diskontinum. Seharusnya keberhasilan mencapai tujuan praktis merupakan proses akumulatif tercapainya tujuan strategis gerakan. Sebaliknya, kegagalan mencapai tujuan praktis petani berjalan seiring dengan kegagalannya dalam mengentaskan nasib petani dari kubangan arus sistem agraria antagonis. Pada tataran tujuan strategis gerakan tersebut telah gagal dalam transformasi agraria.

Berdasarkan hasil analisis terhadap temuan-temuan di lapangan di Lampung dapat dinyatakan bahwa alasan-alasan mendasar kegagalan gerakan transformasi agraria di era demokratisasi sehingga berada pada kondisi involusi, karena beberapa sebab yang saling terkait. *Pertama*, gerakan agraria masih berbasis pada momentum ekstrim (era reformasi), yakni terjadinya dekonstruksi struktur politik negara. Menguatnya kembali struktur politik negara konsisten dengan semakin lemahnya dukungan pemerintah, dan kondisi ini berjalan seiring dengan semakin melemahnya kekuatan gerakan agraria. *Kedua*, tidak ada *common platform*, baik pada tataran nasional dan daerah. Sampai saat ini tidak terjadi kesatuan gerak langkah antar organisasi gerakan agraria dalam membangun visi, misi, tujuan dan program-program perjuangan. *Ketiga*, kualitas sumberdaya gerakan yang kurang memadai. Struktur gerakan agraria yang dibangun dalam menangkap momentum reformasi lebih didasarkan pada semangat perjuangan, sehingga aspek kualitas organisasi dan kepemimpinan menjadi terabaikan. *Keempat*, lawan yang abstrak seperti melawan imperialisme,

neo-kolonialisme dan neo-liberalisme, masih sulit difahami oleh mayoritas aktor gerakan (termasuk non petani) dan belum dapat diartiklasikan pada tataran menengah ke bawah. *Kelima*, struktur gerakan tidak mampu menjaga dan mengatasi kendala dari lingkungan internal dan tekanan-tekanan dari lingkungan eksternal, sehingga posisinya semakin terjebak masuk pada arus kemapanan atau terjebak pada upaya memapankan hegemoni yang melestarikan sistem agraria antagonis.

### **8.3. Penguatan Struktur Gerakan Agraria Dengan Meningkatkan Derajat Mediasi**

Analisis berikut mengikuti pandangan optimistis yang berpihak pada kemungkinan dapat dilakukan transformasi agraria. Berangkat dari asumsi bahwa betapapun kuatnya sistem agraria antagonis, di dalamnya masih ada celah-celah keterbukaan dalam mengembangkan unsur-unsur simbiosis-mutualisme. Sistem agraria sebagai suatu instrumen institusional, maka apapun bentuknya dan siapapun aktornya secara sadar terarah pada suatu tujuan tertentu. Tetapi, tindakan para aktor dalam memelihara sistem agraria tersebut tidak sepenuhnya dapat dikontrol, dan karena itu, kesalahan konsekuensi tidak sepenuhnya dapat diprediksi dan tidak pernah membentuk lingkungan agraria yang stabil. Eksistensi sistem agraria berada dalam beragam pengaruh yang sama-sama penting, tidak bersifat reduksionis dan deterministik. Oleh karena itu, suatu rezim berkuasa tidak dapat menguasai “sejarah” dan mengarahkan sistem agraria sepenuhnya sesuai dengan kepentingan atau tujuannya. Meskipun setiap rezim mereproduksi sistem agraria, tetapi tetap saja mereka tidak dapat mengendalikan sepenuhnya berbagai konsekuensi tindakan yang dilakukan.

Transformasi agraria jika diletakkan dalam posisi “mungkin berhasil”, berarti sedang membayangkan sistem agraria lebih baik. Jika mengikuti pandangan Giddens (2005) Sistem agraria yang demikian bersifat “*realisme utopis*”, karena dalam proses transformasi agraria mengandung makna teleologis (sesuatu yang mungkin terjadi). Akan tetapi, realitas historis sistem agraria di Indonesia yang tidak dikehendaki (antagonis) tidak difahami sepenuhnya bermakna teleologis dengan mengabaikan kemungkinan terjadi realitas lain yang dikehendaki (sistem agraria simbiosis-mutualisme). Ini didasarkan pada argumen bahwa para aktor pengendali utama sistem agraria tidak sepenuhnya mampu mewujudkan nilai-

nilai yang diharapkan, sehingga ruang gerakan transformasi agraria itu selalu terbuka.

Masih mengikuti pandangan Giddens, bahwa gerakan transformasi agraria mendatang di dalamnya juga mengandung keterkaitan timbal balik antara dua konsep, yakni "perjuangan" penguasaan atas sumber-sumber agraria dan "aktualisasi diri" sebagai petani. Dalam konteks perjuangan politik yang pertama disebut "politik emansipatoris" dan kedua disebut "politik kehidupan". Tujuan mendasar dari perjuangan penguasaan atas sumber-sumber agraria adalah "pembebasan dari" ketidaksetaraan dan ketidakadilan, sedangkan tujuan aktualisasi diri sebagai petani mengarah pada berbagai upaya untuk memperbesar kemungkinan pemenuhan dan pemuasan kebutuhan hidup petani berbasis sumberdaya agraria (tanah). Namun demikian tidak dapat diabaikan bahwa diperolehnya keadilan, kesetaraan, kedaulatan, keberlanjutan hidup dan kebebasan aktualisasi diri petani dalam batas-batas tertentu juga sebagai akibat dari gerakan perubahan tatanan yang lebih luas seperti demokratisasi.

Peluang akses di era demokratisasi sudah terbuka dan aktor strategis gerakan dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan partisipasi, termasuk partisipasi kognitif, yakni partisipasi dalam mengambil berbagai keputusan khusus dan dalam merumuskan definisi situasi yang menjadi dasar dalam mengambil berbagai keputusan di bidang agraria. Tetapi, empati pada persoalan agraria yang menyatu dengan konsep perjuangan mengentaskan nasib petani sering tergantung pada kekuatan intervensi pihak lain (termasuk pihak lawan). Disini unsur utopis gerakan agraria begitu tampak dan berpotensi terbawa arus kepentingan pihak lain yang justru gencar ditentang seperti kolonialisme, neoliberalisme, imperialisme dan developmentalisme. Para aktor gerakan dituntut mampu mengontrol dengan cermat seberapa jauh kekuasaan pihak lawan yang ikut ambil bagian dapat menyeret ke arah kecenderungan yang mungkin akan melemahkan posisi gerakan transformasi agraria itu sendiri.

Pandangan Marxian bahwa posisi petani dalam struktur agraria itu lemah dan karena itu harus didukung dan diwakili ternyata masih sesuai untuk menjelaskan sebab dan proses gerakan petani di Indonesia di era demokratisasi saat ini. Sedangkan pandangannya tentang bentuk gerakan radikal dan sifat perubahan revolusioner seperti yang terjadi di Cina,<sup>290</sup> perlu di kritisi. Fakta historis membuktikan bahwa gerakan petani di Lampung dari masa VOC hingga

---

<sup>290</sup> Tan Chung. 1980. Op.Cit.

saat ini selalu tidak mampu membendung begitu kuatnya arus kekuatan pasar. Perubahan revolusioner masih sangat sulit diterima sebagai tujuan gerakan karena indikasi kemampuan kearah itu masih tidak nampak. Teori ini cenderung memandang totalitas struktur bersifat kontradiktif, asimetris, selalu bernegasi dan karena itu perubahan struktural harus bersifat dialektika-revolusioner.

Teori Hegel lebih realistis dalam melihat eksistensi totalitas struktur agraria di Indonesia, di mana unsur-unsur yang bertentangan berdiri sejajar (simetris). Artinya, dalam kondisi kontradiktif antar elemen sistem, antara unsur bernegasi dan bermediasi memiliki kekuatan yang sama. Dalam tradisi Marxian keberadaan oposisi dalam kontradiksi tidak dapat diserap oleh sistem. Ini berarti Marx mengabaikan prinsip bermediasi, sehingga solusi perubahan yang ditawarkan adalah revolusi, yakni membentuk formasi sosial baru dengan menghilangkan formasi sosial yang ada. Menyimak teori Hegel, benturan kepentingan antar elemen aktor berpeluang dapat diserap oleh sistem dan dapat diselesaikan tanpa harus menghilangkan formasi yang ada.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa transformasi struktural agraria yang berkonsekuensi pada perubahan organisasi sistem tidak harus berarti perubahan radikal dan revolusioner, tetapi bisa reformatif atau transformatif. Satu-satunya pendekatan yang paling mungkin digunakan adalah dengan meningkatkan derajat mediasi struktural. Ini sekaligus berarti upaya bagaimana agar negara dan swasta dapat mengurangi derajat kontradiksi dan bernegasi dengan masyarakat petani dalam reproduksi sistem agraria yang dikehendaki bersama. Transformasi agraria pada dasarnya merupakan perjuangan merubah sistem agraria yang antagonis menjadi simbiosis-mutualisme yang responsif terhadap kepentingan petani.

Pendekatan mediasi dalam reproduksi sistem agraria mencakup perubahan aturan dan sumberdaya. Ada lima ranah kelembagaan utama yang menjadi sasaran perubahan, yakni gugus pengetahuan, politik, ekonomi, kebijakan agraria dan masyarakat petani. Semua itu mengarah pada jawaban strategis tentang bagaimana perubahan struktural dapat diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. *Pertama*, perjuangan bukan hanya ditujukan pada negara (politik) dan swasta (ekonomi) tetapi juga pada masyarakat petani (lebih luas - masyarakat sipil). *Kedua*, gerakan agraria bukan hanya dalam dimensi sosio-politik (jangka pendek) tetapi juga sosio-kultural (jangka panjang). *Ketiga*, sasaran secara individual adalah perubahan schemata melalui perubahan gugus pengetahuan

dalam derajat kesadaran diskursif yang dapat diwujudkan dalam praktik agraria sehari-hari.

Sesuai dengan peran organisasi gerakan dalam transformasi agraria, paling tidak dapat diajukan enam pendekatan utama, yakni pendekatan kontra-hegemoni, pendekatan oposisi, pro-posisi, reposisi, kebijakan dan pemberdayaan. Semuanya diperlukan soliditas dan komitmen tinggi, yakni derajat konsolidasi yang *integrated* dari tingkat nasional hingga tingkat lokal. Konsepsi reforma agraria sebagaimana didefinisikan oleh BPN sebenarnya masih terbatas pada bagian dari perubahan sistem agraria, yakni terkonsentrasi pada ranah perubahan dominasi sumberdaya alokatif (ekonomi),<sup>291</sup> meskipun dalam jangka menengah program *landreform* semakin penting dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan merevitalisasi nilai-nilai sosio-kultural pedesaan yang tergerus.

Transformasi struktural agraria memang memiliki logikanya sendiri, berada pada tataran paradigmatis, dan banyak faktor pengaruh di dalamnya. Namun demikian, penguatan organisasi gerakan agraria (khususnya organisasi gerakan petani) tidak dapat diabaikan karena kehadirannya dapat diperankan sebagai wahana aspirasi dan partisipasi sosio-politik dan sosio-kultural petani. Meskipun difahami juga bahwa upaya dan keberhasilan transformasi agraria tidak serta-merta terjadi hanya karena terbangunnya organisasi gerakan agraria yang kuat, karena perubahan sistem agraria tidak hanya berada pada tataran praksis tetapi sudah berada pada tataran paradigmatis. Oleh sebab itu, sebagai solusi secara komprehensif dapat diajukan lima strategi utama dalam gerakan agraria mendatang, yakni gerakan kontra-hegemoni, reposisi, pro-posisi, kebijakan dan pemberdayaan. Secara spesifik (terpisah-pisah) memang tawaran kelima solusi tersebut sudah bukan hal baru. Tetapi disini juga perlu difahami bahwa upaya mengeluarkan posisi masyarakat petani dari posisinya yang subordinat (sebagai subkultur dalam sistem agraria dominan yang antagonis) menjadi seimbang (setara) dengan negara dan swasta tidak cukup hanya dijawab dengan solusi yang terpisah-pisah tersebut, karena di dalamnya dirinya rentan masuk pada jebakan epistemologi esensialisme, determinisme atau reduksionisme.

Oleh karena itu, solusi komprehensif yang harus menjadi pilihan utama dalam skala nasional. *Pertama*, gerakan pada ranah pengetahuan digunakan

---

<sup>291</sup> Jika BPN (2007. Op.Cit., hal. 40-50) merumuskan reforma agraria (RA) berarti *asset reform* (Ass.R atau *land reform*) ditambah *access reform* (Acc.R) atau (RA = Ass.R + Acc.R), maka reforma agraria di dalam lingkup sistem agraria lebih terkonsentrasi pada perubahan dominasi sumberdaya alokatif (ekonomi) daripada sumberdaya otoritatif (politik).



pendekatan kontra-hegemoni, yakni perjuangan untuk menciptakan ruang bagi terjadinya diskursus, mendekonstruksi dan sekaligus merekonstruksi sistem agraria ke arah yang responsif terhadap kepentingan petani (berbasis komunitas. Hasilnya adalah meningkatnya kesadaran diskursif para aktor (di semua elemen sistem agraria) dan berkemampuan dalam melakukan refleksi kritis terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan agraria.

*Kedua*, gerakan pada ranah dominasi sumberdaya agraria digunakan pendekatan oposisi dan reposisi. Pendekatan oposisi menunjuk pada penguatan peran organisasi gerakan yang secara konsisten melakukan tekanan, kontrol terhadap kekuasaan, dan aksi-aksi kolektif. Sedangkan pendekatan reposisi ditujukan kepada para aktor strategis gerakan, baik dalam membangun dukungan negara, dalam partisipasi politik institusional, maupun dalam ruang masyarakat sipil (khususnya pada ranah masyarakat petani).<sup>292</sup> Gerakan pada ranah kekuasaan ditujukan untuk mengurangi ketimpangan struktur dominasi sumberdaya dengan merespon peluang memasuki posisi-posisi strategis dalam institusi politik dan ekonomi.

*Ketiga*, gerakan pada ranah struktur legitimasi ditujukan untuk merubah orientasi substantif kebijakan agraria yang responsif terhadap kepentingan petani, mengeliminir praktik-praktik diskriminasi, alienasi dan marginalisasi terhadap petani. Perjuangan pada ranah ini terkait dengan perubahan schemata kebijakan agraria dan kontrol terhadap praktik kekuasaan dalam institusi hukum.

*Keempat*, khusus pada lingkup internal (masyarakat petani) selain diperlukan konsolidasi juga penguatan posisi aktor intelektual sebagai organ utama gerakan. Dalam stratifikasi kesadaran di mana para aktor strategis berada pada posisi elit atau berada pada barisan pelopor politis intelektual yang memiliki tingkat kesadaran lebih tinggi. Mereka perlu dikembalikan pada posisi menjadi bagian integral, khususnya dalam kesatuan lingkungan masyarakat petani. Realitas gerakan petani skala provinsi di Lampung memberikan inspirasi perlu pemikiran ulang atas anggapan bahwa gerakan petani itu hanya terdiri atas aktor petani dalam berbagai kasus gerakan reforma agraria dari bawah. Kasus

---

<sup>292</sup> Sebagai peringatan kita juga bisa belajar dari pengalaman gerakan petani di negara-negara Amerika Latin. Di Venezuela di bawah Chavez dapat dibangun hubungan saling menguntungkan antara para aktivis petani dengan pemerintah berbasis kepemimpinan populis. Sebaliknya di Ekuador, ketika COCAINE menggunakan strategi elektoral berkoalisi dengan partai pendukung presiden Guffierez, yang terjadi seluruhnya negatif. Gerakan petani mengalami kemunduran dalam tuntutan, strategi, organisasi, dan dukungan basis. Strategi elektoral terbukti hanya memberi peluang pada para borjuasi dalam mengkonsolidasikan kekuatannya untuk kemudian menghantam balik gerakan petani hingga hancur (Lihat James Petras. 2005. *Strategi-Strategi Perjuangan: Sentralisasi Gerakan Tani di Amerika Latin*. <http://coenpontoh.wordpress.com/2005/06/26/strategi-strategi-perjuangan-sentralisasi-gerakan-tani-di-amerika-latin/> diunduh tanggal 25 Februari 2008).

gerakan petani skala provinsi di Lampung merupakan tindakan kolaboratif petani dan non petani, dan pola ini memberikan keunikan tersendiri dalam kasus-kasus gerakan petani di Indonesia pada era demokratisasi saat ini. Oleh sebab itu, organ petani dan organ non petani sama-sama diperkuat berada dalam satu kesatuan gerak langkah dalam keberlanjutan gerakan agraria.

*Kelima*, masyarakat petani merupakan salah satu elemen utama dalam sistem agraria selain negara dan swasta, maka penguatan akses dan partisipasi aktif petani di dalam pembuatan dan implementasi kebijakan agraria adalah sangat penting dan mendasar. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan posisi tawar petani secara institusional yang diwujudkan melalui penguatan organisasi tani.

Secara rinci strategi gerakan agraria mendatang sebagai disajikan dalam Tabel 15 di bawah ini.

Tabel 15. Strategi Gerakan Agraria Mendatang

Aspek Struktural	Pendekatan	Strategi
Struktur Signifikasi	Kontra hegemoni	Memperluas ruang bagi terjadinya diskursus, mendekonstruksi dan merekonstruksi sistem agraria dominan yang responsif terhadap kepentingan petani
Struktur Dominasi	Oposisi	Penguatan organisasi gerakan dalam melakukan tekanan, kontrol terhadap kekuasaan, dan aksi-aksi kolektif
	Pro-posisi	Penguatan akses dalam partisipasi politik institusional.
	Reposisi	Penguatan ruang masyarakat sipil (masyarakat petani)
Struktur Legitimasi	Kebijakan	Merubah orientasi substantif kebijakan agraria yang responsif terhadap kepentingan petani, mengeliminir praktik-praktik diskriminasi. Perjuangan pada ranah ini terkait dengan perubahan schemata kebijakan agraria dan kontrol terhadap praktik kekuasaan dalam institusi hukum.
Struktur Internal	Reposisi	Penguatan posisi aktor intelektual sebagai organ utama gerakan. Mereka ini perlu dikembalikan pada posisi sebenarnya menjadi bagian integral masyarakat sipil (dalam kesatuan lingkungan masyarakat petani). Organ petani dan non petani sama-sama diperkuat berada dalam satu kesatuan gerak langkah dalam keberlanjutan gerakan agraria.
Elemen Petani	Masyarakat Pemberdayaan	Meningkatkan posisi tawar petani secara institusional yang diwujudkan melalui penguatan organisasi tani.

## **BAB IX**

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan berikut ini merupakan abstraksi dari analisis fakta empiris yang sudah dipaparkan sampai dengan bab tujuh tentang involusi gerakan agraria. Kesimpulan empiris ini sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. Sedangkan analisis pada bab delapan berposisi sebagai refleksi dan proyeksi kemungkinan dilakukan gerakan transformasi agraria ke depan.

1. Ketegangan struktural agraria dipicu oleh kebijakan pembangunan yang tidak responsif terhadap kepentingan petani. Dalam praktik pembangunan di pedesaan banyak komunitas petani yang sangat terganggu kelangsungan hidupnya karena tanah yang mereka kuasai diambil-alih atau dibebaskan dengan cara tidak fair. Realitas ini mengakibatkan meningkatnya jumlah petani yang mengalami deprivasi (absolut dan relatif) dan merasa diperlakukan tidak adil. Kondisi ini ditambah dengan berkembangnya ideologi egalitarian yang dapat menjadi arah perjuangan petani. Semua secara bersama-sama menjadi prakondisi utama yang mendorong munculnya gerakan petani.

Betapapun tertutupnya struktur peluang politik Orde Baru di dalamnya tetap masih terdapat celah–celah keterbukaan. Negara menutup rapat perjuangan petani baik melalui jalur institusional maupun non institusional, tetapi mereka tetap berjuang mereproduksi strategi aksi kolektif (protes, gerakan konsensus dan gerakan lokal-tradisional). Aksi-aksi kolektif mengalami stagnasi karena biaya yang mesti ditanggung jauh dari sebanding dengan keberhasilan yang dicapai. Kegagalan perjuangan petani berjalan seiring dengan meningkatnya persoalan pertanahan yang berkembang secara akumulatif dan menyebar. Realitas ini pendorong berkembangnya sub kultur oposisi petani, yang di dalamnya terdapat akumulasi sumberdaya mobilisasi potensial petani. Sub kultur oposisi petani selalu diaktifkan dan selalu berada pada kondisi siap diaktualisasikan dalam aksi-aksi kolektif selanjutnya.

2. Struktur sumberdaya integratif petani dan non petani menjadi ciri utama gerakan petani skala provinsi. Kemunculan secara dramatis aksi-aksi kolektif petani di Lampung pada awal reformasi dalam memanfaatkan momentum

peluang politik tidak dapat dipisahkan dari peran sinergis di antara kedua elemen sumberdaya tersebut. Oleh karena itu gerakan petani muncul dalam dualitas orientasi, yakni *material* (tujuan petani basis) dan *postmaterial* (tujuan non petani). Sebagai gerakan moderen berbasis pada kesadaran bersama untuk melakukan aksi-aksi kolektif, didesain dengan struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas, dan memiliki daya tekan kuat dan posisi tawar seimbang. Perlunya penyadaran dan pengorganisasi petani basis didasarkan pada fakta bahwa selain petani masih belum memiliki kesadaran politik (masih berada pada kesadaran konflikktual), terbukanya peluang politik pada tataran praksis ternyata tetap tidak bebas dari tekanan-tekanan. Realitas ini juga berpengaruh terhadap keragaman sikap partisipatif petani terkait dengan respon mereka terhadap peluang politik.

Cepatnya penguatan struktur mobilisasi sumberdaya gerakan petani dan respon positif petani terhadap peluang politik (dekonstruksi struktur politik negara sebagai momentum) karena telah tersedia sumberdaya mobilisasi potensial (sub kultur oposisi petani). Berkembangnya sub kultur oposisi petani menunjukkan bahwa persoalan pertanahan di lingkungan komunitas petani terus-menerus diaktifkan. Terbukanya peluang politik mendorong kesadaran konflikktual petani secara cepat dapat dirubah ke dalam kesadaran politik. Disini proses pemingkakan kolektif menjadi penting dalam menjembatani keterkaitan antara sub kultur oposisi petani, respon terhadap peluang politik dan kekuatan sumberdaya mobilisasi untuk sampai pada aksi-aksi kolektif dalam gerakan sosio-politik petani.

3. Dalam dinamika gerakan petani terjadi stagnasi, karena dalam proses penguatan organisasi gerakan diwarnai dengan disorientasi perilaku para elit aktor yang akibat negatifnya tidak dapat dikontrol. Pasca reklamings terjadi perubahan drastis motivasi partisipasi di antara kelompok aktor gerakan dari keinginan untuk membela kepentingan substantif petani berubah menjadi keinginan untuk memenuhi kepentingan kelompoknya masing-masing. Disini terjadi perebutan kuasa atas organisasi gerakan petani dan sumberdaya mobilisasi petani basis yang mengarah pada konflik dan fragmentasi. Terjadi deformasi antar kelompok aktor gerakan, terjadi *decoupling* antara persoalan substantif petani dan kepentingan para elit aktor, dan akhirnya gerakan agraria mengalami stagnasi.

Stagnasi gerakan petani mengarah pada kesimpulan telah terjadi “invokasi gerakan agraria”. Ini terjadi ketika struktur sumberdaya mobilisasi semakin melemah, sifat-sifat strukturalnya semakin tunduk pada sistem agraria dominan, sedangkan program-programnya belum terlembagakan. Dilihat secara umum dari sisi perkembangan struktur sumberdaya gerakan petani, disimpulkan bahwa berkembangnya perjuangan petani dari protes sampai pada gerakan sosio-politik menunjukkan peningkatan kualitas struktur sumberdaya mobilisasi. Tetapi pada akhirnya, *pertama*, struktur gerakan berada pada titik kulminasi, mengalami krisis legitimasi dan kredibilitas, diskontinuitas, destrukturisasi dan deinstitutionalisasi. *Kedua*, dilihat secara historis hubungan integratif antara elemen petani dan non petani terjadi dalam tiga tahap, yakni dari yang belum terintegrasi (*unintegrated*), menjadi struktur mobilisasi sumberdaya yang kuat (*integrated*) dan kemudian (hingga saat ini) antar elemen struktur gerakan terbelah dan belum dapat disatukan (*disintegrated*). *Ketiga*, perkembangan struktur gerakan tidak menghasilkan perubahan substantif bagi pengentasan nasib petani sesuai dengan tujuan perjuangan semula. Sedangkan dilihat dari perkembangan organisasionalnya disimpulkan bahwa perkembangan organisasi gerakan petani mengarah pada bentuk gerakan konsensus. Organisasi gerakan seperti ini tidak dapat dipakai sebagai instrumen transformasi agraria. Karakternya yang semula cenderung berada pada posisi *countercultural* telah bergeser cenderung berada pada posisi akomodasionis (*subcultural*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, Soerjo, Melanie A. Sanito dan Lala M. Kolopaking. 2008. *Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan. SMP Tjondronegoro*. Bogor: DKPM-IPB.
- Andrews, Kenneth T. 1997. *The Impacts of Social Movements on the Political Proses: The Civil Rights Movement and Black Electoral Politics in Mississippi*. American Sociological Review, 1997, Vol.62 (October:800-819):<http://www.UNC.edu-cta1/ASR97.pdf>. Download 8 Juni 2007).
- Archetti, Eduardo, Egil Fossum and Per Olav Reiton. 1970. *Agrarian Structure and Peasant Autonomy*. Journal of Peace Research 1970; 7; 185. On behave of International Peace Research Institute, Oslo. Sage Publications.
- Arendt, Hannah. 1951. *The Origin of Totalitarianism*. 1951. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2000. *Lampung Dalam Angka 2000*. Bandar Lampung: CV. Lima Saudara.
- Bappeda Propinsi Lampung. 2006. *Penganggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Lampung*. Makalah disampaikan dalam acara Seminar "Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Lampung", yang diselenggarakan oleh KAGAMA Lampung, Tanggal 14 Desember 2006.
- Bappenas, 2000. *Studi Pemetaan Sosial Budaya di Provinsi Lampung*. Jakarta: BAPPENAS).
- Barkan, Steven E., Lynne L. Snowden. 2001. *Collective Violence*. Allyn and Bacon.
- Basrowi dan Sudikin. 2003. *Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Bates, R.H. 1981. *Markets and States in Tropical Africa: The Political Basis of Agricultural Policies*. Berkeley: University of California Press.
- Beasley, Jeffrey. 1997. *Social Movement Organizations and Collective Action in Mexico: a Comparative Analysis of Urban and Rural Cases*. University of Kansas. Diakses dari [http://www.168.96.200.17/arlibros/97\\_beasley.pdf](http://www.168.96.200.17/arlibros/97_beasley.pdf), pada tanggal 8 Juni 2007.)
- Benford, Robert D. dan David A. Snow. 2000. *Pembingkaihan Processes and Social Movements: An Overview and Assesment*. Annu. Rev.Sociol.26:611-39. Copyright @ 2000 by Annual Review s. All rights reserved.
- Berstein, Henry, dkk. 2008. *Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Bevington, Douglas dan Chris Dixon. 2005. *Movement-relevant Theory: Rethinking Social Movement Scholarship and Activism*. Social Movement Studies. Vol.4, No.3, 185-208, Desember 2005.

- BPN RI. 2007. *Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan "Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat"*. Jakarta: BPN RI.
- Brohman, John. 1996. *Popular Development: Rethinking the Theory and Practice of Development*. Blackwell Publishers Ltd.
- Burhanuddin, Jajat dan Subhan, Arief (Editor), 1999, *Sistem Siaga Dini Untuk Kerusuhan Sosial*, Jakarta: Balitbang Agama Depag RI dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta.
- Canel, E. *New Social Movement Theory and Resource Mobilization Theory: The Need for Integration (continued)*. Diakses dari dalam [http://www.idrc.ca/en/ev-69139-201-1-DO\\_TOPIC.html](http://www.idrc.ca/en/ev-69139-201-1-DO_TOPIC.html)., tanggal 8 Juni 2007.
- Carmin, Joann, Deborah B. Balser. 2002. *Selecting Repertoires of Action in Environmental Movement Organizations: An Interpretive Approach*. Sage Publication: <http://www.sagepublications.com>.
- Chen, Jin. 1995. *Get Green or Get Out: Decoupling Environmental From Economic Objectives in Agricultural Regulation*. The Nasional Agricultural Law Center: University of Arkansas School of Law [NatAgLaw@uark.edu](mailto:NatAgLaw@uark.edu)., atau [www.NationalAgLawCenter.org](http://www.NationalAgLawCenter.org).
- Chung, Tan. 1980. *A New Look at Peasant Rebellions in China*. Sage Publications., hal. 35. Downloaded from <http://chr.sagepub.com> by hartoyo on November 19, 2007.
- Cohen, Jean L.. 1985. *Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements*. Dalam "Social Movements", Journal "Social Research: An International Quarterly of The Social Sciences", Vol. 52 No.4 (Winter 1985).
- Culla, Adi Suryadi. 2006. *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi LSM di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Day, Richard J.F. 2005. *Gramsci is Dead: Anarchist Currents in the Newest Social Movements*. London: Pluto Press.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (editors). 1994. *Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications.
- Depdikbud. 1977/1978. *Sejarah Daerah Lampung*. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya. Bandar Lampung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Depdikbud. 1987. *Risalah Peperangan Di Daerah Lampung Tahun 1856: Gugurnya Raden Inten II Pahlawan Nasional Daerah Lampung*. Alih Bahasa M. Tahir Raden Batin. Bandar Lampung: 31/12/1987
- Dewi, Oetami. 2006. *Resistensi Petani Terhadap Perkebunan Kelapa Sawit: Studi kasus perlawanan petani terhadap perkebunan kelapa sawit PTPN XIII (Persero) PIR V Ngabang, di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat*. Jakarta: FISIP Departemen Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Ringkasan Disertasi.
- Dey, I. 1993. *Qualitative Data Analysis*. London: Routledge.
- Dubet, F dan H.L. Thaler. 2004. *Introduction: The Sociology of Collective Action Reconsidered*. Corrent Sociology, July 2004, Vol. 52(4): 557-573 SAGE Publications. Download dari [www.sagepublications.com](http://www.sagepublications.com).

- Ekstein, Susan. 1989. *Power and Popular Protest: Latin American Social Movements*. Los Angeles: University of California Press.
- Fahrudin, Wawan. 2003. *Akuntabilitas dan Transformasi LSM dalam Proses Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Demokratis di Indonesia*. Jakarta: *Journal for Civil Society Empowerment*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Penerbit Pacivis, Depok.
- Fajar, Undang dan Herman. 2002. *Analisis Kebijakan Pengendalian Konflik Antar Masyarakat Sekitar dengan Perkebunan Besar*. Bogor: Kantor Pusat Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.
- Fakih, Mansour. 1995. *Tanah, Rakyat dan Demokrasi*, Yogyakarta: Forum LSM.
- Fakih, Mansour. 2003. *Perspektif LSM tentang Masalah Nasional di Era Reformasi dan Demokratisasi*. Dalam SMERU.2003. <http://www.smeru.or.id/newslet/2003/ed08/newslet200308.pdf>
- Fakih, Mansour. 2004. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pegolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, Noer. 1999. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Yogyakarta: INSIST, KPA, Pustaka Pelajar.
- Freedman, Robert (Editor). 1961. *Marx On Economics*. New York: A Harcourt, Brace & World, Inc.
- Fuller, Abigail A. 1989. *The Structure and Process of Peace Movement Organizations: Effects on Participation*. Departement of Sociology, University of Colorado, Boulder. Diakses dari [http://www.colorado.edu/conflict/full\\_text\\_search](http://www.colorado.edu/conflict/full_text_search), tanggal 15 Juni 2007.
- Geertz, Clifford. 1963. *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Geertz, Clifford. 1983. *Involusi Pertanian: Proses perubahan ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Ghimire, Krishna B. (Editor). 2001. *Land Reform and Peasant Livelihoods: The Social Dynamics of Rural Poverty and Agrarian Reforms in Developing Countries*. London: ITDG Publishing.
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press.
- Giddens, Anthony. 1993. *New Rule of Sociological Method*. 2<sup>nd</sup>. Edition. Cambridge: Polity Press.
- Giddens, Anthony. 1997. *Sociology*. Third Edition. Polity Press.
- Giddens, Anthony. 2004. *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Penerjemah Adi Loka Sjno. Pasuruan: Pedati Press.
- Giddens, Anthony. 2005. *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Goodman, Ryan dan Derek Jinks 2004. *How to Influence States: Socialization and International Human Rights Law*. Duke Law Journal, Vol 54 December 2004 No.3.



- Hardiyanto, Andik dan Gunawan Wiradi. Penyusun. 2001. *Land Reform Berdasarkan Inisiatif Rakyat*. Seri Panduan Organisasi Tani Jilid I. Bandung: KPA.
- Hardjono, Joan (Ed). 1985. *Transmigrasi: dari kolonisasi sampai swakarsa*. Jakarta: Gramedia.
- Harper, Charles L. 1989. *Exploring Social Change*. New Jersey: Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs.
- Hashim, Wan. 1984. *Petani Dan Persoalan Agraria*. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti SDN. BHD.
- Hjimar, Ulf. 1996. *Constructivist Analysis and Movement Organizations: Conceptual Clarifications*. Acta Sociologica 1996 Vol. 39, pp. 169-186. Sage Publications dalam <http://www.sagepublications.com>. Diakses tanggal 20 Nopember 2007.
- Ichsan Malik. 2004. *Pasang Surut LSM di Indonesia*. Tulisan dimuat dalam, buku: "Lembaga Swadaya Masyarakat: Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan". Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Jenkins, J. Craig. 1983. *Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements*. Columbia: Departemen of Sociology, University of Missouri. Annual Review of Sociology.
- Jenkins, J.Craig dan Bert Klandermans (Editor's). 1995. *The Politics of Social Protest Comparative Perspective on States and Social Movement*. Menneapolis: University of Minnesota Press., hal. 168
- Johnston, Hank dan Bert Klandermans (Editor's). 1995. *Social Movements and Cultur*. Monnieapolis: University of Minnesota Press.
- Joke Schrijvers. 2000. *Kekerasan "Pembangunan": Pilihan untuk Kaum Intelektual*. Jakarta: Kalyanamitra.
- Kadushin, Charles. 2004. *Linton C. Freeman. The Development of Social Network Analysis: A Study in The Sociology of Science*. <http://www.booksurge.com> (download tanggal 4 April 2007).
- Kartodirdjo, Sartono. 1973. *Pretest Movement in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centeries*. Singapore: Oxford University Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, jalanperistiwa, dan kelanjutannya (Sebuah studi kasus mengenai gerakan sosial di Indonesia)*. Terjemahan Hasan Basri. Cetakan pertama. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kauffman, M dan Alfonso, HD (eds). 1997. *Community Power and Grassroots Democracy: The Transformation of Social Life*. Zed Book.
- Kilby, Patrick. 2004. *Accountability for empowerment: Dilemmas facing non-governmental organizations*. Asia Pacific School of Economics and Government, The Australian National University. <http://www.apseg.anu.edu.au>.
- King, Brayden. 2008. *A Social Movement Perspective of Stakeholder Collective Action and Influence*. Dimuat dalam Jurnal Busines and Society: <http://bas.sagepub.com>. Sage Publication.

- Kleden, Ignas. 2004. *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*. Magelang: Indonesiatara.
- Kompas. 2004. *Lembaga Swadaya Masyarakat: Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Kornhauser, W.1959. *The Politics of Mass Society*. New York: Free Press.
- Kriesi, Hanspeter. 1988. *The Interdependence of Structure and Action: Some Reflections on the State of the Art*. JAI Press Inc.
- Kuntowijoyo. 1997. *Esei-Esei Sejarah Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama.
- Kurasawa, Aiko.1993. *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang perubahan sosial di pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: Grasindo.
- Kurtz, Marcus J. 2000. *Understanding Peasant Revolution: From Concept to Theory and Case*. Theory and Society 29: 93-124, 2000. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands.
- Landman, Todd. 1999. *Organization and Impact: The Green Movement in Comparative Perspective*.[http // www.essex.ac.uk/UCPR/events/joints/sessions/paper/archivemennheim/w21/landman.pdf](http://www.essex.ac.uk/UCPR/events/joints/sessions/paper/archivemennheim/w21/landman.pdf).Download 8 Juni 2007.
- Landsberger, Henry A. dan YU.G. Alexandrov. 1984. *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Leonela, Anu dan R. Yando Zakaria (Editor). 2002. *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*. Yogyakarta: Insist dan Karsa.
- Lockie, Stewart. 2004. *Collective agency, non-human causality and environmental social movements: A case study of the Australian 'landcare movement'*. Journal of Sociology @ 2004 The Australian Sociological Association, Volume 40(1): 41-58, DOI:10.1177/1440783304040452 [www.sagepublications.com](http://www.sagepublications.com).
- Lofland, John. 1996. *Social Movement Organizations: Guide to Research on Insurgent Realities*. New York: Aldine de Gruyter.
- Malik, Ichsan, dkk. 2003. *Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*, Jakarta: Yayasan Kemala.
- Mamay, Gergey. *Theories of Social Movements and Their Current Development in Soviet Society*, di download dari <http://www.lucy.ukc.ac.uk/csacpub/russian/mamay.html>.
- Mark De Souza, Roger; John S. Williams and Meyerson Frederick A.B. 2003. *Critical Links: Population, Health, and the Environment*. Population Reference Bureau: Population Bulletin, Vol.58, No.3. September 2003.
- Mark De Souza, Roger, John S. Williams, and Meyerson Frederick A.B. 2003. *Critical Links: Population, Health, and the Environment*. Population Reference Bureau: Population Bulletin, Vol.58, No.3. September 2003.
- Mauss, Arned L. 1975. *Social Problems as Social Movements*. Philadelphia: Lippincott.
- McAdam, Doug dan David A. Snow. 1997. *Social Movements: Reading on The Emergence, Mobilization, and Dynamics*. Los Angeles, California: Roxbury Publishing Company.

- McAdam, Doug dan W. Richard Scott, 2002. *Organization and Movements*. Paper presented at the Annual Meetings of the American Sociological Association, Chicago, IL, August, 2002. Revised draft of a paper prepared for an invitational Conference on Organizations and Social Movements held at the University of Michigan, Ann Arbor, May 10 -11, 2002.
- McAdam, Doug, John D. McCarthy dan Mayer N. Zald (editor's). 1996. *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Pembedungkaians*. USA: Cambridge University Press.
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow dan Charles Tilly. 2001. *Dynamics of Contention*. New York: Cambridge University Press.
- McCarthy, John D. and Mayer N. Zald. 1977. *Resource Mobilization and social movements: A partial theory*. In *American Journal of Sociology* 82, 1977, 6.
- Menteri Transmigrasi dan Perambah Hutan. 1995. *Pidato Dies Natalis Universitas Lampung ke 30 dalam Seminar Memperingati 90 tahun Penempatan Kolonis yang Pertama di Lampung*. Bandar Lampung: Kanwil Departemen Transmigrasi dan PPH Provinsi Lampung.
- Miall, Hugh. 2000. *Resolusi Konflik Kontemporer: Penyelesaian, Mencegah, Melola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Migdal, Joel. 1979. *Peasant Politics and Revolutions Pressure to World Political and Social Change in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Miller, Valerie dan Jane Covey. 2005. *Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Morris, Aldon D., Carol McCurg Muller (Editors). 1992. *Frontier in Social Movement Theory*. New Haven and London: Yale University Press.
- Mustain. 2007. *Petani vs Negara: Gerakan Petani Melawan Hegemoni Negara*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Muukkonen, Martti. 1999. *From Deviant Phenomenon to Collective Identity: Paradigm Shifts in Social Movement Studies*. Master Thesis. Departemen of Sociology University of Joensuu. Diakses dari <http://www.cc.joensuu.fi/~muukkone/Smstudy.rtf>, diakses tanggal 9 Juli 2007.
- Nasikun. 1991. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nasikun. 1997. *Domestikasi Peran Cendekiawan dan Perkembangan Sosiologi di Indonesia*. *Jurnal Unisia*, No.32/XVII/April 1997.
- Ngadisah. 2003. *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*. Yogyakarta: Pustaka Raja.
- Nomani, Farhad and Sohrab Behdad. 2006. *Class and Labor in Iran: Did the Revolution Matter ?* Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press.
- Nurhasim, Moch.1997. *Konflik Tanah di Jenggawah: Tipologi dan Pola Penyelesaiannya*. Jakarta: Prisma 7, Juli-Agustus 1997.
- Nurhayati, Dedeh. 2007. *Pengembangan Sistem Pendidikan Kader pada Organisasi Rakyat untuk Memperkuat Kerja Pengorganisasian dan*

*Pemberdayaan Kelompok Rakyat Marjinal*. Diakses tanggal 31 Agustus 2007.

- Olzak, Susan dan Emily Ryo. 2004. *Organization Diversity, Vitality and Outcomes in the Civil Right Movement: Running Head: Organizational Diversity in the Civil Rights Movement*. Makalah disampaikan pada "Annual Meeting of the American Sociological Association in San Francisco, 2004. Download dari <http://www.stanford.edu/dept/soc/people/faculty/olzak/diversity.paper06.pdf>, 8 Juni 2007.
- Padmo, Soegijanto. 2000. *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Paige, Jeffery M. 1978. *Agrarian Revolution: Social Movement and Export Agricultural in the Underdeveloped World*. New York: The Free Press.
- Paradakis, Elim. 1988. *Social Movements, Self-Limiting Radicalism and the Green Party in West Germany*. *Sociology*. Vol.22. No.3: 433-454. From the SAGE Social Science Collections. All Rights Reserved.
- PAU-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.1989. "*Temu Ilmiah: Perubahan Sosial dan Demokrasi di Pedesaan*", 11-13 Desember 1989. Yogyakarta: PAU-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.
- Petras, James. 1998. *The Political and Social Basis of Regional Variation an Land Occupation in Brazil*. *Journal of Oeasant Studies*.
- Petras, James. 2005. *Strategi-Strategi Perjuangan: Sentralisasi Gerakan Tani di Amerika Latin*. Dalam <http://coenpontoh.wordpress.com/2005/06/26/strategi-strategi-perjuangan-sentralisasi-gerakan-tani-di-amerika-latin/> diunduh tanggal 25 Februari 2008.
- Phongpaichit, P. 1999. *Theories of Social Movements and Their Relevance for Thailand*. Position Paper for Thailand Research Fund.
- Policy Paper RUU Desa, Juli 2007. *Masukan untuk perumusan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa*. Jakarta: Kerjasama antara Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan Democratic Reform Support Program (DRSP-USAID). Download dari [Policy\\_Paper\\_RUU\\_Des](#), pdf.-adobe reader.
- Popkin, Samuel. 1979. *The Rational Peasant*. Berkeley: The University of California Press.
- Puspawidjaja, Rizani. 2002. *Adat dan Budaya Lampung*. Bandar Lampung: Pusat Informasi Budaya Lampung dalam Jurnal Kabar Kampung Tuha, Edisi 01 Bulan September 2002.
- PUSSbik, 2002. *Tanah Lampung: Pertanahan dan Perjuangan Rakyat Tani Lampung*. Bandar Lampung: PUSSbik.
- Ragin, Charles C. 1994. *Constructing Social Research, Sociology for a New Century*. Thousand-Oaks-London, New Delhi: Cine Forge Press.
- Rahmat, Abdi. 2003. *Peranan LSM dalam Penguatan Civil Society di Indonesia: Studi Kasus Walhi*. Jakarta: Tesis Program Pascasarjana S2 Sosiologi Universitas Indonesia.
- Razif. 1991. *Penguasaan Tenaga Kerja dan Perkebunan Besar di Sumatera Timur: Tinjauan Historis*. Prisma "Industri Perkebunan: Kemakmuran untuk Siapa?". Jakarta: LP3ES No.4 Tahun XX, April 1991.

- Rochman, Meuthia Ganie. 2002. *An Uphill Struggle: Advocacy NGO's under Soeharto's New Order*, Jakarta: LabSosio, FISIP-Universitas Indonesia.
- Rusmialdi, Slamet. 1995. *Kepeloporan Transmigran Dalam Pembangunan dan Motivasi di Provinsi Lampung*, dalam Seri Monografi: "Transmigrasi dan Pembangunan Daerah". Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Sajogyo. 1973. *Modernization Without Development*. Bogor: Anonymouse, 2003.
- Sajogyo. 2006. *Ekosilogi: Deideologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi (Petani dan Perdesaan sebagai Kasus Uji)*. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
- Sayogyo. 1982. *Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Schlager, Edella. 1995. *Policy making and collective action: Defining coalition within the advocacy framework*. Dalam "Policy Sciences: An International Journal Devoted to the Improvement of Policy Making". Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
- Scott, James C. 1976. *The Moral Economy of the Peasant*. New Haven: Yale University Press.
- Scott, James C. 1989. *Everyday Form of Resistance: Peasant Resistance*. New York: Rmunk Mc Shape.
- Scott, James C. 2000. *Senjatanya Orang-Orang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Shanin, Theodore (Ed). 1979. *Peasants and Peasant Societies*. New York, Auckland: Penguin Books, Middlesex.
- Siahaan, Hotman M. 1996. *Pembangkangan Terselubung Petani Dalam Program TRI Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi*. Disertasi Doktor Universitas Airlangga.
- Siahaan, Hotman M. 1999. *Anarkhi Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi Pedesaan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.2, Nomor 3 Maret 1999, FISIP UGM.
- Silaen, Victor. 2006. *Perlawanan Komunitas Lokal pada Kasus Indorayon di Toba Samosir: Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: IRE Press.
- Sitorus, MT. Felix. 2004. *Kerangka dan Metode Kajian Agraria*. Jurnal Analisis Sosial Vol.9 No.1 April 2004.
- Sitorus, MT. Felix. 2006. *Reklam Tanah Hutan: Tipe-tipe Reforma Agraria dari Bawah di Dataran Tinggi Sulawesi Tengah*. Dalam Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria. *Sumberdaya Agraria*. Bogor: IPB-Lapera Pustaka Utama, Volume III/Tahun III/2006., hal. 24).
- Situmorang, Abdul Wahib. 2007. *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Smelser, Neil. 1962. *The Theory of Collective Behavior*. New York: free Press.
- Soetarto, Endriatmo, 2005. *Reforma Agraria Di Indonesia: Agenda Kebangsaan Yang Harus Dituntaskan*. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda.

- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugianto, H. 1987/88. *Analisis Migrasi Penduduk Berdasarkan Data SUPAS 1985 Provinsi Lampung*. Yogyakarta: Kerjasama Kantor Menteri Negara
- Suhartono. 1991. *Agroindustri dan Petani: Multi Pajak di Vorstenlanden 1850-1900*, dalam Prisma. 1991. *Industri Perkebunan: Kemakmuran Untuk Siapa?* Jakarta: LP3ES No.4 Tahun XX, April 1991.
- Suhartono. 1995. *Bandit-Bandit Pedesaan: Studi Historis 1850-1942 di Jawa*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Suhendar, Endang dan Winarni, Yohana Budi. 1998. *Petani dan Konflik Agraria*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Sujito, Arie. 2007. *Organisasi Rakyat dan Gerakan Sosial*. <http://groups.yahoo.com/group/suarakorbanbencana/message/1801> (Download tanggal 31 Agustus 2007).
- Sunarto, D.M. 2007. *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Surat Kabar Harian Kompas, Desember 1992.
- Surat Kabar Harian Radar Lampung, edisi Kamis, 17 September 2000.
- Surat Kabar Mingguan "Koridor", Edisi 178/Th. IV. Tanggal 13 Oktober 2002.
- Suryo, Djoko. 1984. *Gerakan Petani*. Dalam Prisma. 1984. *Kelas Menengah Baru: Menggapai Harta dan Kuasa*. Jakarta: LP3ES. No.2, Februari 1984 Tahun XIII.
- Swasono, Sri Edi dan Masri Singarimbun. 1985. *Sepuluh Windu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*. Jakarta: UI-press.
- Syamsu, Amral M. 1985. *Penyelenggaraan Kolonisasi dan Transmigrasi*. Dalam Hardjono (Penyunting), *Transmigrasi: Dari Kolonisasi sampai Swakarsa*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sztompka, Piotr. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. (Terjemahan). Jakarta: Prenada Media.
- Tarrow, Sydney. 1998. *Power in Movement Social Movement and Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Taukhid, M. 1952. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Djakarta: Tjakrawala.
- Tilly, C. 1978. *From Mobilization to Revolution*. Amerika Serikat: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Törnquist, Olle. *Workers in politics: Why is organised labour missing from the democracy movement ?* [http://www.demos.or.id/demokrasi.aceh/Olle/Labor/Pol/Space 7.pdf](http://www.demos.or.id/demokrasi.aceh/Olle/Labor/Pol/Space%207.pdf). Download 8 Juni 2007).
- Triwibowo, Darmawan (editor). 2006. *Gerakan Sosial: Wacana Civil Society bagi Demokratisasi*. Jakarta LP3ES.
- Verbist, Bruno dan Pasya, Gamal. 2004. *Perspektif Sejarah Status Kawasan Hutan, Konflik dan Negosiasi di Sumberjaya, Lampung Barat, Provinsi Lampung*. Agrivita, Vol. 26 No.1 Maret 2004.

- Wahyudi. 2005. *Formasi dan Struktur Gerakan petani: Studi Kasus Reklamasi/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan*. Malang: UMM Press.
- Watala, Tim PSDHBM. 2004. *Kepastian Pengelolaan di Kawasan Hutan Negara: Pengalaman Belajar Bersama di Sumber Jaya*. Bandar Lampung: Watala.
- Webster, Neil. 2004. *Understanding the Evolving Diversity and Originalities in Rural Social Movements in the Age of Globalization: Civil Society and Social Movements*. Paper No. 7, United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD).
- Weick, Karl E. 1976. "Educational Organizations as Loosely Coupled Systems." *Administrative Science Quarterly*.
- White, Benjamin. 1996. *Optimisme Makro, Pesimisme Mikro ? Penaksiran Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia, 1967-1987*. Tulisan dimuat satu bab dalam buku Prof Sajogyo 70 Tahun. 1996. *Memahami dan menanggulangi Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo
- Widgren, Örjan. 1997. *Social Solidarity and Social Exchange*. *Sociology*. Vol. 31. No.4: 755-771. SAGE Social Science Collections. All Rights Reserved).
- Widjajanto, Andi, dkk. 2007. *Transnasionalisasi Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara.
- Wijardjo, Boedhi dan Herlambang Perdana. 2001. *Reklamasi dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: YLBHI dan Raca.
- Wiradi, Gunawan. 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Wiradi, Gunawan. 2000. *Reforma Agraria: Perjalanan yang belum berakhir*. Yogyakarta: Insist.
- Wolf, Eric J. 1969. *Peasant Wars of the Twentieth Century*. New York: Harper and Row.
- Wolf, Eric. 1983. *Petani: Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yin, Robert K. 1996. *Studi Kasus : Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zakaria, Yando, dkk. 2001. *Mensiasati Otonomi Daerah demi Pembaruan Agraria*, Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
- Zald, Mayer N. and John D. McCarthy. 2003. *Social Movements in an Organizational Society*. New Jersey: New Brunswick, Transaction Publishers.